BUKU REFRENSI

DEMOKRASI DIGITAL

POLITIK, ALGORITMA, DAN PARTISIPASI WARGA DI ERA KECERDASAN BUATAN

Dr. Hidayati, S.T., S.H., M.T., M.H.
Dr. Anugerah Tatema Harefa, S.H., M.A.
Dr. Ansar, S.P., M.Si.
Sugiyanto, S.T., M.P.A.







DEMOKRASI DIGITAL POLITIK, ALGORITMA, DAN PARTISIPASI WARGA DI ERA
©Dr. Hidayati, S.T., S.H., M.T., M.H.

DEMOKRASI DIGITAL

Politik, Algoritma, dan Partisipasi Warga di Era Kecerdasan Buatan

Ditulis oleh:

Dr. Hidayati, S.T., S.H., M.T., M.H.
Dr. Anugerah Tatema Harefa, S.H., M.A.
Dr. Ansar, S.P., M.Si.
Sugiyanto, S.T., M.P.A.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978 – 634 – 316 – 088 – 5
V + 237 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Agustus 2026

Desain Cover dan Tata Letak:
Muhammad Rasya Aiman Hafizh

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: https://mediapenerbitindonesia.com
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi berjudul "Demokrasi Digital: Politik, Algoritma, dan Partisipasi Warga di Era Kecerdasan Buatan" ini dapat diselesaikan. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman mengenai perubahan kehidupan demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi, menyampaikan aspirasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang bagi partisipasi warga yang lebih luas. Di sisi lain, muncul berbagai tantangan seperti disinformasi, polarisasi, bias algoritma, manipulasi informasi, serta persoalan etika dan perlindungan data.

Buku ini membahas keterkaitan antara politik, algoritma, dan partisipasi warga dalam membentuk demokrasi digital. Pembahasan diharapkan dapat membantu pembaca memahami peluang dan tantangan teknologi dalam kehidupan demokratis serta mendorong penggunaan teknologi secara kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi, dan masyarakat umum dalam memahami perkembangan demokrasi di era digital dan kecerdasan buatan. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Salam Hangat

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I DEMOKRASI DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL **1**
A. Konsep Dasar Demokrasi dan Evolusinya 1
B. Revolusi Digital dalam Kehidupan Politik 4
C. Karakteristik Demokrasi Digital 9
D. Peluang dan Tantangan Demokrasi Berbasis Teknologi 13

BAB II EKOSISTEM POLITIK DIGITAL DAN PERUBAHAN KOMUNIKASI POLITIK **19**
A. Transformasi Komunikasi Politik 19
B. Media Sosial sebagai Arena Politik Baru 22
C. Politik Berbasis Data (*Data-Driven Politics*) 26
D. Peran Platform Digital dalam Kampanye Politik 31
E. Perubahan Relasi antara Negara, Partai Politik, dan Warga 35

BAB III ALGORITMA DAN KEKUASAAN DALAM DEMOKRASI DIGITAL **39**
A. Memahami Algoritma dan *Artificial Intelligence* 39
B. Algoritma sebagai Penentu Informasi Politik 44
C. *Filter Bubble* dan *Echo Chamber* 47
D. Bias Algoritma dalam Ruang Publik Digital 52
E. Transparansi dan Akuntabilitas Algoritma 55

BAB IV KECERDASAN BUATAN DALAM POLITIK MODERN **59**
A. AI sebagai Instrumen Politik 59
B. AI dalam Analisis Perilaku Pemilih 63
C. *Generative* AI dalam Produksi Konten Politik 68
D. Otomatisasi Komunikasi Politik melalui AI 72
E. Risiko dan Etika Penggunaan AI dalam Politik 74

BAB V PARTISIPASI WARGA DI ERA DIGITAL 79
A. Konsep Partisipasi Politik Digital 79
B. Aktivisme Digital dan Gerakan Sosial 84
C. Petisi Online dan Demokrasi Partisipatif 87
D. Literasi Digital sebagai Prasyarat Partisipasi 89
E. Tantangan Inklusivitas dalam Demokrasi Digital 92

BAB VI DISINFORMASI, HOAKS, DAN MANIPULASI INFORMASI POLITIK 95
A. Ekosistem Penyebaran Disinformasi 95
B. Hoaks Politik dan Polarisasi Publik 100
C. *Deepfake* dan Ancaman terhadap Demokrasi 103
D. Peran AI dalam Penyebaran maupun Deteksi Hoaks 105
E. Strategi Penanggulangan Disinformasi 109

BAB VII TATA KELOLA PLATFORM DIGITAL DAN REGULASI DEMOKRASI 114
A. Platform Digital sebagai Aktor Politik Baru 114
B. Moderasi Konten dan Kebebasan Berekspresi 117
C. Regulasi Platform Digital di Berbagai Negara 121
D. Perlindungan Data Pribadi dalam Demokrasi Digital 124
E. Model Tata Kelola Platform yang Demokratis 126

BAB VIII ETIKA KECERDASAN BUATAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK 132
A. Prinsip Etika *Artificial Intelligence* 132
B. Hak Asasi Manusia dalam Era AI 135
C. Transparansi, *Fairness*, dan *Explainability* 138
D. Akuntabilitas Pengembang AI 140
E. Membangun AI yang Berorientasi pada Demokrasi 143

BAB IX PEMILU DIGITAL DAN MASA DEPAN DEMOKRASI ELEKTORAL 147
A. Digitalisasi Penyelenggaraan Pemilu 147
B. Kampanye Politik Berbasis AI 149
C. *Microtargeting* dan Personalisasi Politik 153
D. Keamanan Siber dalam Pemilu 156

E. Inovasi *Electoral Technology* di Masa Depan 159
BAB X DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA 161
A. Perkembangan Demokrasi Digital Nasional 161
B. Media Sosial dalam Dinamika Politik Indonesia 164
C. Regulasi AI dan Teknologi Digital di Indonesia 166
D. Tantangan Demokrasi Digital di Indonesia 169
E. Peluang Transformasi Demokrasi Berbasis AI 174

BAB XI STUDI KASUS DEMOKRASI DIGITAL GLOBAL ... 179
A. Amerika Serikat dan Politik Algoritma 179
B. Uni Eropa dan Regulasi *Artificial Intelligence* 180
C. Estonia sebagai Model *Digital Democracy* 182
D. Taiwan dalam Penguatan Partisipasi Digital 184
E. Pembelajaran bagi Indonesia 186

BAB XII MASA DEPAN DEMOKRASI DI ERA *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* 188
A. Evolusi Demokrasi Menuju *Society* 5.0 188
B. AI sebagai Mitra Pengambilan Kebijakan Publik 192
C. Model Demokrasi Digital yang Inklusif 194
D. Tata Kelola Ruang Digital dalam Demokrasi 198
E. Visi Demokrasi Berkelanjutan di Era Kecerdasan Buatan . 202

DAFTAR PUSTAKA 205
GLOSARIUM 211
INDEKS 214
BIOGRAFI PENULIS 217
SINOPSIS 218

BAB I
DEMOKRASI DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL

Demokrasi, sebagai sebuah gagasan sekaligus praktik penyelenggaraan kekuasaan, senantiasa bertransformasi mengikuti perubahan struktur sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakatnya. Pada abad ke-21, transformasi paling signifikan datang dari revolusi digital yang mengubah cara warga negara memperoleh informasi, berkomunikasi dengan sesama, dan berinteraksi dengan institusi politik. Bab pembuka ini meletakkan fondasi konseptual bagi seluruh pembahasan buku dengan menelusuri evolusi demokrasi, memetakan revolusi digital dalam kehidupan politik, merumuskan karakteristik demokrasi digital, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang menyertainya.

A. Konsep Dasar Demokrasi dan Evolusinya

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), yang secara harfiah berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Sejak masa Athena klasik, gagasan ini telah mengalami reinterpretasi yang berlapis-lapis, dari demokrasi langsung yang melibatkan warga negara laki-laki dewasa secara langsung dalam majelis rakyat, hingga demokrasi perwakilan yang menjadi model dominan negara-bangsa modern. Robert Dahl (1998) merumuskan demokrasi ideal atau *polyarchy* sebagai sistem yang mensyaratkan partisipasi efektif, kesetaraan suara, pemahaman yang tercerahkan, kendali agenda oleh warga, dan inklusivitas keanggotaan politik. Kerangka ini tetap menjadi rujukan utama dalam menilai kualitas demokrasi kontemporer, termasuk demokrasi yang telah bertransformasi ke ranah digital. Sementara itu, Joseph Schumpeter memandang demokrasi secara lebih prosedural sebagai mekanisme kompetisi elektoral untuk memperebutkan mandat rakyat, sebuah pandangan yang terus

diperdebatkan karena dianggap mereduksi partisipasi warga menjadi sekadar tindakan memilih.

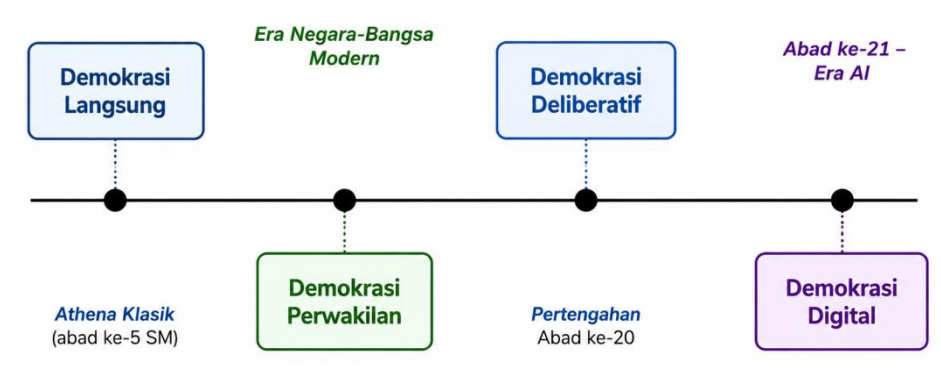
Perkembangan teori demokrasi kontemporer semakin menekankan dimensi deliberatif dan partisipatif. Model demokrasi deliberatif, sebagaimana dikembangkan Jürgen Habermas melalui konsep ruang publik (*Öffentlichkeit*), menempatkan diskursus rasional antarwarga sebagai inti legitimasi keputusan politik. Perkembangan lebih lanjut memperlihatkan bahwa arena deliberasi tersebut kini semakin berpindah ke ruang digital. Hasil kajian literatur sistematis atas ratusan artikel terindeks Scopus menegaskan bahwa demokrasi digital telah berkembang menjadi bidang kajian tersendiri yang meluas pesat sejak pertengahan dekade 2010-an, dengan fokus riset yang bergeser dari sekadar partisipasi daring menuju tata kelola algoritmik dan kecerdasan buatan (Congge et al., 2023). Evolusi ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah konsep statis, melainkan konstruksi yang terus dinegosiasikan seiring perubahan teknologi komunikasi, mulai dari surat kabar cetak, radio, televisi, hingga internet dan platform digital yang saling terhubung secara global.

Dalam diskursus teori demokrasi terbaru, Landemore memperkenalkan gagasan *open democracy* yang menekankan pembukaan lembaga-lembaga representatif kepada partisipasi warga biasa melalui mekanisme acak dan digital, sebagai alternatif atas model perwakilan elektoral konvensional yang dinilai semakin kehilangan legitimasi di banyak negara. Sejalan dengan itu, Gastil merumuskan ide *Democracy Machine* sebagai kerangka institusional yang memanfaatkan teknologi untuk memperluas keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik. Kedua gagasan ini memperlihatkan kecenderungan teori demokrasi kontemporer untuk mengintegrasikan teknologi digital bukan sekadar sebagai alat bantu administratif, melainkan sebagai elemen struktural yang membentuk ulang relasi kekuasaan antara negara dan warganya (Gerbaudo, 2022).

Evolusi konsep demokrasi tersebut dapat dipetakan ke dalam empat fase besar sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.1, yakni demokrasi langsung pada era Athena klasik, demokrasi perwakilan yang lahir bersamaan dengan konsolidasi negara-bangsa modern, demokrasi deliberatif yang menekankan kualitas diskursus publik, dan demokrasi digital yang kini tengah berkembang pada abad ke-21. Setiap fase tidak sepenuhnya menggantikan fase sebelumnya, melainkan berakumulasi dan

saling berinteraksi, sehingga demokrasi digital pada praktiknya tetap mewarisi prinsip-prinsip partisipasi, kesetaraan, dan deliberasi dari fase-fase sebelumnya, sembari menambahkan dimensi baru berupa konektivitas, kecepatan, dan personalisasi informasi politik.

Gambar 1.1 Evolusi Konsep Demokrasi dari Era Klasik Hingga Era Digital



Sumber: Dahl (1998), Habermas, Landemore (2020), dan Congge et al. (2023)

Penting dicatat bahwa perdebatan mengenai definisi demokrasi bukan sekadar perdebatan akademik yang steril, melainkan memiliki konsekuensi praktis yang signifikan bagi cara masyarakat menilai legitimasi rezim politiknya. Ketika demokrasi didefinisikan secara minimalis sebagai sekadar penyelenggaraan pemilihan umum yang kompetitif, maka rezim yang menyelenggarakan pemilu namun membatasi kebebasan pers atau mengendalikan arus informasi digital tetap dapat mengklaim diri sebagai demokratis. Sebaliknya, definisi yang lebih substantif sebagaimana dirumuskan Dahl (1998) menuntut terpenuhinya syarat-syarat partisipasi efektif dan pemahaman yang tercerahkan, yang pada era digital berarti turut mensyaratkan ekosistem informasi yang bebas dari manipulasi algoritmik dan disinformasi sistematis.

Schaffer dan Gagnon (2023) mengingatkan bahwa demokrasi tidak dapat dipahami sebagai konsep tunggal yang berlaku universal tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah masing-masing masyarakat. Argumen ini relevan bagi kajian demokrasi digital, karena penerimaan, adopsi, dan dampak teknologi digital terhadap praktik demokratis sangat bervariasi antarnegara, dipengaruhi oleh faktor-faktor

seperti tingkat literasi digital, struktur kepartaian, kebebasan pers, dan tradisi partisipasi politik yang telah mengakar sebelumnya. Oleh karena itu, buku ini secara konsisten berupaya menghadirkan perspektif komparatif, termasuk konteks Indonesia, alih-alih memperlakukan demokrasi digital sebagai fenomena yang seragam di seluruh dunia.

Perbandingan lintas budaya ini juga relevan untuk memahami mengapa istilah dan konsep yang berkembang dalam literatur Barat mengenai demokrasi digital tidak selalu dapat diterapkan secara langsung pada konteks Indonesia tanpa penyesuaian. Sebagai contoh, konsep *open democracy* yang dikembangkan Landemore (2020) berangkat dari asumsi kelembagaan negara maju dengan tingkat literasi digital dan infrastruktur birokrasi elektronik yang relatif matang, sementara penerapan gagasan serupa di Indonesia perlu mempertimbangkan realitas kesenjangan digital antarwilayah, keragaman bahasa daerah, dan struktur birokrasi yang masih dalam proses transformasi digital. Kesadaran akan keterbatasan transferabilitas konsep semacam ini penting agar kajian demokrasi digital tidak terjebak dalam bias etnosentrisme akademik yang mengabaikan kekhasan konteks lokal.

Evolusi demokrasi menuju bentuk digitalnya tidak boleh dipahami sebagai proses yang deterministik atau tak terelakkan menuju perbaikan kualitas demokrasi. Špecián (2022) memperingatkan bahwa tanpa penguatan kelembagaan yang memadai, teknologi digital berpotensi memperkuat bias kognitif dan perilaku pemilih yang sudah lama menjadi perhatian ekonomi politik perilaku, alih-alih memperbaikinya. Pandangan ini menjadi pengingat penting bahwa transformasi digital demokrasi merupakan medan pertarungan normatif yang hasilnya sangat bergantung pada pilihan kebijakan, desain institusi, dan tata kelola algoritma yang akan dibahas secara mendalam pada bab-bab selanjutnya.

B. Revolusi Digital dalam Kehidupan Politik

Revolusi digital telah mengubah cara politik berlangsung, baik dalam proses komunikasi, pembentukan opini publik, partisipasi masyarakat, maupun pengambilan keputusan politik. Kehadiran internet, media sosial, platform digital, kecerdasan buatan, dan teknologi analitik data membuat hubungan antara negara, politisi, media, dan warga menjadi semakin cepat dan interaktif. Politik tidak lagi hanya berlangsung melalui ruang-ruang formal seperti parlemen, partai politik, kampanye tatap muka,

atau media massa konvensional, tetapi juga berkembang secara intensif di ruang digital.

1. Transformasi Komunikasi Politik

Revolusi digital telah mengubah pola komunikasi antara politisi dan masyarakat. Pada masa sebelumnya, komunikasi politik lebih banyak berlangsung melalui media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi. Informasi politik umumnya disampaikan secara satu arah, dari politisi atau lembaga politik kepada masyarakat. Masyarakat berperan terutama sebagai penerima informasi. Kehadiran internet dan media sosial kemudian mengubah pola tersebut menjadi komunikasi yang lebih cepat, terbuka, interaktif, dan berlangsung hampir tanpa batas waktu maupun ruang.

Platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan X memungkinkan politisi berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada media konvensional. Politisi dapat menyampaikan gagasan, kebijakan, aktivitas, maupun respons terhadap suatu peristiwa hanya dalam hitungan detik. Sebaliknya, masyarakat dapat memberikan komentar, kritik, pertanyaan, dukungan, atau penolakan secara langsung. Kondisi ini menciptakan hubungan komunikasi politik yang lebih dinamis karena masyarakat tidak lagi hanya menjadi audiens, tetapi juga dapat menjadi produsen dan penyebar informasi politik.

Namun, transformasi komunikasi politik juga menghadirkan tantangan. Kecepatan penyebaran informasi dapat menyebabkan informasi yang belum diverifikasi menyebar lebih cepat daripada proses pemeriksaannya. Pernyataan politik yang bersifat provokatif, kontroversial, atau emosional juga dapat memperoleh perhatian lebih besar karena karakteristik algoritma platform digital yang cenderung mengutamakan konten yang menghasilkan interaksi tinggi. Oleh karena itu, komunikasi politik di era digital membutuhkan kemampuan literasi digital, etika komunikasi, serta tanggung jawab dari politisi dan masyarakat agar ruang digital tidak berubah menjadi ruang penyebaran informasi yang menyesatkan.

2. Perubahan Pola Partisipasi Politik Masyarakat

Teknologi digital memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Partisipasi politik sebelumnya

sering dikaitkan dengan aktivitas seperti mengikuti pemilu, menjadi anggota partai politik, menghadiri rapat politik, melakukan demonstrasi, atau menyampaikan aspirasi melalui lembaga perwakilan. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi melalui berbagai aktivitas digital, seperti memberikan komentar terhadap isu politik, membuat konten politik, mengikuti diskusi daring, menandatangani petisi digital, menggalang dukungan, hingga mengorganisasi gerakan sosial melalui media sosial.

Ruang digital juga memungkinkan munculnya bentuk partisipasi politik yang lebih spontan dan tidak selalu bergantung pada organisasi politik formal. Masyarakat dapat membangun gerakan berdasarkan isu tertentu dengan memanfaatkan tagar, video pendek, forum daring, atau berbagai platform komunikasi. Sebuah isu lokal bahkan dapat berkembang menjadi perhatian nasional ketika memperoleh perhatian luas di media sosial. Dalam konteks ini, teknologi digital dapat memperkuat kemampuan masyarakat untuk menyuarakan kepentingan, mengawasi pemerintah, dan membangun solidaritas sosial.

Meskipun demikian, partisipasi digital tidak selalu identik dengan partisipasi politik yang berkualitas. Aktivitas seperti memberikan tanda suka, membagikan konten, atau menggunakan tagar memang menunjukkan keterlibatan, tetapi belum tentu menghasilkan perubahan politik yang nyata. Selain itu, terdapat kesenjangan akses digital yang menyebabkan sebagian kelompok masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dibandingkan kelompok lainnya. Karena itu, revolusi digital perlu dipahami bukan hanya sebagai peningkatan jumlah partisipasi, tetapi juga sebagai perubahan kualitas, inklusivitas, dan efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses politik.

3. Perubahan Strategi Kampanye dan Persaingan Politik

Digitalisasi telah mengubah strategi kampanye politik secara signifikan. Kampanye politik tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pertemuan langsung, baliho, iklan televisi, atau distribusi bahan kampanye secara konvensional. Kandidat dan partai politik kini dapat menggunakan platform digital untuk menyampaikan pesan kepada kelompok masyarakat tertentu secara lebih terarah. Konten kampanye dapat disesuaikan dengan karakteristik audiens berdasarkan usia, lokasi, minat, perilaku digital, dan pola interaksi mereka.

Penggunaan data juga menjadi bagian penting dalam strategi politik modern. Data dari berbagai aktivitas digital dapat membantu

organisasi politik memahami isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat, mengidentifikasi kelompok pemilih, serta mengevaluasi respons terhadap pesan politik tertentu. Kecerdasan buatan semakin memperluas kemampuan tersebut melalui analisis data dalam jumlah besar, pemetaan sentimen publik, otomatisasi konten, dan prediksi terhadap pola perilaku politik. Dengan demikian, kampanye politik menjadi semakin berbasis data dan semakin terukur.

Di sisi lain, penggunaan teknologi dalam kampanye menimbulkan persoalan etika dan demokrasi. Strategi komunikasi yang sangat terpersonalisasi dapat menyebabkan kelompok masyarakat menerima informasi politik yang berbeda-beda tanpa mengetahui bagaimana pesan tersebut dirancang untuk memengaruhi mereka. Teknologi juga dapat digunakan untuk membuat konten manipulatif, termasuk gambar, suara, atau video yang menyerupai tokoh tertentu. Kondisi ini membuat transparansi penggunaan data, perlindungan privasi, keterbukaan sumber informasi, dan kemampuan masyarakat membedakan informasi autentik dengan manipulasi menjadi semakin penting.

4. Algoritma, Opini Publik, dan Polarisasi Politik

Algoritma menjadi salah satu kekuatan penting dalam kehidupan politik digital karena menentukan sebagian informasi yang muncul di hadapan pengguna. Platform digital menggunakan algoritma untuk memilih dan mengurutkan konten berdasarkan berbagai faktor, seperti minat pengguna, riwayat interaksi, popularitas konten, serta kemungkinan pengguna berinteraksi dengan suatu informasi. Akibatnya, pengalaman politik setiap pengguna dapat berbeda karena mereka tidak selalu melihat informasi yang sama.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi pembentukan opini publik. Ketika seseorang terus-menerus memperoleh informasi yang sesuai dengan pandangan politiknya, ia dapat semakin yakin terhadap pendapat yang dimiliki dan semakin jarang berinteraksi dengan perspektif yang berbeda. Situasi ini sering dikaitkan dengan munculnya *filter bubble* dan *echo chamber*. Dalam kondisi tertentu, mekanisme tersebut dapat memperkuat polarisasi karena kelompok masyarakat semakin terpisah berdasarkan preferensi politik dan sumber informasi yang mereka konsumsi.

Namun, algoritma tidak selalu menghasilkan dampak negatif. Teknologi algoritmik juga dapat membantu masyarakat menemukan

informasi yang relevan, mengikuti perkembangan isu politik, dan terhubung dengan komunitas yang memiliki kepentingan serupa. Persoalannya terletak pada bagaimana algoritma dirancang, digunakan, dan diawasi. Karena algoritma semakin berperan dalam menentukan informasi yang dikonsumsi masyarakat, transparansi platform, akuntabilitas teknologi, serta literasi algoritmik menjadi bagian penting dari upaya menjaga kualitas ruang publik digital dan demokrasi.

5. Digitalisasi Pemerintahan dan Masa Depan Demokrasi

Revolusi digital tidak hanya mengubah aktivitas masyarakat dan politisi, tetapi juga mengubah cara pemerintah menjalankan fungsi politik dan administratifnya. Pemerintah semakin banyak menggunakan teknologi digital untuk menyediakan layanan publik, menyampaikan informasi, menerima aspirasi masyarakat, serta melakukan konsultasi publik. Pemerintahan digital memungkinkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berlangsung lebih cepat dan dapat dilakukan tanpa harus selalu melalui pertemuan fisik.

Dalam perkembangan yang lebih jauh, teknologi seperti kecerdasan buatan, analitik data, *big data*, dan sistem digital terintegrasi dapat digunakan untuk membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Data dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah sosial, memantau pelayanan publik, serta mengevaluasi program pemerintah. Jika digunakan secara tepat, digitalisasi dapat memperkuat transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas pemerintahan karena masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi.

Akan tetapi, demokrasi digital juga menghadapi tantangan besar. Penggunaan teknologi oleh pemerintah harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, keamanan informasi, transparansi algoritma, kesetaraan akses, dan hak-hak warga negara. Teknologi seharusnya tidak digunakan untuk memperluas pengawasan secara berlebihan atau membatasi kebebasan berekspresi. Masa depan demokrasi digital karena itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas institusi, regulasi, etika, literasi digital, dan kemampuan masyarakat mengawasi penggunaan teknologi dalam kehidupan politik.

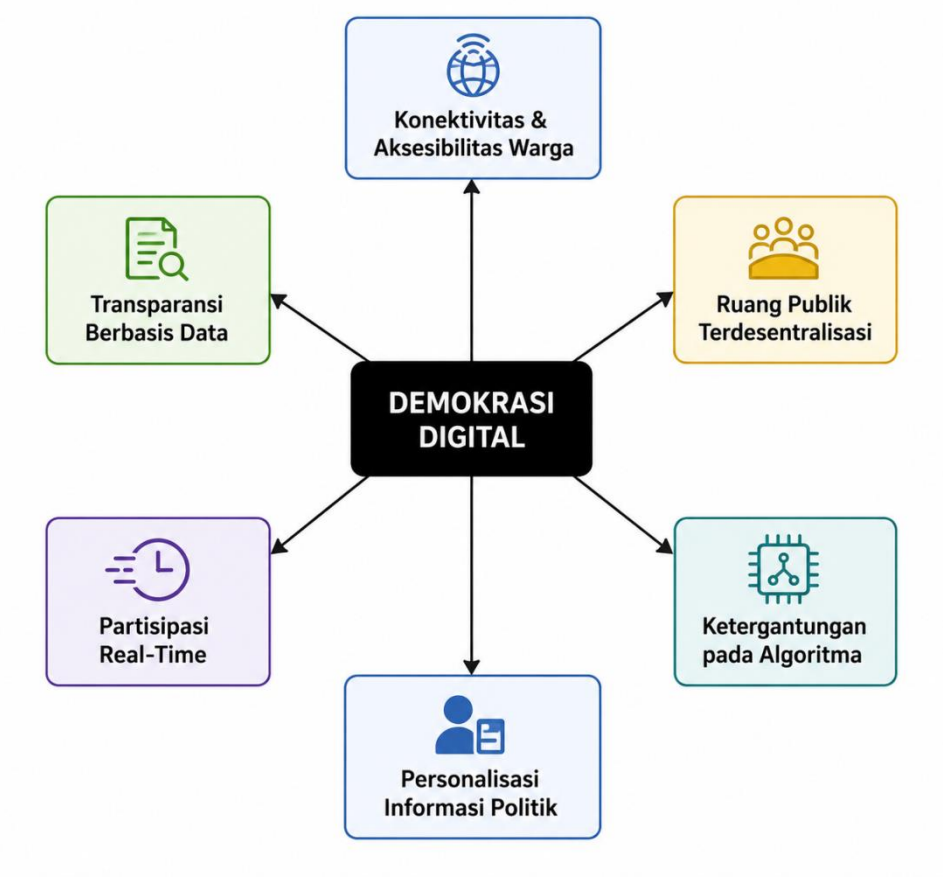
Revolusi digital telah mengubah kehidupan politik secara menyeluruh, mulai dari komunikasi politik, partisipasi masyarakat,

strategi kampanye, pembentukan opini publik, hingga penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi memberikan peluang besar untuk menciptakan politik yang lebih terbuka, cepat, partisipatif, dan responsif. Namun, peluang tersebut berjalan berdampingan dengan risiko berupa disinformasi, manipulasi digital, polarisasi, kesenjangan akses, penyalahgunaan data, dan persoalan etika algoritmik. Dengan demikian, revolusi digital tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan teknologi dalam aktivitas politik. Lebih jauh, revolusi tersebut merupakan perubahan dalam relasi kekuasaan, cara warga berpartisipasi, cara informasi politik diproduksi dan didistribusikan, serta cara keputusan publik dibentuk. Tantangan utama demokrasi di era digital adalah memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berada dalam kerangka kepentingan publik, kebebasan warga negara, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip demokrasi.

C. Karakteristik Demokrasi Digital

Demokrasi digital dapat dipahami sebagai konfigurasi baru praktik demokratis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas partisipasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat sirkulasi informasi politik antara negara dan warganya. Congge et al. (2023) mengidentifikasi bahwa literatur demokrasi digital berkembang di sekitar beberapa klaster tematik utama, yaitu partisipasi elektronik, transparansi pemerintahan, keterlibatan media sosial, dan tata kelola algoritmik. Berdasarkan sintesis literatur tersebut, demokrasi digital memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari model demokrasi konvensional, sebagaimana dirangkum pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Karakteristik Utama Demokrasi Digital



Sumber: Congge et al. (2023) dan Postill (2020)

Karakteristik pertama adalah konektivitas dan aksesibilitas warga yang memungkinkan interaksi politik lintas ruang dan waktu tanpa bergantung pada kehadiran fisik. Karakteristik kedua adalah transparansi berbasis data, di mana informasi kebijakan, anggaran, dan kinerja pemerintah semakin banyak dipublikasikan dalam format digital yang dapat diakses dan diaudit publik. Karakteristik ketiga adalah partisipasi yang berlangsung secara *real-time*, memungkinkan warga memberikan tanggapan, kritik, maupun dukungan terhadap kebijakan publik hampir seketika setelah kebijakan tersebut diumumkan.

Karakteristik keempat adalah personalisasi informasi politik, yang dihasilkan oleh sistem algoritmik yang menyesuaikan konten yang diterima setiap pengguna berdasarkan riwayat interaksi digitalnya. Karakteristik kelima adalah ketergantungan struktural pada algoritma dan infrastruktur platform swasta, yang menempatkan perusahaan teknologi

sebagai aktor kuasi-politik dengan pengaruh signifikan terhadap arus informasi publik (Gray, 2023). Karakteristik keenam adalah desentralisasi ruang publik, di mana wacana politik tidak lagi terpusat pada beberapa institusi media besar, melainkan tersebar pada jutaan simpul produksi konten individu dan komunitas daring.

Untuk memperjelas perbedaan mendasar antara demokrasi konvensional dan demokrasi digital, Tabel 1.1 menyajikan perbandingan pada beberapa dimensi kunci. Perbandingan ini penting sebagai kerangka analitis yang akan digunakan secara konsisten pada bab-bab selanjutnya, khususnya dalam menilai bagaimana setiap dimensi demokrasi konvensional mengalami transformasi, baik dalam bentuk penguatan maupun distorsi, akibat mediasi teknologi digital dan kecerdasan buatan.

Tabel 1.1 Perbandingan Demokrasi Konvensional dan Demokrasi Digital

Dimensi	Demokrasi Konvensional	Demokrasi Digital
Saluran partisipasi	Pemilu berkala, forum tatap muka, surat pembaca	Petisi daring, media sosial, aplikasi partisipasi warga
Arus informasi	Terpusat melalui media massa dan institusi resmi	Terdesentralisasi, dimediasi algoritma platform
Kecepatan respons	Lambat, terikat siklus pemberitaan dan birokrasi	Seketika (*real-time*), tanpa jeda administratif
Sifat pesan politik	Umum, ditujukan pada khalayak luas yang homogen	Personal dan tersegmentasi (*microtargeting*)
Aktor penjaga gerbang	Redaksi media, partai politik, birokrasi negara	Perusahaan platform teknologi dan sistem algoritma
Risiko utama	Sensor negara, monopoli media, apatisme politik	Disinformasi, polarisasi algoritmik, surveilans data

Sumber: Dahl (1998), Gray (2023), dan Postill (2020)

Selain enam karakteristik utama yang telah diuraikan, demokrasi digital juga memperlihatkan karakteristik tambahan yang tidak kalah penting, yaitu hiperkonektivitas afektif, di mana emosi dan sentimen publik dapat menyebar dan terakumulasi secara masif dalam waktu singkat melalui interaksi digital. Karakteristik ini berbeda secara kualitatif dari demokrasi era media massa, di mana sentimen publik memerlukan waktu lebih lama untuk terbentuk dan terkonsolidasi melalui saluran komunikasi yang lebih lambat. Percepatan sirkulasi afek politik ini memiliki implikasi ganda: di satu sisi memungkinkan mobilisasi solidaritas publik yang cepat terhadap isu-isu keadilan, namun di sisi lain juga mempercepat penyebaran kepanikan moral dan reaksi publik yang tidak selalu didasarkan pada informasi yang akurat.

Karakteristik lain yang layak dicermati adalah sifat performatif dari partisipasi politik digital. Gerbaudo (2022) menunjukkan bahwa identitas politik pada era digital semakin dibentuk melalui tindakan performatif di ruang daring seperti mengganti foto profil, menggunakan tagar tertentu, atau membagikan ulang konten politik yang berfungsi sekaligus sebagai ekspresi keyakinan pribadi dan sinyal identitas sosial kepada jaringan pertemanan digital seseorang. Bentuk partisipasi performatif ini memunculkan perdebatan mengenai kedalaman dan keberlanjutan komitmen politik yang dihasilkannya, apakah setara dengan partisipasi konvensional seperti keanggotaan partai atau kehadiran dalam forum warga, ataukah sekadar ekspresi simbolik yang dangkal dan berumur pendek.

Karakteristik demokrasi digital sebagaimana diuraikan di atas juga perlu dipahami sebagai sesuatu yang bersifat dinamis dan terus berevolusi seiring perkembangan teknologi. Kemunculan kecerdasan buatan generatif sejak awal dekade 2020-an, misalnya, menambahkan lapisan karakteristik baru berupa kemampuan produksi konten politik secara otomatis dalam skala dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, kerangka karakteristik yang disajikan dalam subbab ini sebaiknya dipahami sebagai peta konseptual yang terus memerlukan pembaruan, bukan sebagai daftar yang final dan tertutup.

Penting pula dicatat bahwa keenam karakteristik utama yang diuraikan dalam subbab ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling memengaruhi secara sistemik. Konektivitas dan aksesibilitas warga, misalnya, menjadi prasyarat teknis bagi terselenggaranya partisipasi real-time, sementara personalisasi informasi politik yang dihasilkan sistem

algoritmik pada gilirannya memengaruhi bentuk dan intensitas ketergantungan struktural masyarakat terhadap infrastruktur platform swasta. Memahami keterkaitan sistemik antarkarakteristik ini penting agar intervensi kebijakan yang dirancang untuk menguatkan satu karakteristik tertentu misalnya transparansi berbasis data tidak secara tidak sengaja memperlemah karakteristik lain, seperti privasi warga, yang juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kualitas demokrasi digital secara keseluruhan.

D. Peluang dan Tantangan Demokrasi Berbasis Teknologi

1. Perluasan Akses Informasi dan Partisipasi Politik

Teknologi digital memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik dan informasi publik. Internet, media sosial, portal pemerintah, serta platform keterbukaan data memungkinkan warga memperoleh informasi mengenai kebijakan, program pemerintah, aktivitas lembaga negara, dan berbagai isu publik secara lebih cepat. Kondisi ini dapat mendukung terbentuknya warga negara yang lebih terinformasi dan mampu berpartisipasi dalam proses politik. Dalam kerangka *polyarchy*, Dahl (1998) menempatkan akses terhadap informasi yang memadai sebagai salah satu kondisi penting bagi berlangsungnya proses demokrasi yang efektif.

Digitalisasi juga menciptakan saluran partisipasi baru melalui e-petisi, konsultasi publik daring, forum digital, dan berbagai bentuk e-partisipasi. Warga dapat menyampaikan aspirasi tanpa harus hadir secara langsung dalam forum politik konvensional. Teknologi dengan demikian dapat mengurangi hambatan geografis, waktu, dan biaya yang sebelumnya membatasi keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Selain menyampaikan aspirasi, masyarakat juga dapat memanfaatkan data publik untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Namun, perluasan akses informasi tidak secara otomatis menghasilkan partisipasi politik yang berkualitas. Informasi yang tersedia di ruang digital sangat banyak dan memiliki tingkat kredibilitas yang beragam. Masyarakat membutuhkan kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi, dan membandingkan informasi sebelum menggunakannya dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, perluasan akses teknologi harus berjalan bersama dengan penguatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis masyarakat.

2. Mobilisasi Sosial dan Bentuk Baru Partisipasi Politik

Teknologi digital memberikan peluang bagi masyarakat untuk membangun jaringan sosial dan politik secara lebih cepat. Media sosial memungkinkan individu dengan kepentingan yang sama untuk saling terhubung, bertukar informasi, menggalang dukungan, dan mengorganisasi kegiatan kolektif tanpa harus bergantung sepenuhnya pada organisasi politik formal. Kondisi tersebut memperluas bentuk partisipasi politik masyarakat di luar mekanisme elektoral seperti pemilu dan keanggotaan partai politik.

Gerakan sosial digital seperti *Black Lives Matter* dan kampanye *#GirlsLikeUs* memperlihatkan bagaimana ruang digital dapat menjadi arena pembentukan identitas, penyampaian tuntutan, dan mobilisasi kolektif. Gerbaudo (2022) menjelaskan bahwa media sosial memungkinkan terbentuknya bentuk-bentuk mobilisasi yang lebih cair dan jaringan politik yang dapat berkembang dengan cepat. Teknologi juga memberikan ruang bagi kelompok yang secara historis kurang terwakili dalam institusi politik konvensional untuk menyuarakan pengalaman dan kepentingannya kepada publik yang lebih luas.

Meskipun demikian, partisipasi digital juga memiliki keterbatasan. Aktivitas seperti menyukai, membagikan, atau mengomentari konten politik belum tentu menghasilkan perubahan kebijakan atau perubahan kelembagaan. Mobilisasi yang berlangsung cepat juga dapat bersifat sementara dan mudah mengalami perubahan ketika perhatian publik bergeser kepada isu lain. Oleh sebab itu, tantangan penting demokrasi digital adalah bagaimana menghubungkan mobilisasi di ruang digital dengan proses politik dan kelembagaan sehingga partisipasi masyarakat dapat menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

3. Disinformasi, Manipulasi Informasi, dan Polarisasi Politik

Salah satu tantangan paling serius dalam demokrasi digital adalah penyebaran misinformasi, disinformasi, dan teori konspirasi. Gray (2023) menunjukkan bahwa proses demokrasi dapat terancam ketika aktor politik maupun aktor eksternal memanfaatkan ruang digital untuk memanipulasi arus informasi dan memengaruhi opini publik. Dalam konteks pemilu, manipulasi informasi dapat digunakan untuk merusak reputasi kandidat, membentuk persepsi tertentu terhadap kelompok politik, atau memengaruhi pilihan pemilih.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena sistem algoritmik pada platform digital dapat memperkuat penyebaran konten yang menghasilkan interaksi tinggi. Informasi yang kontroversial, emosional, atau partisan sering kali memiliki potensi besar untuk mendapatkan perhatian pengguna. Ketika masyarakat terus menerima informasi yang sesuai dengan pandangan politiknya, terbentuk kondisi yang dikenal sebagai *filter bubble* dan *echo chamber*. Situasi ini dapat mengurangi interaksi dengan pandangan yang berbeda dan memperkuat polarisasi politik.

Karena itu, demokrasi digital membutuhkan kemampuan masyarakat untuk melakukan verifikasi informasi secara kritis. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami sumber informasi, memeriksa bukti, mengenali manipulasi, dan membedakan fakta dari opini atau propaganda. Pada saat yang sama, platform digital perlu meningkatkan transparansi mengenai mekanisme algoritmik dan memiliki sistem yang dapat membatasi penyebaran konten manipulatif tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.

4. Kesenjangan Digital dan Konsentrasi Kekuasaan Teknologi

Meskipun teknologi memperluas peluang partisipasi politik, manfaat tersebut belum tentu dapat dirasakan secara merata. Kesenjangan digital (*digital divide*) muncul akibat perbedaan akses terhadap internet, perangkat digital, kualitas infrastruktur, kemampuan ekonomi, dan tingkat literasi teknologi. Masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok dengan keterbatasan sumber daya berisiko semakin tertinggal apabila proses partisipasi politik dan pelayanan publik semakin bergantung pada teknologi digital.

Persoalan lainnya adalah meningkatnya konsentrasi kekuasaan pada sejumlah perusahaan teknologi besar. Platform digital memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana informasi diproduksi, disebarkan, direkomendasikan, dan ditemukan oleh pengguna. Posisi tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan ruang publik digital. Dalam konteks demokrasi, dominasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan informasi apa yang memperoleh visibilitas dan bagaimana kepentingan komersial platform berhubungan dengan kepentingan publik.

Tantangan tersebut menunjukkan pentingnya tata kelola digital yang mampu menjamin akses teknologi secara lebih inklusif sekaligus membatasi konsentrasi kekuasaan informasi. Pemerintah perlu memperluas infrastruktur digital, meningkatkan literasi masyarakat, dan memastikan bahwa kebijakan digital tidak menciptakan kelompok masyarakat yang semakin terpinggirkan. Di sisi lain, perusahaan teknologi perlu memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap dampak sosial dan politik dari desain serta pengelolaan platform mereka.

5. Tata Kelola Digital, Keamanan Siber, dan Masa Depan Demokrasi

Perkembangan demokrasi digital membutuhkan tata kelola yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Regulasi diperlukan untuk menangani berbagai persoalan seperti perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, keamanan informasi, kampanye digital, penyebaran disinformasi, serta tanggung jawab perusahaan platform. Regulasi tersebut harus dirancang secara hati-hati agar upaya menjaga ruang digital tidak berubah menjadi pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi dan hak masyarakat memperoleh informasi.

Keamanan siber juga menjadi dimensi penting dalam demokrasi berbasis teknologi. Deibert (2022) menjelaskan bahwa kemampuan melakukan pengawasan dan operasi digital yang sebelumnya banyak berada dalam kapasitas negara kini juga dapat dimanfaatkan oleh aktor non-negara yang memiliki sumber daya memadai. Ancaman tersebut dapat berupa pengawasan terhadap aktivis dan jurnalis, pencurian data, serangan terhadap infrastruktur digital, maupun berbagai bentuk manipulasi informasi. Pengawasan digital yang tidak terkendali juga dapat menciptakan *chilling effect*, yaitu kondisi ketika warga enggan menyampaikan pendapat atau berpartisipasi dalam diskusi politik karena khawatir aktivitas digitalnya diawasi.

Pada akhirnya, teknologi digital tidak dapat dipandang sebagai kekuatan yang secara otomatis memperkuat ataupun melemahkan demokrasi. Dampaknya sangat bergantung pada desain teknologi, perilaku pengguna, kebijakan pemerintah, praktik perusahaan platform, dan kualitas institusi demokrasi. Karena itu, keberlanjutan demokrasi digital membutuhkan kombinasi antara akses teknologi yang inklusif, literasi digital masyarakat, transparansi algoritma, regulasi yang adaptif,

keamanan siber, perlindungan data, dan akuntabilitas platform. Dengan pendekatan tersebut, teknologi dapat diarahkan untuk memperkuat partisipasi, transparansi, dan kualitas kehidupan demokratis.

Peluang dan tantangan yang telah diuraikan sesungguhnya bukanlah dua kategori yang berdiri terpisah, melainkan saling terkait secara dialektis. Kemampuan yang sama yang memungkinkan warga mengorganisasi gerakan sosial secara cepat dan berbiaya rendah juga dapat dimanfaatkan aktor jahat untuk menyebarkan disinformasi dengan kecepatan dan jangkauan yang setara. Kapasitas algoritma personalisasi yang memungkinkan warga menerima informasi yang relevan dengan minatnya juga menjadi mekanisme yang sama yang menciptakan *filter bubble* dan *echo chamber*. Sifat ambivalen inilah yang menjadikan tata kelola teknologi digital, bukan penolakan atau penerimaan tanpa syarat terhadapnya, sebagai kunci utama keberlanjutan demokrasi pada abad ke-21.

Perspektif keamanan siber turut memperkaya pemahaman mengenai tantangan demokrasi berbasis teknologi. Deibert (2022) menegaskan bahwa aktivitas mata-mata dan subversi digital yang dahulu menjadi wilayah eksklusif operasi intelijen negara kini dapat diakses oleh aktor non-negara yang memiliki sumber daya finansial memadai, sehingga memperluas jangkauan ancaman terhadap kebebasan warga negara dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ancaman surveilans digital semacam ini tidak hanya mengintimidasi jurnalis dan aktivis, tetapi juga berpotensi menciptakan efek dingin (*chilling effect*) yang membuat warga biasa enggan berpartisipasi secara terbuka dalam wacana politik daring karena kekhawatiran terhadap pengawasan dan konsekuensi yang mungkin ditimbulkannya.

Peluang dan tantangan demokrasi berbasis teknologi juga perlu dipahami dalam kerangka waktu yang lebih panjang, bukan sekadar dampak jangka pendek dari inovasi teknologi tertentu. Pengalaman historis dengan teknologi komunikasi sebelumnya mulai dari pencetakan buku, radio, hingga televisi menunjukkan pola berulang, yaitu periode optimisme awal mengenai potensi demokratisasi teknologi baru, diikuti oleh periode kekecewaan ketika dampak negatif teknologi tersebut mulai terlihat, dan akhirnya periode konsolidasi kelembagaan yang menghasilkan kerangka tata kelola yang lebih matang. Memahami pola historis ini penting agar kekhawatiran maupun optimisme terhadap teknologi digital saat ini tidak bersifat ahistoris, melainkan

mempertimbangkan bahwa masyarakat demokratis pada akhirnya memiliki kapasitas adaptif untuk mengembangkan kerangka kelembagaan baru yang sesuai dengan tantangan teknologi kontemporer, meskipun proses tersebut memerlukan waktu dan sering kali diwarnai konflik kepentingan yang signifikan.

BAB II
EKOSISTEM POLITIK DIGITAL DAN PERUBAHAN KOMUNIKASI POLITIK

Ekosistem politik digital terdiri dari jaringan aktor, platform, dan mekanisme yang membentuk komunikasi politik kontemporer. Transformasi komunikasi politik dari model satu arah yang dimediasi institusi menuju model interaktif yang dimediasi algoritma merupakan salah satu perubahan paling mendasar dalam kehidupan demokrasi modern. Bab ini menelusuri transformasi tersebut, peran media sosial sebagai arena politik baru, kemunculan politik berbasis data, peran platform digital dalam kampanye, serta perubahan relasi antara negara, partai politik, dan warga.

A. Transformasi Komunikasi Politik

Komunikasi politik secara tradisional dipahami sebagai proses penyampaian pesan politik dari elite kepada publik yang dimediasi oleh institusi media massa dengan struktur kelembagaan yang relatif terpusat. Dalam model ini, redaksi media massa berperan sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) yang menyeleksi, menyunting, dan memberikan konteks atas peristiwa politik sebelum disampaikan kepada khalayak. Transformasi digital secara fundamental mengubah struktur ini dengan menghadirkan platform yang memungkinkan aktor politik berkomunikasi langsung dengan warga tanpa perantara institusi media, sekaligus memungkinkan warga menjadi produsen konten politik, bukan sekadar konsumen pasif (Nasrullah, 2021).

Transformasi ini melahirkan apa yang disebut sebagai komunikasi politik jaringan (*networked political communication*), di mana pesan

politik tidak lagi mengalir secara linear dari elite ke massa, melainkan bersirkulasi dalam jaringan horizontal yang melibatkan berbagai simpul: politisi, media arus utama, influencer, buzzer, dan warga biasa. Setiap simpul dalam jaringan ini memiliki kapasitas untuk memproduksi, menyunting ulang, dan mendistribusikan kembali pesan politik, sehingga arah dan kecepatan penyebaran informasi menjadi jauh lebih sulit dikendalikan oleh satu aktor tunggal dibandingkan era media massa konvensional. Fenomena ini turut mendorong personalisasi komunikasi politik, karena kandidat dan partai politik kini dapat menyesuaikan pesan mereka secara spesifik bagi segmen pemilih tertentu.

Perubahan struktural ini juga berimplikasi pada sifat wacana politik itu sendiri. Komunikasi politik digital cenderung mengutamakan kecepatan dan daya tarik emosional dibandingkan kedalaman argumentasi, sebagian karena arsitektur platform digital yang mengoptimalkan metrik keterlibatan pengguna seperti jumlah klik, share, dan komentar (Cohen & Fung, 2021). Konsekuensinya, narasi politik yang sederhana, provokatif, dan mudah dibagikan cenderung memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan narasi yang kompleks dan berimbang, sebuah kecenderungan yang berimplikasi signifikan terhadap kualitas deliberasi publik. Untuk memperjelas pergeseran karakter komunikasi politik, Tabel 2.1 membandingkan pola komunikasi politik era analog dengan era digital pada beberapa dimensi kunci. Perbandingan ini menegaskan bahwa transformasi yang terjadi bukan sekadar perubahan medium, melainkan perubahan mendasar dalam logika produksi, distribusi, dan resepsi pesan politik oleh warga negara.

Tabel 2.1 Perbandingan Komunikasi Politik Era Analog dan Era Digital

Dimensi	**Era Analog (Media Massa)**	**Era Digital (Media Jaringan)**
Arah komunikasi	Satu arah, dari elite ke massa	Multiarah, jaringan horizontal antaraktor
Penjaga gerbang	Redaksi media dan lembaga penyiaran	Algoritma platform dan pengguna berpengaruh
Sifat khalayak	Massa yang relatif homogen	Segmen tersegmentasi berbasis data perilaku

Dimensi	Era Analog (Media Massa)	Era Digital (Media Jaringan)
Kecepatan sirkulasi	Terikat siklus cetak/siar harian	Instan, berlangsung dalam hitungan detik
Bentuk pesan	Narasi panjang, terverifikasi redaksi	Visual pendek, emosional, mudah dibagikan

Sumber: Nasrullah (2021) dan Cohen & Fung (2021)

Transformasi komunikasi politik juga membawa perubahan pada peran jurnalisme profesional dalam ekosistem informasi politik. Pada era analog, media massa menikmati posisi hampir monopolistik sebagai sumber informasi politik bagi publik luas, sehingga standar verifikasi dan etika jurnalistik berfungsi sebagai filter kualitas informasi yang relatif efektif. Pada era digital, jurnalisme profesional harus bersaing memperebutkan perhatian publik dengan miliaran sumber informasi lain yang tidak selalu tunduk pada standar verifikasi yang sama, mulai dari akun media sosial pribadi, situs berita tanpa redaksi profesional, hingga konten yang dihasilkan kecerdasan buatan generatif. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai krisis kepercayaan terhadap institusi media, di mana publik semakin kesulitan membedakan sumber informasi yang kredibel dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan lain yang tidak kalah penting adalah pergeseran metrik keberhasilan komunikasi politik. Pada era analog, keberhasilan komunikasi politik umumnya diukur melalui liputan media dan hasil jajak pendapat konvensional yang dilakukan secara periodik. Pada era digital, keberhasilan komunikasi politik dapat diukur secara langsung dan berkelanjutan melalui metrik keterlibatan digital seperti jumlah tayangan, interaksi, dan sentimen komentar, yang memungkinkan tim kampanye politik melakukan penyesuaian strategi komunikasi secara hampir seketika berdasarkan data performa konten. Kemampuan pengukuran yang presisi ini, meskipun meningkatkan efisiensi kampanye, juga mendorong logika komunikasi politik yang semakin berorientasi jangka pendek dan reaktif terhadap tren algoritmik, alih-alih berorientasi pada penyampaian visi dan program jangka panjang yang koheren.

Transformasi komunikasi politik turut memengaruhi format dan durasi pesan politik yang dianggap efektif. Riset komunikasi digital

menunjukkan bahwa rentang perhatian pengguna terhadap konten politik daring cenderung jauh lebih pendek dibandingkan konsumsi media cetak atau siaran televisi konvensional, sehingga mendorong kompresi pesan politik menjadi format yang semakin ringkas dan visual. Kompresi pesan ini memiliki konsekuensi ganda: di satu sisi meningkatkan aksesibilitas informasi politik bagi khalayak yang lebih luas dan beragam tingkat literasi, namun di sisi lain berisiko menyederhanakan isu-isu kebijakan kompleks menjadi slogan atau narasi yang kehilangan nuansa substantif yang diperlukan untuk pengambilan keputusan politik yang tercerahkan sebagaimana disyaratkan Dahl (1998).

Dimensi lain dari transformasi komunikasi politik adalah menguatnya peran narasi personal dan otentisitas sebagai mata uang politik digital. Berbeda dari komunikasi politik era analog yang cenderung formal dan terstruktur, komunikasi politik digital kontemporer mendorong kandidat dan pejabat publik untuk menampilkan sisi personal kehidupan mereka termasuk kehidupan keluarga, hobi, dan momen keseharian sebagai strategi membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Strategi "politik keotentikan" (*authenticity politics*) ini mencerminkan pergeseran ekspektasi publik terhadap pemimpin politik, dari sosok yang berjarak dan berwibawa menuju sosok yang relatable dan mudah diakses secara personal, sebuah pergeseran yang memiliki implikasi signifikan terhadap cara kandidat menyusun strategi komunikasi kampanye mereka.

B. Media Sosial sebagai Arena Politik Baru

Media sosial telah bertransformasi dari sekadar alat komunikasi interpersonal menjadi arena politik yang setara pentingnya dengan ruang publik konvensional seperti parlemen, media massa, dan forum warga. Sebagai arena politik, media sosial memfasilitasi berbagai bentuk tindakan politik, mulai dari penyebaran informasi kebijakan, mobilisasi dukungan terhadap isu tertentu, hingga pengorganisasian protes dan gerakan sosial berskala besar.

1. Transformasi Media Sosial Menjadi Ruang Politik

Media sosial telah berkembang dari sekadar sarana komunikasi interpersonal menjadi salah satu ruang penting dalam kehidupan politik. Aktivitas politik yang sebelumnya berlangsung melalui parlemen, media massa, organisasi masyarakat, dan forum warga kini juga berlangsung

secara intensif di ruang digital. Media sosial memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan, menyampaikan pendapat, membangun dukungan, dan merespons berbagai persoalan publik secara cepat.

Perubahan tersebut juga menggeser posisi masyarakat dalam proses komunikasi politik. Jika dalam sistem media konvensional masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima informasi, media sosial memungkinkan mereka sekaligus menjadi produsen, penyebar, dan komentator informasi. Nurfitriani et al. (2025) menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi digital di Indonesia telah mengubah masyarakat dari konsumen informasi yang relatif pasif menjadi aktor yang aktif dalam memproduksi dan menyebarkan informasi politik.

Namun, perubahan tersebut memiliki karakter ambivalen. Media sosial memang memperluas ruang partisipasi dan komunikasi politik, tetapi pada saat yang sama membuka peluang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat, manipulasi opini, dan konflik antarkelompok. Oleh karena itu, media sosial perlu dipahami sebagai arena politik yang memiliki peluang sekaligus risiko bagi perkembangan demokrasi.

2. Media Sosial dan Peningkatan Partisipasi Politik

Salah satu kontribusi penting media sosial terhadap kehidupan demokrasi adalah kemampuannya memperluas partisipasi politik masyarakat. Warga dapat mengikuti perkembangan isu politik, menyampaikan pendapat, berdiskusi, membagikan informasi, serta memberikan dukungan terhadap kandidat atau gerakan tertentu tanpa harus hadir dalam ruang politik konvensional. Akses tersebut membuat partisipasi politik menjadi lebih fleksibel dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks Indonesia, media sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan keterlibatan politik generasi muda, terutama menjelang Pemilu 2024. Zaki et al. (2023) menunjukkan bahwa media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam diskusi politik. Bagi Generasi Z, media sosial bahkan telah menjadi bagian penting dari lingkungan sosial dan komunikasi sehari-hari, sehingga isu politik dapat masuk ke dalam ruang digital yang mereka gunakan secara rutin.

Partisipasi tersebut tidak hanya berbentuk dukungan terhadap kandidat dalam pemilu. Warga juga dapat terlibat dalam diskusi publik,

menyebarkan informasi, membuat konten politik, mengikuti kampanye digital, maupun mendukung gerakan sosial. Dengan demikian, media sosial memperluas pemahaman mengenai partisipasi politik dari aktivitas elektoral menuju berbagai bentuk keterlibatan warga dalam isu publik.

3. Arsitektur Platform dan Pembentukan Perilaku Politik

Setiap platform media sosial memiliki karakteristik teknis, format komunikasi, dan pola interaksi yang berbeda. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap cara masyarakat berkomunikasi dan berpartisipasi dalam politik. Platform yang berorientasi pada teks singkat dapat mendorong diskusi politik yang cepat dan responsif, sementara platform berbasis video pendek lebih menekankan visualisasi, kreativitas, hiburan, dan personal branding.

Platform yang berbasis komunitas atau grup tertutup memiliki karakter berbeda karena memungkinkan terbentuknya jaringan dengan tingkat kedekatan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut dapat memperkuat solidaritas dan konsolidasi kelompok, tetapi juga berpotensi membentuk komunitas politik yang homogen dan tertutup terhadap pandangan alternatif. Postill (2020) menekankan bahwa arsitektur platform bukan sekadar persoalan teknis, tetapi ikut menentukan bentuk interaksi dan partisipasi politik yang dapat berkembang di dalamnya.

Perbedaan karakter platform juga memengaruhi strategi komunikasi politik. Kandidat dan partai politik tidak dapat menggunakan pendekatan komunikasi yang sama pada seluruh platform. Pesan politik harus menyesuaikan karakter pengguna, format konten, serta pola interaksi masing-masing platform. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kemampuan memahami ekosistem digital semakin penting dalam strategi politik modern.

4. Influencer, Generasi Z, dan Perubahan Otoritas Politik

Media sosial juga mengubah struktur kepemimpinan opini dalam kehidupan politik. Pada era media massa, pembentukan opini publik banyak dipengaruhi oleh politisi, akademisi, jurnalis, dan tokoh masyarakat. Di era digital, muncul aktor baru berupa *influencer* atau pemengaruh digital yang dapat memiliki pengaruh besar terhadap persepsi

dan perilaku politik masyarakat meskipun tidak memiliki jabatan formal dalam institusi politik.

Pengaruh seorang *influencer* tidak terutama berasal dari posisi formal, tetapi dari jumlah pengikut, tingkat keterlibatan audiens, kredibilitas personal, dan kemampuan membangun hubungan yang dianggap dekat dengan pengikutnya. Kondisi tersebut membuat batas antara komunikasi politik, hiburan, dan personal branding menjadi semakin kabur. Seorang tokoh digital dapat membicarakan isu politik dengan gaya informal yang lebih mudah diterima oleh kelompok masyarakat tertentu dibandingkan komunikasi politik formal.

Fenomena tersebut sangat relevan dalam memahami perilaku politik Generasi Z. Generasi yang tumbuh bersama teknologi digital cenderung berinteraksi dengan isu politik melalui berbagai format digital, mulai dari video pendek hingga diskusi daring. Gerakan seperti #ReformasiDikorupsi menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk membangun kesadaran dan mobilisasi politik dalam waktu singkat. Perubahan tersebut menuntut kandidat dan partai politik untuk memahami pola komunikasi generasi digital tanpa mengabaikan prinsip akurasi dan etika komunikasi politik.

5. Mobilisasi Digital, Polarisasi, dan Tantangan Demokrasi

Media sosial memiliki kemampuan yang sangat besar dalam mengorganisasi mobilisasi politik secara cepat. Gerakan yang sebelumnya membutuhkan organisasi formal, struktur kepemimpinan, dan sumber daya besar dapat berkembang melalui jaringan digital. Penggunaan tagar, video, unggahan, dan berbagai bentuk komunikasi daring memungkinkan masyarakat membangun solidaritas dan menyebarkan tuntutan politik dalam waktu relatif singkat.

Gerakan #ReformasiDikorupsi menjadi salah satu contoh bagaimana media sosial dapat menjadi instrumen mobilisasi kolektif. Ruang digital memungkinkan warga menyampaikan kritik dan membangun perhatian publik terhadap isu politik tanpa sepenuhnya bergantung pada saluran politik formal. Namun, keberhasilan mobilisasi digital dalam membangun perhatian publik tidak selalu berarti bahwa gerakan tersebut mampu menghasilkan perubahan kebijakan secara langsung. Dampak jangka panjangnya tetap bergantung pada kemampuan gerakan menghubungkan tekanan digital dengan proses politik dan institusi formal.

Selain mobilisasi, media sosial juga menghadirkan risiko polarisasi. Lestari (2024) menunjukkan bahwa media sosial dapat berperan ganda dalam demokrasi Indonesia, yaitu memperluas partisipasi sekaligus mempercepat polarisasi politik. Algoritma dapat memperkuat konten yang sesuai dengan preferensi pengguna sehingga masyarakat semakin sering berinteraksi dengan pandangan yang serupa. Oleh karena itu, media sosial perlu dipahami bukan sebagai teknologi yang secara otomatis memperkuat demokrasi, tetapi sebagai arena politik baru yang dampaknya sangat ditentukan oleh desain platform, perilaku pengguna, kualitas informasi, literasi digital, dan tata kelola teknologi.

C. Politik Berbasis Data (*Data-Driven Politics*)

1. Konsep dan Perkembangan Politik Berbasis Data

Politik berbasis data (*data-driven politics*) merujuk pada penggunaan data digital mengenai perilaku, preferensi, karakteristik demografis, serta aktivitas warga untuk mendukung perencanaan strategi politik dan kampanye. Data dapat berasal dari berbagai sumber, seperti media sosial, aktivitas pencarian daring, survei, basis data pemilih, serta interaksi masyarakat dengan berbagai platform digital. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik dan kecenderungan kelompok pemilih.

Perkembangan teknologi digital membuat jumlah dan jenis data yang tersedia bagi aktor politik meningkat secara signifikan. Jika sebelumnya strategi politik banyak bergantung pada survei dan pengalaman lapangan, kini aktor politik dapat menggabungkan berbagai sumber data untuk memahami perilaku masyarakat secara lebih terperinci. Kajian mengenai kampanye berbasis data menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan ini berkembang dalam berbagai konteks pemilu, meskipun tingkat penerapannya berbeda antarnegara (Kefford et al., 2022).

Perbedaan penerapan tersebut dipengaruhi oleh sistem politik, regulasi perlindungan data, perkembangan teknologi, serta budaya politik masing-masing negara. Dengan demikian, politik berbasis data bukan sekadar persoalan penggunaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan perubahan cara aktor politik memahami pemilih dan menyusun strategi komunikasi. Data kemudian menjadi salah satu sumber daya penting dalam kompetisi politik modern.

2. *Political Microtargeting* dan Personalisasi Pesan Politik

Salah satu praktik utama dalam politik berbasis data adalah *political microtargeting*. Praktik ini memungkinkan aktor politik mengidentifikasi kelompok pemilih tertentu berdasarkan karakteristik dan perilaku mereka, kemudian menyampaikan pesan yang disesuaikan dengan profil kelompok tersebut. Berbeda dengan kampanye konvensional yang menyampaikan satu pesan kepada masyarakat luas, *microtargeting* memungkinkan pesan politik dibuat lebih spesifik untuk segmen pemilih tertentu.

Aagaard dan Marthedal (2023) menunjukkan adanya dua kecenderungan utama dalam literatur. Perspektif pertama menekankan risiko manipulasi pemilih, pelanggaran privasi, dan potensi ancaman terhadap demokrasi. Perspektif kedua melihat microtargeting sebagai perkembangan teknis dalam komunikasi politik yang pada dasarnya melengkapi praktik kampanye yang sudah ada. Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa dampak microtargeting masih menjadi perdebatan akademik.

Pesan yang dipersonalisasi dapat memberikan pengaruh persuasif yang lebih besar dibandingkan pesan generik dalam kondisi tertentu, tetapi efeknya tidak selalu sebesar yang diasumsikan dalam kekhawatiran publik mengenai *microtargeting*. Hal tersebut menunjukkan bahwa politik berbasis data perlu dinilai berdasarkan bukti empiris, bukan hanya berdasarkan asumsi bahwa teknologi personalisasi selalu menghasilkan manipulasi politik.

3. Siklus Data, Algoritma, dan Kecerdasan Buatan dalam Politik

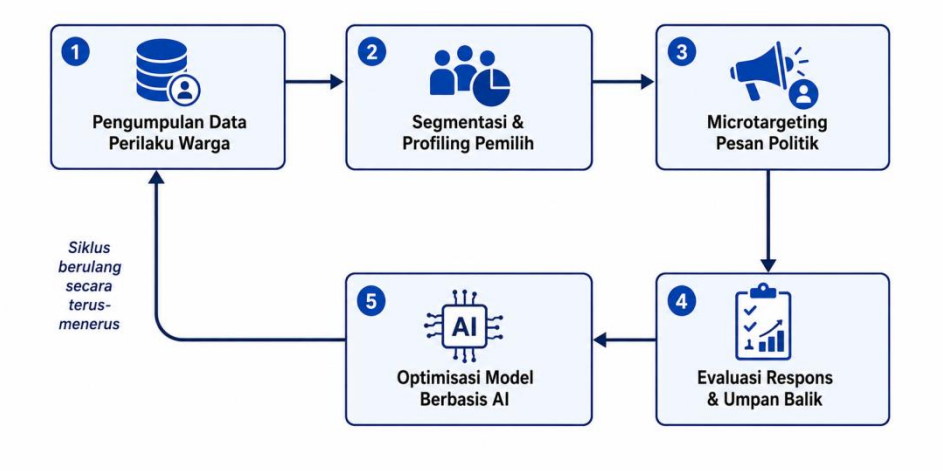
Politik berbasis data berlangsung melalui proses yang bersifat siklis. Proses tersebut dapat dimulai dari pengumpulan data mengenai perilaku dan karakteristik warga, dilanjutkan dengan segmentasi serta pembuatan profil pemilih. Berdasarkan profil tersebut, aktor politik dapat menyusun pesan yang berbeda untuk kelompok pemilih tertentu. Respons masyarakat terhadap pesan tersebut kemudian dikumpulkan kembali sebagai data untuk mengevaluasi efektivitas strategi.

Tahap berikutnya melibatkan penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data serta mengoptimalkan strategi komunikasi. Sistem dapat mengidentifikasi pola respons pemilih dan membantu menentukan jenis pesan yang memiliki kemungkinan lebih

besar untuk mendapatkan perhatian atau respons tertentu. Dengan demikian, semakin banyak interaksi yang terjadi, semakin banyak pula data yang tersedia untuk memperbaiki strategi pada tahap berikutnya.

Siklus tersebut menunjukkan bahwa politik berbasis data tidak berhenti pada pengumpulan informasi. Data menjadi bagian dari proses pembelajaran yang terus berlangsung antara aktor politik, pemilih, dan sistem teknologi. Namun, peningkatan kemampuan prediktif tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi. Pemilih sering kali tidak mengetahui data apa yang digunakan, bagaimana profil mereka dibentuk, atau mengapa mereka menerima pesan politik tertentu.

Gambar 2.1 Siklus Politik Berbasis Data (*Data-Driven Politics*)



Sumber: Aagaard & Marthedal (2023)

4. Privasi Data, *Cambridge Analytica*, dan Regulasi Politik Digital

Salah satu peristiwa yang paling memengaruhi perdebatan mengenai politik berbasis data adalah skandal *Cambridge Analytica* pada 2018. Kasus tersebut memunculkan perhatian luas mengenai pengumpulan dan pemanfaatan data pengguna media sosial untuk kepentingan politik. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa data pribadi dapat memiliki nilai politik yang besar ketika dikombinasikan dengan teknik profiling dan strategi komunikasi yang terarah.

Kasus tersebut kemudian mendorong perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan data pribadi dalam aktivitas politik. Negara-negara memiliki pendekatan regulasi yang berbeda, terutama dalam hal pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penggunaan data untuk

kepentingan kampanye. Negara dengan regulasi perlindungan data yang lebih ketat cenderung memberikan batasan lebih besar terhadap praktik microtargeting dibandingkan negara yang memiliki kerangka regulasi lebih longgar (Kefford et al., 2022).

Persoalan regulasi menjadi semakin penting karena politik berbasis data berada pada titik pertemuan antara kepentingan kampanye dan hak privasi warga. Regulasi yang terlalu longgar dapat membuka peluang penyalahgunaan data, sedangkan regulasi yang terlalu ketat juga perlu mempertimbangkan hak politik dan kebebasan komunikasi. Karena itu, tata kelola politik berbasis data perlu memastikan adanya transparansi mengenai penggunaan data, persetujuan yang memadai, perlindungan data pribadi, dan mekanisme pertanggungjawaban bagi aktor yang menggunakan teknologi tersebut.

5. Data sebagai Sumber Kekuasaan Politik

Data telah berkembang menjadi salah satu sumber daya penting dalam politik modern. Dalam sistem politik konvensional, aktor politik memperoleh informasi mengenai masyarakat melalui survei, sensus, pertemuan tatap muka, media massa, laporan organisasi, dan berbagai bentuk penelitian opini publik. Metode tersebut masih digunakan, tetapi perkembangan teknologi digital memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah yang jauh lebih besar, lebih cepat, dan lebih beragam. Data kependudukan, data pemilih, hasil survei, data ekonomi, aktivitas media sosial, hingga pola interaksi digital dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik dan kecenderungan masyarakat.

Perubahan tersebut membuat data memiliki nilai strategis dalam proses politik. Aktor politik yang memiliki kemampuan mengakses, mengolah, dan menafsirkan data dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, data dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat dukungan politik tertentu, kelompok pemilih yang belum menentukan pilihan, isu yang paling banyak diperbincangkan, serta karakteristik masyarakat yang memiliki kecenderungan tertentu terhadap suatu kandidat atau kebijakan. Dengan demikian, data tidak lagi sekadar berfungsi sebagai informasi pendukung, tetapi dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi politik.

Kekuatan politik yang berasal dari data juga berkaitan dengan ketimpangan kemampuan untuk mengelola informasi. Tidak semua aktor politik memiliki sumber daya teknologi, tenaga ahli, infrastruktur digital,

dan kemampuan analitik yang sama. Partai atau kandidat dengan sumber daya lebih besar dapat melakukan analisis yang lebih kompleks dibandingkan aktor politik yang memiliki keterbatasan teknologi dan pendanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam politik digital, kompetisi tidak hanya terjadi dalam penguasaan suara masyarakat, tetapi juga dalam penguasaan kemampuan untuk memperoleh dan menginterpretasikan data. Data pada akhirnya dapat menjadi bentuk baru dari sumber daya politik yang menentukan kemampuan aktor dalam memahami dan memengaruhi lingkungan politiknya.

6. Algoritma, Kecerdasan Buatan, dan Pengambilan Keputusan Politik

Perkembangan kecerdasan buatan memperluas kemampuan politik berbasis data dari sekadar membaca kondisi masyarakat menjadi memprediksi kemungkinan perilaku politik. Algoritma dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam data dalam jumlah besar yang sulit ditemukan melalui analisis manual. Dalam politik, teknologi tersebut dapat membantu memperkirakan tingkat dukungan terhadap kandidat, mengidentifikasi isu yang berpotensi menjadi perhatian publik, memetakan pola penyebaran informasi, serta mengevaluasi efektivitas suatu kampanye.

AI juga dapat digunakan dalam produksi dan distribusi komunikasi politik. Sistem berbasis AI mampu membantu menghasilkan teks, gambar, video, maupun materi kampanye yang disesuaikan dengan karakteristik audiens. Selain itu, algoritma platform digital menentukan informasi apa yang lebih mungkin muncul di hadapan pengguna berdasarkan perilaku dan interaksi sebelumnya. Dengan demikian, keputusan politik warga dapat dipengaruhi bukan hanya oleh pesan yang sengaja dibuat oleh kandidat, tetapi juga oleh mekanisme algoritmik yang menentukan informasi mana yang lebih terlihat dan lebih sering dikonsumsi.

Di sisi lain, meningkatnya penggunaan algoritma dalam politik menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan proses pengambilan keputusan. Algoritma bukan sistem yang sepenuhnya netral karena dirancang berdasarkan data, tujuan, parameter, dan keputusan manusia. Jika data yang digunakan mengandung bias, algoritma dapat menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang memperkuat bias tersebut. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam politik membutuhkan transparansi mengenai sumber data, tujuan penggunaan algoritma,

mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem pengawasan yang dapat memastikan bahwa teknologi tetap berada dalam kerangka prinsip demokrasi.

D. Peran Platform Digital dalam Kampanye Politik

Peran platform digital dalam kampanye politik dapat dibagi menjadi lima aspek utama, yaitu sebagai infrastruktur komunikasi dan periklanan, ruang kampanye organik, sarana mobilisasi dan pendanaan, arena kompetisi algoritmik, serta instrumen analitik dan evaluasi kampanye.

1. Platform Digital sebagai Infrastruktur Komunikasi dan Periklanan Politik

Platform digital, terutama media sosial dan mesin pencari, telah menjadi bagian penting dari infrastruktur kampanye politik kontemporer. Platform tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat menyampaikan pesan, tetapi juga menyediakan sistem periklanan, segmentasi audiens, analitik, dan mekanisme distribusi konten. Kandidat dan partai politik dapat menggunakan berbagai fitur tersebut untuk menjangkau kelompok pemilih secara lebih luas dan terarah.

Perubahan tersebut terlihat dari pergeseran strategi periklanan politik. Kampanye yang sebelumnya mengandalkan penyiaran pesan secara luas kini semakin menggunakan pendekatan yang tersegmentasi berdasarkan karakteristik dan kebutuhan kelompok pemilih. Iklan digital dalam Pemilihan Pendahuluan Presiden Amerika Serikat 2020 menunjukkan bahwa strategi penempatan iklan dapat berubah mengikuti tahapan kampanye dan kelompok pemilih yang menjadi sasaran (Brodnax & Sapiezynski, 2025). Pola serupa juga ditemukan dalam studi mengenai strategi periklanan politik di berbagai negara (Ridout, Fowler, & Franz, 2025).

Dalam konteks Indonesia, media sosial juga memiliki peran penting dalam membentuk perhatian dan preferensi politik, terutama di kalangan pemilih muda. Platform digital memungkinkan kandidat membangun citra, menyampaikan program, dan merespons isu secara langsung. Dengan demikian, keberhasilan kampanye semakin dipengaruhi

oleh kemampuan kandidat dan partai dalam mengelola komunikasi digital secara konsisten dan strategis.

2. Kampanye Organik, *Buzzer*, dan Produksi Narasi Politik

Selain iklan berbayar, platform digital menyediakan ruang bagi kampanye organik melalui konten yang dibuat oleh kandidat, relawan, komunitas, maupun pendukung. Konten tersebut dapat berupa video, foto, infografik, komentar, siaran langsung, hingga berbagai bentuk meme politik. Kampanye organik memiliki keunggulan karena pesan dapat berkembang melalui interaksi pengguna tanpa selalu membutuhkan biaya iklan secara langsung.

Di Indonesia, fenomena *buzzer* politik menjadi salah satu contoh penting dari kampanye berbasis platform. *Buzzer* dapat digunakan untuk memproduksi, memperkuat, dan menyebarkan narasi politik tertentu dalam jumlah besar. Hasna dan Huwaida (2024) menunjukkan bahwa fenomena tersebut menimbulkan perdebatan mengenai transparansi, otentisitas, dan batas antara partisipasi politik warga dengan aktivitas komunikasi politik yang terorganisasi.

Keberadaan aktor nonformal tersebut menunjukkan bahwa kampanye digital tidak hanya dilakukan oleh kandidat dan partai politik. Pendukung, influencer, komunitas, relawan, dan jaringan akun digital juga dapat berperan dalam membentuk persepsi publik. Kondisi ini memperluas aktor dalam kompetisi politik, tetapi sekaligus membuat publik semakin sulit membedakan antara opini spontan, dukungan sukarela, dan pesan yang sengaja diproduksi sebagai bagian dari strategi kampanye.

3. Platform Digital sebagai Sarana Mobilisasi dan Pendanaan Kampanye

Platform digital juga memperluas kemampuan kandidat dan partai politik dalam melakukan mobilisasi pendukung. Melalui media sosial, aplikasi komunikasi, dan berbagai platform komunitas, tim kampanye dapat mengorganisasi kegiatan politik, menyebarkan informasi acara, merekrut relawan, serta membangun jaringan pendukung dalam waktu relatif singkat. Mobilisasi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada struktur organisasi politik yang bersifat hierarkis dan teritorial.

Selain mobilisasi, digitalisasi juga membuka peluang bagi penggalangan dana secara daring. Kandidat dapat menerima dukungan finansial melalui mekanisme donasi digital dari pendukung yang tersebar

di berbagai wilayah. Model mikro-donasi memungkinkan kampanye memperoleh dana dari jumlah pendukung yang lebih besar dengan nominal kontribusi yang relatif kecil. Pola ini dapat memperluas sumber pendanaan kampanye dan mengurangi ketergantungan terhadap sejumlah kecil donor besar.

Namun, digitalisasi pendanaan juga menciptakan tantangan transparansi. Sumber dana, identitas pemberi, mekanisme pembayaran, dan hubungan antara donasi dengan aktivitas periklanan digital perlu dapat diawasi secara jelas. Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika transaksi digital melibatkan platform yang beroperasi lintas wilayah. Oleh karena itu, perkembangan pendanaan kampanye digital perlu diikuti mekanisme pelaporan dan pengawasan yang mampu mengikuti karakter transaksi digital.

4. Algoritma dan *Algorithmic Arms Race* dalam Kampanye Politik

Kampanye politik digital semakin bergantung pada algoritma yang menentukan distribusi dan visibilitas konten. Kandidat dan tim kampanye berusaha memahami karakteristik algoritma agar konten mereka memperoleh jangkauan dan interaksi yang lebih tinggi. Kondisi ini menciptakan persaingan baru yang dapat disebut sebagai *algorithmic arms race*, yaitu kompetisi antartim kampanye untuk mengoptimalkan konten agar lebih mudah direkomendasikan dan dilihat oleh pengguna.

Kompetisi tersebut mendorong investasi yang semakin besar dalam teknologi, analitik data, produksi konten, dan tenaga profesional digital. Kandidat dengan sumber daya finansial dan teknologi yang besar memiliki kemampuan lebih tinggi untuk memproduksi konten dalam jumlah besar serta melakukan eksperimen terhadap berbagai strategi komunikasi. Sebaliknya, kandidat atau partai dengan sumber daya terbatas dapat mengalami kesulitan untuk memperoleh visibilitas yang sama.

Situasi tersebut berpotensi menciptakan bentuk baru ketimpangan politik. Jika sebelumnya ketimpangan kampanye terutama ditentukan oleh kemampuan membeli ruang iklan di media konvensional, kini ketimpangan juga dipengaruhi oleh kemampuan memahami dan mengoptimalkan sistem digital. Dengan demikian, teknologi tidak selalu menghasilkan kompetisi politik yang lebih setara. Tanpa regulasi dan mekanisme transparansi yang memadai, dominasi sumber daya digital dapat memperkuat posisi kandidat dan partai yang sudah memiliki keunggulan sumber daya.

5. Analitik *Real-Time*, Evaluasi Kampanye, dan Ketergantungan pada Platform

Salah satu keunggulan utama platform digital adalah kemampuan menyediakan data analitik secara hampir real-time. Tim kampanye dapat melihat jumlah tayangan, jangkauan, komentar, tingkat interaksi, pertumbuhan pengikut, serta respons audiens terhadap konten tertentu. Data tersebut memungkinkan strategi komunikasi dievaluasi dan disesuaikan dengan cepat selama kampanye berlangsung.

Kemampuan tersebut berbeda dengan kampanye pada era media konvensional. Dalam kampanye analog, efektivitas pesan biasanya diketahui melalui survei, jajak pendapat, atau evaluasi setelah kegiatan kampanye yang membutuhkan waktu dan biaya relatif besar. Platform digital memungkinkan tim kampanye memperoleh umpan balik hampir seketika sehingga mereka dapat mengubah format pesan, menentukan waktu publikasi, memilih kelompok sasaran, dan mengembangkan konten berdasarkan respons masyarakat.

Namun, ketergantungan terhadap analitik platform juga menciptakan kerentanan baru. Platform dapat mengubah algoritma, sistem rekomendasi, kebijakan iklan, atau mekanisme distribusi konten tanpa selalu memberikan informasi yang cukup kepada pengguna. Perubahan tersebut dapat memengaruhi jangkauan kampanye secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kampanye politik tidak sebaiknya bergantung sepenuhnya pada satu atau dua platform. Diversifikasi saluran komunikasi, transparansi penggunaan data, dan kemampuan membangun hubungan langsung dengan pemilih menjadi semakin penting dalam menghadapi ketidakpastian ekosistem digital.

6. Disinformasi, Polarisasi, dan Tantangan Demokrasi Digital

Salah satu tantangan terbesar kampanye politik melalui platform digital adalah penyebaran disinformasi. Informasi yang tidak benar dapat diproduksi dan disebarkan dengan cepat melalui berbagai platform. Dalam situasi politik yang kompetitif, informasi palsu dapat digunakan untuk menyerang kandidat, memengaruhi persepsi masyarakat, atau membentuk narasi tertentu mengenai suatu kelompok. Kecepatan distribusi digital

membuat informasi yang salah dapat menyebar sebelum proses verifikasi dilakukan secara memadai.

Platform digital juga dapat memperkuat polarisasi politik. Pengguna cenderung berinteraksi dengan orang atau kelompok yang memiliki pandangan serupa, sementara algoritma dapat memperkuat pola konsumsi informasi yang sudah terbentuk. Akibatnya, masyarakat dapat berada dalam lingkungan informasi yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut berpotensi meningkatkan prasangka terhadap kelompok politik lain dan mengurangi ruang dialog yang sehat.

Karena itu, penggunaan platform digital dalam kampanye politik membutuhkan tanggung jawab dari berbagai pihak. Kandidat dan partai politik perlu menjaga integritas informasi, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital, sedangkan platform perlu memiliki mekanisme yang transparan untuk menangani konten manipulatif dan pelanggaran. Regulasi juga perlu dirancang secara hati-hati agar mampu melindungi integritas pemilu tanpa mengurangi kebebasan berekspresi. Dengan pendekatan tersebut, platform digital dapat berkembang bukan hanya sebagai alat kampanye, tetapi juga sebagai ruang publik yang mendukung partisipasi, deliberasi, dan kualitas demokrasi.

E. Perubahan Relasi antara Negara, Partai Politik, dan Warga

Perubahan relasi antara negara, partai politik, dan warga dalam ekosistem digital dapat dijelaskan melalui lima poin utama. Kelima poin ini menunjukkan bagaimana digitalisasi tidak hanya mengubah cara komunikasi politik berlangsung, tetapi juga menggeser distribusi kekuasaan, fungsi representasi, serta posisi aktor baru dalam demokrasi.

1. Pergeseran Fungsi Partai Politik sebagai Perantara Warga

Dalam demokrasi representatif konvensional, partai politik memiliki posisi penting sebagai penghubung antara masyarakat dan negara. Partai mengagregasi kepentingan warga, menyusun agenda politik, merekrut kandidat, serta menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam lembaga pemerintahan. Struktur tersebut membuat partai politik memiliki peran sebagai perantara utama dalam proses representasi politik.

Digitalisasi mengubah pola tersebut karena warga kini memiliki berbagai saluran untuk berkomunikasi secara langsung dengan pejabat publik dan lembaga negara. Media sosial, forum daring, platform

pengaduan, dan petisi digital memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi tanpa harus selalu melalui struktur partai. Warga juga dapat membangun jaringan dan gerakan secara mandiri melalui teknologi digital.

Perubahan ini tidak berarti bahwa partai politik kehilangan seluruh relevansinya. Partai tetap memiliki fungsi penting dalam proses elektoral dan kelembagaan, tetapi cara menjalankan fungsi tersebut harus beradaptasi. Partai yang sebelumnya mengandalkan loyalitas ideologis dan struktur organisasi formal kini semakin dituntut untuk membangun hubungan yang lebih interaktif dengan warga melalui berbagai kanal digital.

2. Transformasi Peran Negara dan Kehadiran Pemerintah di Ruang Digital

Digitalisasi juga mengubah cara negara berhubungan dengan warga. Pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyedia layanan publik melalui institusi fisik, tetapi semakin aktif menggunakan platform digital untuk memberikan informasi, menerima pengaduan, menyampaikan kebijakan, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Kehadiran pemerintah di ruang digital membuat hubungan antara negara dan warga dapat berlangsung secara lebih cepat dan langsung. Namun, kehadiran negara di ruang digital juga menimbulkan persoalan mengenai batas antara pengaturan dan pembatasan. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan, mencegah penyebaran informasi berbahaya, dan melindungi proses elektoral. Di sisi lain, tindakan pemerintah dalam mengatur ruang digital dapat berpotensi membatasi kebebasan berekspresi apabila dilakukan secara berlebihan atau tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.

Situasi tersebut menunjukkan adanya dilema antara keamanan dan kebebasan dalam tata kelola politik digital. Negara perlu memiliki kapasitas untuk mengatur ruang digital, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, transformasi digital tidak menghilangkan kekuasaan negara, tetapi mengubah bentuk dan cara kekuasaan tersebut dijalankan dalam ruang digital.

3. Perubahan Pola Partisipasi dan Representasi Warga

Digitalisasi membuat pola keterlibatan politik warga menjadi semakin fleksibel dan berbasis isu. Warga tidak selalu

mengidentifikasikan diri secara kuat dengan satu partai politik dalam jangka panjang. Sebaliknya, mereka dapat bergabung dengan berbagai gerakan berdasarkan isu tertentu, seperti lingkungan, hak asasi manusia, kebijakan ekonomi, atau isu sosial lainnya. Postill (2020) menunjukkan bahwa teknologi digital dapat mendukung mobilisasi yang digerakkan oleh kelompok kepentingan dan gerakan sosial. Mobilisasi semacam ini cenderung lebih episodik, yaitu muncul ketika terdapat isu tertentu dan dapat berkurang ketika perhatian masyarakat bergeser. Pola tersebut berbeda dengan model organisasi politik tradisional yang mengandalkan keanggotaan dan loyalitas dalam jangka panjang.

Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai masa depan representasi politik. Jika partai politik tidak lagi menjadi satu-satunya saluran utama aspirasi masyarakat, diperlukan mekanisme yang dapat menghubungkan partisipasi digital dengan proses pengambilan keputusan formal. Salah satu kemungkinan adalah berkembangnya model representasi hibrida yang menggabungkan sistem perwakilan elektoral dengan mekanisme partisipasi digital secara langsung. Model tersebut tetap membutuhkan mekanisme untuk menjamin legitimasi, keterwakilan, dan mencegah manipulasi oleh kelompok yang memiliki sumber daya digital lebih besar.

4. Munculnya Platform Digital sebagai Aktor Kekuasaan Baru

Transformasi digital menghadirkan aktor baru yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan politik, yaitu perusahaan platform digital. Platform seperti media sosial dan mesin pencari tidak hanya menyediakan tempat bagi masyarakat untuk berkomunikasi, tetapi juga menentukan bagaimana informasi didistribusikan melalui algoritma, sistem rekomendasi, kebijakan moderasi, dan aturan komunitas. Keputusan internal perusahaan platform dapat memiliki konsekuensi politik yang luas. Perubahan algoritma dapat meningkatkan atau mengurangi visibilitas suatu isu, sementara keputusan mengenai penghapusan konten atau penangguhan akun dapat memengaruhi kemampuan aktor politik tertentu untuk berkomunikasi dengan publik. Karena itu, perusahaan platform memiliki bentuk kekuasaan yang dalam sejumlah literatur disebut sebagai *quasi-state power* atau kekuasaan yang menyerupai fungsi negara.

Persoalan utamanya adalah akuntabilitas. Berbeda dengan lembaga negara yang secara formal memiliki mekanisme pertanggungjawaban

publik, perusahaan platform pada dasarnya merupakan entitas bisnis dengan mekanisme pengambilan keputusan internal. Ketika keputusan mereka memiliki dampak terhadap kebebasan berekspresi dan kehidupan politik jutaan warga, muncul kebutuhan untuk membangun mekanisme transparansi dan pengawasan yang dapat memastikan bahwa kekuasaan platform tidak berjalan tanpa kontrol.

5. Masyarakat Sipil Digital dan Konfigurasi Baru Kekuasaan Politik

Perubahan relasi negara, partai politik, dan warga juga melahirkan peran penting masyarakat sipil digital. Organisasi nonpemerintah, komunitas pemeriksa fakta, kelompok advokasi, organisasi berbasis teknologi, dan komunitas literasi digital dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah maupun platform digital. Mereka juga dapat membantu masyarakat memahami informasi politik dan mengidentifikasi manipulasi informasi.

Masyarakat sipil digital dapat menjadi penyeimbang ketika terjadi ketimpangan kekuasaan antara negara, platform, dan warga. Melalui pengawasan publik, pemeriksaan fakta, advokasi kebijakan, serta edukasi digital, kelompok-kelompok tersebut dapat membantu mempertahankan kualitas ruang publik. Kehadiran mereka juga menunjukkan bahwa demokrasi digital tidak hanya bergantung pada institusi negara dan partai politik, tetapi juga pada kemampuan warga untuk mengorganisasi diri secara mandiri.

Pada akhirnya, perubahan relasi antara negara, partai politik, dan warga menunjukkan bahwa kekuasaan politik di era digital semakin tersebar di antara banyak aktor. Negara tetap memiliki kewenangan regulatif, partai tetap memiliki fungsi representasi dan elektoral, warga memperoleh saluran partisipasi yang lebih langsung, sedangkan platform digital mengendalikan sebagian infrastruktur komunikasi publik. Konfigurasi tersebut membuat politik digital menjadi lebih kompleks dan dinamis. Pemahaman mengenai perubahan relasi kekuasaan ini menjadi dasar penting untuk memahami pembahasan berikutnya mengenai algoritma, *filter bubble*, *echo chamber*, dan kekuasaan dalam demokrasi digital.

BAB III
ALGORITMA DAN KEKUASAAN DALAM DEMOKRASI DIGITAL

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kekuasaan bekerja dalam kehidupan demokratis. Jika sebelumnya kekuasaan politik terutama dijalankan melalui lembaga negara, partai politik, dan media massa, kini algoritma platform digital turut menentukan informasi apa yang dilihat, dibagikan, dan diperbincangkan oleh masyarakat. Algoritma tidak hanya berfungsi sebagai teknologi pengolah data, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membentuk opini publik, preferensi politik, dan pola partisipasi warga.

Dalam konteks demokrasi digital, penggunaan algoritma membawa peluang sekaligus tantangan. Algoritma dapat memperluas akses informasi dan membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, tetapi juga berpotensi menciptakan filter *bubble*, polarisasi, manipulasi informasi, dan ketimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hubungan antara algoritma dan kekuasaan menjadi penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap mendukung demokrasi yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan warga.

A. Memahami Algoritma dan *Artificial Intelligence*

Memahami algoritma dan *Artificial Intelligence* (AI) menjadi bagian penting dalam memahami perkembangan politik digital. Algoritma merupakan serangkaian langkah atau aturan yang digunakan untuk memproses data dan menghasilkan keputusan atau keluaran tertentu. Dalam kehidupan digital, algoritma digunakan dalam berbagai aktivitas, mulai dari pencarian informasi, rekomendasi konten, pengelompokan pengguna, hingga penentuan konten yang muncul pada halaman media sosial. Sementara itu, AI merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer melakukan tugas yang umumnya membutuhkan

kemampuan manusia, seperti mengenali pola, memahami bahasa, membuat prediksi, dan menghasilkan keputusan berdasarkan data.

Dalam konteks politik, algoritma dan AI memiliki peran yang semakin besar karena aktivitas politik masyarakat semakin banyak berlangsung di ruang digital. Platform dapat menganalisis perilaku pengguna untuk memperkirakan jenis informasi yang kemungkinan menarik bagi mereka. AI juga dapat digunakan oleh kandidat dan organisasi politik untuk menganalisis opini publik, mengidentifikasi isu yang sedang berkembang, membuat materi komunikasi, serta mengevaluasi respons masyarakat terhadap suatu pesan politik. Dengan demikian, teknologi tersebut telah menjadi bagian dari proses produksi, distribusi, dan analisis komunikasi politik.

Namun, teknologi algoritmik dan AI bukanlah sistem yang sepenuhnya netral. Hasil yang diberikan sangat dipengaruhi oleh data yang digunakan, tujuan sistem, parameter yang ditetapkan, serta cara teknologi tersebut dirancang dan digunakan. Jika data mengandung bias, sistem dapat menghasilkan keluaran yang juga bias. Oleh karena itu, memahami algoritma dan AI dalam politik tidak cukup hanya dengan mengetahui cara kerja teknologinya, tetapi juga perlu memahami dampaknya terhadap transparansi, kebebasan memilih, privasi, keadilan, dan kualitas demokrasi.

1. Pengertian dan Cara Kerja Algoritma

Algoritma pada dasarnya merupakan prosedur sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau menghasilkan keluaran tertentu dari data yang tersedia. Dalam lingkungan digital, algoritma bekerja dengan mengikuti serangkaian aturan dan perhitungan yang telah dirancang sebelumnya. Misalnya, ketika seseorang menggunakan mesin pencari, sistem akan memproses kata kunci yang dimasukkan dan menggunakan berbagai faktor untuk menentukan informasi yang dianggap paling relevan.

Dalam media sosial, algoritma memiliki fungsi yang lebih kompleks. Sistem dapat mempertimbangkan interaksi pengguna, riwayat pencarian, konten yang ditonton, akun yang diikuti, lokasi umum, serta berbagai indikator lainnya untuk memperkirakan konten yang kemungkinan menarik bagi pengguna. Berdasarkan informasi tersebut, sistem kemudian mengatur urutan konten yang ditampilkan. Artinya, dua orang yang menggunakan platform yang sama dapat memperoleh

informasi yang berbeda karena sistem menyesuaikan tampilan berdasarkan pola aktivitas masing-masing.

Dalam politik, mekanisme tersebut memiliki konsekuensi yang penting. Algoritma dapat menentukan seberapa sering masyarakat melihat konten dari kandidat tertentu, berita politik, diskusi publik, atau isu tertentu. Akibatnya, algoritma secara tidak langsung dapat memengaruhi lingkungan informasi yang membentuk persepsi masyarakat. Meskipun algoritma tidak secara langsung menentukan pilihan politik seseorang, cara algoritma menyaring dan mengurutkan informasi dapat memengaruhi informasi apa yang tersedia bagi seseorang ketika membentuk pendapat politik.

2. Memahami *Artificial Intelligence* dalam Politik

Artificial Intelligence merupakan bidang teknologi yang berusaha mengembangkan sistem komputer agar mampu melakukan tugas yang membutuhkan kemampuan tertentu seperti pembelajaran dari data, pengenalan pola, pemrosesan bahasa, klasifikasi, prediksi, dan pembuatan konten. Salah satu karakteristik penting AI adalah kemampuannya memproses data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang sulit dilakukan secara manual. Kemampuan ini membuat AI memiliki berbagai aplikasi dalam kegiatan politik.

AI dapat digunakan untuk menganalisis opini masyarakat melalui berbagai sumber digital. Misalnya, ribuan komentar atau unggahan media sosial dapat diproses untuk mengidentifikasi kecenderungan sentimen terhadap kandidat atau isu tertentu. AI juga dapat digunakan untuk menemukan topik yang sedang banyak dibicarakan, mengidentifikasi perubahan opini publik, dan membantu memprediksi pola perilaku berdasarkan data historis. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kandidat atau organisasi politik dalam menyusun strategi komunikasi.

Selain analisis, AI juga dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai bentuk konten politik. Sistem generatif dapat membantu menghasilkan teks, gambar, audio, dan video berdasarkan instruksi tertentu. Teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi produksi materi kampanye, tetapi juga menimbulkan risiko apabila digunakan untuk membuat konten palsu atau menyesatkan. Karena itu, kemampuan AI dalam politik perlu ditempatkan dalam kerangka etika dan tanggung jawab agar efisiensi teknologi tidak mengorbankan kejujuran informasi.

3. Algoritma dan AI dalam Analisis Perilaku Pemilih

Salah satu penggunaan penting algoritma dan AI dalam politik adalah analisis perilaku pemilih. Data mengenai karakteristik masyarakat, hasil survei, aktivitas digital, dan respons terhadap berbagai isu dapat dianalisis untuk menemukan pola tertentu. Teknologi *machine learning*, misalnya, dapat digunakan untuk mengelompokkan pemilih berdasarkan karakteristik tertentu atau membuat prediksi mengenai kecenderungan respons terhadap suatu pesan politik. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk melakukan segmentasi pemilih. Kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda dapat menerima pendekatan komunikasi yang berbeda pula. Kandidat dapat mengidentifikasi isu yang paling relevan bagi kelompok tertentu dan menyesuaikan pesan yang disampaikan. Dalam konteks ini, AI membantu mengubah data dalam jumlah besar menjadi informasi yang lebih mudah digunakan dalam pengambilan keputusan politik.

Meskipun demikian, prediksi algoritmik tidak boleh dianggap sebagai kepastian. Model AI bekerja berdasarkan pola yang ditemukan dalam data sebelumnya, sedangkan perilaku politik manusia sangat kompleks dan dapat berubah akibat berbagai peristiwa. Prediksi yang terlalu dipercaya dapat menyebabkan kesalahan dalam strategi politik atau bahkan menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Oleh karena itu, hasil AI sebaiknya diperlakukan sebagai informasi pendukung yang tetap membutuhkan interpretasi dan pengawasan manusia.

4. Risiko Bias dan Manipulasi Algoritmik

Salah satu persoalan penting dalam penggunaan AI dan algoritma adalah bias. Bias dapat muncul ketika data yang digunakan untuk melatih sistem tidak mewakili seluruh kelompok masyarakat secara seimbang. Bias juga dapat muncul dari cara variabel dipilih, tujuan sistem ditentukan, atau model dirancang. Jika masalah tersebut tidak diperhatikan, sistem dapat menghasilkan rekomendasi atau prediksi yang kurang adil terhadap kelompok tertentu. Dalam politik, bias algoritmik dapat memengaruhi distribusi informasi dan cara kelompok masyarakat diperlakukan dalam kampanye. Misalnya, suatu kelompok dapat lebih sering menerima konten politik tertentu karena sistem menganggap mereka sebagai audiens yang potensial. Jika proses tersebut dilakukan tanpa transparansi, masyarakat

mungkin tidak menyadari mengapa mereka menerima pesan tertentu atau mengapa mereka tidak memperoleh informasi politik lainnya.

Risiko lainnya adalah manipulasi. AI memungkinkan produksi pesan dalam jumlah besar dan dengan tingkat personalisasi yang tinggi. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk menyebarkan pesan yang dirancang secara khusus agar memengaruhi kelompok tertentu. Jika dikombinasikan dengan informasi pribadi dan teknik persuasi yang agresif, kemampuan tersebut dapat mengurangi otonomi pemilih. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam politik perlu memperhatikan batas antara persuasi politik yang wajar dan manipulasi yang mengeksploitasi kerentanan masyarakat.

5. Transparansi, Akuntabilitas, dan Literasi AI

Pemahaman terhadap algoritma dan AI perlu diikuti dengan kesadaran mengenai transparansi. Masyarakat perlu mengetahui ketika teknologi AI digunakan untuk menghasilkan atau menyebarkan konten politik, terutama ketika konten tersebut dapat memengaruhi persepsi publik. Transparansi juga diperlukan dalam penggunaan data agar masyarakat memahami bagaimana informasi pribadi atau perilaku digital mereka digunakan dalam aktivitas politik.

Akuntabilitas menjadi prinsip penting lainnya. Ketika algoritma menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang bermasalah, harus terdapat pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengembang teknologi, platform digital, kandidat, partai politik, dan pihak lain yang menggunakan AI memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing. Penggunaan teknologi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban dengan menyatakan bahwa keputusan sepenuhnya dibuat oleh sistem.

Pada akhirnya, masyarakat juga membutuhkan literasi AI dan literasi digital yang memadai. Warga perlu mampu memahami bahwa konten yang muncul di layar mereka dapat dipengaruhi oleh algoritma dan bahwa tidak semua informasi yang dihasilkan atau disebarkan melalui teknologi digital dapat dianggap benar. Kemampuan untuk memeriksa sumber, mengenali konten manipulatif, memahami konteks data, dan mempertanyakan cara informasi diproduksi menjadi semakin penting. Dengan literasi yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan perkembangan AI tanpa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan

mengambil keputusan politik secara mandiri (LeCun, Bengio, dan Hinton, 2015) .

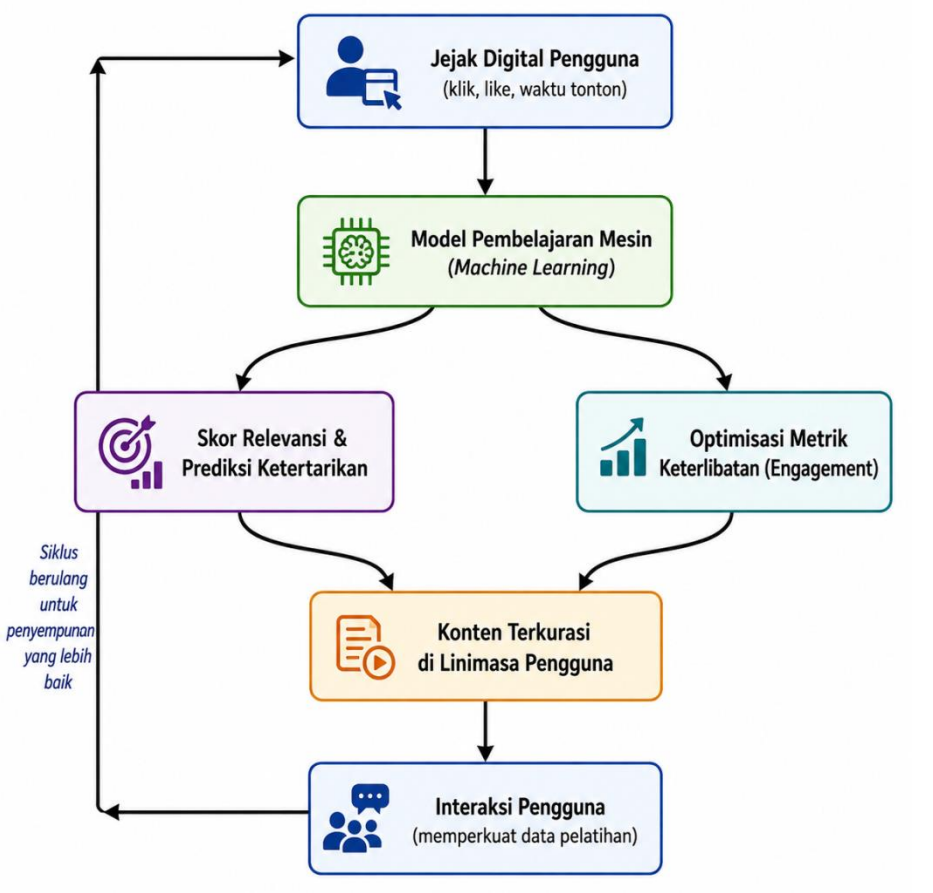
Penting untuk dipahami bahwa algoritma bukanlah entitas yang beroperasi dalam ruang hampa nilai. Setiap algoritma dirancang untuk mengoptimalkan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh perancangnya, seperti memaksimalkan waktu yang dihabiskan pengguna pada platform, jumlah interaksi, atau pendapatan iklan. Pilihan tujuan optimisasi ini pada dasarnya merupakan keputusan yang bermuatan nilai dan berkonsekuensi politik, karena secara langsung memengaruhi jenis informasi termasuk informasi politik yang mendapatkan visibilitas lebih tinggi di hadapan pengguna.

B. Algoritma sebagai Penentu Informasi Politik

Peran algoritma sebagai penentu informasi politik terletak pada kapasitasnya untuk melakukan seleksi dan pemeringkatan konten secara otomatis dari lautan informasi yang jauh melampaui kapasitas kognitif manusia untuk memprosesnya secara manual. Dalam konteks ini, algoritma menjalankan fungsi yang secara historis dilakukan oleh redaktur media massa sebagai penjaga gerbang informasi, namun dengan perbedaan mendasar: keputusan algoritmik beroperasi secara personal bagi setiap pengguna, berlangsung dalam skala miliaran keputusan per hari, dan sebagian besar prosesnya tidak transparan bagi pengguna maupun regulator publik.

Alur kerja algoritma rekomendasi konten politik, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.1, secara umum dimulai dari pengumpulan jejak digital pengguna berupa klik, waktu tonton, dan pola interaksi lainnya. Data ini kemudian diproses oleh model pembelajaran mesin untuk menghasilkan skor relevansi dan prediksi ketertarikan pengguna terhadap kategori konten tertentu, yang secara paralel dioptimalkan berdasarkan metrik keterlibatan yang ditetapkan platform. Hasil pemrosesan ini menentukan konten yang dikurasi dan ditampilkan pada linimasa pengguna, yang pada gilirannya menghasilkan interaksi baru yang kembali memperkuat data pelatihan model.

Gambar 3.1 Alur Kerja Algoritma Rekomendasi Konten Politik



Sumber: LeCun, Bengio, & Hinton (2015)

Implikasi politik dari mekanisme ini sangat signifikan. Karena algoritma dioptimalkan untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, konten yang memuat unsur emosional tinggi (kemarahan, ketakutan, atau indignasi moral) cenderung memperoleh distribusi yang lebih luas dibandingkan konten politik yang informatif namun kurang provokatif. Kondisi ini menciptakan insentif struktural bagi aktor politik untuk memproduksi konten yang semakin polarisasi demi memperoleh visibilitas algoritmik yang lebih tinggi, sebuah dinamika yang berkontribusi pada memburuknya kualitas wacana publik digital dan akan ditelaah lebih jauh melalui fenomena filter *bubble* dan *echo chamber*.

Peran algoritma sebagai penentu informasi politik juga tampak jelas dalam konteks mesin pencari, yang bagi banyak warga menjadi titik masuk utama dalam mencari informasi mengenai kandidat, partai, dan isu

politik tertentu. Berbeda dari algoritma media sosial yang mengutamakan personalisasi berdasarkan riwayat interaksi, algoritma mesin pencari umumnya mengutamakan relevansi dan otoritas sumber informasi, namun tetap rentan terhadap manipulasi melalui teknik optimisasi mesin pencari (*search engine optimization*) yang dapat dimanfaatkan aktor politik maupun aktor jahat untuk menaikkan peringkat konten tertentu secara artifisial. Fenomena ini dikenal dalam literatur sebagai potensi "efek manipulasi hasil pencarian" (*search engine manipulation effect*), yang menunjukkan bahwa urutan hasil pencarian dapat memengaruhi preferensi politik pengguna secara signifikan tanpa disadari, terutama bagi pemilih yang belum memiliki preferensi politik yang kuat sebelumnya.

Selain mesin pencari dan media sosial, algoritma rekomendasi pada platform berbagi video turut memainkan peran signifikan dalam membentuk konsumsi informasi politik, khususnya di kalangan generasi muda yang semakin mengandalkan format video sebagai sumber utama informasi politik dibandingkan format teks konvensional. Karakteristik algoritma rekomendasi video, yang cenderung mengarahkan pengguna pada konten dengan durasi tonton yang panjang, menciptakan insentif bagi kreator konten politik untuk memproduksi narasi yang semakin panjang, mendalam secara emosional, namun tidak selalu didukung verifikasi faktual yang memadai. Dinamika ini menegaskan bahwa peran algoritma sebagai penentu informasi politik tidak seragam di seluruh platform, melainkan sangat dipengaruhi oleh arsitektur teknis dan model bisnis spesifik masing-masing platform.

Konsep kekuasaan algoritmik (*algorithmic power*) menjadi kerangka analitis penting untuk memahami bagaimana sistem algoritmik menjalankan fungsi kekuasaan tanpa melalui mekanisme kelembagaan formal sebagaimana lazim dipahami dalam teori politik konvensional. Berbeda dari kekuasaan negara yang beroperasi melalui hukum dan penegakan yang eksplisit, kekuasaan algoritmik beroperasi secara implisit melalui desain arsitektur teknis yang membentuk pilihan-pilihan yang tersedia bagi pengguna tanpa mereka sadari sepenuhnya. Bentuk kekuasaan tersembunyi ini menuntut kerangka teori politik baru yang mampu menangkap dinamika kekuasaan yang tidak lagi semata bertumpu pada institusi formal negara, melainkan juga pada infrastruktur teknis yang dikendalikan aktor swasta.

Implikasi dari kekuasaan algoritmik terhadap teori demokrasi klasik cukup mendalam. Kerangka Dahl (1998) mengenai *polyarchy*

mengasumsikan bahwa kendali agenda politik berada pada warga negara melalui mekanisme kelembagaan yang transparan dan dapat diakses publik. Ketika agenda informasi politik justru dikendalikan oleh sistem algoritmik yang beroperasi secara tertutup dan dioptimalkan berdasarkan kepentingan komersial platform, maka salah satu prasyarat mendasar demokrasi substantif yakni kendali agenda oleh warga berpotensi mengalami erosi tanpa disadari oleh warga negara itu sendiri. Erosi tersembunyi inilah yang menjadikan kajian algoritma dan kekuasaan sebagai salah satu agenda paling mendesak dalam studi demokrasi digital kontemporer.

Selain kekuasaan algoritmik yang beroperasi pada level kurasi konten, penting pula dipahami bahwa kecerdasan buatan turut membentuk kekuasaan pada level infrastruktur yang lebih mendasar, yaitu kekuasaan atas kepemilikan dan kendali terhadap data pelatihan berskala besar. Perusahaan yang menguasai kapasitas komputasi dan data terbesar memiliki keunggulan struktural dalam mengembangkan sistem algoritmik yang lebih canggih, menciptakan dinamika konsentrasi kekuasaan teknologi yang oleh sejumlah pengamat disebut sebagai bentuk baru monopoli digital. Konsentrasi kekuasaan pada level infrastruktur ini memiliki implikasi jangka panjang yang jauh melampaui isu kurasi konten politik semata, karena turut menentukan negara atau entitas mana yang akan memimpin pengembangan teknologi kecerdasan buatan generasi berikutnya.

C. *Filter Bubble* dan *Echo Chamber*

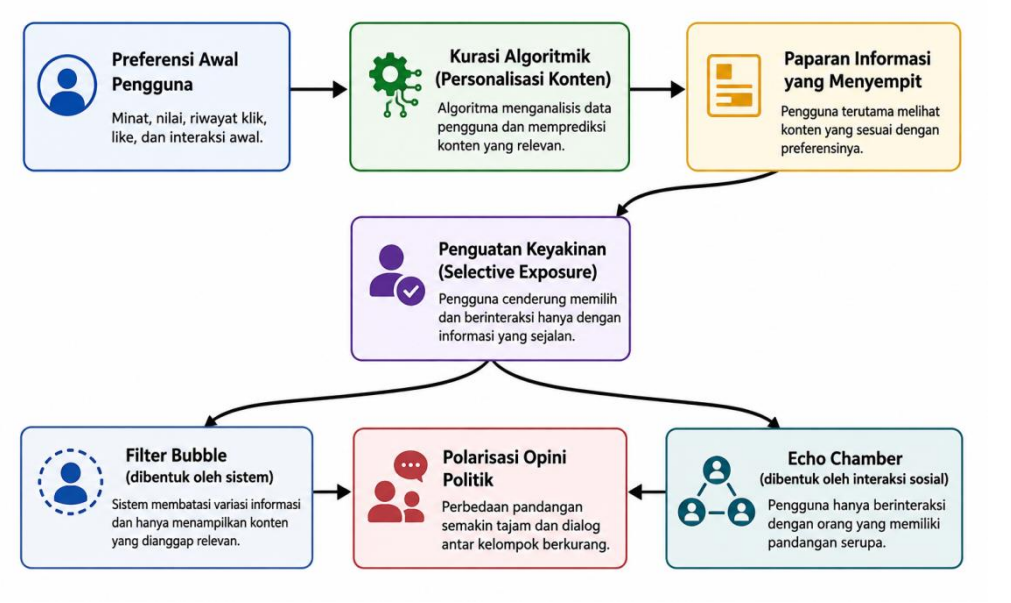
1. Perbedaan Konseptual antara *Filter Bubble* dan *Echo Chamber*

Filter bubble dan *echo chamber* sering digunakan secara bersamaan, tetapi keduanya memiliki mekanisme yang berbeda. *Filter bubble* terutama berkaitan dengan mekanisme teknis dan algoritmik yang menentukan informasi apa yang ditampilkan kepada pengguna. Algoritma platform menganalisis aktivitas pengguna, seperti riwayat pencarian, konten yang dilihat, akun yang diikuti, dan pola interaksi, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan personalisasi konten. Akibatnya, pengguna dapat semakin sering menerima informasi yang sesuai dengan preferensinya dan semakin jarang menemukan perspektif yang berbeda (Kim, 2023).

Sementara itu, *echo chamber* lebih menekankan dimensi sosial dan perilaku pengguna. Fenomena ini terjadi ketika individu cenderung memilih berinteraksi dengan orang, komunitas, atau sumber informasi yang memiliki pandangan yang sama. Informasi yang diterima kemudian terus mengulang dan memperkuat keyakinan yang sudah dimiliki. Cinelli et al. (2023) menunjukkan bahwa pola homofili dalam jaringan sosial dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang relatif homogen secara ideologis.

Kedua fenomena tersebut dapat saling memperkuat. Algoritma dapat menyediakan lingkungan informasi yang semakin sesuai dengan preferensi pengguna, sementara pengguna sendiri secara aktif memilih jaringan dan sumber informasi yang sejalan dengan pandangannya. Dengan demikian, *filter bubble* dapat dipahami sebagai penyempitan paparan informasi yang terutama dipengaruhi oleh sistem algoritmik, sedangkan *echo chamber* lebih berkaitan dengan pilihan sosial dan interaksi kelompok. Pembedaan ini penting agar analisis mengenai polarisasi digital tidak menganggap seluruh persoalan berasal dari algoritma semata.

Gambar 3.2 Mekanisme Terbentuknya *Filter Bubble* dan *Echo Chamber*



2. Hubungan *Filter Bubble*, *Echo Chamber*, dan Polarisasi Politik

Salah satu kekhawatiran utama mengenai *filter bubble* dan *echo chamber* adalah kemampuannya memperkuat polarisasi politik. Ketika pengguna terus menerima informasi yang konsisten dengan pandangan politiknya, mereka dapat semakin yakin bahwa pandangannya benar dan bahwa pandangan kelompok lain tidak valid. Paparan yang terbatas terhadap perspektif alternatif dapat mengurangi kesempatan terjadinya dialog dan pertukaran argumentasi lintas kelompok. Namun, perubahan rekomendasi algoritmik yang dirancang untuk menciptakan kondisi *filter bubble* tidak menghasilkan perubahan polarisasi yang signifikan dalam jangka pendek. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh algoritma terhadap polarisasi tidak selalu langsung dan mungkin bergantung pada karakteristik pengguna, jenis konten, serta durasi paparan.

Filter bubble, echo chamber, dan polarisasi politik merupakan tiga fenomena yang saling berkaitan dalam ekosistem komunikasi digital. *Filter bubble* terjadi ketika algoritma platform digital menyaring dan mempersonalisasi informasi berdasarkan perilaku, preferensi, dan interaksi pengguna, sehingga seseorang lebih sering menerima konten yang dianggap sesuai dengan minatnya. Sementara itu, *echo chamber* menggambarkan kondisi ketika seseorang berada dalam lingkungan sosial atau jaringan komunikasi yang didominasi oleh pandangan yang serupa, sehingga keyakinan yang sudah dimiliki terus diperkuat. Kedua fenomena tersebut dapat menciptakan lingkungan informasi yang terbatas dan mengurangi paparan terhadap pandangan yang berbeda.

Hubungan antara keduanya dapat dipahami melalui proses yang berlangsung secara bertahap. Ketika algoritma terus menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, pengguna cenderung berinteraksi lebih banyak dengan konten tersebut. Interaksi yang meningkat kemudian memberikan sinyal tambahan kepada algoritma bahwa jenis konten tersebut relevan, sehingga konten serupa semakin sering ditampilkan. Pada saat yang sama, pengguna dapat memilih untuk mengikuti akun, komunitas, atau kelompok yang memiliki pandangan politik yang sama. Perpaduan antara penyaringan algoritmik dan pilihan sosial tersebut dapat memperkuat terbentuknya echo chamber.

Kondisi tersebut memiliki implikasi terhadap polarisasi politik. Ketika individu terus menerima informasi yang mendukung pandangan kelompoknya dan jarang berinteraksi dengan perspektif yang berbeda, perbedaan pandangan politik dapat menjadi semakin tajam. Masyarakat dapat semakin yakin bahwa pandangan kelompoknya merupakan

pandangan yang paling benar, sementara kelompok lain dianggap salah atau bahkan sebagai ancaman. Namun, perlu dipahami bahwa filter bubble dan echo chamber tidak selalu secara otomatis menyebabkan polarisasi. Polarisasi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, identitas kelompok, kepentingan politik, media, kondisi ekonomi, dan karakteristik masyarakat.

3. Faktor Psikologis dan *Double Reinforcement*

Fenomena *filter bubble* dan *echo chamber* tidak hanya dapat dijelaskan melalui teknologi, tetapi juga melalui kecenderungan psikologis manusia. Individu pada umumnya memiliki kecenderungan mencari informasi yang sesuai dengan keyakinan sebelumnya, yang dikenal sebagai *confirmation bias*. Dalam konteks politik, kecenderungan tersebut membuat seseorang lebih mudah menerima informasi yang mendukung pandangan politiknya dan lebih kritis terhadap informasi yang bertentangan.

Jost, Baldassarri, dan Druckman (2022) menekankan bahwa polarisasi politik tidak hanya terbentuk karena struktur komunikasi digital, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme kognitif dan motivasional manusia. Ketika pengguna telah memiliki preferensi politik tertentu, mereka cenderung memilih sumber informasi yang memperkuat keyakinan tersebut. Media sosial kemudian dapat memperkuat kecenderungan tersebut melalui sistem rekomendasi yang memprioritaskan konten berdasarkan pola interaksi pengguna.

Interaksi antara kecenderungan psikologis dan sistem algoritmik dapat menghasilkan apa yang disebut sebagai penguatan berlapis ganda (*double reinforcement*). Pada lapisan pertama, individu memilih informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Pada lapisan kedua, algoritma menggunakan perilaku tersebut sebagai dasar untuk memberikan lebih banyak informasi yang serupa. Siklus tersebut dapat menciptakan lingkungan informasi yang semakin homogen. Karena itu, upaya mengurangi polarisasi tidak cukup hanya dengan memperbaiki algoritma, tetapi juga perlu memperhatikan literasi media, kemampuan berpikir kritis, dan kecenderungan psikologis pengguna.

4. Perbedaan Konteks Politik dan Karakteristik Platform

Kekuatan *filter bubble* dan *echo chamber* tidak selalu sama di setiap negara. Sistem kepartaian, budaya politik, tingkat polarisasi masyarakat, dan karakteristik media dapat memengaruhi bagaimana fenomena tersebut berkembang. Dalam sistem dua partai seperti Amerika Serikat, pembelahan politik cenderung lebih mudah terlihat karena masyarakat terpolarisasi di antara dua blok politik utama. Situasinya dapat berbeda dalam sistem multipartai seperti Indonesia. Preferensi politik masyarakat lebih beragam dan tidak selalu terbagi ke dalam dua kelompok ideologis yang jelas. Selain itu, hubungan antara identitas politik, agama, isu sosial, dan pilihan partai dapat menghasilkan pola komunikasi digital yang lebih kompleks. Karena itu, temuan penelitian dari Amerika Serikat tidak dapat langsung digeneralisasikan untuk menjelaskan perilaku pengguna media sosial di Indonesia.

Karakteristik platform juga perlu diperhatikan. Pola komunikasi pada platform berbasis teks berbeda dengan platform video pendek atau aplikasi perpesanan. Platform yang memungkinkan terbentuknya komunitas tertutup dapat menciptakan lingkungan informasi yang lebih homogen, sedangkan platform dengan sistem rekomendasi berbasis video dapat menghasilkan pola paparan informasi yang lebih dinamis. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai *filter bubble* dan *echo chamber* perlu mempertimbangkan konteks negara sekaligus arsitektur teknis platform yang digunakan.

5. Upaya Mengurangi Dampak *Filter Bubble* dan *Echo Chamber*

Berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk mengurangi dampak negatif *filter bubble* dan *echo chamber*. Salah satunya adalah *deliberate cross-cutting exposure*, yaitu desain platform yang sengaja memperkenalkan pengguna pada informasi atau perspektif yang berbeda dari pandangan mereka. Tujuannya adalah memperluas lingkungan informasi dan memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memahami perspektif kelompok lain.

Namun, paparan terhadap pandangan yang berlawanan tidak selalu menghasilkan dampak positif. Dalam kondisi tertentu, informasi yang bertentangan justru dapat memperkuat keyakinan awal dan meningkatkan penolakan terhadap kelompok lain. Hal tersebut terutama dapat terjadi ketika pengguna merasa bahwa informasi tersebut menyerang identitas kelompoknya. Oleh karena itu, sekadar mempertemukan pengguna dengan pandangan berbeda belum tentu cukup untuk mengurangi polarisasi.

Pendekatan lain yang berkembang adalah pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai instrumen untuk membantu dialog politik yang lebih konstruktif. Costello, Pennycook, dan Rand (2024) menunjukkan bahwa dialog personal dengan sistem AI generatif yang dirancang untuk menyampaikan argumentasi berbasis fakta secara empatik dapat mengurangi keyakinan terhadap teori konspirasi dan mempertahankan perubahan tersebut dalam periode tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu menjadi penyebab masalah. Dengan desain dan tata kelola yang tepat, AI juga dapat digunakan untuk memperluas perspektif, meningkatkan kualitas informasi, dan membantu masyarakat menghadapi polarisasi serta disinformasi.

D. Bias Algoritma dalam Ruang Publik Digital

Bias algoritma merujuk pada kecenderungan sistematis suatu sistem algoritmik untuk menghasilkan keluaran yang secara konsisten menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu, yang dapat bersumber dari bias dalam data pelatihan, desain model, maupun konteks penerapannya. Dalam ranah politik, bias algoritma dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari ketimpangan visibilitas konten antarideologi politik, ketidakseimbangan representasi kelompok demografis tertentu dalam hasil pencarian informasi politik, hingga bias linguistik yang merugikan komunitas pengguna bahasa non-dominan. Studi audit terhadap perangkat analisis sentimen berbasis bahasa Bengali, misalnya, mengungkap bagaimana bias identitas terselubung dalam desain teknologi pemrosesan bahasa alami dapat mereproduksi ketimpangan kekuasaan kolonial dalam ranah digital (Das et al., 2024).

Diakopoulos (2016), salah satu perintis kajian akuntabilitas algoritmik, menekankan bahwa bias algoritma dalam pengambilan keputusan otomatis perlu dipahami sebagai persoalan tata kelola dan bukan semata persoalan teknis, karena dampaknya bersentuhan langsung dengan prinsip keadilan dan kesetaraan warga dalam ruang publik. Untuk memudahkan pemahaman, Tabel 3.1 mengklasifikasikan beberapa jenis bias algoritma yang relevan dengan ruang publik digital beserta contoh manifestasinya dalam konteks politik.

Tabel 3.1 Jenis-Jenis Bias Algoritma dalam Ruang Publik Digital

Jenis Bias	Sumber Bias	Manifestasi dalam Ranah Politik
Bias data historis	Data pelatihan mencerminkan ketimpangan masa lalu	Rekomendasi berita yang mereproduksi stereotip kelompok tertentu
Bias keterlibatan	Optimisasi metrik klik dan interaksi	Amplifikasi konten provokatif dan polarisasi opini politik
Bias linguistik	Model dilatih dominan pada bahasa mayoritas	Moderasi konten kurang akurat pada bahasa daerah atau minoritas
Bias seleksi platform	Populasi pengguna platform tidak representatif	Persepsi opini publik yang bias dari data satu platform saja
Bias perancang sistem	Nilai dan asumsi implisit pengembang algoritma	Definisi ambang moderasi konten yang tidak netral secara politik

Sumber: Diakopoulos (2016) dan Das et al. (2024)

Konsekuensi dari berbagai bentuk bias algoritma tersebut adalah terkikisnya prinsip kesetaraan suara yang menjadi salah satu pilar utama demokrasi menurut kerangka Dahl (1998). Ketika sistem algoritmik secara sistematis memberikan visibilitas yang tidak seimbang kepada kelompok politik atau demografis tertentu, maka ruang publik digital berisiko mereproduksi bahkan memperkuat ketimpangan kekuasaan yang telah ada dalam masyarakat, alih-alih menjadi ruang deliberasi yang setara sebagaimana dicita-citakan teori demokrasi deliberatif. Kondisi inilah yang mendorong urgensi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas algoritma yang dibahas pada subbab penutup ini.

Sumber bias algoritma yang paling mendasar dan sering luput dari perhatian publik adalah bias pada tahap pengumpulan dan pelabelan data pelatihan. Karena model pembelajaran mesin belajar dari pola dalam data historis, setiap ketimpangan representasi dalam data tersebut misalnya dominasi konten berbahasa Inggris atau dominasi perspektif kelompok sosial tertentu dalam data pelatihan akan tereproduksi dan bahkan teramplifikasi dalam keluaran sistem algoritmik. Eubanks (2018) dalam

kajian klasiknya mengenai otomatisasi ketimpangan menegaskan bahwa sistem algoritmik yang tampak netral secara teknis sering kali justru memperdalam ketimpangan struktural yang telah ada, karena data yang digunakan untuk melatih sistem tersebut merefleksikan ketimpangan sosial historis yang belum terselesaikan.

Dalam konteks politik Indonesia yang multibahasa dan multietnis, bias linguistik algoritma memiliki relevansi khusus. Sistem moderasi konten dan deteksi ujaran kebencian yang dilatih dominan menggunakan data berbahasa Indonesia baku berisiko kurang akurat dalam mendeteksi konten berbahasa daerah atau dialek lokal, sehingga berpotensi menciptakan kesenjangan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa daerah sebagai media komunikasi politik utama mereka di ruang digital. Persoalan ini menegaskan bahwa audit bias algoritma tidak dapat dilakukan secara generik menggunakan standar yang dikembangkan untuk konteks bahasa dan budaya berbeda, melainkan memerlukan penyesuaian metodologis yang mempertimbangkan keragaman linguistik dan budaya politik lokal.

Upaya mitigasi bias algoritma umumnya melibatkan kombinasi antara intervensi teknis dan intervensi kelembagaan. Pada tataran teknis, pengembang sistem dapat menerapkan teknik audit bias secara sistematis, diversifikasi sumber data pelatihan, dan penerapan metrik keadilan (*fairness metrics*) dalam proses evaluasi model sebelum sistem diterapkan secara luas. Pada tataran kelembagaan, diperlukan mekanisme pengawasan eksternal yang independen dari pengembang sistem, termasuk keterlibatan kelompok masyarakat sipil dan akademisi dalam proses audit algoritma yang berdampak pada ruang publik digital. Kombinasi kedua jenis intervensi inilah yang menjadi inti dari kerangka transparansi dan akuntabilitas algoritma.

Bias algoritma dalam ruang publik digital juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan konsentrasi kekuasaan ekonomi pada segelintir perusahaan teknologi yang mengembangkan sebagian besar sistem algoritmik yang digunakan secara luas secara global. Konsentrasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai "monokultur algoritmik" (*algorithmic monoculture*), yaitu kondisi ketika miliaran pengguna di berbagai negara dan konteks budaya menerima kurasi informasi dari sejumlah kecil sistem algoritmik yang dikembangkan dengan asumsi nilai dan konteks budaya yang relatif homogen. Kondisi monokultur ini meningkatkan risiko bahwa bias tertentu, jika ada dalam desain sistem

algoritmik dominan, akan berdampak secara serentak pada ruang publik digital di berbagai negara, alih-alih terbatas pada satu konteks lokal saja.

Perspektif ekonomi politik media digital juga relevan untuk memahami mengapa bias algoritma sulit diatasi semata melalui perbaikan teknis. Karena model bisnis sebagian besar platform digital bertumpu pada pendapatan iklan yang berbanding lurus dengan tingkat keterlibatan pengguna, terdapat insentif struktural yang bertentangan antara tujuan memaksimalkan keuntungan komersial platform dengan tujuan meminimalkan bias dan polarisasi dalam ruang publik digital. Ketegangan struktural inilah yang menjelaskan mengapa upaya mitigasi bias algoritma yang mengandalkan itikad baik perusahaan teknologi semata sering kali tidak cukup, sehingga diperlukan intervensi regulasi eksternal.

E. Transparansi dan Akuntabilitas Algoritma

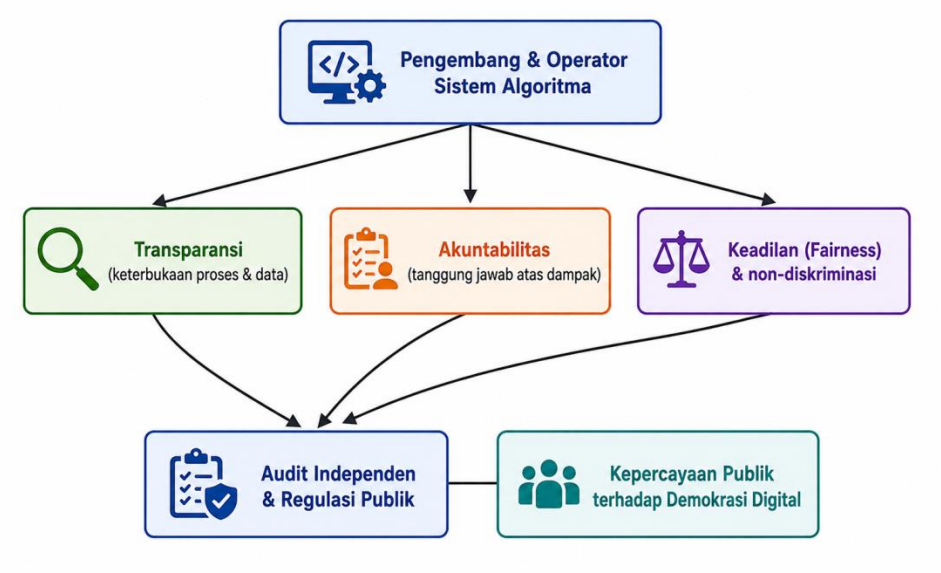
Transparansi dan akuntabilitas algoritma merupakan dua prinsip kunci yang semakin banyak dikaji sebagai prasyarat bagi tata kelola algoritmik yang selaras dengan nilai-nilai demokratis. Grimmelikhuijsen (2023) menemukan bahwa transparansi algoritmik dalam pengambilan keputusan otomatis oleh pemerintah secara signifikan memengaruhi persepsi warga terhadap tingkat kepercayaan mereka pada institusi yang bersangkutan, yang menegaskan bahwa keterbukaan proses algoritmik bukan sekadar isu teknis, melainkan isu legitimasi politik yang fundamental. Namun demikian, transparansi algoritmik memiliki tantangan tersendiri karena kompleksitas teknis model pembelajaran mesin kontemporer sering kali membuat proses pengambilan keputusannya sulit dijelaskan secara utuh bahkan oleh perancangnya sendiri, sebuah fenomena yang dikenal sebagai persoalan *black box* dalam literatur kecerdasan buatan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, sejumlah kerangka tata kelola algoritmik diusulkan dan diterapkan di berbagai yurisdiksi. Uni Eropa, misalnya, mengembangkan kerangka regulasi yang menuntut audit independen dan pelaporan transparansi bagi sistem algoritmik berisiko tinggi (Busuioc, Curtin, & Almada, 2023), sementara berbagai pemerintah daerah mengembangkan register algoritma publik sebagai instrumen akuntabilitas yang memungkinkan warga memeriksa sistem algoritmik yang digunakan institusi pemerintah. Namun demikian, evaluasi terhadap penerapan register algoritma di berbagai negara menunjukkan bahwa

keberadaan register semata belum cukup untuk menjamin akuntabilitas substantif, karena kualitas informasi yang diungkapkan sering kali masih terbatas dan sulit diverifikasi publik secara independen.

Kerangka transparansi dan akuntabilitas algoritma yang komprehensif, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.3, bertumpu pada tiga pilar utama yang saling berkaitan: transparansi mengenai keterbukaan proses dan data yang digunakan sistem algoritmik, akuntabilitas berupa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas dampak keputusan algoritmik, dan keadilan (*fairness*) yang menjamin sistem algoritmik tidak mendiskriminasi kelompok tertentu secara sistematis. Ketiga pilar ini perlu ditopang oleh mekanisme audit independen dan regulasi publik yang efektif, yang pada gilirannya menjadi prasyarat bagi terbangunnya kepercayaan publik terhadap demokrasi digital secara keseluruhan.

Gambar 3.3 Kerangka Transparansi dan Akuntabilitas Algoritma



Sumber: Grimmelikhuijsen (2023) dan Busuioc, Curtin, & Almada (2023)

Algoritma dan kekuasaan dalam demokrasi digital bukanlah relasi yang bersifat deterministik atau tak terelakkan. Diakopoulos (2025) mengingatkan bahwa media berita dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong akuntabilitas algoritmik secara prospektif, yaitu melalui investigasi jurnalistik dan advokasi publik yang mendorong

perusahaan teknologi dan regulator untuk lebih transparan sejak tahap perancangan sistem, bukan sekadar audit reaktif setelah dampak negatif terjadi.

Selain audit dan investigasi jurnalistik, pendekatan regulasi berbasis risiko semakin banyak diadopsi sebagai kerangka tata kelola algoritma yang lebih proporsional. Pendekatan ini mengklasifikasikan sistem algoritmik berdasarkan tingkat risiko dampaknya terhadap hak-hak fundamental warga, dengan sistem berisiko tinggi termasuk sistem yang digunakan dalam konteks pemilu dan proses demokratis dikenakan kewajiban audit, dokumentasi, dan pengawasan yang jauh lebih ketat dibandingkan sistem algoritmik berisiko rendah. Wörsdörfer (2025) mengevaluasi pendekatan berbasis risiko ini dari perspektif filsafat ekonomi ordoliberal, menyimpulkan bahwa meskipun kerangka semacam ini memberikan struktur regulasi yang lebih jelas, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan regulator dalam melakukan pengawasan substantif, bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif secara formal.

Tantangan lain yang perlu diperhitungkan dalam upaya membangun transparansi dan akuntabilitas algoritma adalah ketegangan antara kepentingan transparansi publik dengan kepentingan bisnis perusahaan teknologi yang memandang algoritma mereka sebagai rahasia dagang bernilai komersial tinggi. Busuioc, Curtin, dan Almada (2023) menelaah bagaimana ketegangan ini termanifestasi dalam perdebatan penyusunan regulasi kecerdasan buatan Uni Eropa, di mana perusahaan teknologi secara konsisten mendorong pengecualian dan pembatasan cakupan kewajiban transparansi dengan alasan perlindungan kekayaan intelektual. Ketegangan semacam ini menegaskan bahwa perwujudan transparansi algoritma pada praktiknya merupakan proses negosiasi politik yang berkelanjutan antara kepentingan publik dan kepentingan komersial, bukan sekadar persoalan teknis yang dapat diselesaikan melalui solusi rekayasa semata.

Dimensi partisipatif dalam tata kelola algoritma semakin mendapatkan perhatian sebagai pelengkap pendekatan regulasi *top-down* konvensional. Pendekatan partisipatif ini melibatkan warga negara dan kelompok masyarakat sipil secara langsung dalam proses perancangan, evaluasi, dan pengawasan sistem algoritmik yang berdampak pada kehidupan publik, alih-alih hanya mengandalkan regulator negara atau audit internal perusahaan. Model tata kelola partisipatif semacam ini

sejalan dengan prinsip kesetaraan suara yang menjadi inti teori demokrasi Dahl (1998), karena memberikan warga negara kanal langsung untuk memengaruhi desain sistem algoritmik yang membentuk pengalaman informasi politik mereka, bukan sekadar menjadi objek pasif dari keputusan algoritmik yang dibuat pihak lain.

Pada akhirnya, upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas algoritma yang substantif memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, media, dan masyarakat sipil secara bersamaan. Tidak ada satu aktor pun yang dapat menyelesaikan persoalan tata kelola algoritma secara sepihak, mengingat kompleksitas teknis sistem algoritmik kontemporer dan skala dampaknya yang bersifat lintas batas negara. Dengan memahami kompleksitas algoritma sebagai instrumen kekuasaan mulai dari mekanisme teknis kurasi konten, fenomena *filter bubble* dan *echo chamber*, berbagai bentuk bias yang dapat direproduksinya, hingga tantangan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang substantif, pembaca kini memiliki fondasi konseptual yang memadai untuk menelaah topik yang lebih spesifik mengenai peran kecerdasan buatan dalam politik modern.

BAB IV
KECERDASAN BUATAN DALAM POLITIK MODERN

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) semakin menjadi bagian penting dalam politik modern. Teknologi ini digunakan untuk menganalisis data pemilih, memahami opini publik, mengoptimalkan komunikasi politik, hingga membantu penyusunan strategi kampanye. Kehadiran AI membuat proses politik menjadi semakin berbasis data dan memungkinkan aktor politik mengambil keputusan secara lebih cepat dan terukur. Namun, penggunaan AI juga menghadirkan tantangan bagi demokrasi. Teknologi ini dapat digunakan untuk menghasilkan disinformasi, manipulasi opini, *deepfake*, serta pesan politik yang sangat personal dan sulit dikenali. Karena itu, pemanfaatan AI dalam politik perlu disertai transparansi, literasi digital, pengawasan, dan tanggung jawab etis agar teknologi dapat memperkuat partisipasi masyarakat tanpa mengurangi kebebasan dan kualitas demokrasi.

A. AI sebagai Instrumen Politik

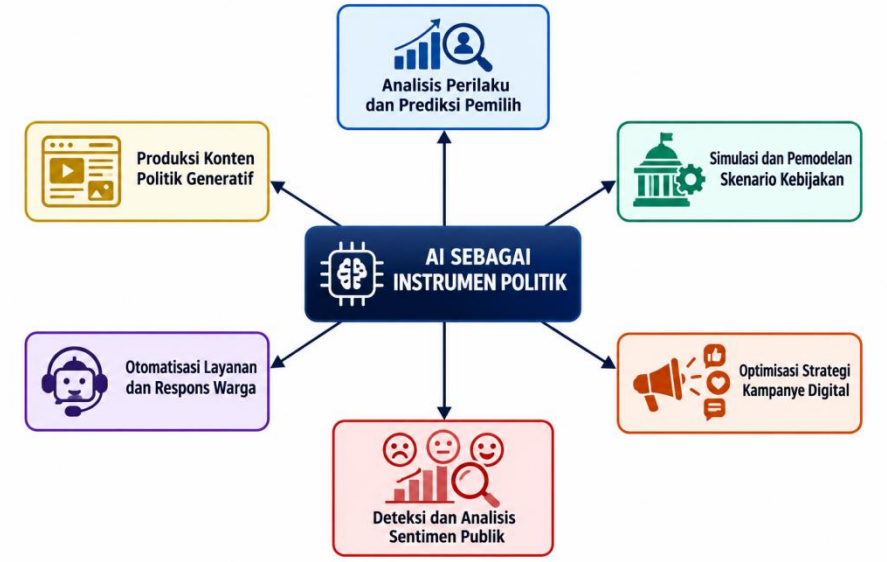
Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) telah berkembang dari sekadar teknologi pendukung menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam proses politik. Kemampuan AI dalam mengolah data dalam jumlah besar, mengenali pola, membuat prediksi, menghasilkan konten, dan mengotomatisasi berbagai aktivitas membuat teknologi ini memiliki nilai strategis bagi kandidat, partai politik, pemerintah, media, maupun kelompok kepentingan. Dalam konteks politik digital, AI dapat digunakan untuk memahami perilaku masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas komunikasi dan strategi politik.

Penggunaan AI dalam politik mencakup berbagai aktivitas, mulai dari analisis opini publik, segmentasi pemilih, penyusunan strategi kampanye, pembuatan konten, hingga pemantauan isu yang berkembang

di masyarakat. AI memungkinkan aktor politik memperoleh informasi secara lebih cepat dan melakukan penyesuaian strategi berdasarkan data yang tersedia. Dengan demikian, proses politik semakin dipengaruhi oleh kemampuan aktor dalam memanfaatkan teknologi dan menginterpretasikan informasi yang dihasilkan oleh sistem AI.

Namun, AI juga membawa persoalan baru bagi demokrasi. Teknologi yang mampu membantu masyarakat memperoleh informasi dapat pula digunakan untuk memproduksi disinformasi, memanipulasi persepsi, dan melakukan persuasi politik secara sangat personal. Karena itu, AI perlu dipahami bukan hanya sebagai alat teknologi, tetapi sebagai instrumen yang dapat memengaruhi distribusi informasi, hubungan kekuasaan, perilaku politik, dan kualitas partisipasi warga.

Gambar 4.1 Ragam Pemanfaatan AI sebagai Instrumen Politik



1. AI sebagai Instrumen Analisis Politik

Salah satu fungsi utama AI dalam politik adalah menganalisis data untuk memahami kondisi dan perilaku masyarakat. AI dapat memproses data dari survei, media sosial, berita daring, hasil pemilu, serta berbagai sumber digital lainnya. Dengan kemampuan tersebut, aktor politik dapat memperoleh gambaran mengenai isu yang sedang berkembang, kecenderungan opini masyarakat, dan perubahan respons publik terhadap suatu peristiwa politik.

Teknologi *machine learning* dapat digunakan untuk menemukan pola yang sulit diidentifikasi melalui analisis manual. Misalnya, sistem dapat mengelompokkan masyarakat berdasarkan karakteristik tertentu, menganalisis sentimen terhadap kandidat, atau mengidentifikasi topik yang paling sering dibicarakan. Analisis tersebut dapat membantu aktor politik memahami kebutuhan dan perhatian masyarakat secara lebih cepat.

AI juga dapat digunakan untuk membuat prediksi politik. Berdasarkan data historis dan karakteristik tertentu, sistem dapat memperkirakan kemungkinan respons masyarakat terhadap suatu isu atau strategi komunikasi. Namun, prediksi AI tidak boleh dianggap sebagai kepastian karena perilaku politik manusia dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat berubah secara cepat. Hasil AI tetap membutuhkan interpretasi manusia dan harus digunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai pengganti penilaian politik.

2. AI dalam Strategi Kampanye Politik

AI dapat membantu mengubah cara kampanye politik dirancang dan dilaksanakan. Dengan menganalisis data mengenai karakteristik dan perilaku pemilih, kandidat dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi tertentu. Pesan politik kemudian dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, perhatian, dan karakteristik kelompok tersebut. Kemampuan AI dalam mengolah data secara cepat juga memungkinkan kampanye berlangsung secara lebih responsif. Ketika suatu isu mendapatkan perhatian besar di masyarakat, sistem dapat membantu mengidentifikasi perubahan tersebut sehingga tim kampanye dapat segera merespons. AI juga dapat digunakan untuk mengevaluasi respons terhadap berbagai jenis konten dan membantu menentukan strategi komunikasi yang lebih efektif.

Namun, penggunaan AI dalam kampanye perlu dibedakan antara personalisasi komunikasi dan manipulasi. Personalisasi dapat membuat pesan lebih relevan bagi masyarakat, sedangkan manipulasi terjadi ketika teknologi digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan atau kondisi psikologis tertentu agar seseorang mengambil keputusan tanpa memperoleh informasi yang memadai. Batas tersebut menjadi semakin penting ketika AI mampu membuat pesan yang berbeda untuk setiap kelompok atau bahkan setiap individu.

3. AI sebagai Penghasil Konten Politik

Perkembangan AI generatif memungkinkan produksi berbagai bentuk konten politik secara cepat. Teks pidato, artikel, gambar, ilustrasi, audio, dan video dapat dibuat atau dimodifikasi dengan bantuan AI. Kemampuan tersebut memberikan keuntungan bagi kandidat dan organisasi politik karena produksi materi komunikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan dalam jumlah besar. AI generatif juga memungkinkan pembuatan konten yang disesuaikan dengan karakteristik audiens. Sebuah gagasan politik dapat dikemas dalam bentuk video pendek untuk kelompok tertentu, infografik untuk kelompok lainnya, atau narasi yang lebih panjang untuk audiens yang membutuhkan informasi mendalam. Dengan demikian, AI dapat meningkatkan variasi dan efisiensi komunikasi politik.

Di sisi lain, teknologi tersebut menghadirkan risiko besar melalui *deepfake* dan konten sintetis. Video atau audio yang dibuat dengan AI dapat menampilkan seseorang seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Jika konten semacam ini disebarkan menjelang pemilu, masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi palsu. Oleh karena itu, kemampuan menghasilkan konten perlu disertai transparansi mengenai penggunaan AI serta mekanisme untuk mengenali dan menangani konten yang menyesatkan.

4. AI, Persuasi Politik, dan Manipulasi Pemilih

AI memungkinkan komunikasi politik menjadi semakin personal. Sistem dapat menganalisis berbagai data untuk mengetahui jenis pesan yang kemungkinan mendapatkan perhatian dari kelompok tertentu. Berdasarkan informasi tersebut, aktor politik dapat mengembangkan pesan yang dirancang untuk meningkatkan perhatian, membangun citra kandidat, atau mengubah persepsi terhadap suatu isu.

Kemampuan tersebut dapat meningkatkan efektivitas persuasi politik. Dalam demokrasi, persuasi pada dasarnya merupakan bagian yang wajar dari kompetisi politik karena kandidat perlu meyakinkan masyarakat melalui gagasan dan program. Persoalan muncul ketika kemampuan teknologi digunakan untuk menyembunyikan sumber pesan, menyampaikan informasi yang tidak benar, atau mengeksploitasi karakteristik pribadi seseorang tanpa sepengetahuannya.

Manipulasi berbasis AI dapat menjadi lebih sulit dikenali karena pesan dapat dibuat dalam jumlah besar dan disesuaikan dengan

karakteristik audiens. Bahkan, masyarakat yang berbeda dapat menerima narasi politik yang berbeda mengenai kandidat atau isu yang sama. Kondisi tersebut dapat mengurangi transparansi kompetisi politik karena publik tidak selalu mengetahui pesan apa yang sebenarnya disampaikan kepada kelompok lain.

5. AI dan Tantangan terhadap Demokrasi

Penggunaan AI dalam politik dapat memberikan manfaat bagi demokrasi apabila digunakan untuk memperluas akses informasi, meningkatkan kualitas analisis, dan membantu masyarakat memahami isu publik. AI dapat membantu mengolah data yang kompleks sehingga informasi menjadi lebih mudah dipahami. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan warga dan membantu organisasi politik memahami kebutuhan masyarakat secara lebih sistematis.

Namun, AI juga dapat memperbesar ketimpangan kekuasaan antara aktor politik dan masyarakat. Aktor yang memiliki akses terhadap data, teknologi, tenaga ahli, dan infrastruktur AI dapat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memahami dan memengaruhi perilaku publik. Jika kemampuan tersebut tidak diimbangi dengan transparansi dan pengawasan, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat konsentrasi kekuasaan informasi.

Karena itu, penggunaan AI sebagai instrumen politik perlu didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, keadilan, dan kebebasan warga. Masyarakat perlu mengetahui kapan AI digunakan dalam produksi atau distribusi informasi politik, sementara platform dan aktor politik harus bertanggung jawab atas dampak penggunaan teknologi tersebut. Pada akhirnya, AI seharusnya digunakan untuk memperkuat kapasitas warga dalam memahami dan berpartisipasi dalam politik, bukan menggantikan otonomi warga atau mengubah pemilih menjadi sekadar objek yang dapat diprediksi dan dimanipulasi.

B. AI dalam Analisis Perilaku Pemilih

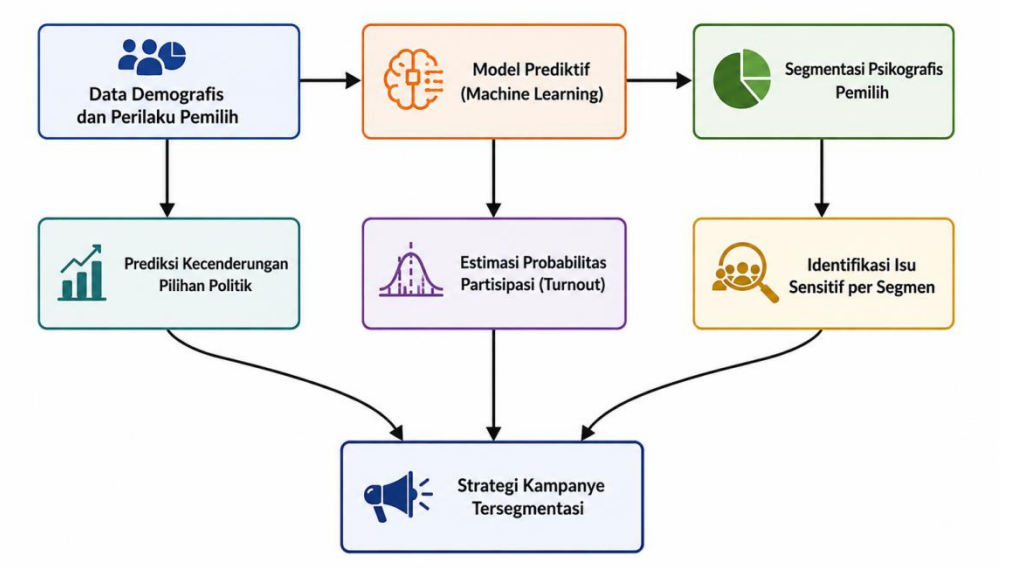
Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) semakin banyak digunakan untuk memahami perilaku pemilih dalam lingkungan politik digital. AI memiliki kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar,

menemukan pola, mengidentifikasi kecenderungan, dan menghasilkan prediksi berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam konteks pemilu, data yang dianalisis dapat berasal dari survei, data demografis, hasil pemilu sebelumnya, media sosial, berita daring, serta berbagai bentuk interaksi digital masyarakat. Kemampuan tersebut memungkinkan aktor politik memperoleh pemahaman yang lebih terperinci mengenai karakteristik dan kecenderungan pemilih.

Penggunaan AI mengubah pendekatan analisis pemilih dari yang sebelumnya banyak bergantung pada survei dan pengamatan manual menjadi analisis yang lebih dinamis dan berbasis data. Sistem AI dapat memproses perubahan opini masyarakat secara lebih cepat, misalnya dengan menganalisis ribuan komentar atau unggahan yang muncul dalam waktu tertentu. AI juga dapat membantu mengidentifikasi isu yang sedang mendapat perhatian masyarakat dan melihat bagaimana respons kelompok pemilih berubah terhadap suatu peristiwa politik.

Meskipun memberikan kemampuan analisis yang lebih besar, penggunaan AI dalam perilaku pemilih tidak berarti bahwa pilihan politik seseorang dapat diprediksi secara sempurna. Perilaku pemilih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti identitas sosial, kondisi ekonomi, pengalaman pribadi, isu politik, lingkungan keluarga, tokoh politik, serta perkembangan peristiwa menjelang pemilu. Oleh karena itu, AI sebaiknya dipandang sebagai instrumen untuk membantu memahami kecenderungan pemilih, bukan sebagai alat yang dapat menentukan secara pasti pilihan seseorang.

Gambar 4.2 Alur Analisis Perilaku Pemilih Berbasis Kecerdasan Buatan



1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Pemilih

Analisis perilaku pemilih dengan AI dimulai dari ketersediaan data. Data tersebut dapat berupa informasi demografis, hasil survei, preferensi terhadap isu, interaksi media sosial, pola konsumsi informasi, dan respons masyarakat terhadap berbagai pesan politik. Semakin beragam sumber data yang digunakan, semakin banyak dimensi perilaku yang dapat dianalisis. Namun, penggunaan berbagai sumber data juga membutuhkan perhatian terhadap kualitas, legalitas, dan perlindungan data pribadi.

AI memiliki kemampuan untuk menggabungkan dan mengolah data yang berasal dari berbagai sumber. Sistem dapat mengidentifikasi pola yang mungkin sulit ditemukan melalui pengamatan manual. Misalnya, AI dapat menemukan hubungan antara karakteristik kelompok pemilih dengan isu yang paling sering mereka bicarakan atau melihat perubahan sentimen masyarakat terhadap kandidat tertentu setelah suatu peristiwa politik.

Tahap pengolahan data juga menentukan kualitas hasil analisis. Data yang tidak lengkap, tidak representatif, atau mengandung bias dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Karena itu, penggunaan AI dalam analisis pemilih tetap membutuhkan proses pembersihan data, pemeriksaan kualitas, dan validasi. Kecanggihan algoritma tidak dapat menggantikan kualitas data yang digunakan sebagai dasar analisis.

2. Segmentasi Pemilih dengan AI

Salah satu manfaat AI adalah kemampuannya melakukan segmentasi pemilih. Masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai karakteristik, seperti usia, wilayah, preferensi isu, pola interaksi digital, atau respons terhadap pesan politik. Segmentasi tersebut memungkinkan aktor politik memahami bahwa pemilih bukan merupakan kelompok yang homogen, tetapi memiliki kebutuhan, perhatian, dan pertimbangan politik yang beragam. AI dapat membantu menemukan kelompok pemilih yang sebelumnya tidak terlihat secara jelas. Misalnya, dua kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik demografis serupa dapat menunjukkan preferensi politik yang berbeda karena memiliki perhatian terhadap isu yang berbeda. Dengan analisis berbasis AI, perbedaan tersebut dapat diidentifikasi melalui pola data yang muncul dari berbagai sumber.

Hasil segmentasi dapat digunakan untuk memahami kebutuhan komunikasi masing-masing kelompok. Kelompok yang lebih memperhatikan persoalan ekonomi dapat membutuhkan informasi mengenai lapangan pekerjaan dan harga kebutuhan pokok, sedangkan kelompok lain mungkin lebih memperhatikan pendidikan, lingkungan, atau pelayanan publik. Dengan demikian, AI membantu aktor politik menyusun komunikasi yang lebih relevan, meskipun penggunaannya tetap perlu memperhatikan prinsip keadilan dan tidak boleh berubah menjadi praktik diskriminatif.

3. Analisis Sentimen dan Opini Pemilih

AI juga dapat digunakan untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap kandidat, partai, atau isu politik. Melalui teknologi pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing*/NLP), sistem dapat mengolah teks dalam jumlah besar dan mengidentifikasi kecenderungan sentimen tertentu. Komentar, unggahan, atau tanggapan masyarakat dapat dianalisis untuk mengetahui apakah respons terhadap suatu isu cenderung positif, negatif, atau netral. Selain sentimen, AI dapat membantu mengidentifikasi topik yang menjadi perhatian masyarakat. Ribuan percakapan digital dapat dikelompokkan berdasarkan tema sehingga aktor politik dapat melihat isu apa yang paling banyak dibicarakan. Perubahan volume percakapan juga dapat menjadi indikator bahwa suatu isu mulai memperoleh perhatian publik yang lebih besar.

Namun, analisis sentimen memiliki keterbatasan. Bahasa manusia sering mengandung sarkasme, humor, sindiran, bahasa daerah, singkatan, dan konteks yang sulit dipahami oleh sistem. Sentimen positif dalam sebuah kalimat juga belum tentu menunjukkan dukungan terhadap kandidat tertentu. Karena itu, hasil analisis AI perlu dikombinasikan dengan interpretasi manusia dan metode penelitian lain agar tidak menghasilkan kesimpulan yang terlalu sederhana.

4. Prediksi Perilaku dan Preferensi Pemilih

AI dapat digunakan untuk membuat prediksi mengenai kecenderungan perilaku pemilih berdasarkan pola data sebelumnya. Model *machine learning* dapat dilatih menggunakan data historis untuk mengenali karakteristik yang berkaitan dengan perilaku politik tertentu. Hasilnya dapat digunakan untuk memperkirakan kelompok mana yang kemungkinan memberikan respons tertentu terhadap isu atau pesan politik.

Prediksi tersebut dapat membantu aktor politik menentukan prioritas strategi. Misalnya, analisis dapat menunjukkan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat perhatian tinggi terhadap suatu isu tetapi belum memiliki kecenderungan dukungan yang kuat. Informasi semacam ini dapat membantu tim kampanye menentukan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar dalam komunikasi politik. Namun, prediksi AI memiliki sifat probabilistik, bukan kepastian. Peristiwa politik yang tidak terduga, perubahan kondisi ekonomi, skandal politik, debat kandidat, atau munculnya isu baru dapat mengubah perilaku masyarakat secara cepat. Oleh sebab itu, prediksi AI harus diperbarui secara berkala dan tidak boleh diperlakukan sebagai gambaran pasti mengenai pilihan setiap individu.

5. Etika, Privasi, dan Risiko Manipulasi

Penggunaan AI untuk menganalisis perilaku pemilih menimbulkan persoalan penting mengenai privasi. Data politik dapat mengungkap preferensi, pandangan, dan kecenderungan seseorang. Jika informasi tersebut dikumpulkan atau dianalisis tanpa transparansi yang memadai, masyarakat dapat kehilangan kendali atas bagaimana data mengenai dirinya digunakan.

Persoalan lain adalah kemungkinan manipulasi. Informasi yang diperoleh dari analisis AI dapat digunakan untuk membuat pesan politik yang sangat terarah kepada kelompok tertentu. Jika pesan tersebut

didasarkan pada informasi yang sensitif atau digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan individu, AI dapat berubah dari alat analisis menjadi alat manipulasi politik. Kondisi ini dapat mengurangi otonomi pemilih dalam membuat keputusan secara bebas dan berdasarkan informasi yang memadai.

Karena itu, AI dalam analisis perilaku pemilih perlu digunakan secara bertanggung jawab. Prinsip perlindungan data pribadi, transparansi, akuntabilitas, keamanan data, dan pengawasan manusia harus menjadi bagian dari proses penggunaannya. Tujuan utama analisis seharusnya adalah memahami kebutuhan dan kecenderungan masyarakat secara lebih baik, bukan mengendalikan pilihan politik mereka. Dengan batas tersebut, AI dapat menjadi instrumen yang membantu memperkuat komunikasi dan partisipasi politik tanpa mengorbankan kebebasan serta otonomi warga.

C. *Generative* AI dalam Produksi Konten Politik

Kemunculan *generative* AI sejak akhir 2022, ditandai peluncuran model bahasa besar yang mampu menghasilkan teks, gambar, audio, dan video berkualitas tinggi dari perintah sederhana, telah mengubah secara fundamental ekonomi produksi konten politik. Sebelum kemunculan teknologi ini, produksi konten kampanye berkualitas tinggi memerlukan tim kreatif profesional dengan biaya signifikan, sehingga menciptakan hambatan sumber daya bagi kandidat atau partai kecil. *Generative* AI secara drastis menurunkan biaya dan hambatan teknis produksi konten, memungkinkan kampanye dengan sumber daya terbatas menghasilkan materi kampanye mulai dari email penggalangan dana, naskah pidato, hingga iklan visual dengan kualitas yang mendekati produksi profesional.

Dalam kampanye politik, *generative AI* dapat membantu membuat pidato, artikel, poster digital, infografik, video pendek, narasi media sosial, hingga materi komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik audiens tertentu. Teknologi ini memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dan dengan variasi format yang lebih banyak. Karena itu, *generative AI* dapat meningkatkan efisiensi komunikasi politik sekaligus memperluas kemampuan aktor politik untuk menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital.

Namun, kemudahan produksi konten juga menghadirkan tantangan serius bagi demokrasi. Konten yang dibuat AI dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, membuat identitas atau

pernyataan palsu, serta memproduksi *deepfake* yang sulit dibedakan dari konten asli. Oleh karena itu, penggunaan *generative AI* dalam politik perlu ditempatkan dalam kerangka etika, transparansi, dan tanggung jawab agar teknologi digunakan untuk memperluas komunikasi politik, bukan untuk memanipulasi pemilih.

1. *Generative AI* sebagai Teknologi Produksi Konten Politik

Generative AI bekerja dengan mempelajari pola dari data dan kemudian menghasilkan keluaran baru berdasarkan instruksi atau *prompt* yang diberikan pengguna. Berbeda dengan AI yang hanya melakukan klasifikasi atau prediksi, teknologi generatif dapat menghasilkan materi yang sebelumnya tidak tersedia dalam bentuk yang sama. Kemampuan ini membuatnya sangat relevan dalam produksi komunikasi politik yang membutuhkan berbagai bentuk konten secara cepat. Dalam komunikasi politik, teknologi ini dapat digunakan untuk membuat teks pidato, pernyataan politik, artikel, slogan, deskripsi program, dan materi kampanye digital. AI juga dapat membantu mengembangkan variasi pesan berdasarkan topik atau karakteristik audiens. Misalnya, satu gagasan politik dapat dikembangkan menjadi materi video pendek, artikel informatif, infografik, dan unggahan media sosial.

Penggunaan teknologi generatif membuat proses produksi konten menjadi lebih fleksibel. Tim kampanye tidak selalu harus memulai setiap materi dari awal karena AI dapat membantu menghasilkan rancangan awal yang kemudian diperiksa dan disempurnakan oleh manusia. Dengan demikian, AI berfungsi sebagai alat pendukung kreativitas dan produktivitas, sedangkan keputusan mengenai substansi politik tetap berada pada manusia.

2. Personalisasi dan Segmentasi Konten Politik

Salah satu keunggulan *generative AI* adalah kemampuannya menghasilkan berbagai versi pesan berdasarkan kebutuhan audiens. Dalam kampanye politik, satu program dapat dijelaskan dengan cara berbeda kepada kelompok masyarakat yang berbeda. Bahasa, contoh, format, dan penekanan pesan dapat disesuaikan dengan karakteristik audiens tanpa harus membuat seluruh materi secara manual. Personalisasi tersebut dapat membuat komunikasi politik menjadi lebih relevan. Masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai isu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan mereka. Kelompok mahasiswa, misalnya, dapat menerima

penjelasan yang lebih banyak mengenai pendidikan dan lapangan pekerjaan, sementara kelompok pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai ekonomi dan akses pembiayaan.

Namun, personalisasi juga memiliki sisi yang perlu diperhatikan. Jika setiap kelompok menerima narasi yang berbeda secara ekstrem, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai program atau posisi politik kandidat yang sama. Kondisi ini dapat mengurangi transparansi karena publik tidak selalu mengetahui keseluruhan pesan yang disampaikan oleh suatu aktor politik. Oleh karena itu, personalisasi perlu tetap berada dalam batas konsistensi informasi dan keterbukaan.

3. Produksi Gambar, Video, dan *Deepfake*

Kemampuan *generative AI* tidak terbatas pada teks. Teknologi ini juga dapat menghasilkan atau memodifikasi gambar, suara, dan video. Dalam kampanye politik, kemampuan tersebut dapat digunakan untuk membuat visualisasi program, ilustrasi, materi edukasi, atau video kampanye dengan biaya produksi yang lebih rendah. Penggunaan AI untuk membuat materi visual dapat meningkatkan daya tarik komunikasi politik. Kandidat dapat menyampaikan gagasan yang kompleks melalui infografik atau simulasi visual yang lebih mudah dipahami. Teknologi generatif juga dapat membantu kelompok politik yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk menghasilkan materi komunikasi dengan kualitas yang lebih baik.

Namun, kemampuan yang sama dapat digunakan untuk membuat *deepfake*. Wajah atau suara seorang tokoh dapat dimanipulasi sehingga tampak seolah-olah orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dalam situasi politik yang sensitif, konten semacam itu dapat memengaruhi persepsi masyarakat dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan memverifikasi sumber dan konteks konten sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

4. Efisiensi Kampanye dan Otomatisasi Komunikasi

Generative AI dapat meningkatkan efisiensi kerja tim kampanye. Produksi berbagai materi komunikasi yang sebelumnya membutuhkan banyak tenaga manusia dapat dibantu oleh sistem AI. AI dapat menghasilkan rancangan teks, mengembangkan ide konten, membuat variasi judul, merangkum isu, atau menyesuaikan format materi untuk berbagai platform digital. Otomatisasi juga memungkinkan kampanye

menghasilkan konten secara lebih konsisten dan cepat. Ketika suatu isu politik berkembang dengan cepat, tim komunikasi dapat menggunakan AI untuk membuat rancangan respons dalam waktu singkat. Hal ini membuat komunikasi politik menjadi semakin responsif terhadap perkembangan percakapan publik.

Meskipun demikian, efisiensi tidak berarti bahwa seluruh proses komunikasi sebaiknya diserahkan kepada AI. Konten politik memiliki konsekuensi sosial yang berbeda dengan konten komersial biasa. Kesalahan fakta, konteks yang keliru, atau pernyataan yang tidak sensitif dapat menimbulkan dampak politik yang besar. Karena itu, keterlibatan manusia tetap diperlukan untuk memeriksa fakta, konteks, etika, dan kesesuaian pesan sebelum konten dipublikasikan.

5. Etika, Transparansi, dan Integritas Informasi Politik

Penggunaan *generative AI* dalam politik membutuhkan standar etika yang lebih kuat karena konten yang dihasilkan dapat memengaruhi keputusan masyarakat. Salah satu prinsip penting adalah transparansi. Masyarakat perlu memiliki cara untuk mengetahui apakah suatu gambar, video, audio, atau teks telah dibuat atau dimodifikasi menggunakan AI, terutama ketika perubahan tersebut dapat memengaruhi interpretasi terhadap suatu peristiwa. Integritas informasi juga menjadi persoalan utama. AI dapat menghasilkan konten yang terlihat meyakinkan tetapi mengandung informasi yang salah. Bahkan, sistem AI dapat menghasilkan informasi yang tampak faktual tetapi sebenarnya tidak memiliki dasar yang valid. Karena itu, konten politik yang dibuat dengan AI tetap harus melalui proses verifikasi manusia sebelum digunakan dalam komunikasi publik.

Pada akhirnya, *generative AI* dapat menjadi instrumen yang bermanfaat bagi demokrasi apabila digunakan untuk memperluas akses informasi, meningkatkan kreativitas, dan mempermudah komunikasi antara aktor politik dengan masyarakat. Sebaliknya, teknologi ini dapat mengancam kualitas demokrasi apabila digunakan untuk membuat disinformasi, *deepfake*, propaganda tersembunyi, atau manipulasi pemilih. Oleh karena itu, prinsip utama dalam penggunaan *generative AI* dalam politik adalah teknologi boleh mempercepat produksi pesan, tetapi tidak boleh menghilangkan kebenaran, transparansi, dan tanggung jawab politik.

D. Otomatisasi Komunikasi Politik melalui AI

Otomatisasi komunikasi politik merujuk pada penggunaan sistem AI untuk menjalankan fungsi komunikasi yang sebelumnya memerlukan keterlibatan manusia secara langsung, mencakup respons otomatis terhadap pertanyaan warga, *chatbot* politik yang mensimulasikan percakapan dengan kandidat, hingga sistem yang secara otomatis menyesuaikan konten kampanye berdasarkan karakteristik audiens yang berinteraksi dengannya. Krause (2024) mencatat bahwa perkembangan model bahasa besar telah mencapai tahap yang memungkinkan *generative* AI digunakan dalam skala oleh kampanye pemilu, dengan potensi transformasi cara kampanye berinteraksi dengan pemilih melalui percakapan AI ke pemilih dalam berbagai bahasa dan berpotensi dalam skala yang sangat luas.

Salah satu bentuk otomatisasi komunikasi politik yang paling signifikan adalah penggunaan *chatbot* berbasis AI yang dirancang untuk mensimulasikan interaksi dengan kandidat atau pejabat publik, memungkinkan warga mengajukan pertanyaan spesifik mengenai posisi kebijakan kandidat dan menerima jawaban yang disesuaikan secara *real-time*. Meskipun teknologi ini berpotensi meningkatkan aksesibilitas informasi politik bagi warga yang tidak memiliki akses langsung ke kandidat, ia juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai akurasi dan akuntabilitas respons yang dihasilkan *chatbot* tersebut, terutama ketika sistem AI menghasilkan informasi yang tidak sepenuhnya akurat mengenai posisi kebijakan aktual kandidat.

Otomatisasi komunikasi politik juga mencakup penggunaan AI untuk mengoptimalkan waktu, frekuensi, dan saluran penyampaian pesan politik secara otomatis berdasarkan analisis performa *real-time*. Sistem semacam ini memungkinkan kampanye politik menjalankan ribuan variasi pesan secara simultan pada berbagai segmen audiens, kemudian secara otomatis mengalokasikan lebih banyak sumber daya pada variasi pesan yang menunjukkan performa terbaik, sebuah proses yang dalam industri periklanan digital dikenal sebagai optimisasi programatik. Penerapan teknik ini dalam konteks politik meningkatkan efisiensi kampanye secara signifikan, namun juga memperlebar kesenjangan kapasitas antara kampanye yang memiliki sumber daya teknis memadai dengan kampanye yang tidak.

Dimensi lain dari otomatisasi komunikasi politik yang layak dicermati adalah penggunaan sistem AI untuk menganalisis dan merespons sentimen publik secara otomatis terhadap peristiwa politik yang sedang berlangsung. Sistem pemantauan sentimen berbasis AI memungkinkan tim kampanye mendeteksi pergeseran opini publik dalam hitungan menit setelah suatu peristiwa terjadi, memungkinkan respons komunikasi yang jauh lebih cepat dibandingkan siklus komunikasi politik konvensional yang memerlukan waktu berjam-jam hingga berhari-hari untuk merumuskan dan menyebarkan respons resmi. Kecepatan respons yang dimungkinkan otomatisasi ini memiliki konsekuensi ganda: meningkatkan responsivitas politik terhadap dinamika opini publik, namun juga berisiko mendorong komunikasi politik yang semakin reaktif dan kurang reflektif, karena tekanan untuk merespons cepat dapat mengorbankan kedalaman pertimbangan substantif atas suatu isu kebijakan.

Otomatisasi komunikasi politik melalui AI juga memiliki implikasi terhadap struktur tenaga kerja industri konsultasi politik. Sejumlah fungsi yang sebelumnya memerlukan tim besar staf komunikasi seperti penyusunan draf pidato, respons media sosial, dan analisis performa pesan kini dapat dijalankan sistem otomatis dengan pengawasan manusia yang jauh lebih minim dibandingkan sebelumnya. Transformasi struktural ini menciptakan efisiensi biaya yang signifikan bagi kampanye politik, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan lapangan kerja di industri konsultasi politik, serta risiko hilangnya nuansa dan penilaian etis manusia dalam proses pengambilan keputusan komunikasi yang sensitif secara politik.

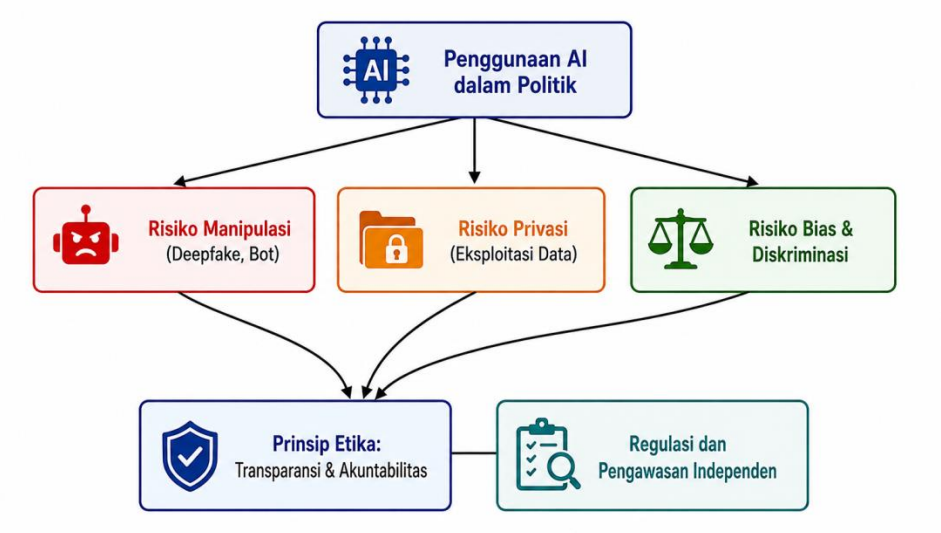
Tantangan otomatisasi komunikasi politik yang tidak kalah penting adalah risiko homogenisasi gaya komunikasi politik antarkandidat. Karena banyak sistem generative AI dilatih pada korpus data yang serupa dan menghasilkan output berdasarkan pola statistik yang dominan dalam data tersebut, terdapat risiko bahwa konten politik yang dihasilkan berbagai kampanye yang menggunakan alat AI serupa akan menunjukkan kemiripan gaya dan struktur naratif yang berlebihan, mengurangi keragaman wacana politik yang seharusnya menjadi ciri khas demokrasi yang sehat. Risiko homogenisasi ini menjadi pertimbangan penting bagi pengembang alat AI politik untuk menyediakan variasi dan kustomisasi yang memadai, alih-alih algoritma generik yang seragam bagi seluruh penggunanya.

Tantangan otomatisasi komunikasi politik juga mencakup persoalan akuntabilitas ketika sistem AI melakukan kesalahan komunikasi yang berdampak signifikan terhadap persepsi publik terhadap kandidat atau kebijakan tertentu. Berbeda dari kesalahan komunikasi yang dilakukan staf manusia, yang tanggung jawabnya relatif jelas dapat ditelusuri, kesalahan yang dihasilkan sistem AI otomatis menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab, apakah pengembang sistem, operator kampanye yang menerapkannya, ataukah kandidat itu sendiri sebagai penerima manfaat akhir dari komunikasi tersebut. Kekaburan rantai akuntabilitas ini menjadi salah satu tantangan tata kelola paling mendesak dalam otomatisasi komunikasi politik, menuntut kerangka regulasi yang secara eksplisit menetapkan pembagian tanggung jawab antara berbagai aktor yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi komunikasi politik berbasis AI.

E. Risiko dan Etika Penggunaan AI dalam Politik

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam politik memberikan berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas komunikasi, analisis kebijakan, dan partisipasi masyarakat. AI dapat membantu aktor politik mengolah data dalam jumlah besar, memahami kecenderungan opini publik, menyusun strategi komunikasi, serta menghasilkan berbagai bentuk konten politik. Namun, semakin besar kemampuan teknologi tersebut, semakin besar pula risiko yang muncul apabila AI digunakan tanpa batas etika dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Gambar 4.3 Kerangka Risiko dan Etika Penggunaan AI dalam Politik



Risiko AI dalam politik tidak hanya berkaitan dengan kesalahan teknologi, tetapi juga dengan dampaknya terhadap hubungan antara aktor politik dan warga negara. Data masyarakat dapat digunakan untuk membuat profil politik, algoritma dapat menentukan informasi yang diterima pengguna, dan AI generatif dapat menghasilkan konten yang sulit dibedakan dari informasi asli. Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat memahami isu, menilai kandidat, dan mengambil keputusan politik.

Oleh karena itu, etika menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan AI dalam politik. Teknologi perlu dikembangkan dan digunakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, privasi, keamanan, dan penghormatan terhadap otonomi warga. Tujuan penggunaan AI seharusnya bukan sekadar meningkatkan efektivitas politik, tetapi juga memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap mendukung proses demokrasi yang sehat.

1. Risiko Manipulasi dan Persuasi Politik

Salah satu risiko utama AI dalam politik adalah meningkatnya kemampuan untuk melakukan persuasi yang sangat terarah. AI dapat menganalisis data mengenai perilaku pengguna dan membantu mengidentifikasi jenis pesan yang kemungkinan besar menarik perhatian kelompok tertentu. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan untuk membuat konten politik yang disesuaikan dengan karakteristik audiens.

Persuasi pada dasarnya merupakan bagian normal dari kompetisi politik. Kandidat dan partai politik memang berusaha meyakinkan masyarakat melalui program, gagasan, dan argumentasi. Persoalan etis muncul ketika AI digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan psikologis, ketakutan, emosi, atau informasi pribadi seseorang agar pilihan politiknya dapat diarahkan secara tersembunyi.

Risiko manipulasi menjadi semakin besar ketika masyarakat tidak mengetahui bagaimana pesan tersebut dibuat atau mengapa mereka menjadi sasaran suatu konten. Pemilih dapat merasa bahwa mereka memperoleh informasi yang objektif, padahal konten tersebut telah dirancang berdasarkan analisis perilaku mereka. Karena itu, penggunaan AI dalam komunikasi politik perlu membedakan secara jelas antara persuasi yang transparan dan manipulasi yang mengurangi otonomi pemilih.

2. Privasi dan Penyalahgunaan Data Politik

AI membutuhkan data untuk bekerja secara efektif. Dalam politik, data yang digunakan dapat mencakup informasi demografis, preferensi terhadap isu, pola interaksi digital, respons terhadap kampanye, hingga data mengenai perilaku masyarakat. Semakin banyak data yang tersedia, semakin rinci pula profil pemilih yang dapat dibentuk. Persoalannya, masyarakat tidak selalu memahami bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan. Aktivitas yang tampak sederhana seperti memberikan komentar, mengikuti akun, melakukan pencarian, atau berinteraksi dengan konten tertentu dapat menghasilkan jejak digital yang memiliki nilai politik. Jika data tersebut dikumpulkan tanpa transparansi atau digunakan di luar tujuan yang diketahui masyarakat, privasi warga dapat terancam.

Penyalahgunaan data juga dapat menghasilkan dampak politik yang lebih luas. Data pribadi dapat digunakan untuk melakukan segmentasi pemilih, mengidentifikasi kelompok yang rentan terhadap pesan tertentu, atau menyusun strategi komunikasi yang sangat personal. Karena itu, penggunaan AI dalam politik harus menerapkan prinsip minimisasi data, keamanan, persetujuan yang sesuai, pembatasan tujuan penggunaan, serta perlindungan terhadap informasi pribadi.

3. Bias Algoritmik dan Diskriminasi

AI tidak selalu menghasilkan keputusan yang objektif. Sistem AI belajar dari data dan dirancang berdasarkan tujuan tertentu. Apabila data

yang digunakan mengandung ketimpangan atau bias, sistem dapat menghasilkan keluaran yang mereproduksi bahkan memperkuat bias tersebut. Bias juga dapat muncul dari cara kategori dibuat, variabel dipilih, atau tujuan algoritma ditetapkan. Dalam politik, bias algoritmik dapat memengaruhi siapa yang menerima informasi tertentu, bagaimana kelompok masyarakat dikategorikan, atau kelompok mana yang dianggap sebagai target komunikasi. Misalnya, sistem dapat memberikan prioritas berbeda kepada kelompok tertentu berdasarkan pola data masa lalu. Jika tidak diawasi, kondisi tersebut dapat menyebabkan kelompok masyarakat tertentu memperoleh akses yang berbeda terhadap informasi politik.

Risiko tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi algoritma secara berkala. Penggunaan AI perlu melibatkan pemeriksaan terhadap kualitas data, representasi kelompok masyarakat, tingkat kesalahan, dan kemungkinan munculnya perlakuan yang tidak adil. Keputusan penting yang memiliki konsekuensi politik juga sebaiknya tidak sepenuhnya diserahkan kepada sistem otomatis tanpa pengawasan manusia.

4. *Deepfake*, Disinformasi, dan Krisis Kepercayaan

AI generatif memungkinkan pembuatan teks, gambar, suara, dan video yang tampak sangat meyakinkan. Kemampuan tersebut dapat digunakan untuk tujuan positif, tetapi juga dapat digunakan untuk menciptakan *deepfake*. Dalam konteks politik, *deepfake* dapat menampilkan kandidat seolah-olah mengucapkan pernyataan atau melakukan tindakan yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Bahaya *deepfake* tidak hanya terletak pada konten palsu itu sendiri, tetapi juga pada kecepatan penyebarannya. Konten politik yang kontroversial dapat menyebar melalui media sosial sebelum masyarakat atau lembaga terkait memiliki kesempatan untuk melakukan verifikasi. Jika konten tersebut muncul pada periode yang sensitif, seperti menjelang pemilu, dampaknya terhadap persepsi masyarakat dapat menjadi signifikan.

Selain itu, AI dapat menciptakan fenomena yang dikenal sebagai *liar's dividend*, yaitu kondisi ketika masyarakat mulai meragukan konten yang sebenarnya autentik karena mengetahui bahwa teknologi dapat menghasilkan konten palsu. Akibatnya, bukan hanya informasi palsu yang menjadi masalah, tetapi kepercayaan terhadap informasi yang benar juga dapat menurun. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme verifikasi,

pelabelan konten AI, literasi digital, dan tanggung jawab platform untuk menjaga integritas informasi politik.

5. Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan AI

Transparansi merupakan prinsip penting dalam penggunaan AI di bidang politik. Masyarakat perlu mengetahui ketika AI digunakan untuk menghasilkan, mengubah, menargetkan, atau mendistribusikan konten politik. Transparansi membantu masyarakat memahami konteks informasi yang mereka terima dan membuat keputusan yang lebih sadar.

Akuntabilitas juga diperlukan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika penggunaan AI menimbulkan masalah. Kandidat, partai politik, konsultan kampanye, pengembang teknologi, dan platform digital memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan perannya. Penggunaan AI tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban dengan menyatakan bahwa keputusan atau konten sepenuhnya dihasilkan oleh mesin.

Pada akhirnya, etika penggunaan AI dalam politik harus berorientasi pada perlindungan otonomi warga dan kualitas demokrasi. AI seharusnya membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih baik, memperluas partisipasi, dan meningkatkan kualitas komunikasi politik, bukan menciptakan lingkungan politik yang penuh manipulasi dan ketidakpastian. Prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, perlindungan privasi, keamanan data, pengawasan manusia, dan integritas informasi perlu menjadi dasar dalam setiap penggunaan AI dalam proses politik.

BAB V
PARTISIPASI WARGA DI ERA DIGITAL

Era digital telah mengubah cara warga berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Media sosial, platform digital, dan berbagai layanan daring memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, mengawasi pemerintah, menyebarkan informasi, serta terlibat dalam berbagai isu publik dengan lebih cepat dan luas. Partisipasi politik tidak lagi terbatas pada pemilu atau ruang-ruang formal, tetapi juga berlangsung melalui aktivitas digital sehari-hari. Namun, partisipasi digital juga menghadapi tantangan seperti penyebaran disinformasi, polarisasi, kesenjangan akses teknologi, dan rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, partisipasi warga di era digital perlu didukung oleh kemampuan berpikir kritis, etika dalam berkomunikasi, serta akses informasi yang terbuka dan dapat dipercaya. Dengan demikian, teknologi digital dapat menjadi sarana untuk memperkuat keterlibatan warga dan kualitas demokrasi.

A. Konsep Partisipasi Politik Digital

Partisipasi politik digital merupakan bentuk keterlibatan warga negara dalam proses politik dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet. Perkembangan media sosial, platform komunikasi, situs web, aplikasi digital, dan berbagai teknologi interaktif telah memperluas ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, berdiskusi, mengawasi pemerintah, serta terlibat dalam berbagai aktivitas politik. Jika sebelumnya partisipasi politik lebih banyak dilakukan melalui pemilu, organisasi politik, demonstrasi, atau pertemuan tatap muka, kini keterlibatan tersebut juga dapat dilakukan melalui ruang digital.

Partisipasi politik digital tidak hanya berarti menggunakan media sosial untuk membicarakan politik. Konsep ini mencakup berbagai aktivitas yang memungkinkan warga memengaruhi, mengawasi, atau

berinteraksi dengan proses politik melalui teknologi digital. Aktivitas tersebut dapat berupa mengikuti informasi politik, memberikan komentar terhadap isu publik, membuat dan menyebarkan konten politik, mengikuti petisi daring, melakukan advokasi digital, berkomunikasi dengan pejabat publik, hingga menggunakan platform digital untuk mengorganisasi gerakan sosial.

Kehadiran teknologi digital membuat batas antara produsen dan konsumen informasi politik menjadi semakin kabur. Masyarakat tidak hanya menerima informasi yang diproduksi oleh pemerintah, partai politik, atau media, tetapi juga dapat menghasilkan dan menyebarkan informasi sendiri. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi demokrasi untuk menjadi lebih partisipatif, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan berupa disinformasi, polarisasi, kesenjangan akses digital, dan manipulasi opini publik.

Gambar 5.1 Tangga Partisipasi Politik Digital



1. Pengertian dan Karakteristik Partisipasi Politik Digital

Partisipasi politik digital dapat dipahami sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas politik dengan menggunakan teknologi digital sebagai media utama atau pendukung. Teknologi tersebut memungkinkan warga menyampaikan aspirasi, berinteraksi dengan aktor politik, membangun jaringan, mengawasi kebijakan, serta memobilisasi dukungan. Dengan demikian, ruang digital menjadi bagian dari ruang

politik tempat berbagai kepentingan masyarakat dipertemukan dan diperdebatkan.

Salah satu karakteristik utama partisipasi politik digital adalah interaktivitas. Dalam komunikasi politik konvensional, informasi sering kali bergerak secara satu arah dari pemerintah, kandidat, atau media kepada masyarakat. Platform digital memungkinkan masyarakat memberikan respons secara langsung melalui komentar, pesan, unggahan, video, atau bentuk interaksi lainnya. Hubungan antara warga dan aktor politik menjadi lebih terbuka dan memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih cepat.

Karakteristik lainnya adalah kecepatan, jangkauan, fleksibilitas, dan keterhubungan. Sebuah isu politik dapat memperoleh perhatian luas dalam waktu singkat karena dibagikan oleh banyak pengguna. Individu juga dapat berpartisipasi tanpa harus hadir secara fisik dalam suatu kegiatan politik. Kondisi tersebut membuat partisipasi politik menjadi lebih mudah dilakukan, meskipun tingkat kemudahan tersebut tetap dipengaruhi oleh akses internet, kemampuan digital, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Digital

Partisipasi politik digital memiliki bentuk yang sangat beragam. Bentuk yang paling sederhana adalah konsumsi informasi politik, seperti membaca berita, mengikuti akun pemerintah atau kandidat, menonton debat politik, dan mencari informasi mengenai kebijakan publik. Meskipun terlihat pasif, aktivitas tersebut tetap penting karena memberikan dasar pengetahuan yang memungkinkan warga membentuk pendapat dan mengambil keputusan politik.

Bentuk partisipasi berikutnya adalah ekspresi politik digital. Warga dapat menyampaikan pendapat melalui komentar, unggahan, video, infografik, *meme*, atau tulisan mengenai isu publik. Mereka juga dapat memberikan dukungan atau kritik terhadap kandidat, kebijakan, dan lembaga pemerintah. Aktivitas tersebut memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi produsen informasi politik.

Pada tingkat yang lebih aktif, partisipasi dapat berupa mobilisasi dan advokasi digital. Masyarakat dapat membuat petisi daring, membangun komunitas, menggalang dukungan, mengorganisasi kegiatan, melakukan kampanye isu, atau menghubungkan masyarakat yang

memiliki kepentingan yang sama. Teknologi digital memungkinkan mobilisasi berlangsung lebih cepat dan dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh ruang dalam politik dapat memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingannya.

3. Partisipasi Digital dan Hubungan Warga dengan Pemerintah

Teknologi digital juga mengubah hubungan antara warga negara dan pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan platform digital untuk menyampaikan informasi mengenai program, layanan publik, regulasi, dan kegiatan pemerintahan. Pada saat yang sama, masyarakat dapat memberikan masukan, menyampaikan keluhan, melaporkan masalah, dan mengawasi pelaksanaan program melalui kanal digital. Dalam kondisi ideal, komunikasi tersebut dapat menciptakan hubungan yang lebih responsif. Pemerintah memperoleh informasi mengenai kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, sementara warga memperoleh akses yang lebih mudah terhadap informasi publik. Platform digital juga dapat digunakan untuk konsultasi publik, survei masyarakat, diskusi kebijakan, dan berbagai bentuk keterlibatan dalam proses pemerintahan.

Namun, tersedianya platform digital tidak otomatis membuat pemerintahan menjadi lebih partisipatif. Partisipasi hanya akan memiliki dampak substantif apabila aspirasi masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Jika kanal digital hanya digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa menyediakan mekanisme respons atau tindak lanjut, partisipasi dapat berubah menjadi sekadar aktivitas simbolik. Karena itu, kualitas partisipasi lebih penting daripada sekadar jumlah interaksi digital yang dihasilkan.

4. Media Sosial sebagai Ruang Partisipasi Politik

Media sosial menjadi salah satu ruang terpenting bagi partisipasi politik digital karena memungkinkan masyarakat membangun jaringan dan berinteraksi secara langsung. Platform tersebut dapat digunakan untuk mendiskusikan isu politik, membangun komunitas, mengorganisasi kegiatan, menyebarkan informasi, dan memberikan dukungan terhadap suatu gerakan. Informasi yang sebelumnya membutuhkan media massa untuk mendapatkan jangkauan luas kini dapat disebarkan langsung oleh masyarakat. Media sosial juga memberikan kesempatan bagi kelompok yang kurang terwakili dalam ruang politik konvensional untuk

memperoleh perhatian publik. Individu atau komunitas dapat menggunakan konten digital untuk mengangkat isu yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Ketika suatu isu mendapatkan dukungan luas, tekanan publik terhadap pemerintah atau aktor politik dapat meningkat.

Namun, ruang partisipasi digital juga memiliki keterbatasan. Algoritma platform dapat memengaruhi informasi yang terlihat oleh pengguna, sementara *filter bubble* dan *echo chamber* dapat membuat masyarakat lebih sering berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa. Akibatnya, media sosial dapat menjadi ruang partisipasi sekaligus ruang konflik dan polarisasi. Oleh karena itu, partisipasi digital perlu disertai kemampuan untuk memeriksa informasi dan berinteraksi secara kritis dengan pandangan yang berbeda.

5. Tantangan dan Masa Depan Partisipasi Politik Digital

Salah satu tantangan utama partisipasi politik digital adalah kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet, perangkat digital, dan kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi. Jika proses politik semakin bergantung pada ruang digital, kelompok yang memiliki keterbatasan akses dapat semakin sulit berpartisipasi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa digitalisasi politik tidak boleh menghilangkan akses masyarakat yang masih bergantung pada saluran partisipasi konvensional.

Tantangan lainnya adalah kualitas informasi. Partisipasi yang didasarkan pada informasi palsu, manipulasi, atau propaganda dapat menghasilkan keputusan politik yang tidak sehat. Selain itu, penggunaan bot, akun palsu, dan konten yang dibuat dengan AI dapat menciptakan kesan seolah-olah suatu pendapat memperoleh dukungan masyarakat yang besar. Kondisi tersebut dapat mengganggu proses pembentukan opini publik yang sehat.

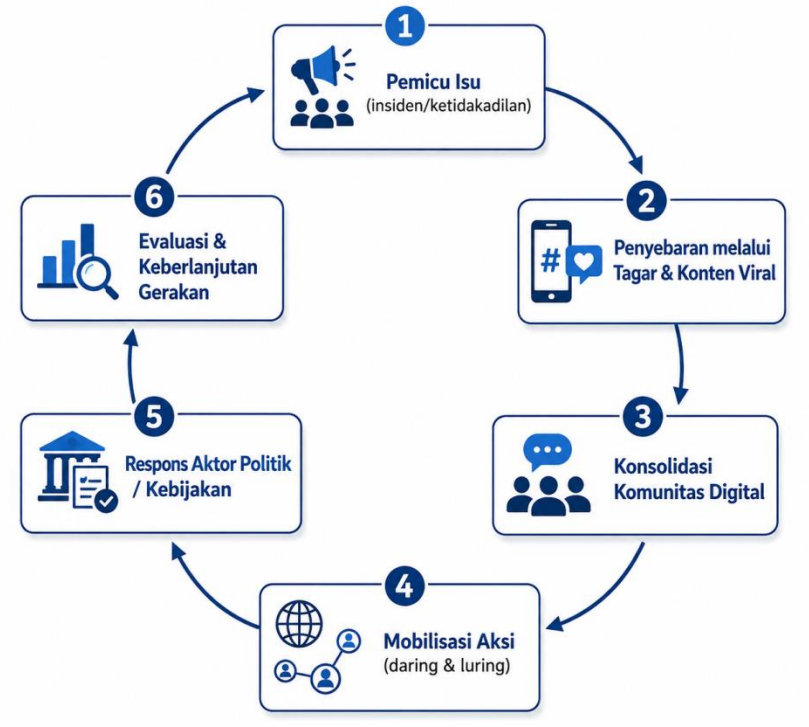
Masa depan partisipasi politik digital sangat bergantung pada kemampuan masyarakat, pemerintah, platform teknologi, dan aktor politik dalam membangun ruang digital yang inklusif dan bertanggung jawab. Partisipasi digital seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya *like*, komentar, unggahan, atau tanda tangan petisi, tetapi dari sejauh mana aktivitas tersebut mampu menghasilkan dialog, pengawasan, representasi, dan pengaruh nyata terhadap proses politik. Dengan demikian, teknologi digital dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperluas suara warga, memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta

meningkatkan kualitas demokrasi, bukan sekadar menjadi ruang baru untuk menyebarkan informasi politik.

B. Aktivisme Digital dan Gerakan Sosial

Aktivisme digital merujuk pada penggunaan teknologi digital sebagai instrumen utama dalam mengorganisasi, memobilisasi, dan mengadvokasi perubahan sosial-politik, baik yang berlangsung sepenuhnya di ruang daring maupun yang mengombinasikan aksi daring dengan aksi luring secara terkoordinasi. Siklus aktivisme digital dan gerakan sosial kontemporer umumnya berlangsung melalui enam tahap yang saling berkaitan, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 5.2 dimulai dari pemicu isu berupa insiden atau ketidakadilan tertentu, penyebaran melalui tagar dan konten viral, konsolidasi komunitas digital di sekitar isu tersebut, mobilisasi aksi baik daring maupun luring, respons dari aktor politik atau perubahan kebijakan, hingga evaluasi dan keberlanjutan gerakan tersebut dalam jangka panjang.

Gambar 5.2 Siklus Aktivisme Digital dan Gerakan Sosial



Konteks Indonesia menghadirkan contoh konkret siklus aktivisme digital ini melalui gerakan #ReformasiDikorupsi, yang menunjukkan bagaimana keterlibatan warga digital melalui media sosial dapat memobilisasi dukungan kolektif berskala besar dalam waktu yang sangat singkat, tanpa memerlukan struktur organisasi formal sebagaimana lazim pada gerakan sosial era predigital. Kapasitas mobilisasi cepat semacam ini menjadi salah satu kontribusi paling signifikan aktivisme digital terhadap demokrasi, karena memungkinkan warga menyalurkan tuntutan politik secara langsung kepada pembuat kebijakan tanpa melalui perantara institusi formal yang sering kali dianggap lamban merespons aspirasi publik.

Meskipun demikian, keberlanjutan dampak aktivisme digital terhadap perubahan kebijakan substantif tetap menjadi pertanyaan terbuka yang memerlukan kajian kritis. Sejumlah pengamat mencatat fenomena "aktivisme klik" (*clicktivism* atau *slacktivism*), yaitu kecenderungan partisipasi digital yang dangkal dan berumur pendek, di mana warga merasa telah berkontribusi terhadap perubahan sosial hanya dengan membagikan konten atau menandatangani petisi daring, tanpa disertai komitmen tindak lanjut yang lebih substantif. Kritik ini penting sebagai penyeimbang terhadap optimisme berlebihan mengenai kapasitas transformatif aktivisme digital, meskipun bukti empiris menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, aktivisme digital justru berfungsi sebagai titik masuk yang kemudian mendorong keterlibatan lebih mendalam dalam bentuk partisipasi konvensional, alih-alih menggantikannya sepenuhnya.

Gerakan sosial digital juga menunjukkan karakteristik organisasi yang berbeda secara struktural dari gerakan sosial era predigital. Alih-alih bertumpu pada kepemimpinan terpusat dan struktur organisasi hierarkis, gerakan sosial digital kontemporer cenderung bersifat terdesentralisasi dan leaderless, dengan koordinasi yang muncul secara organik melalui interaksi jaringan digital antarpartisipan. Karakteristik terdesentralisasi ini memiliki keunggulan berupa ketahanan terhadap represi yang menyasar pemimpin tertentu, namun juga kelemahan berupa kesulitan dalam merumuskan tuntutan yang koheren dan bernegosiasi secara terpusat dengan otoritas politik, sebuah dilema struktural yang terus menjadi perdebatan dalam kajian gerakan sosial kontemporer.

Perbandingan aktivisme digital antarnegara menunjukkan bahwa efektivitas dan bentuk aktivisme sangat dipengaruhi konteks kebebasan sipil masing-masing negara. Di negara-negara dengan ruang sipil yang

relatif terbuka, aktivisme digital cenderung berkembang secara terbuka dan terhubung langsung dengan aksi luring berskala besar. Sebaliknya, di negara-negara dengan pembatasan kebebasan sipil yang lebih ketat, aktivisme digital sering kali harus beroperasi secara lebih hati-hati, memanfaatkan enkripsi dan anonimitas untuk melindungi partisipan dari represi negara, sebagaimana disinggung dalam kajian mengenai adaptasi masyarakat sipil Asia Timur yang menggunakan platform petisi publik sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan aplikasi terenkripsi yang dapat menimbulkan kecurigaan otoritas.

Gerakan sosial digital juga semakin memanfaatkan strategi transmedia, yaitu penyebaran narasi dan tuntutan gerakan melalui berbagai platform digital secara simultan dengan format konten yang disesuaikan karakteristik masing-masing platform. Sebuah gerakan sosial kontemporer dapat menyebarkan pesan inti melalui utas panjang di platform berbasis teks, video pendek yang emosional di platform video, dan infografis ringkas di platform visual, memaksimalkan jangkauan lintas segmen audiens yang memiliki preferensi konsumsi media berbeda-beda. Strategi transmedia semacam ini menegaskan bahwa aktivisme digital kontemporer menuntut kompetensi komunikasi multiplatform yang jauh lebih kompleks dibandingkan aktivisme era predigital yang umumnya mengandalkan satu atau dua saluran komunikasi utama saja.

Studi kasus gerakan #ReformasiDikorupsi di Indonesia juga menawarkan pelajaran penting mengenai batas kapasitas aktivisme digital dalam menghasilkan perubahan kebijakan yang berkelanjutan. Meskipun gerakan tersebut berhasil memobilisasi dukungan publik berskala besar dalam waktu singkat dan memperoleh perhatian media yang signifikan, evaluasi jangka panjang terhadap tuntutan kebijakan yang diajukan menunjukkan hasil yang beragam, dengan sebagian tuntutan berhasil memengaruhi wacana publik namun tidak sepenuhnya terwujud dalam perubahan regulasi konkret. Pembelajaran dari kasus ini menegaskan bahwa kapasitas mobilisasi digital yang cepat tidak secara otomatis berkorelasi dengan efektivitas kebijakan jangka panjang, sebuah nuansa penting yang perlu dipertimbangkan dalam menilai keberhasilan aktivisme digital secara keseluruhan.

C. Petisi Online dan Demokrasi Partisipatif

Petisi daring merupakan salah satu instrumen partisipasi politik digital yang paling banyak diadopsi warga di berbagai negara, memungkinkan individu mengumpulkan dukungan publik terhadap suatu isu atau tuntutan kebijakan tanpa memerlukan infrastruktur organisasi formal. Platform petisi daring seperti Change.org dan berbagai alternatif lokalnya telah diadopsi secara luas oleh aktivis di kawasan Asia Timur, memungkinkan mereka membangun koalisi besar di sekitar isu-isu kunci, meningkatkan kesadaran publik, dan menekan pembuat kebijakan, bahkan dalam lingkungan politik yang relatif restriktif sekalipun. Meskipun platform semacam ini tidak menawarkan tingkat keamanan yang setara dengan aplikasi terenkripsi, aksesibilitas dan sifat publiknya menjadikannya berharga bagi kampanye akar rumput yang menyasar keterlibatan luas.

Petisi daring berkontribusi pada apa yang oleh sejumlah teoretikus disebut sebagai demokrasi partisipatif digital, yaitu model demokrasi yang memperluas keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik melampaui mekanisme elektoral periodik. Berbagai platform partisipasi digital, seperti LiquidFeedback dan Consul, dirancang khusus untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif, menurunkan biaya partisipasi politik sehingga memungkinkan keterlibatan individu yang lebih luas, sekaligus memberikan akses terhadap proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kesetaraan politik antarwarga. Perkembangan platform semacam ini merepresentasikan upaya konkret mewujudkan visi demokrasi terbuka.

Meskipun demikian, efektivitas petisi daring dalam menghasilkan perubahan kebijakan substantif tetap bervariasi tergantung konteks kelembagaan masing-masing negara. Di negara-negara dengan mekanisme formal yang mewajibkan pemerintah merespons petisi yang mencapai ambang dukungan tertentu, petisi daring memiliki jalur konkret menuju pengaruh kebijakan. Namun di negara-negara tanpa mekanisme formal semacam ini, petisi daring lebih berfungsi sebagai instrumen membangun tekanan opini publik dan kesadaran isu, ketimbang jalur langsung menuju perubahan kebijakan. Perbedaan efektivitas kelembagaan ini menegaskan pentingnya desain institusional yang mendukung, bukan sekadar ketersediaan teknologi partisipasi semata.

Selain petisi berbasis platform komersial seperti Change.org, sejumlah pemerintah mulai mengembangkan platform petisi resmi yang terintegrasi dengan mekanisme respons kebijakan formal. Platform semacam ini umumnya menetapkan ambang jumlah tanda tangan tertentu yang mewajibkan pemerintah memberikan respons resmi, menciptakan jalur partisipasi yang lebih terstruktur dan dapat diprediksi dibandingkan petisi pada platform komersial yang tidak memiliki kewajiban respons formal. Meskipun demikian, efektivitas platform petisi resmi pemerintah sangat bergantung pada komitmen politik untuk benar-benar menindaklanjuti petisi yang memenuhi ambang tersebut, bukan sekadar memberikan respons administratif tanpa tindak lanjut substantif terhadap tuntutan yang diajukan.

Petisi daring juga berperan sebagai instrumen pengukuran opini publik yang informal namun berharga bagi pembuat kebijakan, meskipun perlu digunakan dengan kehati-hatian metodologis. Berbeda dari survei opini publik yang dirancang untuk representativitas statistik, jumlah penandatangan petisi mencerminkan intensitas preferensi kelompok tertentu yang cukup peduli untuk bertindak, ketimbang gambaran representatif preferensi keseluruhan populasi. Kesalahpahaman mengenai sifat representasi petisi daring ini dapat menyesatkan pembuat kebijakan apabila mereka keliru menafsirkan dukungan petisi sebagai cerminan opini mayoritas warga, padahal petisi cenderung lebih mencerminkan intensitas preferensi kelompok minoritas yang termobilisasi secara efektif melalui jaringan digital.

Perbandingan model demokrasi partisipatif digital antarnegara menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi platform partisipasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan warga terhadap institusi pemerintah yang mengoperasikannya. Di negara dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah, platform partisipasi digital resmi cenderung memperoleh tingkat adopsi dan keterlibatan warga yang lebih tinggi dibandingkan di negara dengan tingkat kepercayaan publik yang rendah, di mana warga cenderung lebih skeptis terhadap motif sesungguhnya di balik platform partisipasi yang diinisiasi pemerintah. Korelasi antara kepercayaan institusional dan efektivitas platform partisipasi ini menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi partisipatif digital tidak semata bergantung pada kecanggihan teknologi platform, melainkan juga pada modal sosial dan kepercayaan yang telah terbangun sebelumnya antara warga dan institusi pemerintahan.

D. Literasi Digital sebagai Prasyarat Partisipasi

Literasi digital merupakan salah satu prasyarat penting bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan politik di era digital. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer, tetapi juga mencakup kemampuan menemukan, memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan menghasilkan informasi melalui teknologi digital. Dalam konteks politik, kemampuan tersebut menjadi semakin penting karena sebagian besar informasi mengenai kandidat, kebijakan, isu publik, dan peristiwa politik kini beredar melalui ruang digital.

Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik memiliki kemampuan lebih besar untuk membedakan informasi yang dapat dipercaya dari informasi yang menyesatkan. Mereka tidak hanya menerima informasi berdasarkan judul, popularitas, atau jumlah interaksi, tetapi mampu memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan mempertimbangkan konteks. Kemampuan tersebut menjadi dasar bagi pengambilan keputusan politik yang rasional dan bertanggung jawab. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat membuat partisipasi politik lebih mudah dipengaruhi oleh disinformasi, propaganda, manipulasi algoritmik, dan konten yang sengaja dibuat untuk membangkitkan emosi. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi politik melalui teknologi digital perlu berjalan bersamaan dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengevaluasi lingkungan informasi digital.

1. Memahami dan Mengevaluasi Informasi Politik

Kemampuan memahami informasi merupakan dasar pertama literasi digital. Masyarakat perlu mampu membaca dan memahami isi berita, pernyataan politik, data, infografik, video, maupun berbagai bentuk konten digital lainnya. Pemahaman tidak hanya berarti mengetahui isi informasi, tetapi juga memahami konteks, tujuan, dan pihak yang menyampaikan informasi tersebut.

Evaluasi informasi menjadi semakin penting karena ruang digital memungkinkan siapa saja menghasilkan dan menyebarkan konten. Informasi yang terlihat profesional belum tentu benar, sedangkan informasi yang sederhana belum tentu tidak kredibel. Warga perlu mempertanyakan sumber informasi, waktu publikasi, bukti yang

digunakan, serta kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik suatu pesan politik.

Kemampuan mengevaluasi informasi membantu masyarakat menghindari keputusan politik berdasarkan informasi yang keliru. Sebelum membagikan sebuah berita atau konten politik, pengguna dapat memeriksa sumber lain dan membandingkan informasi dari beberapa perspektif. Kebiasaan tersebut membantu membangun budaya politik yang lebih kritis dan mengurangi penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Literasi Digital dan Kemampuan Berpikir Kritis

Literasi digital memiliki hubungan erat dengan kemampuan berpikir kritis. Di lingkungan digital, masyarakat menghadapi informasi dalam jumlah sangat besar dan terus berubah. Tidak semua informasi memiliki kualitas yang sama, sehingga warga perlu memiliki kemampuan untuk menentukan mana informasi yang relevan, valid, dan dapat dipercaya.

Berpikir kritis berarti tidak menerima suatu klaim hanya karena klaim tersebut sesuai dengan pandangan pribadi. Dalam politik, seseorang perlu bersedia mempertanyakan informasi yang mendukung kelompoknya sendiri maupun informasi yang menyerang kelompok politik lain. Sikap tersebut penting karena algoritma platform dapat membuat pengguna lebih sering melihat konten yang sesuai dengan preferensi sebelumnya.

Kemampuan berpikir kritis juga membantu masyarakat mengenali teknik persuasi politik. Judul yang provokatif, gambar yang emosional, penggunaan data secara selektif, dan narasi yang membenturkan kelompok masyarakat merupakan beberapa bentuk komunikasi yang dapat memengaruhi persepsi. Dengan literasi digital yang baik, warga dapat membedakan antara argumentasi politik yang berbasis informasi dan pesan yang sengaja dirancang untuk memanipulasi emosi.

3. Literasi Digital untuk Menghadapi Disinformasi dan *Deepfake*

Perkembangan AI generatif membuat kemampuan mengenali informasi palsu semakin penting. Teknologi dapat digunakan untuk menghasilkan teks, gambar, suara, dan video yang terlihat meyakinkan. Dalam politik, konten semacam ini dapat digunakan untuk menciptakan kesan bahwa seorang kandidat mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Literasi digital membantu masyarakat memahami bahwa tampilan sebuah konten bukan bukti bahwa konten tersebut autentik. Warga perlu memeriksa sumber asli, membandingkan dengan pemberitaan lain, melihat tanggal dan konteks publikasi, serta mencari informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk konten visual atau video yang mencurigakan, masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap kemungkinan manipulasi digital.

Kemampuan tersebut sangat penting terutama menjelang pemilu ketika arus informasi politik meningkat secara signifikan. Warga yang memiliki literasi digital dapat menjadi penyaring informasi di lingkungannya sendiri. Mereka tidak hanya menghindari penyebaran informasi palsu, tetapi juga dapat membantu keluarga, teman, dan komunitas memahami pentingnya verifikasi sebelum membagikan konten politik.

4. Literasi Digital dan Partisipasi Politik yang Bertanggung Jawab

Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menerima informasi, tetapi juga kemampuan menghasilkan dan menyebarkan konten secara bertanggung jawab. Ketika warga membuat unggahan politik, memberikan komentar, atau membagikan informasi, mereka ikut membentuk ruang publik digital. Karena itu, kebebasan berekspresi perlu disertai kesadaran terhadap konsekuensi dari informasi yang disebarkan.

Partisipasi yang bertanggung jawab berarti menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang memadai, menghormati perbedaan pandangan, dan menghindari penyebaran informasi yang belum diverifikasi. Masyarakat juga perlu memahami batas antara kritik politik yang sah dan serangan terhadap individu atau kelompok. Ruang digital yang sehat membutuhkan pengguna yang mampu berdiskusi tanpa menjadikan perbedaan politik sebagai alasan untuk melakukan penghinaan atau permusuhan. Dengan demikian, literasi digital dapat meningkatkan kualitas partisipasi, bukan hanya kuantitasnya. Banyaknya komentar, unggahan, atau aktivitas di media sosial belum tentu menunjukkan partisipasi politik yang berkualitas. Partisipasi menjadi lebih bermakna ketika masyarakat mampu menyampaikan aspirasi secara argumentatif, memahami persoalan yang dibahas, dan terlibat dalam diskusi yang konstruktif.

5. Literasi Digital sebagai Fondasi Demokrasi Digital

Literasi digital pada akhirnya merupakan bagian penting dari kemampuan warga negara dalam menjalankan demokrasi di lingkungan digital. Demokrasi membutuhkan warga yang mampu memperoleh informasi, menilai pilihan politik, menyampaikan pendapat, dan mengambil keputusan secara mandiri. Ketika sebagian besar proses tersebut berlangsung melalui teknologi digital, kemampuan menggunakan dan memahami teknologi menjadi semakin penting.

Literasi digital juga dapat membantu mengurangi ketimpangan partisipasi. Masyarakat yang memahami cara menggunakan platform digital memiliki peluang lebih besar untuk mengakses informasi publik, berkomunikasi dengan lembaga pemerintah, mengikuti diskusi politik, dan melakukan advokasi. Sebaliknya, keterbatasan literasi dapat membuat seseorang lebih mudah menjadi konsumen pasif informasi dan lebih rentan terhadap manipulasi.

Oleh karena itu, literasi digital harus dipandang sebagai prasyarat substantif bagi partisipasi politik digital. Masyarakat tidak cukup hanya memiliki akses terhadap internet, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk memahami informasi, mengevaluasi sumber, mengenali manipulasi, melindungi data pribadi, serta berkomunikasi secara bertanggung jawab. Dengan literasi digital yang kuat, teknologi dapat digunakan untuk memperluas partisipasi warga sekaligus memperkuat demokrasi yang kritis, inklusif, dan berorientasi pada informasi yang dapat dipercaya.

E. Tantangan Inklusivitas dalam Demokrasi Digital

Meskipun demokrasi digital menjanjikan perluasan partisipasi politik, realitas empiris menunjukkan bahwa manfaat tersebut tidak terdistribusi secara merata di seluruh lapisan masyarakat, menciptakan tantangan inklusivitas yang serius bagi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Kesenjangan digital (*digital divide*) termanifestasi secara konkret dalam konteks partisipasi politik, di mana kelompok masyarakat dengan akses infrastruktur terbatas, literasi digital rendah, atau berada di wilayah terpencil secara sistematis kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan publik yang semakin bergantung pada saluran digital.

Tantangan inklusivitas juga bersifat multidimensional, melampaui sekadar akses infrastruktur semata. Dimensi generasi menunjukkan bahwa

warga lanjut usia cenderung kurang terwakili dalam partisipasi politik digital dibandingkan generasi muda, meskipun kelompok ini tetap memiliki kepentingan politik yang signifikan dan hak partisipasi yang setara. Dimensi gender turut relevan, dengan kajian Wahyuni dan Adnan (2024) menemukan bahwa perempuan menghadapi hambatan tambahan dalam partisipasi politik digital, termasuk risiko pelecehan daring yang lebih tinggi ketika terlibat aktif dalam wacana politik publik, sebuah kondisi yang dapat menciptakan efek dingin yang secara tidak proporsional membungkam suara perempuan dalam ruang publik digital.

Dimensi disabilitas turut menjadi tantangan inklusivitas yang sering luput dari perhatian dalam wacana demokrasi digital. Banyak platform partisipasi digital dan situs pemerintah belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk kompatibilitas dengan pembaca layar bagi tunanetra atau antarmuka yang ramah bagi pengguna dengan keterbatasan motorik. Kegagalan mengintegrasikan prinsip desain inklusif sejak tahap perancangan platform partisipasi digital berisiko mereproduksi eksklusi yang sebelumnya dialami penyandang disabilitas dalam ranah politik konvensional, alih-alih menghadirkan solusi sebagaimana dijanjikan retorika demokratisasi teknologi digital.

Merespons berbagai tantangan inklusivitas tersebut, sejumlah kerangka kebijakan mengusulkan pendekatan desain partisipasi digital yang universal (*universal design*), yang mempertimbangkan keragaman kebutuhan pengguna sejak tahap perancangan platform, ketimbang menambahkan fitur aksesibilitas sebagai penyesuaian belakangan. Pendekatan ini perlu dikombinasikan dengan program literasi digital yang secara khusus menyasar kelompok rentan, subsidi infrastruktur bagi wilayah dengan akses terbatas, dan mekanisme partisipasi hibrida yang tetap menyediakan jalur luring bagi warga yang tidak dapat atau tidak nyaman berpartisipasi secara digital.

Tantangan inklusivitas dalam demokrasi digital juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan, karena biaya akses internet dan perangkat digital masih menjadi hambatan substansial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kesenjangan ekonomi digital ini menciptakan risiko bahwa demokrasi digital, alih-alih memperluas partisipasi politik secara inklusif, justru mereproduksi ketimpangan sosial-ekonomi yang telah ada dalam bentuk baru berupa ketimpangan akses terhadap ruang publik digital,

sehingga kelompok yang secara ekonomi sudah terpinggirkan berisiko juga terpinggirkan secara politik dalam ekosistem demokrasi yang semakin bergantung pada partisipasi digital.

Merespons tantangan inklusivitas yang multidimensional ini, sejumlah negara mengembangkan kebijakan subsidi akses internet dan perangkat digital bagi kelompok masyarakat rentan sebagai bagian dari strategi memperkuat inklusivitas demokrasi digital, sekaligus mengintegrasikan pendidikan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal sejak usia dini. Kebijakan semacam ini mencerminkan pengakuan bahwa akses terhadap infrastruktur digital dan kompetensi literasi digital bukan sekadar persoalan teknis, melainkan telah menjadi prasyarat hak politik dasar warga negara dalam demokrasi kontemporer, sejalan dengan semangat kesetaraan suara yang menjadi salah satu pilar utama teori demokrasi Dahl (1998).

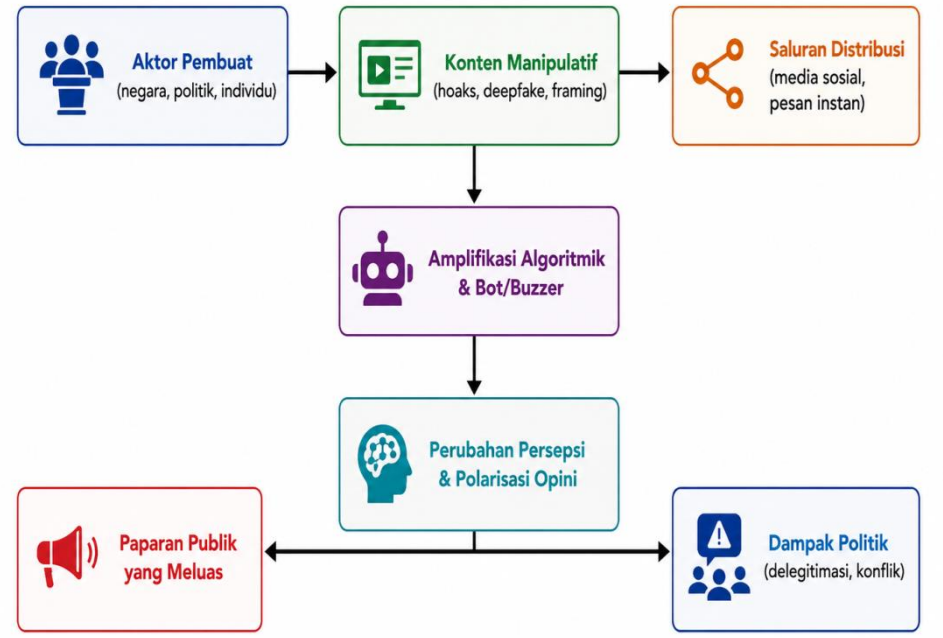
BAB VI
DISINFORMASI, HOAKS, DAN MANIPULASI INFORMASI POLITIK

Perkembangan media digital telah mempercepat penyebaran informasi politik kepada masyarakat. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti oleh meningkatnya disinformasi, hoaks, dan manipulasi informasi yang dapat memengaruhi persepsi dan perilaku politik warga. Informasi yang salah atau sengaja dipelintir dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial, terutama ketika didukung oleh algoritma yang memprioritaskan konten menarik dan memiliki tingkat interaksi tinggi. Dalam konteks demokrasi digital, disinformasi dan manipulasi informasi dapat mengganggu kualitas diskusi publik, memperkuat polarisasi, serta memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Karena itu, kemampuan memeriksa sumber, memahami konteks informasi, dan meningkatkan literasi digital menjadi penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan politik berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Ekosistem Penyebaran Disinformasi

Disinformasi merupakan informasi yang sengaja dibuat, dimanipulasi, atau disebarkan dengan tujuan tertentu, meskipun informasi tersebut diketahui atau seharusnya diketahui tidak benar. Dalam politik digital, disinformasi tidak muncul dan menyebar secara terpisah, tetapi berkembang dalam sebuah ekosistem yang melibatkan banyak aktor, teknologi, platform, serta perilaku pengguna. Ekosistem tersebut membuat sebuah informasi dapat diproduksi, diperkuat, disebarkan, dan diterima oleh masyarakat dalam waktu yang sangat cepat.

Gambar 6.1 Ekosistem Penyebaran Disinformasi Politik



Perkembangan media sosial, aplikasi percakapan, mesin pencari, platform berbagi video, serta teknologi AI generatif semakin memperluas kemampuan produksi dan distribusi informasi. Seseorang dapat membuat konten politik dalam waktu singkat dan menyebarkannya kepada ribuan atau bahkan jutaan pengguna. Ketika konten tersebut mendapatkan banyak interaksi, algoritma platform dapat memberikan jangkauan yang lebih luas sehingga proses penyebarannya semakin cepat. Karena itu, disinformasi tidak cukup dipahami sebagai persoalan mengenai informasi palsu semata. Persoalan yang lebih luas adalah bagaimana informasi tersebut diproduksi, siapa yang menyebarkannya, teknologi apa yang digunakan, mengapa masyarakat mempercayainya, dan bagaimana sistem digital memperkuat distribusinya. Memahami keseluruhan ekosistem tersebut penting untuk melihat dampak disinformasi terhadap pembentukan opini publik dan kualitas demokrasi.

1. Produksi dan Sumber Disinformasi

Tahap awal dalam ekosistem disinformasi adalah produksi informasi yang menyesatkan. Konten dapat dibuat oleh individu, kelompok politik, jaringan akun terkoordinasi, maupun aktor lain yang memiliki kepentingan tertentu. Bentuknya sangat beragam, mulai dari teks yang dipelintir, gambar yang keluar dari konteks, video yang diedit secara selektif, hingga konten sintetis yang dibuat menggunakan AI.

Motivasi di balik produksi disinformasi juga beragam. Dalam konteks politik, disinformasi dapat digunakan untuk menyerang reputasi kandidat, membangun citra tertentu, memengaruhi persepsi terhadap suatu kebijakan, atau menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi. Disinformasi juga dapat dibuat untuk mendapatkan perhatian dan interaksi karena konten yang kontroversial atau emosional sering kali lebih mudah menarik perhatian pengguna.

Teknologi digital membuat produksi konten semacam itu menjadi semakin mudah. AI generatif dapat membantu membuat teks, gambar, audio, dan video dengan cepat, sementara berbagai aplikasi pengeditan memungkinkan konten dimodifikasi dengan tingkat kemiripan yang semakin tinggi. Akibatnya, masyarakat menghadapi tantangan yang lebih besar dalam membedakan konten autentik dari konten yang telah dimanipulasi.

2. Peran Platform Digital dalam Penyebaran Disinformasi

Platform digital merupakan bagian penting dari ekosistem disinformasi karena menyediakan infrastruktur yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat. Media sosial, aplikasi percakapan, platform video, dan berbagai kanal digital lainnya memungkinkan pengguna membagikan konten kepada jaringan yang luas. Sebuah informasi tidak perlu melewati proses penyuntingan seperti dalam media konvensional sebelum dapat dikonsumsi publik.

Algoritma juga berperan dalam menentukan konten yang memperoleh visibilitas lebih besar. Konten yang menghasilkan banyak komentar, reaksi, atau pembagian dapat dianggap menarik bagi pengguna lain dan memperoleh distribusi yang lebih luas. Dalam kondisi tertentu, informasi yang kontroversial atau emosional dapat memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan informasi yang membutuhkan penjelasan panjang dan kompleks. Namun, platform digital bukan satu-satunya penyebab penyebaran disinformasi. Algoritma bekerja bersama perilaku

pengguna. Pengguna memiliki kecenderungan membagikan informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka atau yang dianggap menarik bagi kelompoknya. Interaksi antara sistem algoritmik dan perilaku manusia inilah yang membuat penyebaran disinformasi dapat berlangsung secara cepat dan berulang.

3. Peran Pengguna dan Jaringan Sosial

Pengguna merupakan aktor penting dalam ekosistem disinformasi karena mereka berfungsi sebagai penerima sekaligus penyebar informasi. Ketika seseorang menerima informasi yang dianggap penting atau mengejutkan, mereka dapat langsung meneruskannya kepada orang lain tanpa melakukan verifikasi. Proses tersebut dapat membuat informasi yang awalnya berasal dari sumber yang tidak jelas menjadi terlihat lebih kredibel karena telah dibagikan oleh orang yang dikenal.

Jaringan sosial juga memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Informasi yang diterima dari keluarga, teman, komunitas, atau tokoh yang dipercaya cenderung lebih mudah diterima dibandingkan informasi dari sumber yang tidak dikenal. Kondisi ini dapat membuat disinformasi menyebar melalui hubungan sosial yang sebenarnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi.

Fenomena *echo chamber* dan *filter bubble* dapat memperkuat kondisi tersebut. Ketika pengguna lebih sering berinteraksi dengan orang atau konten yang memiliki pandangan serupa, informasi yang mendukung keyakinan kelompok dapat berulang kali muncul. Informasi yang bertentangan cenderung ditolak atau dianggap sebagai serangan. Akibatnya, disinformasi dapat berkembang menjadi keyakinan bersama dalam kelompok tertentu meskipun tidak didukung oleh bukti yang memadai.

4. Amplifikasi, Viralitas, dan Manipulasi Informasi

Salah satu karakteristik utama ekosistem digital adalah kemampuan memperbesar jangkauan sebuah informasi. Proses ini disebut amplifikasi, yaitu ketika sebuah konten memperoleh distribusi yang jauh lebih besar daripada jangkauan awalnya. Amplifikasi dapat terjadi melalui pembagian berulang oleh pengguna, rekomendasi algoritmik, akun dengan banyak pengikut, maupun jaringan akun yang sengaja digunakan untuk meningkatkan visibilitas suatu pesan.

Dalam konteks politik, amplifikasi dapat digunakan untuk membentuk persepsi mengenai seberapa besar dukungan masyarakat

terhadap suatu isu atau kandidat. Penggunaan akun palsu, bot, atau jaringan akun terkoordinasi dapat menciptakan kesan bahwa sebuah pandangan mendapatkan dukungan yang luas. Padahal, tingginya aktivitas digital belum tentu mencerminkan dukungan masyarakat yang sebenarnya.

Viralitas juga dapat mengubah cara masyarakat menilai suatu informasi. Konten yang sering muncul dan mendapatkan banyak interaksi dapat dianggap lebih penting atau lebih benar meskipun popularitas tidak sama dengan kebenaran. Karena itu, jumlah *like*, komentar, *share*, atau jumlah penayangan tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kredibilitas sebuah informasi politik.

5. Dampak Disinformasi terhadap Demokrasi

Penyebaran disinformasi dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan politik masyarakat. Warga yang mengambil keputusan berdasarkan informasi palsu atau menyesatkan dapat memiliki persepsi yang keliru mengenai kandidat, kebijakan, maupun kondisi sosial. Dalam konteks pemilu, kondisi tersebut dapat memengaruhi pilihan politik dan kualitas kompetisi antaraktor politik. Disinformasi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Ketika masyarakat terus-menerus menerima informasi yang mempertanyakan kredibilitas pemerintah, lembaga pemilu, media, atau institusi publik tanpa dasar yang kuat, tingkat kepercayaan dapat menurun. Masalah menjadi semakin serius ketika masyarakat tidak lagi memiliki kesepakatan mengenai sumber informasi mana yang dapat dipercaya.

Oleh karena itu, menghadapi ekosistem disinformasi membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan kebiasaan melakukan verifikasi, sementara platform digital perlu memperkuat mekanisme transparansi dan penanganan konten manipulatif. Media juga memiliki peran penting dalam menyediakan pemeriksaan fakta dan informasi yang berkualitas. Pada akhirnya, demokrasi digital membutuhkan ekosistem informasi yang sehat, karena kebebasan berpartisipasi akan kehilangan maknanya apabila keputusan politik masyarakat dibentuk oleh informasi yang sengaja dipalsukan atau dimanipulasi.

B. Hoaks Politik dan Polarisasi Publik

Hoaks politik merupakan informasi palsu, menyesatkan, atau dipelintir yang berkaitan dengan kandidat, partai politik, kebijakan, lembaga negara, maupun isu publik. Dalam lingkungan digital, hoaks politik dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial, aplikasi percakapan, platform video, dan berbagai kanal komunikasi daring. Kecepatan tersebut membuat masyarakat dapat menerima dan menyebarkan informasi sebelum memiliki kesempatan untuk memeriksa kebenarannya.

Hoaks politik menjadi persoalan yang lebih serius karena tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi yang salah, tetapi sering kali berkaitan dengan upaya membentuk persepsi masyarakat. Sebuah informasi dapat dibuat untuk meningkatkan citra kandidat tertentu, merusak reputasi lawan, membangun ketakutan, atau memperkuat keyakinan kelompok tertentu. Ketika informasi tersebut terus berulang dalam lingkungan digital, masyarakat dapat menganggapnya sebagai sesuatu yang benar meskipun tidak memiliki dasar yang kuat. Hubungan antara hoaks politik dan polarisasi publik muncul ketika informasi palsu digunakan untuk memperkuat perbedaan antara kelompok politik. Hoaks dapat menggambarkan kelompok lain sebagai ancaman, tidak bermoral, atau tidak layak dipercaya. Akibatnya, perbedaan pilihan politik tidak lagi sekadar perbedaan pendapat mengenai kebijakan, tetapi dapat berkembang menjadi permusuhan antarkelompok.

1. Karakteristik dan Bentuk Hoaks Politik

Hoaks politik dapat muncul dalam berbagai bentuk. Informasi palsu dapat berupa berita yang sepenuhnya dibuat-buat, kutipan tokoh yang tidak pernah disampaikan, foto yang digunakan di luar konteks, statistik yang dimanipulasi, hingga video yang telah diedit sehingga memberikan kesan berbeda dari peristiwa sebenarnya. Perkembangan AI juga memungkinkan munculnya gambar, suara, dan video sintetis yang semakin sulit dibedakan dari konten asli.

Hoaks tidak selalu berbentuk informasi yang sepenuhnya salah. Sebagian hoaks menggunakan fakta yang benar tetapi ditempatkan dalam konteks yang keliru atau dipadukan dengan informasi palsu. Teknik tersebut membuat informasi terlihat lebih meyakinkan karena mengandung unsur fakta. Masyarakat yang hanya membaca judul atau

melihat potongan konten tanpa memeriksa konteks dapat dengan mudah memperoleh kesimpulan yang salah.

Dalam politik, hoaks biasanya memiliki daya tarik yang kuat ketika berkaitan dengan isu sensitif, identitas kelompok, kandidat, pemilu, atau peristiwa yang menimbulkan emosi. Informasi yang membangkitkan kemarahan, ketakutan, kebencian, atau rasa bangga terhadap kelompok sendiri cenderung lebih mudah mendapatkan perhatian. Kondisi tersebut membuat hoaks politik memiliki potensi penyebaran yang lebih besar dibandingkan informasi yang bersifat netral.

2. Mekanisme Penyebaran Hoaks Politik

Media sosial dan aplikasi percakapan menjadi saluran penting dalam penyebaran hoaks politik. Sebuah konten dapat dibagikan secara berulang oleh pengguna dan menjangkau jaringan yang sangat luas dalam waktu singkat. Informasi yang awalnya berasal dari satu akun dapat muncul kembali melalui berbagai akun lain sehingga terlihat seperti berasal dari banyak sumber yang berbeda.

Algoritma platform juga dapat memengaruhi jangkauan suatu konten. Konten yang mendapatkan banyak interaksi dapat memperoleh visibilitas lebih tinggi. Jika hoaks dirancang dengan judul yang provokatif atau narasi yang emosional, konten tersebut dapat memperoleh perhatian besar sebelum kebenarannya diperiksa. Akibatnya, koreksi yang muncul kemudian sering kali tertinggal dibandingkan kecepatan penyebaran informasi palsu.

Jaringan sosial juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan terhadap hoaks. Informasi yang diterima dari orang yang dikenal atau kelompok yang dipercaya dapat dianggap lebih kredibel. Ketika anggota suatu kelompok politik saling membagikan informasi yang mendukung pandangan mereka, hoaks dapat memperoleh legitimasi sosial meskipun tidak memiliki bukti yang kuat. Proses tersebut memperlihatkan bahwa penyebaran hoaks bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku dan hubungan sosial masyarakat.

3. Hoaks sebagai Pemicu Polarisasi Publik

Polarisasi publik terjadi ketika masyarakat semakin terpisah ke dalam kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang semakin berbeda. Hoaks dapat memperkuat proses tersebut dengan membangun narasi negatif mengenai kelompok politik lain. Misalnya, suatu kelompok

dapat digambarkan sebagai ancaman terhadap kepentingan masyarakat, sementara kelompok sendiri diposisikan sebagai satu-satunya pihak yang benar atau dapat dipercaya.

Ketika hoaks terus beredar dalam kelompok yang memiliki pandangan politik sama, informasi tersebut dapat memperkuat keyakinan yang sudah ada. Anggota kelompok cenderung menerima informasi yang mendukung pandangan mereka dan menolak informasi yang bertentangan. Kondisi tersebut dapat menciptakan *echo chamber*, di mana informasi yang sama terus diulang dan diperkuat dalam lingkungan kelompok.

Polarisasi juga dapat berubah dari perbedaan ideologis menjadi polarisasi emosional atau *affective polarization*. Dalam kondisi ini, masyarakat tidak hanya berbeda mengenai gagasan politik, tetapi juga mengembangkan rasa tidak suka, curiga, atau bahkan permusuhan terhadap kelompok politik lain. Hoaks yang menyerang identitas dan karakter kelompok dapat memperkuat proses tersebut karena masyarakat mulai melihat kelompok lain sebagai musuh, bukan sebagai sesama warga dengan pilihan politik yang berbeda.

4. Dampak Hoaks terhadap Opini dan Kepercayaan Publik

Hoaks politik dapat memengaruhi cara masyarakat memahami kandidat, partai, kebijakan, dan institusi publik. Informasi palsu yang diterima secara berulang dapat membentuk persepsi tertentu meskipun informasi tersebut tidak benar. Dalam situasi politik yang kompetitif, perubahan persepsi semacam ini dapat memengaruhi preferensi pemilih dan kualitas persaingan politik. Dampak lainnya adalah menurunnya kepercayaan terhadap institusi. Ketika masyarakat terus menerima klaim bahwa lembaga negara, penyelenggara pemilu, media, atau kelompok tertentu tidak dapat dipercaya, legitimasi institusi dapat melemah. Bahkan setelah informasi tersebut terbukti salah, sebagian masyarakat mungkin tetap mempertahankan keraguan karena informasi yang telah diterima sebelumnya meninggalkan kesan yang kuat.

Hoaks juga dapat menciptakan situasi ketika masyarakat kesulitan menentukan informasi mana yang benar. Ketika terlalu banyak informasi palsu dan informasi yang saling bertentangan beredar, masyarakat dapat mengalami kelelahan informasi. Dalam kondisi tersebut, sebagian orang mungkin memilih tidak mempercayai sumber informasi mana pun. Jika berlangsung dalam jangka panjang, keadaan ini dapat mengurangi kualitas partisipasi politik dan kepercayaan sosial.

5. Upaya Mengurangi Hoaks dan Polarisasi Politik

Mengatasi hoaks politik membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Masyarakat memiliki peran utama melalui peningkatan literasi digital, kemampuan memeriksa sumber, dan kebiasaan membandingkan informasi sebelum membagikannya. Warga juga perlu memahami bahwa informasi yang sesuai dengan pandangan politik pribadi tidak otomatis benar. Platform digital memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan transparansi mengenai mekanisme distribusi konten dan memperkuat sistem untuk mendeteksi jaringan penyebaran informasi yang manipulatif. Upaya tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi pembatasan ekspresi politik yang sah. Mekanisme moderasi juga perlu memiliki prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, media profesional, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan institusi publik memiliki peran dalam membangun budaya verifikasi informasi. Upaya menghadapi hoaks tidak cukup hanya dengan menghapus konten, tetapi juga perlu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami bagaimana informasi diproduksi dan disebarkan. Dengan demikian, penanganan hoaks dapat sekaligus menjadi upaya mengurangi polarisasi dan memperkuat ruang publik yang sehat. Pada akhirnya, hoaks politik dan polarisasi publik memiliki hubungan yang saling memperkuat. Hoaks dapat memperdalam perbedaan antarkelompok, sementara masyarakat yang telah terpolarisasi lebih mudah menerima informasi yang menguntungkan kelompoknya dan menolak informasi dari kelompok lain. Karena itu, demokrasi digital membutuhkan masyarakat yang kritis, platform yang bertanggung jawab, media yang kredibel, serta budaya politik yang mampu menerima perbedaan tanpa mengubahnya menjadi permusuhan.

C. *Deepfake* dan Ancaman terhadap Demokrasi

Deepfake, yaitu konten audio, gambar, atau video sintetik yang dihasilkan menggunakan teknik kecerdasan buatan untuk menciptakan representasi realistis namun palsu dari seseorang, merupakan salah satu ancaman paling dramatis terhadap integritas informasi politik pada era digital. *Deepfake* dapat secara langsung mengubah preferensi pemilih dan menyebarkan disinformasi mengenai kandidat dengan membuat mereka tampak mengambil posisi kebijakan yang sesungguhnya tidak mereka anut

atau terlibat dalam perilaku ilegal, sehingga berpotensi mengikis kepercayaan terhadap keseluruhan proses elektoral. Selain itu, kampanye disinformasi terkoordinasi yang memanfaatkan video *deepfake* dapat mencegah warga menggunakan hak pilihnya dengan menyebarkan informasi palsu mengenai prosedur pemilihan atau mengintimidasi pemilih melalui ancaman pemerasan, sebuah bentuk penekanan partisipasi yang secara langsung merugikan kualitas demokrasi.

Meskipun ancaman *deepfake* bersifat nyata, dampak riilnya lebih terbatas dibandingkan prediksi yang beredar luas sebelum siklus pemilu tersebut berlangsung. Survei *Home Security Heroes* (2023) menyatakan kekhawatiran terhadap potensi dampak *deepfake* pada pemilihan mendatang. Hal ini menunjukkan potensi pengaruh psikologis *deepfake* yang signifikan terlepas dari efektivitas riilnya dalam mengubah hasil pemilu. Kondisi ini menegaskan bahwa ancaman *deepfake* tidak hanya bersifat langsung melalui konten palsu itu sendiri, tetapi juga secara tidak langsung melalui kekhawatiran yang ditimbulkannya terhadap integritas informasi secara keseluruhan.

Ancaman tersembunyi dari *deepfake* yang oleh sejumlah pengamat dianggap lebih mengkhawatirkan dibandingkan insiden *deepfake* individual adalah dampak kumulatif psikologis dan sosialnya terhadap kepercayaan publik. Insiden *deepfake* pada pemilu 2023 dan awal 2024 menemukan bahwa meskipun hanya sedikit kasus yang menunjukkan efek terukur langsung terhadap hasil pemilihan, ancaman paling mengkhawatirkan justru bukan *deepfake* tunggal, melainkan efek kumulatif psikologis dan sosial dari maraknya kehadiran teknologi tersebut dalam wacana publik. Efek kumulatif ini berkontribusi pada fenomena dividen pembohong, di mana kesadaran publik terhadap keberadaan deepfake dieksploitasi untuk mendiskreditkan konten otentik yang merugikan aktor politik tertentu.

Selain *deepfake* video dan audio, varian teknologi manipulasi visual yang lebih sederhana namun tidak kalah berbahaya adalah "*cheapfake*" atau "*shallowfake*", yaitu konten manipulatif yang dihasilkan tanpa memerlukan teknologi AI canggih, cukup melalui teknik penyuntingan konvensional seperti pemotongan konteks video, perlambatan atau percepatan rekaman, atau penulisan ulang keterangan gambar yang menyesatkan. Di banyak negara berkembang, *cheapfake* yang lebih murah dan mudah diproduksi justru masih mendominasi ekosistem disinformasi dibandingkan *deepfake* berbasis AI yang lebih

canggih namun memerlukan sumber daya teknis lebih besar, sebuah temuan yang menegaskan pentingnya kebijakan penanggulangan yang tidak semata berfokus pada ancaman teknologi mutakhir sambil mengabaikan bentuk manipulasi konvensional yang lebih sederhana.

Ancaman *deepfake* terhadap demokrasi juga perlu dipertimbangkan dalam konteks target sasarannya yang tidak terbatas pada kandidat politik semata. Target utama konten manipulatif AI adalah kandidat politik terkemuka, namun turut mencakup fabrikasi dukungan dari tokoh selebriti internasional untuk menciptakan kesan legitimasi yang keliru terhadap kandidat tertentu. Perluasan target *deepfake* ke tokoh nonpolitik seperti selebriti dan figur publik lainnya menunjukkan bahwa strategi manipulasi informasi politik kontemporer semakin canggih dalam memanfaatkan kredibilitas figur publik lintas sektor untuk memengaruhi persepsi politik warga.

Dampak jangka panjang *deepfake* terhadap kepercayaan publik juga perlu dianalisis melalui lensa generasi, mengingat kelompok usia yang berbeda menunjukkan tingkat kerentanan dan kewaspadaan yang berbeda pula terhadap konten sintetik. Generasi yang tumbuh besar bersamaan dengan perkembangan teknologi *deepfake* cenderung memiliki kewaspadaan bawaan yang lebih tinggi terhadap kemungkinan manipulasi visual, sementara generasi yang lebih tua yang terbiasa mempercayai rekaman audio-visual sebagai bukti otentik peristiwa menghadapi kurva pembelajaran yang lebih curam dalam menyesuaikan tingkat kepercayaan mereka terhadap konten digital di era *deepfake*. Kesenjangan generasi dalam literasi *deepfake* ini menuntut pendekatan edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok usia, alih-alih kampanye kesadaran publik yang seragam bagi seluruh lapisan masyarakat.

D. Peran AI dalam Penyebaran maupun Deteksi Hoaks

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) memiliki peran yang semakin besar dalam ekosistem informasi digital, termasuk dalam penyebaran maupun deteksi hoaks. Kemampuan AI dalam menghasilkan teks, gambar, audio, dan video memungkinkan produksi konten dilakukan dengan cepat dan dalam jumlah besar. Pada sisi lain, kemampuan yang sama dapat dimanfaatkan untuk menganalisis konten, menemukan pola yang mencurigakan, dan membantu mengidentifikasi informasi yang berpotensi menyesatkan.

Dalam konteks politik, perkembangan tersebut menciptakan kondisi yang bersifat paradoks. AI dapat menjadi alat untuk mempercepat produksi disinformasi, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mengurangi penyebarannya. Teknologi yang sama dapat digunakan oleh aktor yang memiliki tujuan berbeda, sehingga dampaknya sangat bergantung pada bagaimana AI dirancang dan digunakan. Karena itu, pemanfaatan AI untuk menghadapi hoaks tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan teknologi. Sistem AI tetap memiliki keterbatasan dan dapat menghasilkan kesalahan. Pengawasan manusia, verifikasi sumber, transparansi algoritma, literasi digital, serta kerja sama antara platform, media, pemerintah, dan masyarakat tetap diperlukan agar AI dapat digunakan secara bertanggung jawab dalam menjaga kualitas informasi politik.

Gambar 6.2 Peran Ganda AI: Penyebaran vs Deteksi Hoaks



1. AI sebagai Penghasil dan Penguat Hoaks

AI generatif memungkinkan pembuatan konten dalam waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan metode produksi konvensional. Sistem AI dapat membantu menghasilkan teks, gambar, suara, dan video yang tampak meyakinkan. Dalam konteks politik, kemampuan tersebut dapat digunakan untuk membuat konten yang menggambarkan kandidat atau tokoh publik secara tidak benar. Selain menghasilkan konten palsu, AI dapat membantu membuat variasi informasi dalam jumlah besar. Sebuah

narasi dapat dikembangkan menjadi berbagai judul, gambar, atau bentuk pesan yang disesuaikan dengan kelompok audiens tertentu. Hal ini membuat produksi disinformasi menjadi lebih mudah dan memungkinkan satu narasi menyebar melalui berbagai bentuk konten.

AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi distribusi konten. Sistem otomatis dapat membantu menentukan waktu, format, atau kelompok audiens yang dianggap paling mungkin merespons suatu pesan. Jika dikombinasikan dengan jaringan akun yang terkoordinasi, kemampuan tersebut dapat memperbesar jangkauan informasi palsu. Karena itu, perkembangan AI membuat tantangan disinformasi menjadi semakin kompleks.

2. *Deepfake* dan Manipulasi Konten Politik

Salah satu bentuk penggunaan AI yang paling banyak mendapat perhatian adalah *deepfake*. Teknologi ini dapat digunakan untuk memanipulasi wajah, suara, atau gerakan seseorang sehingga terlihat seolah-olah melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dalam politik, *deepfake* dapat digunakan untuk merusak reputasi kandidat atau menciptakan persepsi tertentu mengenai suatu peristiwa. Konten semacam itu dapat menjadi sangat persuasif karena masyarakat cenderung menganggap video atau rekaman suara sebagai bukti visual dan audio yang kuat. Jika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memeriksa sumber dan konteks, konten yang telah dimanipulasi dapat dipercaya dan dibagikan secara luas.

Masalahnya menjadi semakin kompleks karena teknologi AI berkembang dengan cepat. Teknik manipulasi semakin mudah digunakan dan kualitas hasilnya semakin tinggi. Akibatnya, masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan visual sederhana untuk menentukan apakah suatu konten asli atau palsu. Proses verifikasi membutuhkan kombinasi teknologi, pemeriksaan sumber, dan penilaian manusia.

3. AI untuk Mendeteksi Hoaks dan Disinformasi

Di sisi lain, AI dapat digunakan untuk membantu mendeteksi informasi yang berpotensi palsu atau menyesatkan. Sistem dapat menganalisis teks untuk menemukan pola bahasa tertentu, memeriksa kesesuaian informasi dengan sumber yang tersedia, dan mengidentifikasi karakteristik konten yang memiliki kemungkinan mengandung

disinformasi. Teknologi pemrosesan bahasa alami dapat digunakan untuk mengolah informasi dalam jumlah besar secara lebih cepat.

AI juga dapat menganalisis gambar dan video untuk mencari tanda-tanda manipulasi. Sistem tertentu dapat memeriksa ketidaksesuaian visual, perubahan wajah, pola suara, atau karakteristik teknis lainnya yang mungkin menunjukkan bahwa suatu konten telah dibuat atau dimodifikasi secara sintetis. Kemampuan tersebut dapat membantu platform dan pemeriksa fakta memprioritaskan konten yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Selain memeriksa konten secara individual, AI dapat digunakan untuk menemukan pola penyebaran. Sistem dapat mengidentifikasi aktivitas akun yang tidak wajar, pola pembagian konten yang sangat terkoordinasi, atau penyebaran narasi yang muncul secara bersamaan di berbagai jaringan. Dengan demikian, AI tidak hanya membantu mendeteksi *apa* yang mungkin palsu, tetapi juga dapat membantu memahami *bagaimana* informasi tersebut menyebar.

4. Keterbatasan AI dalam Mendeteksi Hoaks

Meskipun memiliki kemampuan analisis yang tinggi, AI tidak selalu mampu menentukan kebenaran sebuah informasi secara akurat. Informasi politik sering kali mengandung konteks, satire, opini, atau pernyataan yang membutuhkan pemahaman situasi tertentu. Sebuah sistem dapat keliru mengategorikan pernyataan sebagai hoaks hanya karena tidak memahami konteks komunikasi. Masalah lain adalah kemungkinan munculnya *false positive* dan *false negative*. *False positive* terjadi ketika informasi yang sebenarnya benar dianggap sebagai hoaks, sedangkan *false negative* terjadi ketika informasi palsu justru dianggap benar atau tidak terdeteksi. Kedua jenis kesalahan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius dalam politik, terutama ketika informasi berkaitan dengan kandidat, pemilu, atau isu sensitif.

AI juga dapat menghadapi masalah ketika berhadapan dengan konten baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Aktor penyebar disinformasi dapat terus mengubah pola, bahasa, dan format konten untuk menghindari sistem deteksi. Oleh karena itu, teknologi deteksi harus terus diperbarui dan tetap dikombinasikan dengan pemeriksaan fakta oleh manusia.

5. AI, Verifikasi Informasi, dan Perlindungan Demokrasi

Penggunaan AI dalam deteksi hoaks sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari sistem verifikasi yang lebih luas. AI dapat membantu menyaring dan memprioritaskan informasi yang membutuhkan pemeriksaan, tetapi keputusan akhir mengenai kebenaran suatu informasi sebaiknya mempertimbangkan sumber yang kredibel, bukti, konteks, dan penilaian manusia. Pendekatan tersebut dapat mengurangi risiko kesalahan akibat terlalu bergantung pada sistem otomatis. Transparansi juga menjadi prinsip penting. Masyarakat perlu mengetahui bahwa suatu konten telah diberi label atau diperiksa menggunakan sistem AI dan memahami bahwa hasil deteksi bukan selalu keputusan yang sempurna. Platform perlu menyediakan mekanisme bagi pengguna untuk mengajukan keberatan atau meminta pemeriksaan ulang terhadap konten yang dianggap bermasalah.

Pada akhirnya, AI memiliki dua sisi dalam ekosistem hoaks politik. Di satu sisi, AI dapat mempercepat produksi, personalisasi, dan penyebaran konten palsu. Di sisi lain, AI dapat membantu mendeteksi pola bahasa, gambar, video, akun, dan jaringan penyebaran yang mencurigakan. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa kemampuan deteksi berkembang setidaknya secepat kemampuan menghasilkan manipulasi. Karena itu, penggunaan AI perlu dipadukan dengan literasi digital, pemeriksaan fakta, transparansi platform, perlindungan kebebasan berekspresi, dan pengawasan manusia agar teknologi benar-benar berfungsi untuk memperkuat kualitas informasi dan demokrasi.

E. Strategi Penanggulangan Disinformasi

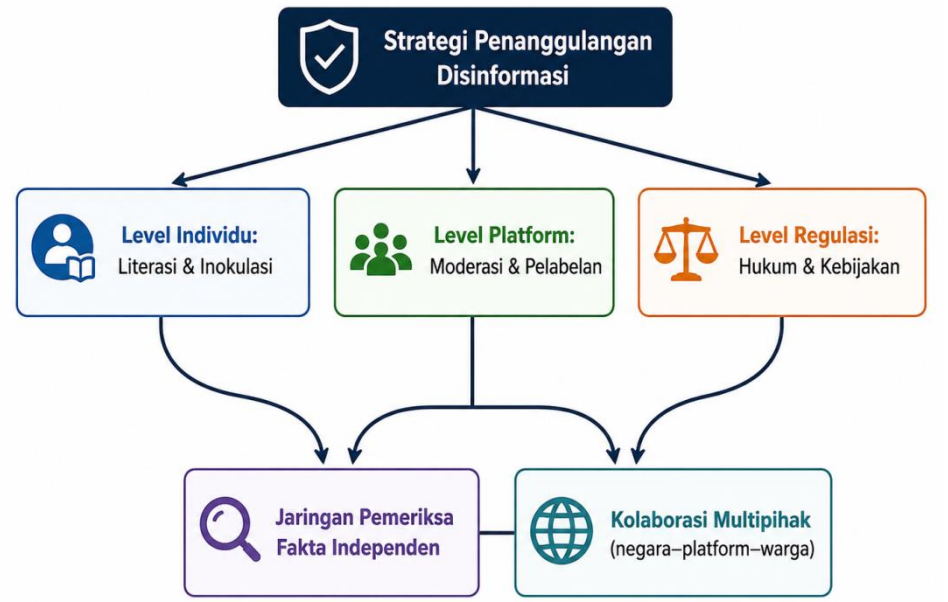
Disinformasi merupakan salah satu tantangan utama dalam demokrasi digital karena dapat memengaruhi persepsi masyarakat, membentuk opini publik secara keliru, memperkuat polarisasi, dan mengganggu kepercayaan terhadap institusi politik. Perkembangan media sosial dan teknologi AI membuat produksi serta penyebaran informasi palsu menjadi semakin cepat. Karena itu, penanggulangan disinformasi tidak cukup dilakukan dengan menghapus konten yang bermasalah, tetapi membutuhkan strategi yang melibatkan masyarakat, platform digital, media, pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai aktor lainnya.

Strategi penanggulangan disinformasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mencegah masyarakat menerima informasi palsu,

meningkatkan kemampuan untuk mengenali dan memverifikasi informasi, hingga merespons konten yang terbukti menyesatkan. Pendekatan tersebut penting karena disinformasi dapat muncul dalam berbagai bentuk dan menyebar melalui berbagai saluran. Strategi yang hanya berfokus pada satu platform atau satu jenis konten akan sulit menghadapi karakter informasi digital yang terus berubah.

Pada saat yang sama, upaya melawan disinformasi harus tetap menghormati kebebasan berekspresi dan keberagaman pendapat. Tidak semua informasi yang salah merupakan disinformasi, karena terdapat perbedaan antara kesalahan yang tidak disengaja dan informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Oleh karena itu, penanggulangan disinformasi perlu dilakukan secara proporsional, transparan, berbasis bukti, dan tidak digunakan untuk membungkam kritik politik yang sah.

Gambar 6.3 Kerangka Strategi Penanggulangan Disinformasi



1. Meningkatkan Literasi Digital Masyarakat

Strategi pertama adalah meningkatkan literasi digital. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menemukan, memahami, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Kemampuan tersebut menjadi semakin penting karena siapa pun dapat memproduksi dan mendistribusikan informasi melalui

platform digital tanpa melalui proses penyuntingan seperti pada media konvensional.

Literasi digital juga perlu mengajarkan masyarakat untuk memeriksa sumber informasi. Pengguna dapat melihat siapa yang membuat informasi, kapan informasi tersebut diterbitkan, apa bukti yang digunakan, dan apakah informasi serupa dilaporkan oleh sumber lain yang kredibel. Kebiasaan melakukan pemeriksaan sederhana dapat mengurangi kemungkinan seseorang menjadi bagian dari rantai penyebaran disinformasi.

Selain kemampuan teknis, literasi digital perlu membangun sikap kritis. Masyarakat harus menyadari bahwa informasi yang sesuai dengan pandangan politik pribadi belum tentu benar. Kemampuan untuk mempertanyakan informasi dari kelompok sendiri maupun kelompok lain merupakan bagian penting dari budaya demokrasi. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan terhadap hoaks, tetapi juga sebagai dasar bagi partisipasi politik yang lebih bertanggung jawab.

2. Memperkuat Pemeriksaan Fakta dan Verifikasi Informasi

Pemeriksaan fakta (*fact-checking*) merupakan strategi penting untuk mengidentifikasi dan menjelaskan informasi yang salah atau menyesatkan. Pemeriksa fakta dapat menelusuri sumber, membandingkan klaim dengan data yang tersedia, memeriksa konteks suatu pernyataan, dan memberikan penjelasan mengenai status kebenaran sebuah informasi. Dalam konteks politik, proses ini sangat penting untuk memeriksa klaim mengenai kandidat, kebijakan, pemilu, maupun institusi publik.

Pemeriksaan fakta perlu dilakukan dengan cepat karena disinformasi dapat menyebar dalam waktu singkat. Klarifikasi yang muncul terlalu lambat mungkin tidak mampu mengimbangi jangkauan informasi palsu yang telah terlanjur beredar. Karena itu, media, organisasi pemeriksa fakta, dan institusi terkait perlu memiliki mekanisme pemantauan terhadap isu yang berkembang di ruang digital. Namun, pemeriksaan fakta harus dilakukan secara transparan dan berbasis bukti. Masyarakat perlu dapat mengetahui sumber data yang digunakan dan alasan suatu klaim dinilai benar, salah, atau menyesatkan. Transparansi tersebut penting agar kegiatan pemeriksaan fakta tidak dianggap sebagai alat untuk mendukung kepentingan politik tertentu.

3. Memanfaatkan AI dan Teknologi Deteksi

AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi konten yang berpotensi mengandung disinformasi. Sistem AI dapat menganalisis teks, gambar, audio, dan video dalam jumlah besar serta mencari pola yang mencurigakan. Teknologi tersebut dapat membantu memprioritaskan konten yang perlu diperiksa lebih lanjut oleh manusia. AI juga dapat digunakan untuk mendeteksi pola penyebaran yang tidak wajar. Misalnya, sistem dapat membantu mengidentifikasi akun yang menyebarkan konten serupa secara berulang atau jaringan yang menunjukkan pola koordinasi tertentu. Informasi tersebut dapat membantu platform dan peneliti memahami bagaimana suatu narasi berkembang dan menyebar. Meskipun demikian, AI tidak boleh menjadi satu-satunya mekanisme penentuan kebenaran informasi. Sistem dapat melakukan kesalahan dan tidak selalu memahami konteks politik yang kompleks. Oleh karena itu, penggunaan AI sebaiknya ditempatkan dalam sistem *human-in-the-loop*, yaitu teknologi membantu proses penyaringan dan analisis sementara keputusan penting tetap melalui pemeriksaan manusia.

4. Meningkatkan Tanggung Jawab Platform Digital

Platform digital memiliki posisi penting karena menjadi infrastruktur utama penyebaran informasi. Platform dapat berkontribusi dalam mengurangi disinformasi melalui mekanisme pelabelan konten, pengurangan distribusi konten yang terbukti menyesatkan, penghapusan jaringan akun palsu, serta penyediaan informasi kontekstual bagi pengguna. Transparansi algoritma juga penting. Masyarakat dan peneliti perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai faktor yang memengaruhi distribusi konten. Jika sistem rekomendasi secara tidak sengaja memberikan keuntungan lebih besar kepada konten yang provokatif atau menyesatkan, platform perlu mengevaluasi mekanisme tersebut tanpa menghilangkan keberagaman pendapat yang sah.

Tanggung jawab platform harus dilaksanakan secara proporsional. Penanganan disinformasi tidak boleh berubah menjadi sensor terhadap kritik atau pendapat politik yang berbeda. Karena itu, keputusan mengenai moderasi konten perlu memiliki aturan yang jelas, mekanisme banding, dan transparansi mengenai alasan suatu konten diberi label, dibatasi, atau dihapus.

5. Membangun Ekosistem Informasi Politik yang Sehat

Penanggulangan disinformasi pada akhirnya membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan informasi publik yang akurat dan mudah diakses. Media memiliki tanggung jawab menjalankan jurnalistik yang kredibel dan melakukan verifikasi. Institusi pendidikan dapat memperkuat literasi digital, sedangkan organisasi masyarakat dapat membantu membangun kesadaran publik mengenai bahaya disinformasi.

Kandidat dan partai politik juga memiliki tanggung jawab besar. Persaingan politik seharusnya tidak mendorong penggunaan informasi palsu untuk menyerang lawan atau memanipulasi masyarakat. Aktor politik perlu membangun budaya kompetisi yang didasarkan pada program, argumentasi, dan informasi yang dapat diverifikasi. Komitmen tersebut penting karena disinformasi yang berasal dari aktor politik dapat memiliki dampak yang lebih besar terhadap kepercayaan masyarakat.

Pada akhirnya, strategi penanggulangan disinformasi harus bergerak dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif dan kolaboratif. Masyarakat perlu dibekali literasi digital, media perlu memperkuat verifikasi, platform perlu meningkatkan tanggung jawab dan transparansi, sementara AI dapat digunakan sebagai alat pendukung deteksi. Dengan kombinasi tersebut, ruang digital dapat menjadi lingkungan informasi yang lebih sehat dan mampu mendukung proses demokrasi tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

BAB VII
TATA KELOLA PLATFORM DIGITAL DAN REGULASI DEMOKRASI

Perkembangan platform digital telah menjadikan perusahaan teknologi sebagai aktor penting dalam kehidupan demokrasi. Platform seperti media sosial berperan dalam mengatur penyebaran informasi, moderasi konten, penggunaan data pengguna, serta mekanisme algoritmik yang dapat memengaruhi ruang diskusi publik. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, kebebasan berekspresi, perlindungan data, dan kepentingan masyarakat.

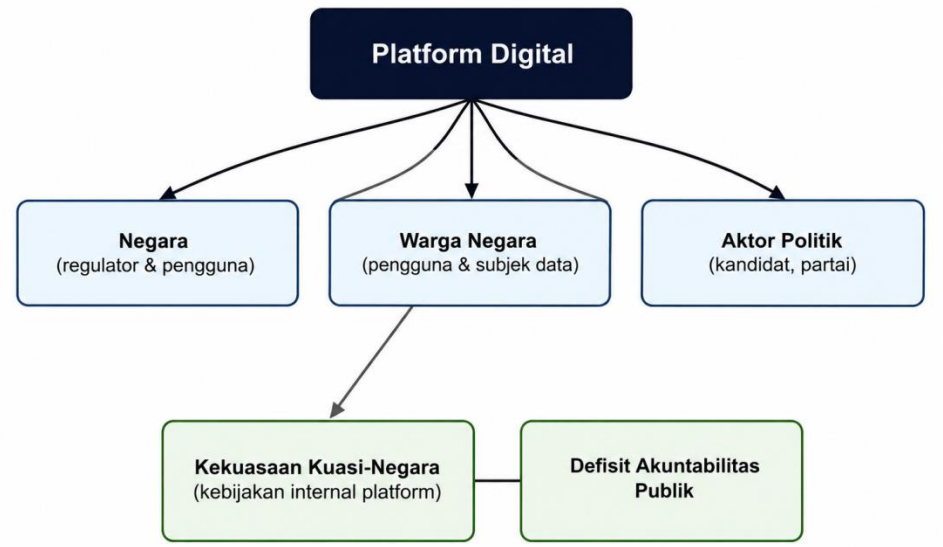
Regulasi demokrasi di era digital diperlukan untuk memastikan bahwa platform digital menjalankan tanggung jawab secara transparan dan akuntabel. Regulasi yang tepat dapat membantu mengurangi penyalahgunaan data, disinformasi, manipulasi politik, dan praktik algoritmik yang merugikan masyarakat. Namun, regulasi juga perlu dirancang secara proporsional agar tidak membatasi kebebasan berpendapat dan partisipasi warga. Dengan demikian, tata kelola platform digital harus diarahkan untuk menciptakan ruang digital yang aman, terbuka, adil, dan mendukung kualitas demokrasi.

A. Platform Digital sebagai Aktor Politik Baru

Platform digital telah berevolusi dari sekadar infrastruktur teknis netral menjadi aktor politik yang memiliki kapasitas memengaruhi wacana publik, hasil pemilihan umum, dan bahkan stabilitas politik suatu negara. Derave, Gailly, Sales, dan Poels (2024) mengembangkan taksonomi dan ontologi platform digital yang menegaskan bahwa platform kontemporer

menyediakan infrastruktur sosial-teknis kritis yang membentuk produksi budaya dan politik masyarakat, sebuah peran yang jauh melampaui fungsi teknisnya sebagai penyedia layanan. Transformasi peran ini, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 7.1, menempatkan platform digital dalam relasi kekuasaan segitiga dengan negara sebagai regulator dan pengguna, warga negara sebagai pengguna sekaligus subjek data, dan aktor politik sebagai pengguna strategis untuk tujuan kampanye dan komunikasi kebijakan.

Gambar 7.1 Platform Digital sebagai Aktor Politik Baru



Sumber: Derave et al. (2024)

Karakteristik unik platform digital sebagai aktor politik terletak pada posisinya yang oleh sejumlah pengamat disebut sebagai "kekuasaan kuasi-negara". Keputusan internal platform mengenai kebijakan moderasi konten, algoritma rekomendasi, dan penegakan aturan komunitas memiliki dampak yang setara dengan kebijakan publik konvensional terhadap kehidupan politik jutaan warga negara, namun tanpa mekanisme akuntabilitas publik yang setara dengan yang berlaku bagi lembaga negara. Kondisi ini menciptakan apa yang dalam literatur tata kelola disebut sebagai defisit akuntabilitas, di mana keputusan-keputusan berdampak besar diambil melalui proses internal perusahaan yang tertutup dan sulit diperiksa publik secara independen.

Peran politik platform digital juga tampak dari kapasitasnya menentukan batasan kebebasan berekspresi secara de facto melalui kebijakan komunitas yang mereka tetapkan sendiri. Berbeda dari pembatasan kebebasan berekspresi oleh negara yang tunduk pada mekanisme konstitusional dan pengawasan yudisial, kebijakan pembatasan konten oleh platform beroperasi berdasarkan syarat dan ketentuan layanan yang dirumuskan secara sepihak oleh perusahaan, meskipun dampaknya terhadap wacana publik demokratis setara signifikannya. Realitas ini menegaskan urgensi kerangka regulasi yang mampu menyeimbangkan otonomi bisnis platform dengan kepentingan publik demokratis, sebuah tema yang akan dielaborasi lebih lanjut pada subbab-subbab berikutnya dalam bab ini.

Keragaman jenis platform mulai dari media sosial, mesin pencari, hingga *marketplace* menuntut pendekatan tata kelola yang terdiferensiasi, karena setiap jenis platform memiliki mekanisme pengaruh politik yang berbeda. Media sosial memengaruhi politik terutama melalui kurasi dan amplifikasi konten, mesin pencari memengaruhi melalui pemeringkatan hasil pencarian yang membentuk akses informasi warga, sementara marketplace turut memiliki dimensi politik melalui kebijakan periklanan dan penjualan yang mereka terapkan terhadap konten atau produk bermuatan politik. Pemahaman mengenai diferensiasi jenis platform ini penting agar kebijakan regulasi tidak menerapkan pendekatan seragam yang kurang sesuai dengan karakteristik teknis dan mekanisme pengaruh politik masing-masing jenis platform.

Perbandingan kapasitas politik platform digital dengan aktor politik konvensional juga perlu mempertimbangkan skala jangkauan yang jauh melampaui kapasitas institusi politik tradisional. Sebuah platform media sosial besar dapat menjangkau miliaran pengguna secara simultan di seluruh dunia, skala yang tidak dapat ditandingi oleh partai politik atau bahkan pemerintah nasional manapun dalam hal jangkauan komunikasi langsung. Skala jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menjadikan keputusan kebijakan internal platform, sekecil apa pun perubahan yang tampak dari perspektif teknis berpotensi menghasilkan dampak politik agregat yang sangat signifikan ketika dikalikan dengan basis pengguna global yang dimiliki platform tersebut.

Perubahan kecil pada algoritma rekomendasi, misalnya penyesuaian bobot faktor tertentu dalam formula pemeringkatan konten, dapat menghasilkan pergeseran visibilitas yang substansial bagi jutaan

pengguna secara bersamaan tanpa pengumuman publik yang memadai mengenai perubahan tersebut. Ketidaktransparanan perubahan algoritmik semacam ini menegaskan urgensi kewajiban notifikasi dan transparansi yang telah mulai diwajibkan sejumlah kerangka regulasi kontemporer seperti *Digital Services Act*.

Dimensi tambahan dari kekuasaan politik platform digital tampak dari kapasitasnya membentuk agenda publik melalui mekanisme trending topic dan fitur eksplorasi konten yang menyoroti isu-isu tertentu kepada khalayak luas. Berbeda dari media massa konvensional yang menetapkan agenda melalui keputusan redaksional eksplisit, platform digital menetapkan agenda melalui mekanisme algoritmik yang tampak otomatis dan objektif namun sesungguhnya mencerminkan pilihan desain yang dibuat perancang sistem, termasuk keputusan mengenai metrik apa yang digunakan untuk menentukan topik yang sedang tren dan bagaimana metrik tersebut ditimbang dalam algoritma penentuan agenda.

B. Moderasi Konten dan Kebebasan Berekspresi

Moderasi konten merupakan proses yang dilakukan oleh platform digital untuk mengidentifikasi, menilai, membatasi, memberi label, atau menghapus konten yang dianggap melanggar aturan tertentu. Dalam konteks politik digital, moderasi konten menjadi semakin penting karena platform digunakan sebagai ruang utama untuk menyampaikan pendapat, melakukan kampanye, berdiskusi, dan menyebarkan informasi politik. Pada saat yang sama, platform juga menghadapi berbagai persoalan seperti hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, ancaman, manipulasi, dan konten yang sengaja dibuat untuk mengganggu proses demokrasi.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu prinsip penting dalam demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mengkritik pemerintah, mendukung atau menolak kandidat, serta mendiskusikan berbagai persoalan publik. Karena itu, moderasi konten tidak boleh dilakukan secara sembarangan sehingga kritik politik yang sah justru dianggap sebagai pelanggaran. Tantangan utama terletak pada bagaimana membatasi konten yang berbahaya tanpa menghilangkan ruang bagi perbedaan pendapat.

Hubungan antara moderasi konten dan kebebasan berekspresi menjadi semakin kompleks ketika AI dan algoritma digunakan dalam proses moderasi. Sistem otomatis dapat memeriksa jutaan konten dalam

waktu singkat, tetapi tidak selalu mampu memahami konteks, satire, ironi, bahasa lokal, atau perbedaan antara kritik dan serangan. Oleh karena itu, moderasi konten membutuhkan keseimbangan antara teknologi, aturan yang transparan, pengawasan manusia, dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk berekspresi.

1. Konsep dan Tujuan Moderasi Konten

Moderasi konten pada dasarnya bertujuan menjaga agar platform digital tetap menjadi ruang komunikasi yang aman dan dapat digunakan oleh masyarakat. Platform biasanya memiliki aturan yang menentukan jenis konten yang diperbolehkan dan jenis konten yang dapat dibatasi. Dalam praktiknya, tindakan moderasi dapat berupa pemberian peringatan, pelabelan, pembatasan distribusi, penghapusan konten, atau pembatasan akun.

Dalam konteks politik, moderasi dapat digunakan untuk menangani konten yang mengandung informasi palsu yang berbahaya, manipulasi, ancaman, atau serangan terhadap kelompok tertentu. Tujuannya bukan menghilangkan perbedaan pendapat, tetapi mengurangi konten yang dapat menimbulkan kerugian nyata terhadap individu atau proses demokrasi. Karena itu, aturan moderasi harus membedakan antara opini politik, kritik, informasi keliru, dan konten yang sengaja dibuat untuk menyesatkan.

Moderasi yang baik juga harus mempertimbangkan konteks. Pernyataan yang terlihat agresif secara tekstual belum tentu merupakan ancaman jika digunakan dalam konteks satire atau diskusi tertentu. Demikian pula, kritik keras terhadap pejabat publik tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Kemampuan memahami konteks menjadi salah satu alasan mengapa keputusan moderasi yang penting tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada sistem otomatis.

2. Kebebasan Berekspresi dalam Ruang Digital

Platform digital telah memperluas ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat politik. Individu dapat mengkritik kebijakan, mendukung kandidat, mendiskusikan isu publik, atau menyampaikan pengalaman secara langsung kepada audiens yang luas. Hal ini memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses ke media untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi publik.

Kebebasan berekspresi juga mencakup hak untuk menyampaikan pandangan yang tidak populer atau berbeda dari mayoritas. Dalam demokrasi, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dan bahkan diperlukan untuk menguji berbagai gagasan. Jika setiap pendapat yang kontroversial langsung dihapus, ruang publik dapat menjadi terlalu homogen dan kehilangan fungsi sebagai tempat perdebatan yang terbuka. Namun, kebebasan berekspresi bukan berarti seluruh jenis konten harus dibiarkan tanpa batas. Ancaman kekerasan, penipuan, manipulasi yang merugikan, dan bentuk konten tertentu yang secara nyata membahayakan orang lain dapat memerlukan pembatasan. Tantangannya adalah menentukan batas tersebut secara jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Algoritma dan AI dalam Moderasi Konten

Jumlah konten yang diproduksi setiap hari membuat moderasi secara manual tidak selalu memungkinkan. Platform dapat menggunakan AI dan algoritma untuk mendeteksi kata, gambar, video, pola perilaku, dan jaringan akun yang dianggap berisiko. Teknologi tersebut memungkinkan proses penyaringan dilakukan dalam skala yang sangat besar. AI juga dapat membantu mengidentifikasi pola yang sulit ditemukan secara manual. Misalnya, sistem dapat mendeteksi akun yang melakukan aktivitas tidak wajar atau jaringan yang menyebarkan konten yang sama secara terkoordinasi. Dalam konteks politik, kemampuan tersebut dapat membantu mengidentifikasi kampanye manipulatif dan penyebaran informasi yang dirancang untuk memengaruhi opini publik secara tidak transparan.

Namun, sistem otomatis memiliki kemungkinan melakukan kesalahan. Algoritma dapat menghapus konten yang sebenarnya sah atau gagal mendeteksi konten yang melanggar aturan. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena keterbatasan data pelatihan, perbedaan bahasa, konteks budaya, maupun perubahan pola komunikasi. Oleh sebab itu, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, sementara keputusan yang memiliki konsekuensi besar terhadap kebebasan berekspresi perlu memperoleh pengawasan manusia.

4. Risiko *Over-Moderation* dan *Under-Moderation*

Over-moderation terjadi ketika platform terlalu banyak membatasi atau menghapus konten yang sebenarnya masih berada dalam batas

ekspresi yang sah. Dalam konteks politik, kondisi tersebut dapat menyebabkan kritik terhadap pemerintah, kandidat, atau kebijakan tertentu ikut dibatasi. Jika terjadi secara sistematis, *over-moderation* dapat menciptakan efek takut berbicara atau *chilling effect* di kalangan masyarakat.

Sebaliknya, *under-moderation* terjadi ketika platform gagal menangani konten yang benar-benar berbahaya. Jika disinformasi, ancaman, ujaran kebencian, atau konten manipulatif dibiarkan menyebar, platform dapat menjadi ruang yang memperkuat konflik sosial dan politik. Kedua kondisi tersebut menunjukkan bahwa moderasi bukan sekadar persoalan seberapa banyak konten yang dihapus, tetapi bagaimana keputusan dibuat secara tepat dan proporsional.

Keseimbangan antara keduanya membutuhkan aturan yang jelas dan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Platform perlu menjelaskan dasar pengambilan keputusan, menyediakan mekanisme banding, serta melakukan evaluasi terhadap kesalahan moderasi. Transparansi semacam ini penting agar masyarakat tidak merasa bahwa aturan platform digunakan secara sewenang-wenang untuk mengendalikan percakapan politik.

5. Menyeimbangkan Moderasi dan Demokrasi

Moderasi konten yang baik harus berorientasi pada perlindungan ruang publik, bukan sekadar penghapusan konten sebanyak mungkin. Platform perlu membedakan antara informasi yang salah karena ketidaksengajaan, opini yang kontroversial, satire, kritik politik, dan disinformasi yang sengaja dibuat untuk menipu. Perbedaan tersebut penting agar tindakan moderasi tidak menghambat diskusi politik yang sah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam menjaga keseimbangan tersebut. Pengguna perlu mengetahui alasan konten mereka dibatasi atau dihapus dan memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan. Platform juga perlu terbuka mengenai aturan, prosedur, dan penggunaan AI dalam proses moderasi. Dengan demikian, keputusan moderasi dapat lebih mudah diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, moderasi konten dan kebebasan berekspresi bukan dua kepentingan yang harus selalu dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersama apabila moderasi dilakukan secara proporsional, transparan, konsisten, dan menghormati hak warga. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ruang digital yang memungkinkan masyarakat bebas

menyampaikan pendapat sekaligus terlindungi dari manipulasi, ancaman, dan informasi yang secara nyata merusak proses demokrasi.

C. Regulasi Platform Digital di Berbagai Negara

Pendekatan regulasi platform digital menunjukkan variasi signifikan antarnegara, mencerminkan perbedaan tradisi hukum, nilai konstitusional mengenai kebebasan berekspresi, dan kapasitas kelembagaan masing-masing negara dalam menegakkan regulasi. Uni Eropa melalui *Digital Services Act* mengembangkan salah satu kerangka regulasi paling komprehensif di dunia, menetapkan kewajiban gradasi berdasarkan ukuran dan tingkat risiko platform, dengan platform dan mesin pencari berskala sangat besar dikenakan kewajiban tambahan berupa asesmen risiko wajib, audit independen, dan transparansi algoritmik. Signifikansi regulasi ini tidak terbatas pada Uni Eropa semata, karena fenomena "efek Brussels" menunjukkan kecenderungan standar regulasi Uni Eropa diadopsi secara sukarela oleh perusahaan teknologi global maupun ditiru oleh yurisdiksi lain di berbagai belahan dunia.

Amerika Serikat mengambil pendekatan regulasi yang secara signifikan berbeda dari Uni Eropa, dengan *Section 230 Communications Decency Act* yang memberikan imunitas luas kepada platform dari tanggung jawab hukum atas konten yang diunggah penggunanya. Meskipun *Section 230* sempat diperiksa Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Gonzalez v. Google LLC pada 2023, pengadilan pada akhirnya tidak menerapkan doktrin tersebut karena menilai gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut, sehingga kerangka imunitas luas *Section* 230 tetap dipertahankan. Pendekatan minimal intervensi negara ini mencerminkan tradisi konstitusional Amerika Serikat yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai nilai yang sangat dilindungi, meskipun pendekatan ini juga dikritik karena dinilai memberikan terlalu sedikit insentif bagi platform untuk secara proaktif menangani konten berbahaya.

Untuk memperjelas perbedaan mendasar antar-yurisdiksi, Tabel 7.1 membandingkan tiga model regulasi platform digital pada dimensi filosofi dasar, mekanisme penegakan, dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi. Perbandingan ini menegaskan bahwa tidak ada model regulasi tunggal yang dapat diterapkan secara universal, mengingat

setiap model regulasi mencerminkan trade-off nilai yang berbeda antara perlindungan terhadap bahaya daring dan pelestarian kebebasan berekspresi warga negara.

Tabel 7.1 Perbandingan Model Regulasi Platform Digital

Dimensi	Uni Eropa (DSA)	Amerika Serikat (Section 230)
Filosofi dasar	Regulasi proaktif berbasis risiko dan kewajiban platform	Imunitas luas, minim intervensi negara
Kewajiban transparansi	Wajib, mencakup audit independen dan asesmen risiko	Sukarela, tanpa kewajiban hukum yang mengikat
Mekanisme keberatan	Wajib disediakan platform dan badan sengketa independen	Terbatas pada kebijakan internal platform
Sanksi pelanggaran	Denda hingga 6% pendapatan global tahunan	Minim sanksi langsung terhadap platform
Implikasi ekspresi	Risiko overmoderasi akibat kewajiban kepatuhan ketat	Risiko undermoderasi akibat minimnya insentif

Di kawasan Asia, pendekatan regulasi platform digital cenderung lebih beragam dan sering kali menekankan kedaulatan digital nasional sebagai prinsip utama. Sejumlah negara mengembangkan kerangka regulasi yang mewajibkan platform menyimpan data warga negara di dalam yurisdiksi domestik dan menetapkan perwakilan hukum lokal yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sebuah pendekatan yang berbeda signifikan dari model Uni Eropa yang menekankan pada kewajiban prosedural transparansi maupun model Amerika Serikat yang menekankan pada kebebasan pasar.

Perbandingan lebih lanjut antarnegara juga menunjukkan bahwa efektivitas regulasi platform digital tidak semata ditentukan oleh kekomprehensifan teks regulasi, melainkan juga oleh kapasitas kelembagaan penegakan hukum. Uni Eropa relatif diuntungkan oleh keberadaan Komisi Eropa sebagai badan pengawas supranasional dengan

kapasitas teknis dan sumber daya finansial yang memadai untuk menegakkan *Digital Services Act* secara konsisten. Sebaliknya, banyak negara berkembang yang telah menyusun kerangka regulasi platform yang relatif progresif di atas kertas menghadapi tantangan signifikan dalam penegakannya, akibat keterbatasan kapasitas teknis regulator, sumber daya finansial yang terbatas, dan asimetri kekuatan tawar-menawar yang signifikan dibandingkan perusahaan teknologi multinasional yang mereka atur.

Selain Uni Eropa dan Amerika Serikat, sejumlah negara berkembang mulai mengembangkan kerangka regulasi platform digital mereka sendiri yang mencerminkan prioritas dan konteks kelembagaan yang berbeda dari kedua model dominan tersebut. India, misalnya, mengembangkan kerangka regulasi *Information Technology Rules* yang mewajibkan platform besar menunjuk petugas kepatuhan lokal dan merespons keluhan konten dalam jangka waktu tertentu, mencerminkan pendekatan yang menekankan akuntabilitas lokal sekaligus kedaulatan digital nasional. Keragaman pendekatan regulasi platform digital di negara berkembang ini menegaskan bahwa masa depan tata kelola platform global kemungkinan akan semakin terfragmentasi menjadi berbagai model regional, alih-alih konvergen menuju satu standar global tunggal.

Pengalaman implementasi *Digital Services Act* pada tahun-tahun awal pemberlakuannya juga menghasilkan sejumlah pembelajaran penting bagi yurisdiksi lain yang mempertimbangkan pengembangan kerangka regulasi serupa. Salah satu tantangan utama yang teridentifikasi adalah kompleksitas teknis dalam melakukan audit algoritmik secara independen, mengingat regulator umumnya tidak memiliki akses langsung terhadap kode sumber dan data pelatihan sistem algoritmik platform, sehingga sangat bergantung pada laporan yang disediakan platform itu sendiri. Ketergantungan pada laporan mandiri platform ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang perlu diatasi melalui pengembangan kapasitas audit independen yang benar-benar mandiri dari platform yang diaudit, sebuah agenda pengembangan kelembagaan yang masih terus berlangsung di berbagai yurisdiksi yang menerapkan kerangka regulasi berbasis audit.

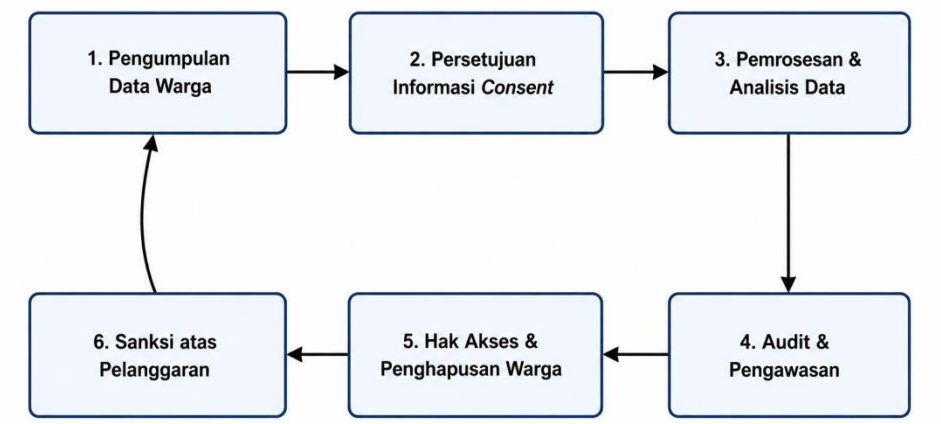
Dinamika politik penyusunan regulasi platform digital juga perlu dipahami sebagai proses yang melibatkan lobi intensif dari berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Perusahaan teknologi besar umumnya mengerahkan sumber daya finansial dan personel lobi yang signifikan untuk memengaruhi proses legislasi

regulasi platform, sementara kelompok masyarakat sipil dan advokasi hak digital berupaya mengimbangi pengaruh tersebut melalui riset independen dan mobilisasi opini publik.

D. Perlindungan Data Pribadi dalam Demokrasi Digital

Perlindungan data pribadi menjadi fondasi penting bagi demokrasi digital yang sehat, mengingat data perilaku warga menjadi bahan baku utama bagi politik berbasis data dan analisis perilaku pemilih berbasis AI. Alur perlindungan data pribadi yang komprehensif, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 7.3, mencakup enam tahap yang saling berkaitan: pengumpulan data warga, persetujuan yang benar-benar terinformasi, pemrosesan dan analisis data, audit dan pengawasan independen, hak akses dan penghapusan data oleh warga, hingga sanksi tegas atas pelanggaran yang membentuk siklus akuntabilitas berkelanjutan bagi pengelolaan data politik warga negara.

Gambar 7.3 Alur Perlindungan Data Pribadi dalam Demokrasi Digital



General Data Protection Regulation Uni Eropa tetap menjadi kerangka regulasi perlindungan data paling berpengaruh secara global, menetapkan prinsip-prinsip mendasar seperti persetujuan eksplisit, tujuan penggunaan yang terbatas, dan hak warga untuk mengakses serta menghapus data pribadi mereka. Dalam konteks politik, kerangka semacam ini secara langsung membatasi praktik microtargeting yang

mengeksploitasi data pribadi tanpa persetujuan memadai sebagaimana terungkap dalam skandal *Cambridge Analytica*, meskipun penegakan regulasi perlindungan data dalam konteks politik tetap menghadapi tantangan signifikan mengingat kompleksitas rantai pengumpulan dan pemrosesan data yang melibatkan banyak pihak ketiga, termasuk perusahaan konsultan politik dan platform periklanan digital.

Ketegangan antara perlindungan data pribadi dan efektivitas kampanye politik berbasis data menciptakan dilema kebijakan yang kompleks. Di satu sisi, pembatasan ketat terhadap pengumpulan dan penggunaan data politik melindungi otonomi dan privasi warga negara dari eksploitasi berlebihan. Di sisi lain, pembatasan yang terlalu ketat berpotensi menghambat kapasitas kampanye politik legitimate untuk menjangkau dan memahami kebutuhan pemilih secara efektif, terutama bagi kandidat atau partai dengan sumber daya terbatas yang bergantung pada efisiensi kampanye berbasis data untuk bersaing dengan kandidat yang memiliki sumber daya finansial lebih besar. Penyeimbangan kedua kepentingan ini menuntut kerangka regulasi yang cermat dan proporsional, alih-alih pendekatan yang terlalu permisif maupun terlalu restriktif.

Persoalan perlindungan data pribadi dalam konteks politik juga mencakup dimensi data inferensial, yaitu data yang tidak secara langsung diberikan warga namun disimpulkan sistem AI dari pola perilaku digital mereka, seperti orientasi politik yang diinferensikan dari riwayat interaksi media sosial meskipun warga tersebut tidak pernah secara eksplisit menyatakan preferensi politiknya. Data inferensial semacam ini menciptakan tantangan regulasi tersendiri, karena kerangka perlindungan data konvensional yang berfokus pada data yang secara eksplisit diberikan warga belum sepenuhnya memadai untuk mengatur praktik inferensi data yang semakin canggih dan sulit dideteksi oleh warga negara yang menjadi subjeknya, menuntut pembaruan kerangka regulasi yang secara eksplisit turut mencakup perlindungan terhadap data inferensial dalam konteks politik.

Perlindungan data pribadi dalam konteks politik juga perlu mempertimbangkan dimensi keamanan nasional, mengingat data politik warga negara berpotensi menjadi target operasi intelijen asing sebagaimana telah disinggung dalam konteks operasi manipulasi informasi asing. Kebocoran data politik berskala besar tidak hanya merugikan privasi individu warga negara yang terdampak, tetapi juga berpotensi dieksploitasi aktor asing untuk menyusun profil target *microtargeting* bagi

operasi disinformasi yang disesuaikan secara presisi, menciptakan persinggungan erat antara persoalan perlindungan data pribadi konvensional dengan persoalan keamanan nasional yang menuntut koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga di tingkat pemerintahan.

Kompleksitas rantai pemrosesan data politik juga mencakup peran perusahaan konsultan politik dan agensi periklanan digital sebagai perantara antara platform, kampanye, dan data pemilih, sebuah lapisan tambahan dalam rantai pasok data yang sering kali kurang mendapat pengawasan regulasi dibandingkan platform besar itu sendiri. Perusahaan konsultan politik dapat mengumpulkan, menggabungkan, dan menganalisis data dari berbagai sumber platform sekaligus, menciptakan profil pemilih yang jauh lebih komprehensif dibandingkan yang dapat dihasilkan satu platform secara individual, namun operasi mereka sering kali beroperasi dalam area abu-abu regulasi yang belum sepenuhnya diatur kerangka perlindungan data konvensional yang cenderung berfokus pada platform sebagai pengendali data utama.

Perlindungan data pribadi dalam konteks pemilu juga menuntut perhatian khusus terhadap periode pascapemilu, mengingat data yang dikumpulkan selama masa kampanye termasuk profil psikografis dan preferensi politik pemilih berpotensi terus disimpan dan dimanfaatkan aktor politik jauh setelah pemilu berakhir, tanpa batasan waktu retensi yang jelas. Ketiadaan kewajiban penghapusan data politik pascapemilu menciptakan risiko akumulasi profil politik warga negara dalam jangka panjang oleh berbagai aktor politik yang pernah mengumpulkan data mereka, sebuah risiko privasi yang menuntut kerangka regulasi eksplisit mengenai batas waktu retensi data politik dan kewajiban penghapusan data setelah periode retensi yang wajar terlampaui.

E. Model Tata Kelola Platform yang Demokratis

Model tata kelola platform yang demokratis merupakan pendekatan dalam mengelola platform digital dengan menempatkan prinsip demokrasi, kepentingan publik, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga sebagai dasar pengambilan keputusan. Platform digital saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi atau hiburan, tetapi telah menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, berdiskusi, membentuk opini, dan berpartisipasi

dalam kehidupan politik. Karena itu, cara platform mengatur konten, algoritma, data, dan interaksi pengguna memiliki konsekuensi langsung terhadap kualitas demokrasi.

Gambar 7.2 Model Tata Kelola Platform Digital yang Demokratis



Tata kelola platform menjadi semakin penting karena sebagian besar aktivitas digital berlangsung dalam lingkungan yang aturan dan mekanismenya ditentukan oleh perusahaan teknologi. Keputusan mengenai konten apa yang ditampilkan, informasi apa yang direkomendasikan, akun mana yang dibatasi, serta bagaimana data pengguna digunakan dapat memengaruhi perilaku dan persepsi masyarakat. Dengan demikian, platform memiliki kekuasaan yang menyerupai fungsi pengaturan ruang publik, meskipun platform bukan lembaga pemerintahan.

Model tata kelola yang demokratis berupaya memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak digunakan secara sepihak. Pengelolaan platform perlu melibatkan transparansi aturan, mekanisme pengawasan,

perlindungan hak pengguna, partisipasi pemangku kepentingan, serta pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuat. Tujuannya bukan menghilangkan peran perusahaan dalam mengelola platform, tetapi memastikan bahwa kepentingan komersial tetap seimbang dengan kepentingan masyarakat dan prinsip demokrasi.

1. Transparansi dalam Pengelolaan Platform

Transparansi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola platform yang demokratis. Pengguna perlu mengetahui bagaimana aturan platform dibuat dan bagaimana keputusan mengenai konten, akun, iklan, serta distribusi informasi dilakukan. Tanpa transparansi, masyarakat akan kesulitan memahami mengapa suatu konten mendapatkan jangkauan tinggi sementara konten lain dibatasi atau tidak terlihat.

Transparansi juga berkaitan dengan penggunaan algoritma. Algoritma menentukan sebagian informasi yang muncul di hadapan pengguna, sehingga mekanisme rekomendasi memiliki pengaruh terhadap pembentukan ruang informasi. Platform tidak harus membuka seluruh kode sumber algoritmanya, tetapi perlu memberikan penjelasan yang memadai mengenai prinsip dan faktor utama yang memengaruhi rekomendasi serta distribusi konten.

Dalam konteks politik, transparansi menjadi semakin penting karena algoritma dapat memengaruhi visibilitas pesan politik. Pengguna perlu mengetahui apakah suatu konten merupakan iklan politik, konten yang dipromosikan, atau informasi yang muncul secara organik. Dengan informasi tersebut, masyarakat dapat menilai pesan politik secara lebih kritis dan memahami konteks di balik kemunculannya.

2. Akuntabilitas dan Mekanisme Pengawasan

Akuntabilitas berarti platform harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang memengaruhi pengguna. Ketika sebuah akun dibatasi, konten dihapus, atau distribusi informasi dikurangi, harus terdapat alasan yang jelas dan mekanisme yang memungkinkan keputusan tersebut diperiksa. Mekanisme pengawasan dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk regulator, lembaga independen, peneliti, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan pengguna. Keterlibatan pihak eksternal dapat membantu mengurangi risiko bahwa perusahaan menjadi satu-satunya pihak yang menentukan bagaimana ruang publik digital dikelola. Akuntabilitas juga membutuhkan

mekanisme pengaduan dan banding. Pengguna harus memiliki kesempatan untuk meminta peninjauan ketika merasa kontennya dibatasi secara keliru. Proses tersebut penting terutama dalam konteks politik karena kesalahan moderasi dapat membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan kritik atau berpartisipasi dalam perdebatan publik.

3. Partisipasi Pengguna dan Pemangku Kepentingan

Tata kelola yang demokratis tidak seharusnya hanya dilakukan dari atas ke bawah. Pengguna perlu memiliki ruang untuk memberikan masukan mengenai aturan, kebijakan, dan perubahan sistem yang memengaruhi pengalaman mereka. Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui konsultasi publik, forum pengguna, survei, atau mekanisme lain yang memungkinkan masukan masyarakat dipertimbangkan. Selain pengguna, tata kelola platform juga dapat melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, kelompok perlindungan konsumen, jurnalis, serta ahli teknologi. Setiap kelompok memiliki perspektif yang berbeda mengenai dampak platform terhadap masyarakat. Pelibatan berbagai pihak dapat membantu menghasilkan aturan yang lebih seimbang dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis.

Partisipasi juga penting dalam menangani persoalan yang kompleks seperti disinformasi, ujaran kebencian, moderasi konten, dan penggunaan AI. Tidak semua masalah tersebut dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknologi. Dialog antara platform dan masyarakat dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang terdampak.

4. Perlindungan Hak dan Kepentingan Publik

Platform digital perlu menghormati hak dasar pengguna, termasuk kebebasan berekspresi, privasi, keamanan, dan akses terhadap informasi. Dalam konteks politik, perlindungan tersebut menjadi penting karena platform telah menjadi salah satu ruang utama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan aktivitas politik. Perlindungan privasi juga menjadi bagian penting dari tata kelola demokratis. Data pengguna dapat digunakan untuk personalisasi konten, periklanan, dan analisis perilaku. Jika penggunaan data tidak transparan atau tidak memiliki perlindungan yang memadai, data tersebut dapat digunakan untuk memengaruhi perilaku pengguna secara berlebihan, termasuk dalam konteks politik.

Kepentingan publik juga harus diperhatikan ketika platform menghadapi konflik antara kepentingan komersial dan kualitas ruang informasi. Sistem yang hanya mengejar keterlibatan pengguna dapat memberikan keuntungan pada konten yang sensasional, kontroversial, atau emosional. Tata kelola yang demokratis perlu mempertimbangkan dampak sosial dari desain platform, bukan hanya ukuran keuntungan atau jumlah interaksi.

5. Pengawasan Algoritma dan Kecerdasan Buatan

Algoritma dan AI memiliki peran besar dalam menentukan bagaimana informasi diproduksi, direkomendasikan, dan dimoderasi. Karena itu, tata kelola platform yang demokratis perlu memastikan bahwa sistem tersebut tidak menghasilkan diskriminasi, manipulasi, atau pembatasan yang tidak proporsional terhadap kelompok tertentu. Pengawasan algoritma dapat dilakukan dengan mengevaluasi bagaimana sistem rekomendasi bekerja, bagaimana konten politik diprioritaskan, serta apakah terdapat bias dalam proses moderasi otomatis. Evaluasi juga perlu memperhatikan dampak sistem terhadap kelompok masyarakat yang berbeda. Sistem yang terlihat netral secara teknis belum tentu menghasilkan dampak yang netral dalam praktik.

Dalam penggunaan AI, pengawasan manusia tetap diperlukan. Keputusan otomatis yang memiliki dampak besar terhadap hak pengguna sebaiknya dapat ditinjau kembali oleh manusia. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, bukan sebagai pengganti seluruh proses pengambilan keputusan yang memiliki konsekuensi sosial dan politik.

6. Model Tata Kelola yang Seimbang dan Demokratis

Model tata kelola platform yang demokratis pada akhirnya membutuhkan keseimbangan antara beberapa kepentingan. Platform tetap membutuhkan ruang untuk melakukan inovasi dan menjalankan kegiatan bisnis, tetapi kepentingan tersebut tidak boleh mengabaikan hak pengguna dan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, pengawasan eksternal juga perlu dilakukan secara proporsional agar tidak berubah menjadi kontrol yang berlebihan terhadap ruang digital. Model yang ideal dapat dibangun melalui kombinasi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, perlindungan hak, pengawasan algoritma, dan tanggung jawab sosial. Tidak ada satu mekanisme yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan platform

digital. Masing-masing mekanisme perlu saling melengkapi agar pengelolaan platform tidak terkonsentrasi pada satu pihak.

Dengan demikian, tata kelola platform yang demokratis bukan sekadar persoalan bagaimana perusahaan teknologi mengatur pengguna, tetapi bagaimana kekuasaan digital dapat dikendalikan melalui prinsip demokrasi. Platform perlu menjadi ruang yang terbuka terhadap perbedaan pendapat, aman dari manipulasi, transparan dalam pengambilan keputusan, dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari teknologi yang digunakannya. Jika prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, platform digital dapat berfungsi sebagai infrastruktur yang memperkuat partisipasi warga dan kualitas demokrasi, bukan menjadi sumber kekuasaan baru yang sulit diawasi.

BAB VIII
ETIKA KECERDASAN BUATAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK

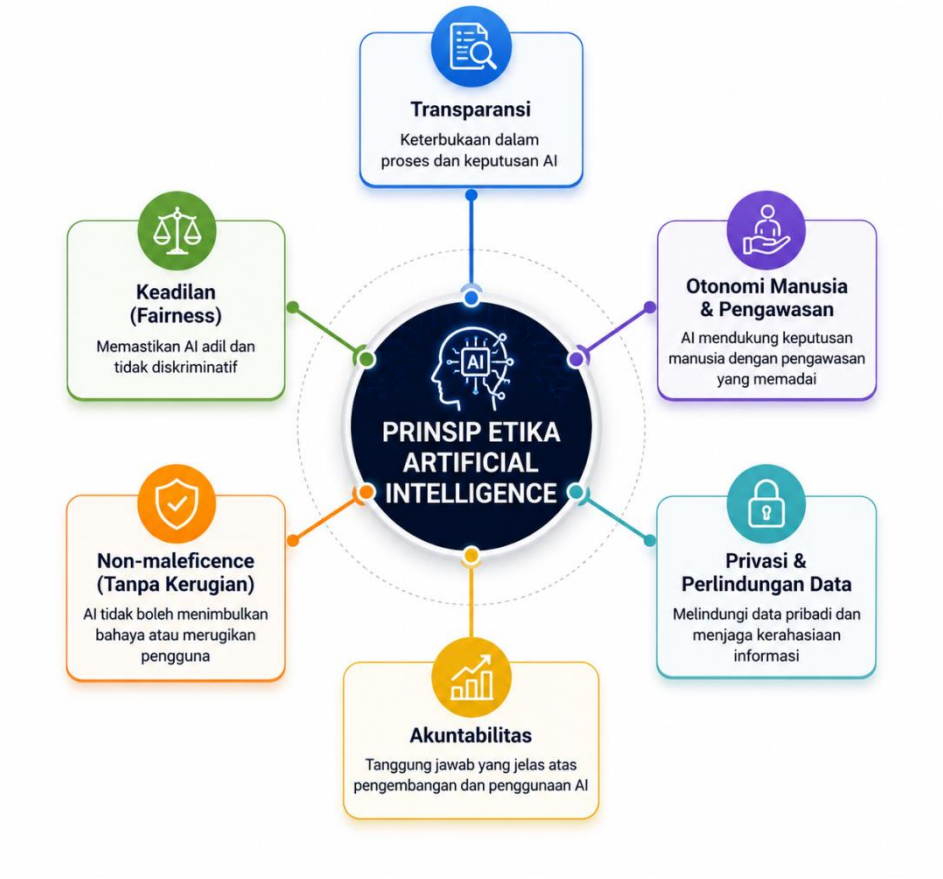
Perkembangan kecerdasan buatan (AI) semakin memengaruhi kehidupan politik, mulai dari analisis opini publik, komunikasi politik, hingga produksi dan penyebaran konten. Penggunaan AI memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan partisipasi politik, tetapi juga menimbulkan persoalan etika, seperti bias algoritma, pelanggaran privasi, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan teknologi untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan AI dalam kehidupan politik perlu didasarkan pada prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, privasi, dan penghormatan terhadap kebebasan warga. Etika AI menjadi penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan sebagai sarana yang mendukung demokrasi, bukan sebagai alat untuk memanipulasi masyarakat atau memperkuat ketimpangan kekuasaan.

A. Prinsip Etika *Artificial Intelligence*

Prinsip etika *Artificial Intelligence* (AI) merupakan seperangkat nilai dan pedoman yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan AI berlangsung secara bertanggung jawab, aman, dan berorientasi pada kepentingan manusia. AI memiliki kemampuan untuk memproses data dalam jumlah besar, mengenali pola, membuat prediksi, dan menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Karena itu, penerapan AI tidak cukup hanya dinilai berdasarkan kemampuan teknis dan efisiensinya, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap hak, kebebasan, keadilan, serta kehidupan sosial. Dalam konteks politik dan demokrasi, prinsip etika AI menjadi semakin penting karena teknologi ini dapat digunakan dalam kampanye, analisis perilaku pemilih, produksi konten politik, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan. Etika diperlukan agar penggunaan AI

tidak berubah menjadi instrumen manipulasi, diskriminasi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Keenam prinsip utama etika AI yang relevan bagi konteks politik, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 8.1, mencakup transparansi, keadilan, non-maleficence, akuntabilitas, privasi dan perlindungan data, serta otonomi manusia dan pengawasan.

Gambar 8.1 Prinsip Utama Etika Artificial Intelligence



Sumber: Jobin, Ienca, & Vayena (2021)

Salah satu prinsip utama etika AI adalah transparansi dan keterjelasan. Masyarakat perlu mengetahui ketika mereka berinteraksi dengan sistem AI, bagaimana data digunakan, serta secara umum bagaimana suatu sistem menghasilkan rekomendasi atau keputusan. Transparansi menjadi penting karena keputusan yang dihasilkan AI dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan tanpa selalu dapat dipahami oleh pengguna. Dalam kehidupan politik, misalnya, algoritma dapat digunakan untuk menentukan jenis konten politik yang ditampilkan kepada seseorang

berdasarkan perilaku digitalnya. Jika proses tersebut berlangsung tanpa keterbukaan, masyarakat dapat kesulitan mengetahui mengapa mereka menerima informasi tertentu dan bagaimana informasi tersebut dipilih. Oleh sebab itu, pengelola AI perlu menyediakan informasi yang memadai mengenai tujuan penggunaan sistem, jenis data yang digunakan, serta batasan dan potensi kesalahan sistem.

Prinsip berikutnya adalah keadilan dan non-diskriminasi. Sistem AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil apabila data yang digunakan dalam proses pelatihan mengandung bias atau tidak mewakili keragaman masyarakat. Bias tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya berdasarkan kondisi sosial, wilayah, tingkat ekonomi, gender, usia, atau karakteristik kelompok tertentu. Dalam konteks politik, bias algoritma dapat menyebabkan kelompok masyarakat tertentu memperoleh akses informasi atau layanan digital yang berbeda. Karena itu, pengembangan AI harus memperhatikan kualitas dan keberagaman data serta melakukan evaluasi secara berkala untuk menemukan potensi diskriminasi. Prinsip keadilan tidak berarti bahwa semua orang harus selalu mendapatkan perlakuan yang sama dalam setiap situasi, tetapi memastikan bahwa penggunaan AI tidak menciptakan perlakuan yang merugikan atau tidak proporsional terhadap kelompok tertentu.

Privasi dan perlindungan data juga menjadi prinsip penting dalam etika AI. Kemampuan AI untuk mengolah data dalam jumlah besar membuat teknologi ini sangat bergantung pada informasi mengenai individu dan kelompok masyarakat. Data tersebut dapat berupa informasi demografis, aktivitas digital, preferensi, lokasi, hingga pola perilaku pengguna. Penggunaan data tanpa persetujuan yang memadai dapat mengancam privasi dan meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi pribadi. Dalam politik, persoalan ini menjadi semakin sensitif karena data warga dapat digunakan untuk melakukan segmentasi pemilih dan menyusun pesan politik yang sangat personal. Oleh karena itu, pengelolaan data harus dilakukan secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan persetujuan, keamanan, pembatasan penggunaan, serta hak individu untuk mengetahui dan mengendalikan penggunaan datanya.

Prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab manusia menegaskan bahwa AI tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan yang berdampak pada manusia. Meskipun sistem AI dapat melakukan analisis dan menghasilkan rekomendasi secara otomatis, tetap harus terdapat pihak yang bertanggung

jawab atas desain, penggunaan, pengawasan, dan dampak dari sistem tersebut. Prinsip ini sangat penting dalam kehidupan politik karena keputusan yang berkaitan dengan hak warga, akses informasi, pelayanan publik, atau proses elektoral memiliki konsekuensi yang luas. Ketika AI menghasilkan kesalahan atau keputusan yang merugikan, harus tersedia mekanisme untuk melakukan pemeriksaan, koreksi, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, AI sebaiknya digunakan sebagai alat yang membantu manusia dalam mengambil keputusan, bukan menggantikan sepenuhnya pertimbangan manusia dalam persoalan yang memiliki konsekuensi sosial dan politik yang besar.

Pada akhirnya, prinsip etika AI juga berkaitan dengan keamanan, kemanusiaan, dan kebermanfaatan sosial. Sistem AI harus dirancang agar tidak mudah disalahgunakan, menghasilkan kerugian, atau digunakan untuk memanipulasi masyarakat. Dalam demokrasi, AI seharusnya mendukung kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi yang berkualitas, partisipasi warga, dan proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Penggunaan AI untuk membuat *deepfake*, menyebarkan informasi palsu secara masif, atau memanipulasi preferensi politik menunjukkan bahwa teknologi yang kuat dapat menimbulkan risiko apabila tidak disertai batasan etis. Oleh karena itu, penerapan AI perlu menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dengan mengutamakan transparansi, keadilan, privasi, akuntabilitas, keamanan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi penting agar perkembangan AI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kualitas, kepercayaan, dan keberlanjutan demokrasi.

B. Hak Asasi Manusia dalam Era AI

Persinggungan antara kecerdasan buatan dan hak asasi manusia menjadi semakin signifikan seiring meluasnya penerapan AI dalam berbagai aspek kehidupan politik, mencakup hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hak untuk tidak didiskriminasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. UNESCO secara eksplisit menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi utama etika AI, menegaskan bahwa sistem AI tidak boleh digunakan dengan cara yang melanggar atau menggerus hak asasi manusia yang telah diakui secara

internasional, termasuk dalam konteks penggunaan AI untuk tujuan politik seperti analisis perilaku pemilih dan produksi konten kampanye.

Hak atas privasi menjadi salah satu hak asasi manusia yang paling langsung terancam oleh penerapan AI dalam politik, mengingat analisis perilaku pemilih berbasis AI bergantung pada pengumpulan dan pemrosesan data pribadi warga negara dalam skala masif. Ancaman terhadap privasi ini tidak terbatas pada pengumpulan data eksplisit semata, melainkan juga mencakup inferensi karakteristik sensitif seperti orientasi politik, afiliasi keagamaan, atau orientasi seksual dari data yang tampak netral, sebuah praktik yang berpotensi melanggar hak privasi warga negara meskipun secara teknis tidak melanggar ketentuan hukum perlindungan data yang berlaku, mengingat kerangka hukum konvensional belum sepenuhnya mengantisipasi kapasitas inferensial AI kontemporer.

Hak untuk tidak didiskriminasi turut menjadi perhatian penting dalam persinggungan AI dan hak asasi manusia, khususnya mengingat pembahasan bias algoritma yang menunjukkan bagaimana sistem AI dapat mereproduksi dan bahkan memperkuat ketimpangan sosial yang telah ada. Dalam konteks politik, diskriminasi algoritmik dapat termanifestasi melalui ketimpangan visibilitas konten politik antarkelompok demografis, bias dalam sistem verifikasi identitas pemilih yang secara disproporsional menyulitkan kelompok minoritas, atau bias dalam sistem deteksi ujaran kebencian yang kurang akurat dalam mendeteksi konten berbahasa daerah. Perlindungan hak untuk tidak didiskriminasi menuntut audit sistematis terhadap sistem AI politik guna memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang dirugikan secara sistemik oleh penerapan teknologi tersebut.

Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, juga memiliki dimensi baru dalam era AI yang menuntut perhatian khusus. Ketika sistem AI menentukan konten politik apa yang dilihat warga negara, kapasitas warga untuk berpartisipasi secara tercerahkan dalam pemerintahan sangat bergantung pada kualitas dan keberagaman informasi yang mereka terima melalui sistem tersebut. Perlindungan hak partisipasi politik di era AI karenanya tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap ekosistem informasi yang sehat, menegaskan keterkaitan erat antara hak asasi manusia konvensional dengan tata kelola algoritmik kontemporer.

Perlindungan hak asasi manusia dalam era AI juga menuntut perhatian khusus terhadap kelompok rentan yang secara historis

mengalami marginalisasi, mengingat sistem AI berisiko mereproduksi dan bahkan memperkuat ketimpangan yang telah ada terhadap kelompok tersebut. Kelompok rentan dalam konteks politik dapat mencakup minoritas etnis dan agama, penyandang disabilitas, kelompok berpenghasilan rendah dengan akses teknologi terbatas, dan kelompok yang menggunakan bahasa daerah sebagai media komunikasi politik utama mereka. Perlindungan hak asasi manusia yang efektif dalam era AI menuntut perhatian eksplisit terhadap dampak diferensial sistem AI terhadap kelompok-kelompok rentan ini, bukan sekadar evaluasi dampak agregat yang dapat menyembunyikan ketimpangan signifikan pada level subkelompok tertentu.

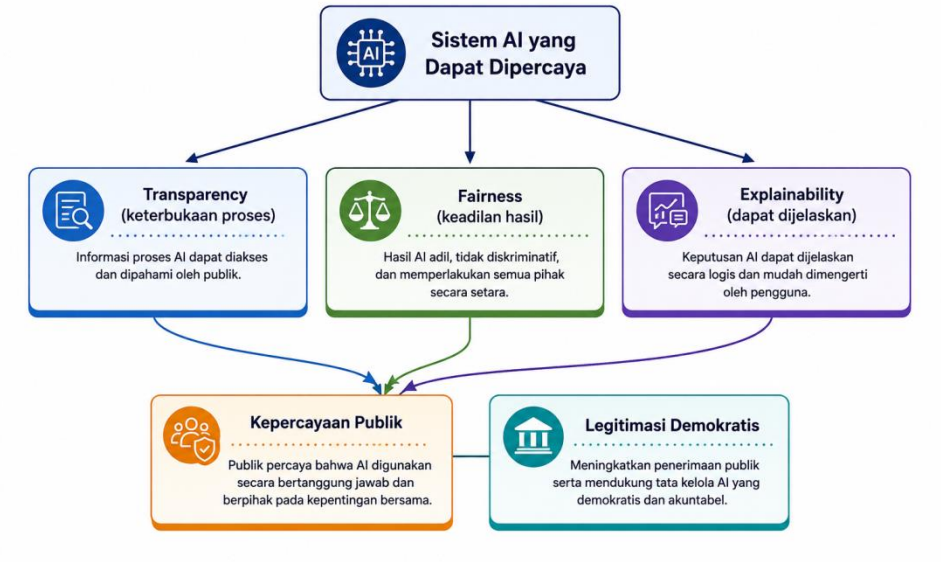
Penerapan rekomendasi UNESCO dalam konteks nasional menghadapi tantangan implementasi yang signifikan, mengingat sifatnya sebagai rekomendasi non-mengikat yang bergantung pada kemauan politik masing-masing negara anggota untuk menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan regulasi domestik yang konkret. Sejumlah negara telah mengembangkan rencana aksi nasional yang secara eksplisit merujuk pada Rekomendasi UNESCO sebagai kerangka acuan, sementara negara lain masih dalam tahap awal mempertimbangkan bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kerangka kebijakan AI domestik mereka. Variasi tingkat implementasi ini menegaskan bahwa konvergensi normatif pada tataran internasional tidak secara otomatis menghasilkan konvergensi praktik pada tataran domestik, menuntut advokasi berkelanjutan bagi penerjemahan prinsip etika AI global ke dalam kebijakan nasional yang konkret dan dapat ditegakkan.

Dimensi hak asasi manusia yang sering terabaikan dalam diskursus AI politik adalah hak atas informasi yang beragam dan seimbang, sebuah hak yang secara implisit terkandung dalam prinsip kebebasan berekspresi dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan yang diakui berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Ketika sistem AI secara sistematis menyempitkan keberagaman informasi politik yang diterima warga negara, hal tersebut dapat dipahami sebagai pelanggaran tidak langsung terhadap hak atas informasi yang beragam, meskipun kerangka hukum hak asasi manusia konvensional belum sepenuhnya mengartikulasikan hak ini secara eksplisit dalam konteks algoritmik kontemporer.

C. Transparansi, *Fairness*, dan *Explainability*

Transparansi, *fairness*, dan *explainability* merupakan tiga pilar teknis yang saling berkaitan dalam membangun sistem AI yang dapat dipercaya, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 8.2. *Explainability* dapat diartikan sebagai transparansi mengenai apa yang mendasari rekomendasi algoritma yang relevan bagi berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan berbeda-beda, sementara *fairness* merujuk pada perlakuan setara terhadap individu atau kelompok individu oleh sistem AI. Ketiga pilar ini secara kolektif membentuk fondasi kepercayaan publik terhadap sistem AI, yang pada gilirannya menjadi prasyarat legitimasi demokratis bagi penerapan AI dalam ranah politik.

Gambar 8.2 Kerangka Transparansi, Fairness, dan Explainability



Transparansi merupakan prinsip penting dalam pengembangan dan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) yang menekankan keterbukaan mengenai bagaimana suatu sistem AI dikembangkan, digunakan, dan menghasilkan keluaran. Pengguna dan masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai tujuan penggunaan AI, jenis data yang digunakan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem tersebut. Dalam kehidupan politik, transparansi menjadi penting karena AI dapat digunakan untuk menyebarkan informasi, menganalisis perilaku masyarakat, melakukan segmentasi pemilih, dan mendukung strategi komunikasi politik. Tanpa transparansi, masyarakat dapat kesulitan

memahami apakah suatu informasi dihasilkan oleh manusia atau AI, bagaimana informasi tersebut dipilih, dan kepentingan apa yang berada di balik penggunaannya.

Fairness atau keadilan berkaitan dengan upaya memastikan bahwa sistem AI tidak menghasilkan perlakuan yang diskriminatif terhadap individu maupun kelompok tertentu. Sistem AI belajar dari data, sehingga kualitas dan karakteristik data dapat memengaruhi hasil yang diberikan. Apabila data pelatihan mengandung bias, sistem dapat menghasilkan rekomendasi atau keputusan yang tidak adil. Dalam konteks politik, bias tersebut dapat memengaruhi cara kelompok masyarakat tertentu menerima informasi politik, memperoleh akses terhadap layanan digital, atau menjadi sasaran komunikasi politik. Oleh sebab itu, penerapan prinsip *fairness* membutuhkan pemeriksaan terhadap data, pengujian sistem secara berkala, serta perhatian terhadap keberagaman kelompok yang terdampak oleh penggunaan AI.

Sementara itu, *explainability* atau keterjelasan mengacu pada kemampuan untuk memberikan penjelasan yang dapat dipahami mengenai alasan suatu sistem AI menghasilkan keputusan, prediksi, atau rekomendasi tertentu. Prinsip ini penting karena sebagian sistem AI memiliki mekanisme yang kompleks sehingga proses pengambilan keputusannya sulit dipahami oleh pengguna. Dalam konteks demokrasi, masyarakat perlu memiliki kesempatan untuk memahami dasar dari keputusan yang dapat memengaruhi kepentingan mereka. Misalnya, apabila algoritma menentukan jenis informasi politik yang ditampilkan kepada pengguna, diperlukan pemahaman mengenai faktor utama yang memengaruhi pemilihan informasi tersebut.

Ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun penggunaan AI yang bertanggung jawab. Transparansi memberikan keterbukaan mengenai keberadaan dan proses penggunaan AI, *fairness* memastikan bahwa sistem tidak menghasilkan perlakuan yang tidak adil, sedangkan *explainability* membantu manusia memahami alasan di balik keluaran sistem. Ketiganya menjadi semakin penting ketika AI digunakan dalam bidang politik karena keputusan dan rekomendasi algoritmik dapat memengaruhi opini publik, perilaku pemilih, serta kualitas ruang diskusi demokratis.

Dalam praktiknya, penerapan ketiga prinsip tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengembang teknologi, platform digital, lembaga politik, akademisi, dan masyarakat. Pengembang

perlu melakukan pengujian terhadap potensi bias, menyediakan informasi yang relevan mengenai cara kerja sistem, serta memastikan adanya mekanisme untuk mengoreksi kesalahan. Pengguna juga perlu memiliki literasi digital yang memadai agar mampu memahami keterbatasan AI dan tidak menerima seluruh keluaran sistem sebagai kebenaran mutlak. Dengan pendekatan tersebut, penggunaan AI dapat berlangsung secara lebih terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, transparansi, *fairness*, dan *explainability* merupakan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap AI. Teknologi yang mampu menghasilkan keputusan dengan cepat belum tentu dapat dianggap baik apabila prosesnya tidak transparan, hasilnya bias, atau keputusannya tidak dapat dijelaskan. Dalam kehidupan demokratis, AI harus ditempatkan sebagai teknologi yang mendukung manusia, bukan sebagai mekanisme yang bekerja tanpa pengawasan. Penerapan ketiga prinsip tersebut membantu memastikan bahwa perkembangan AI tetap sejalan dengan nilai keadilan, kebebasan, hak warga negara, dan prinsip-prinsip demokrasi.

D. Akuntabilitas Pengembang AI

Akuntabilitas pengembang AI merujuk pada kerangka tanggung jawab yang jelas bagi individu maupun organisasi yang merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem AI, khususnya ketika sistem tersebut menghasilkan dampak merugikan terhadap warga negara atau proses demokratis. Rantai akuntabilitas dalam konteks AI politik, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 8.3, melibatkan setidaknya tiga aktor utama yang saling berkaitan: pengembang algoritma yang merancang sistem inti, perusahaan platform atau vendor yang mengintegrasikan dan mendistribusikan sistem tersebut, serta operator kampanye atau pengguna akhir yang menerapkan sistem dalam konteks politik spesifik, dengan dampak kolektif yang bermuara pada warga negara dan proses demokratis secara keseluruhan.

Gambar 8.3 Rantai Akuntabilitas Pengembang AI dalam Politik



Kompleksitas rantai akuntabilitas ini menciptakan tantangan signifikan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika sistem AI politik menghasilkan dampak merugikan. Ketika sebuah sistem AI menghasilkan konten yang menyesatkan atau diskriminatif, pertanyaan mengenai apakah tanggung jawab utama berada pada pengembang algoritma yang merancang model dasar, perusahaan yang mengintegrasikan model tersebut ke dalam produk komersial, ataukah operator kampanye yang menerapkan sistem tanpa pengawasan memadai, sering kali tidak memiliki jawaban tunggal yang jelas, menuntut kerangka hukum yang secara eksplisit menetapkan pembagian tanggung jawab proporsional di sepanjang rantai tersebut.

EU AI Act, yang mulai berlaku sejak 2024 sebagai regulasi AI komprehensif pertama di dunia, mengadopsi pendekatan berbasis risiko yang menetapkan kewajiban akuntabilitas berbeda-beda tergantung tingkat risiko sistem AI, dengan sistem AI berisiko tinggi termasuk sistem yang digunakan dalam konteks pemilu dan proses demokratis dikenakan kewajiban dokumentasi, audit, dan pengawasan manusia yang jauh lebih ketat dibandingkan sistem AI berisiko rendah. Pendekatan berbasis risiko ini mencerminkan pengakuan bahwa tidak semua aplikasi AI memerlukan tingkat pengawasan akuntabilitas yang sama, sehingga sumber daya regulasi dapat difokuskan pada aplikasi yang berpotensi menimbulkan

dampak paling signifikan terhadap hak-hak fundamental warga negara, termasuk hak-hak politik yang menjadi fokus pembahasan buku ini.

Standar internasional ISO/IEC 42001 yang diterbitkan pada Desember 2023 melengkapi kerangka regulasi berbasis risiko dengan menyediakan standar sertifikasi formal bagi organisasi yang mengembangkan sistem manajemen AI bertanggung jawab. Berbeda dari kerangka NIST yang bersifat panduan sukarela, ISO 42001 menyediakan mekanisme sertifikasi yang dapat diverifikasi pihak ketiga independen, memberikan sinyal kredibilitas yang lebih kuat kepada publik mengenai komitmen organisasi terhadap pengembangan AI yang bertanggung jawab. Adopsi standar sertifikasi semacam ini oleh perusahaan yang mengembangkan sistem AI politik dapat menjadi instrumen penting bagi peningkatan akuntabilitas industri secara keseluruhan, meskipun sifatnya yang sukarela berarti dampaknya sangat bergantung pada tekanan pasar dan regulasi tambahan yang mewajibkan adopsinya.

Selain kerangka EU AI Act dan standar ISO 42001, sejumlah yurisdiksi lain mengembangkan pendekatan akuntabilitas yang saling melengkapi. Amerika Serikat melalui Executive Order Oktober 2023 menetapkan standar keamanan dan hak sipil bagi pengembangan model AI fondasi berskala besar, sementara sejumlah negara mengembangkan kerangka sertifikasi sukarela yang serupa dengan pendekatan ISO namun disesuaikan konteks regulasi domestik masing-masing. Keragaman pendekatan akuntabilitas ini, meskipun mencerminkan perbedaan filosofi regulasi antarnegara, secara kolektif menunjukkan tren global menuju penguatan akuntabilitas pengembang AI, meskipun harmonisasi standar akuntabilitas lintas yurisdiksi masih menjadi agenda yang belum sepenuhnya tercapai.

Akuntabilitas pengembang AI juga perlu mempertimbangkan dimensi akuntabilitas kolektif industri, melampaui akuntabilitas individual masing-masing perusahaan. Inisiatif kolaboratif seperti forum standar industri dan konsorsium riset keamanan AI memungkinkan berbagi praktik terbaik dan pembelajaran kolektif mengenai risiko dan mitigasi yang efektif, sebuah pendekatan yang melengkapi akuntabilitas individual perusahaan dengan norma dan standar bersama tingkat industri. Akuntabilitas kolektif semacam ini penting mengingat sifat teknologi AI yang berkembang sangat cepat, di mana pembelajaran dari kegagalan atau insiden pada satu perusahaan dapat memberikan pelajaran berharga bagi

seluruh industri untuk mencegah terulangnya insiden serupa pada konteks penerapan yang berbeda.

E. Membangun AI yang Berorientasi pada Demokrasi

Membangun AI yang berorientasi pada demokrasi berarti mengembangkan dan menggunakan kecerdasan buatan dengan menempatkan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian penting dari desain, pengembangan, dan penerapannya. AI tidak hanya perlu dinilai berdasarkan kemampuan teknis, kecepatan, atau efisiensi, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, kebebasan warga, kesetaraan, transparansi, dan kualitas pengambilan keputusan publik. Dalam konteks politik, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena AI dapat memengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam proses politik.

AI memiliki potensi untuk memperluas demokrasi. Teknologi ini dapat membantu masyarakat memperoleh informasi publik, mempermudah akses terhadap dokumen dan kebijakan, mendukung analisis aspirasi masyarakat, serta meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan warga. AI juga dapat membantu kelompok yang memiliki keterbatasan akses untuk memahami informasi politik melalui penyederhanaan bahasa, penerjemahan, dan berbagai bentuk layanan digital.

Namun, AI juga dapat menciptakan konsentrasi kekuasaan baru. Pihak yang menguasai data, algoritma, dan infrastruktur AI memiliki kemampuan besar untuk memengaruhi arus informasi dan perilaku masyarakat. Karena itu, membangun AI yang demokratis membutuhkan perhatian terhadap siapa yang merancang teknologi, data apa yang digunakan, bagaimana keputusan dibuat, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Demokrasi harus menjadi prinsip yang melekat dalam seluruh siklus kehidupan AI.

1. Menempatkan Nilai Demokrasi dalam Desain AI

AI yang berorientasi pada demokrasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak warga. Nilai tersebut tidak seharusnya hanya menjadi pertimbangan setelah sistem selesai dibuat, tetapi perlu diperhatikan sejak tahap awal perancangan teknologi. Dalam

konteks politik, desain AI harus mempertimbangkan bagaimana sistem dapat memengaruhi kebebasan masyarakat dalam memperoleh dan menyampaikan informasi. Sistem rekomendasi, misalnya, sebaiknya tidak dirancang hanya untuk memaksimalkan perhatian pengguna tanpa mempertimbangkan kemungkinan penyebaran informasi manipulatif atau polarisatif. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak sepenuhnya netral. Pilihan mengenai data, tujuan sistem, indikator keberhasilan, dan mekanisme algoritma dapat menghasilkan konsekuensi sosial tertentu. Oleh karena itu, pengembangan AI perlu melibatkan pertimbangan etis dan sosial sejak awal agar teknologi dapat mendukung, bukan melemahkan, prinsip demokrasi.

2. Transparansi dan Keterjelasan Sistem AI

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam membangun AI yang demokratis. Masyarakat perlu mengetahui kapan AI digunakan dan bagaimana teknologi tersebut memengaruhi keputusan atau informasi yang mereka terima. Transparansi menjadi sangat penting ketika AI digunakan dalam proses politik, pemerintahan, komunikasi publik, atau moderasi konten. Sistem AI yang memengaruhi masyarakat sebaiknya memberikan informasi yang dapat dipahami mengenai tujuan penggunaannya, jenis data yang digunakan, dan faktor utama yang memengaruhi hasilnya. Masyarakat tidak selalu membutuhkan akses terhadap seluruh kode teknis, tetapi perlu mendapatkan penjelasan yang cukup untuk memahami bagaimana sistem bekerja dan bagaimana hasilnya dapat memengaruhi mereka. Keterjelasan juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mempertanyakan keputusan AI. Jika seseorang menerima keputusan otomatis yang berdampak pada hak atau aksesnya, harus tersedia mekanisme untuk memperoleh penjelasan dan meminta peninjauan. Dengan demikian, penggunaan AI tidak menciptakan sistem pengambilan keputusan yang tertutup dan sulit dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan, Inklusivitas, dan Pencegahan Bias

AI yang demokratis harus dapat digunakan oleh masyarakat dari berbagai kelompok secara adil. Salah satu persoalan utama adalah bias algoritmik yang dapat muncul dari data atau desain sistem. Jika data yang digunakan tidak mewakili keragaman masyarakat, AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks

politik, bias dapat memengaruhi distribusi informasi, pelayanan publik, moderasi konten, maupun analisis opini masyarakat. Kelompok tertentu dapat menerima informasi yang berbeda atau memperoleh perlakuan berbeda karena karakteristik yang terdapat dalam data. Jika tidak diawasi, teknologi dapat memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada. Karena itu, pengembangan AI perlu memperhatikan keberagaman data dan melakukan evaluasi terhadap kemungkinan bias. Pengujian sistem juga sebaiknya dilakukan terhadap berbagai kelompok pengguna dan kondisi penggunaan. Pendekatan inklusif akan membantu memastikan bahwa AI tidak hanya bekerja dengan baik bagi kelompok yang dominan, tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara lebih luas.

4. Perlindungan Privasi dan Otonomi Warga

AI membutuhkan data dalam jumlah besar untuk melakukan analisis dan menghasilkan prediksi. Dalam politik, data tersebut dapat berkaitan dengan perilaku digital, preferensi terhadap isu, pola interaksi, atau aktivitas masyarakat. Penggunaan data secara tidak terkendali dapat mengancam privasi dan membuka peluang terjadinya manipulasi terhadap individu. AI yang berorientasi pada demokrasi harus membatasi pengumpulan dan penggunaan data sesuai dengan tujuan yang jelas. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan memiliki perlindungan terhadap penggunaan data yang tidak sesuai. Keamanan data juga menjadi bagian penting karena kebocoran atau penyalahgunaan informasi dapat menimbulkan dampak yang serius. Selain privasi, persoalan yang lebih mendasar adalah otonomi warga. AI tidak seharusnya digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan psikologis masyarakat atau memanipulasi keputusan politik secara tersembunyi. Teknologi seharusnya membantu masyarakat membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai, bukan mengarahkan pilihan mereka melalui teknik manipulasi yang sulit disadari.

5. Mendorong Partisipasi Publik dalam Pengembangan AI

AI yang demokratis sebaiknya tidak dikembangkan hanya berdasarkan perspektif perusahaan teknologi atau kelompok ahli. Masyarakat yang akan terkena dampak teknologi perlu memiliki kesempatan untuk memberikan masukan. Partisipasi publik dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang mungkin tidak terlihat dari perspektif teknis. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui

konsultasi publik, forum diskusi, survei, uji coba sistem, atau mekanisme umpan balik. Akademisi, organisasi masyarakat, kelompok pengguna, jurnalis, dan berbagai pemangku kepentingan juga dapat dilibatkan dalam proses evaluasi. Pendekatan tersebut dapat membuat pengembangan AI lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi publik juga membantu meningkatkan legitimasi teknologi. Masyarakat cenderung lebih mudah menerima penggunaan AI ketika mereka memahami tujuan dan manfaatnya serta memiliki kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran. Dengan demikian, partisipasi bukan hanya instrumen untuk memperoleh masukan, tetapi juga bagian dari proses membangun kepercayaan terhadap AI.

Membangun AI yang berorientasi pada demokrasi membutuhkan perubahan cara pandang terhadap teknologi. AI tidak cukup dinilai dari seberapa pintar, cepat, atau efisien sistem tersebut, tetapi juga dari siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang berpotensi dirugikan, bagaimana keputusan dapat diawasi, dan sejauh mana hak warga tetap terlindungi. Pada akhirnya, AI yang demokratis bukanlah AI yang mengambil alih proses demokrasi, melainkan AI yang memperkuat kemampuan manusia untuk menjalankan demokrasi. Teknologi harus tetap berada di bawah prinsip kepentingan publik, hak warga, dan pertanggungjawaban demokratis sehingga kemajuan kecerdasan buatan dapat berjalan seiring dengan penguatan kualitas demokrasi.

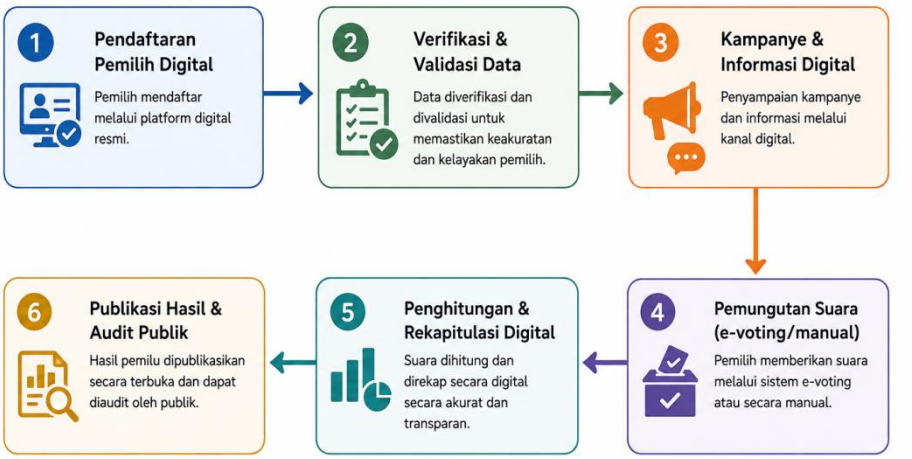
BAB IX
PEMILU DIGITAL DAN MASA DEPAN DEMOKRASI ELEKTORAL

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemilu dan demokrasi elektoral. Teknologi dapat digunakan dalam berbagai tahapan pemilu, mulai dari penyebaran informasi, pendaftaran dan verifikasi pemilih, kampanye digital, hingga penghitungan dan penyampaian hasil. Pemilu digital berpotensi membuat proses demokrasi lebih cepat, mudah diakses, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Namun, digitalisasi pemilu juga menghadirkan tantangan seperti keamanan data, serangan siber, disinformasi, manipulasi digital, dan kesenjangan akses teknologi. Oleh karena itu, masa depan demokrasi elektoral tidak hanya bergantung pada kemampuan mengadopsi teknologi, tetapi juga pada transparansi, keamanan, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Dengan tata kelola yang tepat, teknologi digital dapat menjadi sarana untuk memperkuat integritas pemilu dan meningkatkan partisipasi warga.

A. Digitalisasi Penyelenggaraan Pemilu

Digitalisasi penyelenggaraan pemilu merujuk pada integrasi teknologi digital ke dalam berbagai tahapan siklus elektoral, mulai dari pendaftaran pemilih hingga publikasi hasil akhir. Alur digitalisasi pemilu yang komprehensif, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 9.1, mencakup enam tahap utama: pendaftaran pemilih digital, verifikasi dan validasi data pemilih, kampanye dan diseminasi informasi digital, pemungutan suara yang dapat melibatkan sistem elektronik maupun manual, penghitungan dan rekapitulasi digital, hingga publikasi hasil dan audit publik yang memungkinkan verifikasi independen atas integritas keseluruhan proses.

Gambar 9.1 Alur Digitalisasi Penyelenggaraan Pemilu



Manfaat digitalisasi pemilu tampak signifikan pada tahap pendaftaran pemilih, di mana transisi dari pendaftaran manual berbasis kertas menuju pendaftaran digital secara substansial menurunkan biaya administrasi sekaligus mempercepat proses verifikasi data pemilih. Hovland mencatat bahwa pendaftaran pemilih daring telah menurunkan biaya administrasi pendaftaran pemilih secara signifikan dibandingkan metode pendaftaran manual konvensional, sekaligus mengurangi risiko kesalahan pencatatan akibat penulisan tangan yang tidak terbaca. Efisiensi semacam ini menjadi salah satu argumen utama bagi digitalisasi pemilu, khususnya bagi negara dengan populasi pemilih besar dan sumber daya administrasi elektoral yang terbatas.

Meskipun demikian, digitalisasi pemilu juga menghadirkan risiko baru yang perlu dikelola secara cermat, khususnya terkait keandalan infrastruktur teknis dan potensi kerentanan keamanan siber. Pengalaman digitalisasi pemilu di berbagai negara menunjukkan bahwa manfaat efisiensi administratif perlu diimbangi dengan investasi memadai dalam keandalan sistem, redundansi infrastruktur, dan mekanisme audit yang memungkinkan verifikasi independen hasil pemilu, mengingat kegagalan sistem digital pada momen kritis pemungutan suara dapat menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih serius dibandingkan kegagalan serupa pada konteks administrasi pemerintahan rutin lainnya.

Digitalisasi pemilu juga membuka peluang baru bagi pemilih yang berada di luar negeri atau memiliki keterbatasan mobilitas fisik untuk

berpartisipasi dalam pemilihan umum melalui mekanisme pemungutan suara jarak jauh, meskipun penerapan mekanisme semacam ini menuntut jaminan keamanan dan verifikasi identitas yang setara ketatnya dengan pemungutan suara konvensional di tempat pemungutan suara fisik. Sejumlah negara telah mengembangkan sistem pemungutan suara elektronik jarak jauh dengan berbagai tingkat keberhasilan, dengan Estonia sebagai salah satu contoh paling matang dalam penerapan sistem tersebut secara luas.

Manfaat digitalisasi pemilu juga tampak pada tahap kampanye dan diseminasi informasi, di mana portal informasi pemilu resmi berbasis digital memungkinkan pemilih mengakses informasi mengenai kandidat, program kerja, dan prosedur pemungutan suara secara terpusat dan terverifikasi, mengurangi ketergantungan pemilih pada sumber informasi tidak resmi yang berisiko mengandung disinformasi. Efektivitas portal informasi resmi semacam ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan netralitas penyelenggara pemilu yang mengoperasikannya, menegaskan keterkaitan erat antara aspek teknis digitalisasi pemilu dengan aspek kelembagaan kepercayaan publik yang telah dibangun sebelumnya.

B. Kampanye Politik Berbasis AI

Kampanye politik berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) merupakan perkembangan lanjutan dari digitalisasi kampanye yang memanfaatkan kemampuan komputasi untuk menganalisis data, mengidentifikasi karakteristik pemilih, mengoptimalkan pesan, dan menghasilkan konten politik. Jika kampanye digital sebelumnya terutama berfokus pada penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi, kampanye berbasis AI menambahkan kemampuan untuk melakukan analisis dan otomatisasi dalam skala yang jauh lebih besar. AI dengan demikian tidak hanya menjadi alat produksi konten, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis dalam kampanye.

1. AI untuk Analisis Perilaku dan Preferensi Pemilih

Salah satu penggunaan AI dalam kampanye politik adalah menganalisis data pemilih untuk memahami pola perilaku, preferensi isu, dan kecenderungan politik. Data dapat berasal dari berbagai sumber

digital, seperti interaksi media sosial, hasil survei, aktivitas kampanye, dan pola keterlibatan terhadap konten tertentu. Dengan teknik *machine learning*, data tersebut dapat digunakan untuk menemukan pola yang sulit diidentifikasi melalui analisis konvensional.

Kemampuan analitik AI memungkinkan tim kampanye melakukan segmentasi pemilih secara lebih rinci. Pemilih tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang homogen, tetapi dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik, perhatian terhadap isu, pola konsumsi informasi, atau tingkat keterlibatan politik. Hasil analisis tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan kelompok mana yang perlu diprioritaskan dalam strategi komunikasi. Namun, penggunaan AI untuk menganalisis perilaku politik menimbulkan persoalan mengenai privasi dan penggunaan data pribadi. Data yang digunakan untuk membangun profil politik dapat mengandung informasi sensitif mengenai preferensi dan perilaku seseorang. Karena itu, pengumpulan dan pemrosesan data pemilih harus memperhatikan prinsip persetujuan, keamanan data, transparansi, dan batas penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. AI untuk *Microtargeting* dan Personalisasi Pesan Politik

AI juga memungkinkan kampanye melakukan *microtargeting* dengan tingkat presisi yang lebih tinggi. Sistem dapat membantu menentukan kelompok pemilih yang dianggap paling relevan terhadap suatu pesan kemudian menghasilkan atau memilih konten yang sesuai dengan karakteristik kelompok tersebut. Pendekatan ini memungkinkan kandidat menyampaikan pesan yang berbeda kepada kelompok pemilih yang memiliki kebutuhan dan perhatian politik berbeda.

Personalisasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi komunikasi karena kandidat tidak harus menyampaikan satu pesan yang sama kepada seluruh masyarakat. Isu ekonomi, misalnya, dapat dikomunikasikan dengan penekanan yang berbeda kepada kelompok pekerja, pelaku usaha, mahasiswa, atau masyarakat di wilayah tertentu. AI dapat membantu mengembangkan variasi pesan tersebut dalam jumlah besar dan dengan waktu yang relatif singkat. Namun, personalisasi ekstrem juga dapat menimbulkan persoalan demokratis. Pemilih mungkin tidak mengetahui bahwa mereka sedang menerima pesan yang dirancang khusus berdasarkan profil digital mereka. Kondisi ini dapat menciptakan komunikasi politik yang tidak transparan karena publik tidak dapat melihat keseluruhan pesan yang disampaikan kepada kelompok pemilih lainnya.

Oleh sebab itu, efektivitas *microtargeting* perlu diseimbangkan dengan prinsip keterbukaan agar personalisasi tidak berkembang menjadi manipulasi tersembunyi.

3. AI dalam Produksi dan Distribusi Konten Kampanye

AI generatif memungkinkan tim kampanye memproduksi teks, gambar, audio, dan video dalam waktu yang jauh lebih singkat. Kandidat dapat menggunakan AI untuk menyusun materi media sosial, membuat variasi slogan, mengembangkan naskah video, menerjemahkan pesan ke berbagai bahasa, atau menghasilkan desain visual. Kemampuan tersebut dapat mengurangi biaya produksi sekaligus memungkinkan kampanye menghasilkan konten dalam jumlah besar. AI juga dapat membantu menentukan waktu dan saluran distribusi konten berdasarkan pola interaksi audiens. Sistem dapat menganalisis konten yang memperoleh tingkat keterlibatan tinggi dan memberikan rekomendasi mengenai format atau waktu publikasi. Dengan demikian, produksi dan distribusi pesan dapat berlangsung dalam sebuah siklus yang semakin otomatis.

Meskipun memberikan efisiensi, otomatisasi produksi konten membawa risiko penyebaran informasi yang salah dalam skala besar. Konten yang dihasilkan AI dapat terlihat meyakinkan meskipun mengandung kesalahan faktual. Risiko tersebut menjadi lebih serius ketika teknologi digunakan untuk membuat *deepfake*, suara sintetis, atau gambar manipulatif yang menampilkan kandidat seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Karena itu, proses verifikasi manusia tetap menjadi bagian penting dalam kampanye berbasis AI.

4. AI untuk Prediksi, Strategi, dan Pengambilan Keputusan Kampanye

AI dapat digunakan untuk membantu tim kampanye memprediksi berbagai kemungkinan respons pemilih terhadap isu atau strategi komunikasi tertentu. Model prediktif dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan sentimen publik, memperkirakan tingkat keterlibatan terhadap suatu isu, dan membantu menentukan prioritas wilayah atau kelompok pemilih.

Kemampuan tersebut membuat kampanye politik menjadi semakin adaptif. Ketika muncul isu baru, tim kampanye dapat menganalisis respons masyarakat dan menyesuaikan strategi komunikasi dalam waktu relatif

singkat. AI juga dapat membantu melakukan simulasi terhadap beberapa alternatif pesan sehingga tim kampanye dapat memilih strategi yang diperkirakan paling efektif.

Namun, prediksi AI tidak sama dengan kepastian. Model dibangun berdasarkan data historis dan asumsi tertentu sehingga dapat menghasilkan kesalahan prediksi, terutama ketika terjadi perubahan politik yang tidak terduga. Ketergantungan berlebihan pada prediksi algoritmik juga dapat mengurangi peran pertimbangan manusia dalam keputusan politik. Oleh karena itu, AI sebaiknya diposisikan sebagai alat pendukung keputusan, bukan sebagai pengganti penilaian politik dan pertimbangan etis manusia.

5. Risiko, Etika, dan Tata Kelola Kampanye Politik Berbasis AI

Penggunaan AI dalam kampanye politik menghadirkan sejumlah persoalan etis yang perlu mendapat perhatian. Selain privasi data dan manipulasi informasi, terdapat risiko bias algoritmik, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, produksi propaganda otomatis, penggunaan *deepfake*, serta sulitnya menentukan pihak yang bertanggung jawab atas konten yang dihasilkan AI. Risiko tersebut menjadi semakin besar karena konten politik dapat menyebar dengan sangat cepat melalui jaringan media sosial.

Karena itu, kampanye berbasis AI memerlukan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai ketika konten politik dibuat atau dimodifikasi menggunakan AI, terutama apabila perubahan tersebut dapat memengaruhi persepsi terhadap kandidat. Selain itu, penggunaan data pemilih harus mengikuti aturan perlindungan data dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan untuk membangun profil politik individu.

Pada akhirnya, AI dapat memberikan keuntungan besar bagi kampanye politik karena meningkatkan kemampuan analisis, personalisasi, produksi konten, dan evaluasi strategi. Namun, teknologi tersebut juga dapat memperbesar kapasitas manipulasi apabila digunakan tanpa batas etis dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, kampanye politik berbasis AI perlu ditempatkan dalam kerangka transparansi, perlindungan data, verifikasi informasi, akuntabilitas aktor politik, dan literasi AI masyarakat. Prinsip tersebut penting agar penggunaan AI tidak hanya meningkatkan efektivitas kampanye, tetapi juga tetap menjaga integritas proses demokrasi.

C. *Microtargeting* dan Personalisasi Politik

Microtargeting dan personalisasi politik merupakan salah satu perkembangan penting dalam transformasi kampanye digital. Jika kampanye konvensional cenderung menyampaikan pesan yang relatif sama kepada masyarakat luas, *microtargeting* memungkinkan kandidat dan partai politik menyusun pesan berdasarkan karakteristik, kebutuhan, perilaku, dan preferensi kelompok pemilih tertentu. Perkembangan analitik data dan kecerdasan buatan semakin meningkatkan kemampuan kampanye untuk melakukan segmentasi pemilih dan menyesuaikan komunikasi secara lebih presisi.

1. Konsep dan Mekanisme *Political Microtargeting*

Political microtargeting merupakan strategi komunikasi yang menggunakan data mengenai pemilih untuk mengidentifikasi kelompok atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, kemudian menyampaikan pesan politik yang disesuaikan dengan karakteristik tersebut. Data yang digunakan dapat berasal dari survei, basis data pemilih, aktivitas media sosial, interaksi dengan konten digital, serta berbagai sumber data lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan profil dan segmentasi pemilih.

Proses *microtargeting* umumnya berlangsung melalui beberapa tahapan. Pertama, data dikumpulkan dari berbagai sumber. Kedua, data dianalisis untuk mengidentifikasi karakteristik dan pola perilaku pemilih. Ketiga, pemilih dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Keempat, pesan politik disesuaikan dengan setiap kelompok. Kelima, respons terhadap pesan dianalisis untuk memperbaiki strategi berikutnya. Dengan perkembangan AI, sebagian proses tersebut dapat dilakukan secara otomatis dan dalam skala yang jauh lebih besar.

Aagaard dan Marthedal (2023) menunjukkan bahwa literatur mengenai *political microtargeting* memperlihatkan dua perspektif utama. Perspektif pertama menekankan potensi manipulasi dan ancaman terhadap otonomi pemilih, sedangkan perspektif kedua melihat *microtargeting* sebagai perkembangan teknis dari praktik kampanye yang sebenarnya telah lama menggunakan segmentasi pemilih. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa dampak *microtargeting* terhadap demokrasi perlu dinilai berdasarkan cara teknologi tersebut digunakan, bukan hanya berdasarkan keberadaan teknologinya.

2. Personalisasi Pesan dan Strategi Komunikasi Pemilih

Personalisasi politik memungkinkan kandidat menyampaikan pesan yang berbeda kepada kelompok pemilih yang berbeda. Satu isu politik dapat dikemas dengan penekanan yang berbeda sesuai dengan karakteristik audiens. Isu lapangan kerja, misalnya, dapat dikomunikasikan melalui perspektif kesempatan kerja kepada pemilih muda, sementara kepada pelaku usaha dapat disampaikan melalui perspektif kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi.

Strategi tersebut membuat komunikasi politik menjadi lebih relevan bagi penerima pesan. Pemilih dapat menerima informasi mengenai isu yang memang dianggap penting bagi mereka, sehingga kemungkinan terjadinya perhatian dan interaksi dapat meningkat. Dalam perspektif kampanye, personalisasi juga memungkinkan sumber daya komunikasi digunakan secara lebih efisien karena pesan dapat diarahkan kepada kelompok yang dianggap paling potensial untuk dipengaruhi.

Namun, personalisasi memiliki konsekuensi terhadap ruang publik bersama. Jika setiap kelompok pemilih menerima pesan politik yang berbeda, masyarakat tidak lagi memiliki pengalaman informasi yang sepenuhnya sama. Dua kelompok warga dapat memperoleh gambaran yang sangat berbeda mengenai program dan prioritas kandidat yang sama. Kondisi ini dapat menyulitkan publik untuk mengevaluasi kandidat secara kolektif dan membandingkan keseluruhan agenda politik secara terbuka.

3. *Microtargeting*, Data Pribadi, dan Kecerdasan Buatan

Perkembangan AI semakin meningkatkan kemampuan *microtargeting*. Algoritma dapat menganalisis sejumlah besar data untuk menemukan pola yang mungkin tidak terlihat melalui analisis manual. Sistem dapat membantu mengidentifikasi kelompok pemilih berdasarkan karakteristik demografis, perilaku digital, preferensi isu, dan pola keterlibatan terhadap konten politik. AI juga memungkinkan proses personalisasi dilakukan secara dinamis. Ketika pengguna memberikan respons terhadap suatu konten, sistem dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengoptimalkan pesan berikutnya. Dengan demikian, kampanye berbasis AI dapat membentuk siklus yang terdiri atas pengumpulan data, segmentasi, penyampaian pesan, pengukuran respons, dan penyempurnaan strategi secara terus-menerus.

Kemampuan tersebut sekaligus memperbesar persoalan privasi. Data yang digunakan untuk *microtargeting* dapat mengungkap preferensi politik dan karakteristik pribadi yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Karena itu, penggunaan data politik membutuhkan batas yang jelas mengenai jenis data yang boleh dikumpulkan, tujuan pemrosesan, persetujuan pengguna, keamanan penyimpanan, dan pihak yang dapat mengakses data. Tanpa perlindungan tersebut, personalisasi politik dapat berkembang menjadi praktik pengawasan dan profiling politik yang berlebihan.

4. Efektivitas *Microtargeting* dan Otonomi Pemilih

Salah satu pertanyaan utama adalah seberapa efektif *microtargeting* dalam mengubah perilaku politik. Bukti empiris menunjukkan hasil yang lebih kompleks dibandingkan anggapan bahwa pesan yang sangat personal secara otomatis mampu mengubah pilihan pemilih. Pesan yang ditargetkan dapat memiliki efek persuasif dalam kondisi tertentu, tetapi keunggulannya terhadap pesan generik relatif terbatas. Hal tersebut penting karena menunjukkan bahwa kemampuan teknis untuk menargetkan pemilih tidak sama dengan kemampuan untuk memanipulasi mereka. Keputusan politik dipengaruhi banyak faktor, termasuk identitas politik, nilai pribadi, kondisi ekonomi, kepercayaan terhadap kandidat, lingkungan sosial, serta pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, *microtargeting* merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi komunikasi politik, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan pilihan pemilih.

Meskipun demikian, persoalan otonomi tetap perlu diperhatikan. Ketika pesan dirancang berdasarkan profil psikologis atau kerentanan tertentu, terdapat kemungkinan teknologi digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan individu. Persoalannya bukan hanya apakah pemilih berubah pilihan, tetapi apakah proses pengambilan keputusan tersebut berlangsung secara bebas dan transparan. Demokrasi membutuhkan pemilih yang memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis, bukan pemilih yang secara tersembunyi diarahkan melalui manipulasi personal.

5. Transparansi, Regulasi, dan Masa Depan Personalisasi Politik

Penggunaan *microtargeting* membutuhkan mekanisme transparansi agar pemilih mengetahui bagaimana mereka menjadi sasaran

komunikasi politik. Transparansi dapat mencakup informasi mengenai siapa yang membiayai iklan, mengapa seseorang menerima iklan tertentu, kategori data yang digunakan untuk penargetan, serta apakah konten tersebut dibuat atau disesuaikan menggunakan AI. Dengan informasi tersebut, pemilih memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami konteks pesan yang mereka terima.

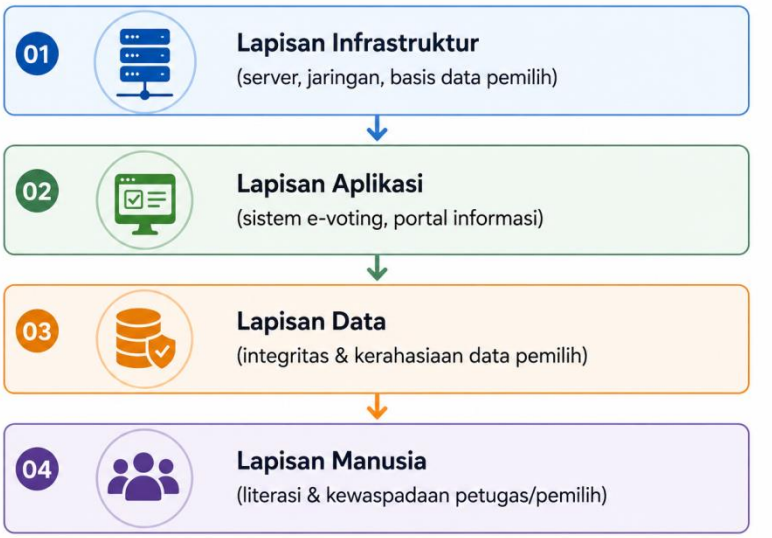
Regulasi juga diperlukan untuk membatasi penggunaan data pribadi dan mencegah praktik penargetan yang manipulatif. Pembatasan dapat diarahkan pada penggunaan kategori data yang sangat sensitif, penargetan kelompok rentan, penggunaan data tanpa persetujuan, serta praktik yang sengaja menyembunyikan sumber dan tujuan komunikasi politik. Pada saat yang sama, regulasi perlu menjaga keseimbangan agar tidak menghambat kebebasan politik dan inovasi komunikasi secara berlebihan.

Pada akhirnya, *microtargeting* bukanlah teknologi yang secara otomatis memperkuat atau melemahkan demokrasi. Dampaknya sangat bergantung pada sumber data, metode segmentasi, tujuan kampanye, tingkat transparansi, serta mekanisme pengawasan yang tersedia. Jika digunakan secara bertanggung jawab, personalisasi dapat membantu kandidat menyampaikan informasi yang lebih relevan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika digunakan tanpa batas, teknologi tersebut dapat memperbesar manipulasi, mengurangi transparansi ruang publik, dan mengancam otonomi pemilih. Karena itu, prinsip transparansi, perlindungan data, akuntabilitas, proporsionalitas, dan otonomi pemilih harus menjadi dasar dalam pengembangan *microtargeting* politik.

D. Keamanan Siber dalam Pemilu

Keamanan siber dalam pemilu mencakup perlindungan terhadap seluruh infrastruktur teknis yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dari ancaman peretasan, manipulasi, dan gangguan operasional. Kerangka keamanan siber pemilu yang komprehensif, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 9.2, beroperasi pada empat lapisan yang saling berkaitan: lapisan infrastruktur mencakup server, jaringan, dan basis data pemilih; lapisan aplikasi mencakup sistem pemungutan suara elektronik dan portal informasi; lapisan data mencakup integritas dan kerahasiaan data pemilih; dan lapisan manusia mencakup literasi dan kewaspadaan petugas maupun pemilih terhadap upaya manipulasi sosial.

Gambar 9.2 Lapisan Keamanan Siber dalam Penyelenggaraan Pemilu



Keamanan siber dalam pemilu merupakan aspek penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepercayaan terhadap seluruh proses elektoral yang menggunakan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi dalam pemilu dapat mencakup sistem pendaftaran pemilih, pengelolaan data pemilih, penyampaian informasi, kampanye digital, hingga pengolahan dan publikasi hasil pemilu. Semakin besar ketergantungan proses pemilu terhadap teknologi, semakin besar pula kebutuhan untuk melindungi sistem dari berbagai ancaman siber yang dapat mengganggu proses demokrasi.

Salah satu ancaman utama adalah peretasan dan serangan terhadap infrastruktur digital. Pelaku dapat berusaha memperoleh akses tanpa izin terhadap sistem pemilu, mengubah data, mencuri informasi, atau mengganggu layanan digital. Serangan seperti *Distributed Denial of Service* (DDoS), malware, *phishing*, dan pencurian kredensial dapat menyebabkan sistem tidak dapat digunakan atau menimbulkan keraguan terhadap keakuratan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Karena itu, sistem yang digunakan dalam pemilu harus memiliki perlindungan berlapis, pemantauan keamanan secara berkelanjutan, serta mekanisme pemulihan ketika terjadi gangguan.

Perlindungan data pemilih juga menjadi bagian penting dari keamanan siber. Data pemilih dapat mengandung informasi pribadi yang harus dilindungi dari pencurian, penyalahgunaan, maupun penyebaran

tanpa izin. Kebocoran data tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk manipulasi politik, penipuan, atau penyusunan strategi komunikasi politik yang tidak etis. Oleh karena itu, pengelolaan data pemilih perlu menerapkan pembatasan akses, enkripsi, autentikasi yang kuat, pencatatan aktivitas sistem, serta prosedur yang jelas mengenai penyimpanan dan penggunaan data.

Keamanan siber dalam pemilu juga berkaitan dengan integritas informasi dan komunikasi politik. Serangan digital tidak selalu bertujuan mengubah data pemilu secara langsung, tetapi dapat diarahkan untuk menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat. Penyebaran informasi palsu mengenai hasil pemilu, manipulasi dokumen digital, *deepfake*, akun palsu, dan operasi informasi terkoordinasi dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses elektoral. Oleh sebab itu, keamanan teknis perlu berjalan bersama dengan literasi digital, verifikasi informasi, komunikasi publik yang cepat, dan mekanisme klarifikasi dari lembaga yang berwenang.

Selain perlindungan teknologi, diperlukan pula tata kelola dan kesiapan kelembagaan. Lembaga penyelenggara pemilu perlu memiliki standar keamanan, prosedur penanganan insiden, audit sistem, pengujian kerentanan, serta koordinasi dengan lembaga keamanan siber dan penyedia teknologi. Penggunaan teknologi dalam pemilu juga harus dapat diawasi secara independen sehingga masyarakat memiliki keyakinan bahwa sistem bekerja sesuai prosedur. Transparansi mengenai mekanisme keamanan tanpa membuka informasi teknis yang dapat dimanfaatkan untuk menyerang sistem menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

Dengan demikian, keamanan siber dalam pemilu bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan demokrasi dan kepercayaan publik. Pemilu yang aman membutuhkan kombinasi antara teknologi yang kuat, perlindungan data, sumber daya manusia yang kompeten, tata kelola yang transparan, serta masyarakat yang memiliki literasi digital. Keamanan yang baik memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung pemilu yang jujur, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga digitalisasi tidak justru menjadi sumber kerentanan baru bagi demokrasi.

E. Inovasi *Electoral Technology* di Masa Depan

Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi lahirnya inovasi baru dalam penyelenggaraan pemilu. *Electoral technology* mencakup berbagai teknologi yang digunakan untuk mendukung proses elektoral, mulai dari pendaftaran pemilih, verifikasi identitas, penyampaian informasi, kampanye, pemungutan suara, hingga pengolahan dan publikasi hasil. Di masa depan, perkembangan kecerdasan buatan, komputasi awan, biometrik, *blockchain*, dan teknologi komunikasi dapat membuat proses pemilu menjadi semakin cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Salah satu inovasi yang berpotensi berkembang adalah pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan pemilu. AI dapat membantu melakukan analisis data pemilih, mendeteksi pola yang tidak wajar, mengidentifikasi potensi disinformasi, serta membantu penyelenggara memberikan informasi yang lebih cepat kepada masyarakat. AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan layanan informasi pemilu melalui *chatbot* dan sistem layanan digital. Namun, penggunaan AI harus tetap diawasi agar tidak menghasilkan keputusan yang bias atau digunakan untuk memanipulasi pilihan politik masyarakat.

Inovasi lainnya adalah sistem identitas dan verifikasi pemilih berbasis teknologi digital. Teknologi biometrik, identitas digital, dan sistem verifikasi yang terintegrasi dapat membantu meningkatkan akurasi proses identifikasi pemilih serta mengurangi risiko penggunaan identitas ganda. Pengembangan teknologi tersebut harus disertai dengan perlindungan data yang kuat karena informasi identitas merupakan data yang sangat sensitif. Keamanan, privasi, dan keterbatasan akses terhadap teknologi harus menjadi pertimbangan utama agar inovasi tidak menciptakan bentuk ketimpangan baru dalam proses elektoral.

Teknologi *blockchain* juga sering dipertimbangkan sebagai salah satu inovasi untuk meningkatkan integritas dan keterlacakan proses pemilu. Karakteristik blockchain yang memungkinkan pencatatan data secara terdistribusi dapat mendukung mekanisme verifikasi dan audit terhadap transaksi digital. Dalam jangka panjang, teknologi ini berpotensi digunakan untuk mendukung berbagai bagian dari proses pemilu, termasuk pencatatan dan verifikasi data. Meskipun demikian, blockchain bukan solusi otomatis untuk seluruh persoalan pemilu. Keamanan

perangkat pemilih, validitas identitas, kerahasiaan pilihan, dan kualitas sistem secara keseluruhan tetap harus diperhatikan.

Masa depan *electoral technology* juga berkaitan dengan aksesibilitas dan inklusivitas pemilu. Teknologi digital dapat memberikan kemudahan bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi atau berpartisipasi dalam proses politik. Platform digital dapat menyediakan informasi pemilu dalam berbagai format, bahasa, dan media yang lebih mudah dipahami. Teknologi juga dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan tertentu agar memperoleh akses yang lebih baik terhadap informasi dan layanan elektoral. Namun, digitalisasi harus tetap mempertimbangkan kesenjangan akses internet, kemampuan literasi digital, dan ketersediaan infrastruktur di berbagai wilayah.

Pada akhirnya, inovasi *electoral technology* tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh keamanan, transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Teknologi harus dirancang untuk memperkuat integritas pemilu dan mempermudah partisipasi warga, bukan sekadar menggantikan proses manual dengan sistem digital. Masa depan pemilu yang berbasis teknologi membutuhkan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan nilai-nilai demokrasi. Dengan tata kelola yang tepat, *electoral technology* dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan proses pemilu yang lebih efektif, inklusif, aman, dan terpercaya.

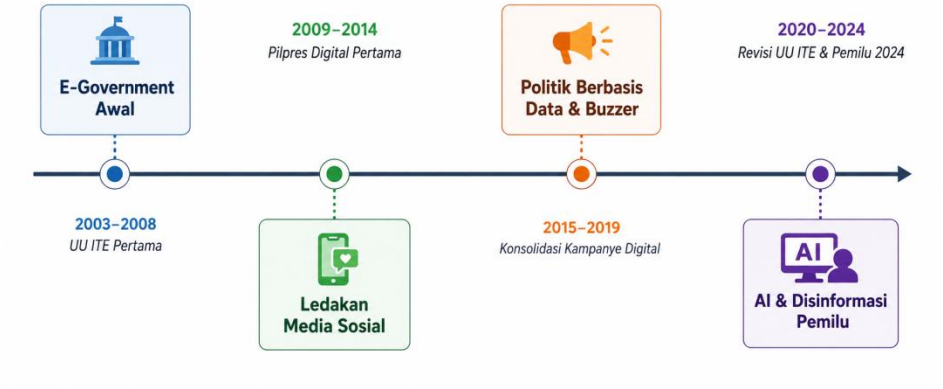
BAB X
DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan populasi pengguna media sosial yang sangat besar, Indonesia menghadirkan konteks yang khas dalam persinggungan antara demokrasi, algoritma, dan kecerdasan buatan, dipengaruhi karakteristik geografis kepulauan, keragaman etnis dan bahasa, serta dinamika politik yang unik. Bab ini membahas perkembangan demokrasi digital nasional, media sosial dalam dinamika politik Indonesia, regulasi AI dan teknologi digital di Indonesia, tantangan demokrasi digital di Indonesia, serta peluang transformasi demokrasi berbasis AI.

A. Perkembangan Demokrasi Digital Nasional

Perkembangan demokrasi digital Indonesia dapat dipetakan melalui empat fase evolusi utama, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 10.1. Fase awal *e-government* pada 2003–2008 yang ditandai pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pertama, fase ledakan media sosial pada 2009–2014 yang menyaksikan Pemilihan Presiden 2014 sebagai pemilu digital pertama Indonesia dengan intensitas kampanye media sosial yang signifikan, fase konsolidasi politik berbasis data dan buzzer pada 2015–2019, hingga fase AI dan disinformasi pemilu pada 2020–2024 yang ditandai revisi kedua UU ITE dan Pemilihan Umum 2024 sebagai pemilu dengan kompleksitas digital tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Gambar 10.1 Evolusi Demokrasi Digital Nasional Indonesia



Karakteristik khas perkembangan demokrasi digital Indonesia terletak pada fenomena lompatan teknologi (*leapfrogging*), di mana adopsi media sosial sebagai arena politik utama terjadi tanpa melalui fase konsolidasi media digital berbasis situs web resmi yang lazim dialami negara-negara maju. Pola lompatan ini menjadikan media sosial, ketimbang portal berita digital konvensional atau situs resmi pemerintah, sebagai medium utama komunikasi politik digital di Indonesia sejak awal perkembangannya.

Perkembangan demokrasi digital nasional Indonesia juga perlu dipahami dalam konteks transisi demokrasi pascareformasi 1998, di mana keterbukaan politik yang dihasilkan reformasi bersinergi dengan liberalisasi sektor telekomunikasi dan penetrasi internet yang terus meningkat. Sinergi antara keterbukaan politik dan digitalisasi ini menghasilkan ekosistem demokrasi digital yang relatif terbuka dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara lain, meskipun keterbukaan ini tetap diwarnai berbagai tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi hingga saat ini.

Karakteristik demografis Indonesia turut membentuk lintasan perkembangan demokrasi digital nasional secara signifikan, mengingat Indonesia memiliki populasi pengguna internet dan media sosial terbesar di Asia Tenggara, dengan mayoritas penduduk berusia produktif yang tumbuh besar bersamaan dengan penetrasi teknologi digital. Struktur demografis yang didominasi penduduk usia muda ini menciptakan basis sosial yang sangat reseptif terhadap inovasi teknologi politik, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri berupa ekspektasi tinggi terhadap kecepatan dan interaktivitas komunikasi politik yang tidak selalu dapat

dipenuhi institusi politik konvensional yang masih beroperasi dengan ritme birokrasi yang relatif lambat.

Pengalaman transisi demokrasi Indonesia pascareformasi juga perlu dipahami bersamaan dengan gelombang demokratisasi ketiga yang melanda banyak negara berkembang pada akhir abad ke-20, di mana pembukaan ruang politik sering kali berlangsung bersamaan dengan liberalisasi ekonomi dan keterbukaan terhadap arus informasi global. Sinkronisasi historis antara reformasi politik 1998 dengan awal mula era internet komersial di Indonesia menciptakan kondisi unik di mana generasi pertama warga negara yang mengalami kebebasan politik pascaotoritarianisme juga menjadi generasi pertama yang mengadopsi teknologi digital secara luas, menghasilkan asosiasi kuat antara nilai kebebasan politik dan kebebasan digital dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia.

Peran diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara juga menjadi dimensi yang semakin signifikan dalam ekosistem demokrasi digital nasional, mengingat kemudahan komunikasi digital memungkinkan warga negara Indonesia di luar negeri tetap terlibat aktif dalam wacana politik domestik meskipun secara fisik berada jauh dari tanah air. Keterlibatan diaspora digital ini menciptakan dinamika baru dalam wacana politik Indonesia, membawa perspektif komparatif dari pengalaman tinggal di negara dengan sistem politik dan teknologi berbeda, sekaligus menghadirkan tantangan verifikasi mengenai sejauh mana partisipasi digital dari diaspora tersebut mencerminkan kepentingan dan aspirasi warga negara yang tinggal di dalam negeri.

Perspektif historis yang lebih luas juga penting untuk memahami bahwa perkembangan demokrasi digital Indonesia tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi peristiwa politik domestik signifikan sepanjang dua dekade terakhir, mencakup transisi kepemimpinan nasional, dinamika desentralisasi otonomi daerah, dan berbagai gerakan sosial yang memanfaatkan ruang digital sebagai arena mobilisasi. Setiap peristiwa politik signifikan tersebut turut membentuk cara warga negara dan aktor politik Indonesia memahami dan memanfaatkan teknologi digital, menciptakan pembelajaran kolektif yang terakumulasi dari satu siklus politik ke siklus berikutnya, membentuk budaya politik digital Indonesia yang terus berkembang secara dinamis.

B. Media Sosial dalam Dinamika Politik Indonesia

Media sosial telah menjadi arena sentral dinamika politik Indonesia, dengan Indonesia secara konsisten tercatat sebagai salah satu pasar pengguna media sosial terbesar secara global. Dampak media sosial terhadap demokrasi Indonesia menegaskan bahwa media sosial berperan ganda dalam dinamika politik nasional yaitu memfasilitasi partisipasi politik warga yang sebelumnya terpinggirkan dari saluran politik formal, sekaligus mempercepat polarisasi politik antarkubu yang semakin tajam menjelang setiap siklus pemilihan umum, khususnya pada Pemilihan Umum 2024 yang menyaksikan intensitas kontestasi digital yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Fenomena buzzer politik menjadi salah satu karakteristik paling khas dinamika politik digital Indonesia. Buzzer politik di Indonesia beroperasi melalui jaringan akun yang terkoordinasi untuk memperkuat narasi kampanye tertentu, baik yang bersifat mendukung maupun menyerang kandidat lawan, menciptakan lanskap wacana politik digital yang sulit dibedakan antara ekspresi organik warga dengan kampanye terkoordinasi yang dibayar. Kompleksitas membedakan otentisitas wacana politik digital ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga negara dalam menilai kredibilitas informasi politik yang mereka konsumsi melalui media sosial.

Generasi muda, khususnya Generasi Z yang untuk pertama kalinya menjadi kelompok pemilih signifikan pada Pemilihan Umum 2024, menunjukkan pola keterlibatan politik digital yang khas. Media sosial telah menjadi ruang partisipasi politik primer bagi generasi ini, dengan bentuk keterlibatan yang lebih beragam dibandingkan sekadar memberikan suara, mencakup penyebaran informasi, keterlibatan diskusi daring, dan partisipasi dalam gerakan digital seperti kampanye #ReformasiDikorupsi. Pola partisipasi Generasi Z yang berbasis isu spesifik, ketimbang loyalitas partisan konvensional, menandai transformasi signifikan dalam budaya politik Indonesia yang akan terus berkembang seiring pertumbuhan populasi pemilih muda pada siklus-siklus pemilu mendatang.

Karakteristik unik lanskap media sosial Indonesia juga tampak dari dominasi platform yang berorientasi visual dan video pendek, berbeda dari sejumlah negara Barat yang masih mempertahankan signifikansi platform berbasis teks. Preferensi format visual ini memengaruhi secara mendasar

bentuk komunikasi politik yang efektif di Indonesia, mendorong kandidat dan partai politik mengembangkan kompetensi produksi konten visual yang menarik, sekaligus menciptakan tantangan tersendiri bagi penyampaian pesan kebijakan yang kompleks dan memerlukan elaborasi mendalam, sebuah format yang secara inheren kurang sesuai dengan karakteristik konten visual berdurasi pendek yang mendominasi preferensi konsumsi media warga Indonesia kontemporer.

Dinamika politik digital Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh dan influencer politik yang memiliki basis pengikut besar di media sosial, sering kali melampaui jangkauan media massa konvensional dalam menjangkau segmen pemilih muda. Fenomena ini sejalan dengan pembahasan kepemimpinan opini digital namun dengan karakteristik khas Indonesia berupa signifikansi tokoh agama dan budaya lokal sebagai figur berpengaruh dalam wacana politik digital, menciptakan lanskap kepemimpinan opini yang lebih beragam dan terfragmentasi dibandingkan model influencer politik konvensional yang lebih dikenal di negara-negara Barat.

Ekosistem media digital Indonesia juga ditandai kemunculan media daring alternatif yang beroperasi secara independen dari kelompok media arus utama yang secara historis didominasi konglomerasi bisnis dengan afiliasi politik tertentu. Kemunculan media alternatif berbasis digital ini memperluas keragaman sumber informasi politik yang tersedia bagi warga negara, meskipun kualitas jurnalistik dan standar verifikasi faktual media alternatif tersebut sangat bervariasi, menuntut kapasitas literasi media yang memadai dari warga negara untuk membedakan media alternatif yang kredibel dari yang tidak, namun memiliki relevansi khusus dalam konteks ekosistem media Indonesia yang semakin terfragmentasi.

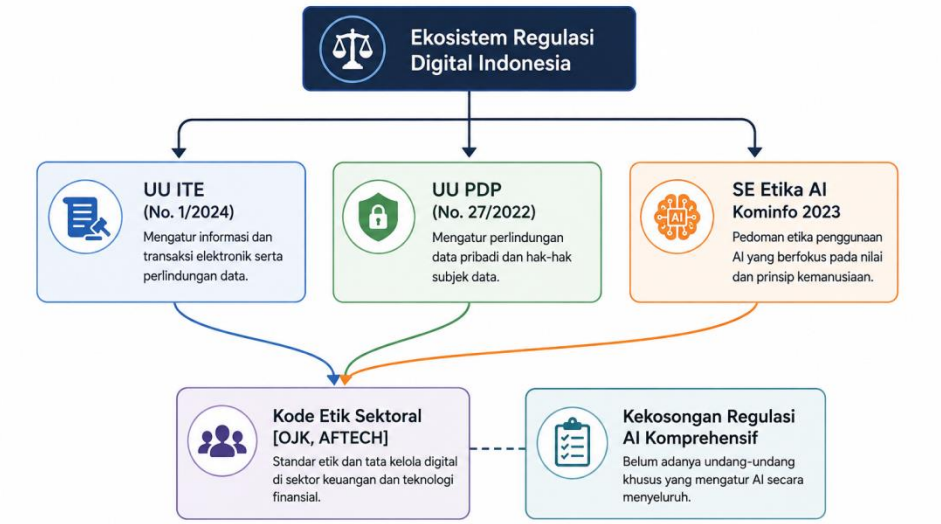
Perilaku konsumsi media politik warga Indonesia juga mengungkap kecenderungan konsumsi berita yang semakin terpersonalisasi melalui algoritma platform. Kecenderungan ini menciptakan risiko fragmentasi wacana publik yang semakin tajam di Indonesia, mengingat keragaman etnis, agama, dan afiliasi politik yang sudah ada sebelumnya berpotensi diperkuat oleh mekanisme algoritmik yang mengoptimalkan personalisasi konten berdasarkan preferensi yang telah teridentifikasi, sebuah dinamika yang menuntut kewaspadaan khusus mengingat sensitivitas isu identitas dalam konteks sosial-politik Indonesia yang majemuk.

Peran perempuan dalam politik digital Indonesia juga layak mendapat perhatian khusus, mengingat kajian mengenai partisipasi politik perempuan dalam Pemilihan Umum 2024 yang telah disinggung pada Subbab 5.5 menemukan bahwa media sosial memberikan saluran partisipasi yang berharga bagi perempuan, meskipun disertai risiko pelecehan daring yang secara disproporsional membebani partisipan perempuan dibandingkan laki-laki. Kesenjangan gender dalam pengalaman partisipasi politik digital ini menuntut perhatian kebijakan khusus, termasuk pengembangan mekanisme perlindungan terhadap pelecehan daring yang efektif dan sensitif gender, guna memastikan ruang digital politik Indonesia benar-benar inklusif bagi seluruh warga negara tanpa memandang gender.

C. Regulasi AI dan Teknologi Digital di Indonesia

Kerangka regulasi digital dan AI Indonesia, sebagaimana dipetakan pada Gambar 10.2, saat ini bertumpu pada tiga pilar utama yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan kedua melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, serta Surat Edaran Etika Kecerdasan Buatan yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2023 sebagai panduan awal tata kelola penggunaan AI. Ketiga instrumen ini membentuk fondasi hukum yang mengatur aspek teknologi digital di Indonesia, meskipun Indonesia belum memiliki regulasi AI komprehensif yang setara dengan EU AI Act.

Gambar 10.2 Peta Kerangka Regulasi Digital dan AI di Indonesia



Perubahan kedua UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur secara lebih spesifik larangan penyebaran informasi bohong, pencemaran nama baik, dan manipulasi data, mencakup Pasal 27A yang mengatur diseminasi informasi yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Meskipun demikian, sejumlah akademisi menilai bahwa pasal-pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE berisiko multitafsir dan berpotensi membatasi kritik politik yang sah, sebuah kekhawatiran yang telah lama disuarakan sejak UU ITE pertama kali disahkan pada 2008 dan tetap relevan meskipun telah mengalami dua kali perubahan. Ketegangan antara penanggulangan disinformasi dan perlindungan kebebasan berekspresi ini mencerminkan dilema regulasi platform digital.

Berbeda dari Uni Eropa yang telah mengesahkan regulasi AI komprehensif melalui EU AI Act, Indonesia hingga kini belum memiliki regulasi AI khusus yang setara, dengan UU ITE dan UU PDP masih menjadi fondasi hukum utama yang mengatur aspek teknologi digital termasuk AI secara tidak langsung. Reformulasi UU ITE terhadap kebutuhan pengaturan AI, dibandingkan dengan pendekatan Uni Eropa dan Tiongkok dalam mengatur AI, menjadi topik kajian akademik yang terus berkembang, menegaskan urgensi Indonesia merumuskan kerangka regulasi AI yang lebih spesifik dan komprehensif, ketimbang terus mengandalkan kerangka regulasi teknologi informasi umum yang tidak sepenuhnya mengantisipasi karakteristik unik risiko AI kontemporer.

Di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan bersama asosiasi industri fintech seperti Asosiasi *Financial Technology* Indonesia dan Asosiasi *Fintech Syariah* Indonesia telah mengembangkan kode etik AI sektoral untuk memastikan penerapan AI yang bertanggung jawab dalam layanan keuangan digital. Pendekatan regulasi sektoral semacam ini, meskipun bermanfaat bagi sektor spesifik yang diaturnya, menghasilkan fragmentasi tata kelola AI Indonesia yang belum terintegrasi dalam kerangka nasional yang koheren, berbeda dari pendekatan regulasi berbasis risiko yang komprehensif sebagaimana diterapkan EU AI Act yang mencakup seluruh sektor penerapan AI secara terpadu.

Perbandingan pendekatan regulasi Indonesia dengan Tiongkok turut menjadi bahan kajian akademik yang relevan, mengingat kedua negara sama-sama menghadapi tantangan mengatur ekosistem digital dengan populasi besar namun dengan pendekatan filosofis yang berbeda signifikan. Tiongkok mengembangkan kerangka regulasi AI yang jauh lebih ketat dan terpusat, mencerminkan model tata kelola digital yang menempatkan kendali negara sebagai prioritas utama, berbeda dari pendekatan Indonesia yang cenderung lebih permisif dan mengandalkan regulasi umum teknologi informasi. Perbandingan lintas model regulasi Asia semacam ini penting bagi perumusan kebijakan Indonesia yang mempertimbangkan berbagai alternatif pendekatan, bukan hanya merujuk pada model Barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat semata.

Kebutuhan koordinasi antarlembaga pemerintah dalam regulasi teknologi digital juga menjadi tantangan tersendiri di Indonesia, mengingat kewenangan terkait berada tersebar pada berbagai kementerian dan lembaga, mencakup Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Dalam Negeri untuk aspek administrasi kependudukan digital, Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk aspek pengawasan kampanye digital, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk aspek teknologi finansial. Fragmentasi kewenangan lintas lembaga ini berpotensi menciptakan tumpang tindih regulasi maupun kekosongan pengaturan pada area yang tidak jelas menjadi tanggung jawab lembaga mana, menuntut mekanisme koordinasi lintas kementerian yang lebih terintegrasi guna memastikan kebijakan regulasi teknologi digital Indonesia berjalan koheren dan tidak saling bertentangan.

Perkembangan ekosistem startup teknologi Indonesia turut memengaruhi dinamika demokrasi digital nasional, mengingat sejumlah perusahaan teknologi domestik telah berkembang menjadi platform

dengan basis pengguna signifikan yang turut memainkan peran dalam distribusi informasi politik, meskipun skalanya masih jauh lebih kecil dibandingkan platform teknologi global. Kehadiran platform teknologi domestik ini menghadirkan peluang bagi pengembangan solusi teknologi demokrasi yang lebih sensitif terhadap konteks lokal Indonesia, termasuk keragaman bahasa daerah dan kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia, dibandingkan mengandalkan sepenuhnya platform global yang dirancang untuk konteks pasar yang lebih homogen.

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat, dengan sektor e-commerce dan fintech sebagai penopang utama, turut menciptakan basis infrastruktur digital yang secara tidak langsung mendukung perkembangan demokrasi digital nasional. Infrastruktur pembayaran digital dan identitas elektronik yang dikembangkan untuk mendukung ekonomi digital berpotensi diadaptasi bagi keperluan partisipasi politik digital, menciptakan sinergi antara agenda pembangunan ekonomi digital dengan agenda penguatan demokrasi digital yang selama ini sering diperlakukan sebagai dua agenda kebijakan yang terpisah, padahal keduanya berbagi fondasi infrastruktur teknis yang serupa dan dapat saling memperkuat jika dikembangkan secara terintegrasi.

D. Tantangan Demokrasi Digital di Indonesia

Demokrasi digital di Indonesia berkembang seiring dengan semakin luasnya penggunaan internet, media sosial, platform digital, dan kecerdasan buatan dalam kehidupan masyarakat. Digitalisasi membuka peluang bagi warga untuk memperoleh informasi politik, menyampaikan pendapat, mengawasi pemerintah, dan terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi politik tanpa selalu bergantung pada institusi politik konvensional. Namun, teknologi tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi yang lebih berkualitas. Ruang digital juga menghadirkan persoalan baru berupa penyebaran disinformasi, polarisasi, kesenjangan digital, ancaman terhadap privasi dan kebebasan berekspresi, serta meningkatnya kekuasaan platform digital. Oleh karena itu, tantangan demokrasi digital di Indonesia perlu dipahami sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan institusi, perilaku masyarakat, dan distribusi kekuasaan.

1. Disinformasi, Hoaks, dan Manipulasi Informasi Politik

Tantangan pertama adalah penyebaran disinformasi dan hoaks dalam ruang politik digital. Media sosial memungkinkan informasi diproduksi dan disebarkan oleh siapa saja dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan media konvensional. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada warga untuk menjadi produsen informasi, tetapi sekaligus membuat informasi yang tidak benar dapat beredar luas sebelum melalui proses pemeriksaan fakta. Dalam konteks politik dan pemilu, disinformasi dapat digunakan untuk membentuk persepsi negatif terhadap kandidat, merusak reputasi lembaga negara, memanipulasi isu tertentu, atau menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Bawaslu juga menempatkan disinformasi sebagai salah satu tantangan penting dalam pengawasan pemilu di ruang digital.

Persoalan disinformasi menjadi semakin kompleks karena bentuk manipulasi informasi terus berkembang. Informasi palsu tidak selalu hadir dalam bentuk berita yang sepenuhnya dibuat-buat, tetapi dapat berupa foto yang dimanipulasi, video yang dipotong tanpa konteks, akun palsu, jaringan *bot*, judul provokatif, maupun konten lama yang disebarkan kembali seolah-olah merupakan peristiwa baru. Perkembangan *generative AI* bahkan memungkinkan pembuatan gambar, suara, dan video sintetis yang semakin sulit dibedakan dari konten asli. Dalam situasi seperti ini, kemampuan masyarakat untuk membedakan informasi faktual dari manipulasi menjadi bagian penting dari kualitas kewargaan digital.

Dampak disinformasi terhadap demokrasi tidak hanya terletak pada kemungkinan seseorang mempercayai informasi yang salah. Penyebaran informasi palsu secara terus-menerus juga dapat menciptakan ketidakpastian mengenai apa yang benar dan apa yang tidak benar. Kondisi tersebut dapat menghasilkan *information disorder*, yaitu keadaan ketika masyarakat kesulitan menentukan sumber informasi yang dapat dipercaya. Dalam jangka panjang, persoalan ini dapat melemahkan kepercayaan terhadap media, pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun sesama warga. Karena itu, penanggulangan disinformasi membutuhkan kombinasi antara pemeriksaan fakta, transparansi platform, literasi digital, pendidikan politik, dan tanggung jawab aktor politik.

2. Polarisasi Politik dan Fragmentasi Ruang Publik Digital

Tantangan kedua adalah polarisasi politik yang dapat semakin kuat melalui interaksi di media sosial. Platform digital memungkinkan warga menemukan dan berinteraksi dengan orang yang memiliki pandangan

politik serupa. Kondisi tersebut pada satu sisi dapat memperkuat solidaritas dan partisipasi politik, tetapi pada sisi lain dapat menciptakan kelompok-kelompok komunikasi yang relatif tertutup. Ketika pengguna lebih sering menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya, perbedaan pandangan politik dapat semakin sulit dipertemukan.

Fenomena *filter bubble* dan *echo chamber* menjadi relevan dalam konteks ini. Sistem algoritmik dapat merekomendasikan konten berdasarkan perilaku pengguna sebelumnya, sedangkan pengguna sendiri cenderung memilih akun, komunitas, dan sumber informasi yang sejalan dengan pandangannya. Interaksi antara preferensi pengguna dan mekanisme algoritmik tersebut dapat menciptakan lingkungan informasi yang homogen. Namun, penting untuk tidak menganggap bahwa algoritma merupakan satu-satunya penyebab polarisasi. Identitas politik, kondisi sosial, kepentingan kelompok, dan kecenderungan psikologis manusia juga berperan dalam membentuk polarisasi.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik, fragmentasi ruang publik digital dapat menjadi persoalan serius. Perdebatan mengenai kandidat atau kebijakan tertentu dapat dengan cepat berkembang menjadi konflik antarkelompok. Ketika perbedaan politik dipersepsikan sebagai konflik identitas, ruang diskusi dapat berubah menjadi arena saling menyerang daripada pertukaran argumentasi. Karena itu, demokrasi digital tidak cukup hanya menjamin kebebasan masyarakat untuk berbicara, tetapi juga perlu membangun ruang deliberasi yang memungkinkan warga berinteraksi secara konstruktif dengan kelompok yang memiliki pandangan berbeda.

3. Kesenjangan Digital dan Rendahnya Literasi Digital

Tantangan ketiga adalah ketidakmerataan akses dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Demokrasi digital mengasumsikan bahwa warga memiliki kesempatan yang relatif setara untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi melalui teknologi. Kenyataannya, kemampuan tersebut dipengaruhi oleh kualitas jaringan internet, ketersediaan perangkat, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, lokasi geografis, usia, dan keterampilan digital. Dengan demikian, digitalisasi politik dapat menciptakan bentuk baru ketimpangan apabila kelompok tertentu memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk memanfaatkan ruang digital dibandingkan kelompok lainnya.

Kesenjangan digital juga memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar persoalan akses internet. Seseorang dapat memiliki akses terhadap internet tetapi belum tentu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kualitas informasi yang diterimanya. Literasi digital mencakup kemampuan mencari informasi, memeriksa sumber, mengenali manipulasi, memahami cara kerja algoritma, membedakan fakta dan opini, serta memahami konsekuensi dari membagikan informasi. Pemerintah Indonesia juga menekankan bahwa peningkatan konektivitas perlu disertai penguatan literasi digital karena algoritma platform dapat memengaruhi informasi yang diterima masyarakat dan membentuk persepsi publik.

Persoalan literasi menjadi semakin penting karena warga kini menghadapi lingkungan informasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan era media massa konvensional. Dalam satu linimasa, masyarakat dapat menemukan berita dari media profesional, opini individu, konten influencer, propaganda politik, iklan, satire, dan konten yang dibuat AI. Tanpa kemampuan evaluasi yang memadai, masyarakat dapat mengalami kesulitan membedakan berbagai jenis informasi tersebut. Oleh sebab itu, literasi digital harus ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan demokrasi. Warga tidak hanya perlu diajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana menggunakan teknologi secara kritis, bertanggung jawab, dan demokratis.

4. Kebebasan Berekspresi, Privasi, dan Pengawasan Digital

Tantangan keempat berkaitan dengan hubungan antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan untuk mengatur ruang digital. Pemerintah memiliki kepentingan untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian, penipuan, ancaman keamanan, dan disinformasi. Namun, tindakan pengaturan yang terlalu luas dapat berisiko membatasi kritik politik yang sah. Persoalan ini menjadi penting karena media sosial telah menjadi salah satu ruang utama masyarakat untuk mengkritik pemerintah, menyampaikan aspirasi, dan mendiskusikan berbagai persoalan publik.

Kebebasan internet Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan. Freedom House dalam *Freedom on the Net 2025* menempatkan Indonesia dalam kategori *Partly Free*, dengan perhatian terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan aktivitas politik daring. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi digital membutuhkan keseimbangan antara kepentingan menjaga keamanan

ruang digital dan kewajiban melindungi hak warga untuk memperoleh informasi serta menyampaikan pendapat.

Persoalan lainnya adalah perlindungan privasi dan data pribadi. Politik berbasis data memungkinkan aktor politik mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai perilaku digital masyarakat untuk membangun profil pemilih. Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk *microtargeting* dan personalisasi pesan politik. Jika tidak dibatasi secara jelas, praktik tersebut dapat mengurangi otonomi pemilih dan membuka peluang penggunaan data politik secara tidak bertanggung jawab. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi bagian integral dari demokrasi digital, terutama ketika teknologi AI semakin mampu menggabungkan dan menganalisis data dalam jumlah besar.

5. Dominasi Platform Digital, AI, dan Akuntabilitas Politik

Tantangan kelima berkaitan dengan meningkatnya kekuasaan perusahaan platform dalam membentuk ruang publik digital. Media sosial dan mesin pencari tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menentukan bagaimana informasi ditemukan, direkomendasikan, disebarkan, dan dikonsumsi. Algoritma platform dapat menentukan konten mana yang memperoleh visibilitas lebih besar, sementara kebijakan moderasi menentukan jenis konten yang dapat tetap beredar. Dengan demikian, perusahaan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan informasi tempat proses demokrasi berlangsung.

Perkembangan *generative AI* memperluas persoalan tersebut. AI dapat digunakan secara positif untuk meningkatkan akses informasi, membantu penyandang disabilitas, menerjemahkan materi politik, dan memperluas komunikasi antara kandidat dengan masyarakat. Namun, teknologi yang sama dapat digunakan untuk menghasilkan *deepfake*, propaganda otomatis, komentar palsu, dan konten manipulatif dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan bahwa kemampuan teknologi tidak berkembang lebih cepat daripada kemampuan masyarakat, lembaga negara, dan platform dalam mendeteksi serta mengendalikan penyalahgunaannya.

Oleh karena itu, tantangan demokrasi digital Indonesia pada akhirnya merupakan persoalan tata kelola kekuasaan digital. Pemerintah perlu memastikan regulasi tidak berubah menjadi pembatasan politik yang berlebihan; perusahaan platform perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; partai dan kandidat perlu bertanggung jawab terhadap

praktik kampanye digital; media perlu mempertahankan fungsi verifikasi; dan masyarakat sipil perlu memperkuat pengawasan. Demokrasi digital yang sehat bukan berarti menghilangkan seluruh risiko teknologi, melainkan membangun institusi dan kapasitas warga yang mampu mengendalikan risiko tersebut. Dengan demikian, teknologi dapat diarahkan untuk memperluas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas tanpa mengorbankan kebebasan, privasi, dan kesetaraan politik.

E. Peluang Transformasi Demokrasi Berbasis AI

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) menghadirkan kemungkinan baru dalam perkembangan demokrasi digital. Jika teknologi digital sebelumnya terutama berfungsi mempercepat komunikasi dan memperluas akses informasi, AI memiliki kemampuan tambahan untuk menganalisis data dalam jumlah besar, mengenali pola, menghasilkan informasi, menerjemahkan bahasa, serta membantu pengambilan keputusan. Kemampuan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat hubungan antara negara dan warga, meningkatkan kualitas partisipasi politik, memperluas akses terhadap informasi publik, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif. Namun, manfaat tersebut tidak muncul secara otomatis. Dampaknya sangat bergantung pada desain teknologi, kualitas data, kapasitas institusi, dan prinsip tata kelola yang digunakan.

1. AI untuk Memperluas Partisipasi Politik Warga

Peluang pertama adalah kemampuan AI untuk memperluas partisipasi politik. Sistem berbasis AI dapat membantu warga memahami informasi kebijakan, menjelaskan dokumen pemerintah yang kompleks, merangkum rancangan peraturan, serta menyediakan akses terhadap informasi politik dalam bahasa yang lebih sederhana. Teknologi semacam ini dapat menurunkan hambatan pengetahuan yang selama ini membuat sebagian masyarakat kesulitan mengikuti proses politik dan pemerintahan. Dengan demikian, AI berpotensi membuat informasi publik lebih mudah dipahami oleh kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlibat dalam diskusi politik.

AI juga dapat digunakan untuk membangun sistem konsultasi publik yang lebih interaktif. Masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, keluhan, atau pendapat melalui sistem digital yang mampu

mengelompokkan masukan berdasarkan isu dan wilayah. Pemerintah kemudian dapat menggunakan hasil analisis tersebut untuk memahami pola kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, AI tidak menggantikan partisipasi warga, tetapi berfungsi sebagai infrastruktur yang membantu mengorganisasi dan mengolah suara publik dalam jumlah besar.

Lebih jauh, teknologi AI dapat membantu mengurangi hambatan partisipasi bagi kelompok tertentu. Teknologi penerjemahan otomatis, pengenalan suara, *text-to-speech*, dan *speech-to-text* dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan bahasa, literasi, atau kemampuan tertentu untuk mengakses informasi politik. Peluang ini penting bagi demokrasi karena kualitas partisipasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah warga yang dapat berbicara, tetapi juga oleh kemampuan berbagai kelompok masyarakat untuk memahami dan menggunakan informasi politik secara bermakna.

2. AI untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah

Peluang kedua terletak pada pemanfaatan AI untuk meningkatkan transparansi pemerintahan. Pemerintah menghasilkan data dalam jumlah sangat besar melalui anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, administrasi kependudukan, dan berbagai program pembangunan. AI dapat membantu menganalisis data tersebut untuk menemukan pola yang tidak biasa, mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, dan membantu lembaga pengawasan menentukan area yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam konteks keterbukaan informasi, AI juga dapat membantu masyarakat memahami data pemerintah yang kompleks. Data anggaran, misalnya, dapat diubah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana sumber daya publik dialokasikan. Sistem AI juga dapat membantu membandingkan program, anggaran, dan hasil pembangunan dari waktu ke waktu. Kemampuan tersebut dapat memperkuat fungsi pengawasan masyarakat terhadap pemerintah.

Namun, penggunaan AI untuk transparansi perlu disertai mekanisme akuntabilitas. Sistem AI tidak boleh dianggap sebagai sumber kebenaran yang selalu benar karena hasil analisisnya bergantung pada kualitas data dan desain algoritma. Jika AI digunakan untuk mendeteksi penyimpangan atau menentukan prioritas pengawasan, harus tersedia

mekanisme untuk memeriksa hasil sistem tersebut. Dengan demikian, AI berfungsi sebagai alat pendukung pengawasan, sementara keputusan akhir tetap berada pada institusi dan manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

3. AI untuk Memperkuat Deliberasi dan Pengambilan Keputusan Publik

AI juga berpotensi memperkuat deliberasi publik dengan membantu masyarakat memahami berbagai perspektif mengenai suatu persoalan. Sistem AI dapat digunakan untuk mengelompokkan argumen masyarakat berdasarkan isu, mengidentifikasi pola dukungan dan penolakan, serta menyajikan berbagai perspektif yang muncul dalam konsultasi publik. Dalam proses yang dirancang secara tepat, teknologi ini dapat membantu masyarakat melihat persoalan secara lebih komprehensif daripada hanya mengikuti informasi yang paling populer di media sosial.

Peluang tersebut sangat penting karena salah satu persoalan demokrasi digital adalah banyaknya informasi tetapi terbatasnya kapasitas manusia untuk mengolahnya. Dalam konsultasi publik dengan ribuan atau bahkan jutaan masukan, lembaga pemerintah sering menghadapi kesulitan untuk membaca seluruh pendapat secara manual. AI dapat membantu mengorganisasi masukan tersebut sehingga suara masyarakat yang jumlahnya besar tetap dapat dipertimbangkan dalam proses kebijakan.

AI juga dapat digunakan untuk membantu simulasi kebijakan. Misalnya, sistem dapat membantu memperkirakan kemungkinan konsekuensi dari beberapa alternatif kebijakan berdasarkan data historis dan berbagai skenario. Akan tetapi, hasil simulasi tidak boleh diperlakukan sebagai keputusan politik final. Kebijakan publik selalu mengandung nilai, kepentingan, dan pertimbangan etis yang tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi persoalan prediksi algoritmik. Karena itu, AI sebaiknya memperkaya deliberasi, bukan menggantikan proses deliberasi demokratis.

4. AI untuk Memperkuat Integritas Pemilu dan Melawan Disinformasi

Peluang penting lainnya adalah penggunaan AI untuk meningkatkan integritas proses pemilu. AI dapat membantu mendeteksi pola aktivitas digital yang tidak wajar, mengidentifikasi jaringan akun otomatis, menganalisis penyebaran konten manipulatif, dan membantu pemeriksa fakta memprioritaskan informasi yang perlu diverifikasi. Dalam

lingkungan digital yang menghasilkan jutaan konten setiap hari, kemampuan analitik semacam ini dapat membantu lembaga penyelenggara pemilu dan organisasi masyarakat sipil merespons ancaman informasi secara lebih cepat.

AI juga dapat digunakan untuk membantu mendeteksi konten sintetis seperti *deepfake*. Sistem deteksi dapat menganalisis karakteristik gambar, suara, atau video untuk mencari tanda-tanda manipulasi. Meskipun teknologi deteksi tidak selalu sempurna, penggunaannya dapat menjadi salah satu lapisan pertahanan terhadap manipulasi informasi politik. Hal ini menjadi semakin penting ketika AI generatif memungkinkan produksi konten politik palsu dilakukan dengan biaya rendah dan dalam jumlah besar.

Namun, penggunaan AI dalam pengawasan informasi politik harus dilakukan secara hati-hati. Sistem yang dirancang untuk mendeteksi disinformasi dapat menghasilkan kesalahan dan berpotensi menganggap pendapat yang sah sebagai informasi bermasalah. Jika mekanisme tersebut digunakan tanpa transparansi dan mekanisme keberatan, AI justru dapat menjadi instrumen pembatasan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penggunaan AI untuk menjaga integritas pemilu harus disertai pengawasan independen, prosedur verifikasi manusia, dan mekanisme banding yang jelas.

5. AI untuk Membangun Pemerintahan yang Lebih Responsif dan Inklusif

Peluang terakhir adalah penggunaan AI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif. Sistem AI dapat membantu pemerintah mengidentifikasi pola kebutuhan masyarakat berdasarkan data pelayanan, pengaduan, dan berbagai indikator sosial. Dengan analisis tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan yang muncul lebih cepat dan menentukan prioritas intervensi secara lebih tepat.

AI juga dapat membantu membangun sistem pelayanan publik yang tersedia sepanjang waktu. *AI chatbot* dapat menjawab pertanyaan dasar mengenai layanan pemerintah, prosedur administrasi, dan hak masyarakat tanpa mengharuskan warga datang langsung ke kantor pemerintah. Dalam konteks negara dengan wilayah geografis yang luas seperti Indonesia, teknologi ini dapat membantu memperluas akses terhadap pelayanan, terutama apabila dikombinasikan dengan teknologi

multibahasa dan sistem yang dapat beroperasi pada perangkat dengan keterbatasan koneksi.

Pada akhirnya, peluang terbesar AI bagi demokrasi bukan sekadar membuat proses pemerintahan menjadi lebih cepat, tetapi membantu menciptakan hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan warga. AI dapat memperluas akses informasi, memperkuat partisipasi, membantu pengawasan, mendukung integritas pemilu, dan meningkatkan responsivitas pelayanan publik. Namun, seluruh peluang tersebut harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang berpusat pada manusia. AI seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas warga dan institusi demokratis, bukan menjadi pengganti keputusan politik manusia. Prinsip transparansi, keadilan, perlindungan data, *explainability*, keamanan, dan akuntabilitas menjadi syarat utama agar transformasi berbasis AI benar-benar menghasilkan demokrasi yang lebih inklusif dan berkualitas.

BAB XI
STUDI KASUS DEMOKRASI DIGITAL GLOBAL

A. Amerika Serikat dan Politik Algoritma

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menunjukkan secara jelas bagaimana algoritma telah menjadi bagian penting dalam kehidupan politik modern. Perkembangan platform media sosial, mesin pencari, dan teknologi periklanan digital memungkinkan aktor politik menggunakan data dalam jumlah besar untuk memahami perilaku, minat, dan preferensi masyarakat. Algoritma kemudian digunakan untuk menentukan konten politik yang ditampilkan kepada pengguna, sehingga ruang informasi yang diterima setiap individu dapat berbeda berdasarkan karakteristik dan aktivitas digitalnya.

Dalam kampanye politik, penggunaan algoritma memungkinkan strategi komunikasi dilakukan secara lebih terarah melalui *microtargeting*. Kandidat dan organisasi politik dapat mengelompokkan pemilih berdasarkan berbagai karakteristik dan menyampaikan pesan yang disesuaikan dengan kelompok sasaran. Strategi ini dapat meningkatkan efektivitas kampanye, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai privasi, transparansi, dan potensi manipulasi. Pemilih mungkin tidak menyadari bahwa pesan yang mereka terima telah dipilih secara algoritmik berdasarkan data dan perilaku digital mereka.

Algoritma juga memiliki pengaruh terhadap pembentukan opini publik dan polarisasi politik di Amerika Serikat. Sistem rekomendasi pada platform digital cenderung mempertahankan perhatian pengguna dengan menampilkan konten yang dianggap relevan atau menarik. Dalam kondisi tertentu, mekanisme tersebut dapat memperkuat paparan terhadap pandangan yang serupa dan mengurangi interaksi dengan perspektif berbeda. Akibatnya, ruang publik digital dapat menjadi semakin terfragmentasi dan memperkuat perbedaan politik yang sudah ada.

Persoalan lain muncul dari penggunaan data pribadi dalam politik digital. Data aktivitas pengguna dapat memberikan gambaran mengenai minat, kebiasaan, dan kecenderungan politik seseorang. Pemanfaatan data tersebut untuk kepentingan politik menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana warga memahami dan memberikan persetujuan atas penggunaan informasi mereka. Perdebatan mengenai privasi data dan pengaruh platform teknologi menunjukkan bahwa kekuasaan politik pada era digital tidak hanya berada di tangan pemerintah dan partai politik, tetapi juga semakin berkaitan dengan perusahaan teknologi yang mengendalikan infrastruktur informasi digital.

Di sisi lain, politik algoritma di Amerika Serikat menunjukkan bahwa teknologi dapat memberikan manfaat bagi demokrasi. Platform digital memungkinkan kandidat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, kelompok warga dapat mengorganisasi gerakan sosial dengan lebih cepat, dan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber informasi politik. Dengan demikian, algoritma tidak selalu menjadi ancaman bagi demokrasi, tetapi dampaknya sangat bergantung pada bagaimana teknologi tersebut dirancang, digunakan, dan diawasi.

Pengalaman Amerika Serikat menunjukkan bahwa algoritma telah menjadi salah satu sumber kekuasaan baru dalam demokrasi digital. Kekuasaan tersebut muncul melalui kemampuan untuk mengumpulkan data, menentukan visibilitas informasi, mengarahkan perhatian pengguna, dan memengaruhi pola komunikasi politik. Karena itu, tantangan utama demokrasi bukan sekadar bagaimana menggunakan teknologi dalam politik, tetapi bagaimana memastikan bahwa kekuasaan algoritmik tetap transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak mengurangi kebebasan masyarakat dalam membentuk pilihan politiknya sendiri.

B. Uni Eropa dan Regulasi *Artificial Intelligence*

Uni Eropa merupakan salah satu kawasan yang aktif membangun kerangka regulasi untuk mengatur perkembangan dan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI). Pendekatan Uni Eropa menempatkan AI tidak hanya sebagai teknologi yang perlu dikembangkan, tetapi juga sebagai teknologi yang harus digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan menghormati hak-hak dasar manusia. Regulasi diperlukan karena AI dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, tetapi juga dapat

menimbulkan risiko terhadap privasi, keamanan, kebebasan, dan proses demokrasi.

Salah satu tonggak penting dalam pendekatan Uni Eropa adalah EU *Artificial Intelligence Act* (AI *Act*). Regulasi ini menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan membedakan sistem AI berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkannya. Sistem yang dianggap memiliki risiko sangat tinggi terhadap keselamatan atau hak fundamental manusia mendapatkan persyaratan yang lebih ketat, sedangkan penggunaan AI dengan risiko lebih rendah memperoleh aturan yang relatif lebih ringan. Pendekatan ini bertujuan agar pengawasan terhadap AI dapat disesuaikan dengan tingkat dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam konteks demokrasi, regulasi AI Uni Eropa memiliki arti penting karena beberapa penggunaan AI dapat memengaruhi perilaku dan kebebasan masyarakat. Sistem yang berpotensi melakukan manipulasi, mengeksploitasi kelemahan individu, atau memengaruhi perilaku manusia secara tidak semestinya menjadi perhatian dalam kerangka regulasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan AI tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan perlindungan terhadap hak fundamental, kebebasan individu, dan integritas proses demokratis.

Regulasi Uni Eropa juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan AI. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai ketika mereka berinteraksi dengan sistem AI dalam situasi tertentu, terutama ketika konten atau keputusan yang dihasilkan AI berpotensi memengaruhi kehidupan mereka. Kewajiban tertentu juga dapat berlaku terhadap penyedia dan pengguna sistem AI untuk memastikan adanya dokumentasi, pengawasan manusia, pengelolaan risiko, serta mekanisme untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan teknologi tersebut.

Pendekatan Uni Eropa memiliki pengaruh yang lebih luas karena regulasi tersebut tidak hanya berdampak pada organisasi yang berada di wilayah Eropa, tetapi juga dapat memengaruhi perusahaan dan pengembang dari luar Uni Eropa ketika sistem AI mereka digunakan atau berdampak pada pasar Eropa. Kondisi ini menjadikan Uni Eropa sebagai salah satu aktor penting dalam pembentukan standar tata kelola AI secara global. Model regulasi tersebut juga menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat berjalan bersamaan dengan perlindungan hak masyarakat apabila terdapat aturan dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Dengan demikian, pengalaman Uni Eropa menunjukkan bahwa regulasi AI dapat menjadi instrumen untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan demokrasi dan hak warga negara. Regulasi tidak dimaksudkan untuk menghentikan perkembangan AI, tetapi untuk memastikan bahwa teknologi tersebut dikembangkan dan digunakan dengan memperhatikan risiko serta dampaknya terhadap manusia. Bagi negara lain, termasuk Indonesia, pendekatan Uni Eropa dapat menjadi salah satu referensi dalam membangun tata kelola AI yang transparan, aman, adil, dan tetap mendukung perkembangan inovasi digital.

C. Estonia sebagai Model *Digital Democracy*

Estonia secara konsisten diakui sebagai salah satu model demokrasi digital paling matang di dunia, dengan infrastruktur *X-Road* sebagai tulang punggung interoperabilitas data yang menghubungkan seluruh layanan pemerintah digital negara tersebut. Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 11.1, ekosistem *X-Road* menghubungkan berbagai layanan mulai dari *e-Residency* yang menyediakan identitas digital, *i-Voting* untuk pemungutan suara elektronik, hingga layanan perpajakan, kesehatan, dan registrasi usaha secara terintegrasi.

Gambar 11.1 Model Interoperabilitas *e-Governance* Estonia (*X-Road*)



Estonia sering dipandang sebagai salah satu contoh penting dalam perkembangan *digital democracy* karena berhasil mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai aspek kehidupan pemerintahan dan partisipasi warga. Transformasi digital di negara ini dibangun secara bertahap melalui pengembangan identitas digital, layanan publik daring, serta sistem pertukaran data antarlembaga. Pendekatan tersebut membuat interaksi antara masyarakat dan pemerintah menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Salah satu fondasi utama demokrasi digital Estonia adalah identitas digital yang memungkinkan warga mengakses berbagai layanan publik secara daring. Dengan identitas tersebut, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas administratif tanpa harus selalu datang secara langsung ke kantor pemerintahan. Infrastruktur digital yang terintegrasi juga mendukung pertukaran informasi antarlembaga sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.

Estonia juga dikenal melalui penerapan pemungutan suara secara daring atau i-Voting. Sistem ini memberikan kesempatan kepada warga untuk menggunakan hak pilih melalui internet dalam pemilu tertentu.

Kehadiran i-Voting memperluas pilihan cara berpartisipasi dalam pemilu dan menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas proses demokrasi. Namun, penerapannya tetap membutuhkan perhatian terhadap keamanan siber, kerahasiaan suara, autentikasi pemilih, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital.

Selain pemilu digital, Estonia mengembangkan berbagai layanan pemerintahan berbasis elektronik yang memungkinkan masyarakat berinteraksi dengan negara secara digital. Model tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi digital tidak hanya berkaitan dengan pemungutan suara melalui internet, tetapi juga mencakup akses informasi, pelayanan publik, komunikasi pemerintah, dan keterlibatan warga dalam proses pemerintahan. Dengan infrastruktur digital yang kuat, teknologi menjadi bagian dari sistem pemerintahan sehari-hari.

Pengalaman Estonia juga menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Kepercayaan publik, keamanan data, literasi digital, infrastruktur, dan tata kelola yang baik merupakan faktor penting dalam memastikan teknologi dapat diterima dan digunakan secara luas. Pemerintah perlu memberikan jaminan bahwa data masyarakat terlindungi dan sistem digital dapat diandalkan. Tanpa kepercayaan tersebut, teknologi yang canggih sekalipun tidak akan mampu memperkuat partisipasi demokratis.

Dengan demikian, Estonia dapat menjadi salah satu model dalam memahami bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk memperkuat hubungan antara negara dan warga. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa transformasi menuju *digital democracy* membutuhkan pembangunan ekosistem yang menyeluruh, bukan sekadar digitalisasi layanan atau proses pemilu. Bagi negara lain, termasuk Indonesia, pengalaman Estonia dapat menjadi referensi untuk mengembangkan demokrasi digital yang inklusif, aman, transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

D. Taiwan dalam Penguatan Partisipasi Digital

Taiwan merupakan salah satu contoh menarik dalam pengembangan partisipasi politik berbasis teknologi digital. Perkembangan demokrasi digital di Taiwan didukung oleh penggunaan teknologi dalam komunikasi publik, konsultasi masyarakat, serta penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Platform digital memberikan

ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapat, mendiskusikan persoalan publik, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara lebih terbuka.

Salah satu pendekatan yang menonjol adalah penggunaan platform partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat memberikan usulan, berdiskusi, dan menyampaikan tanggapan terhadap berbagai persoalan kebijakan. Pemerintah dapat menggunakan masukan tersebut sebagai bahan untuk memahami kebutuhan masyarakat dan merumuskan respons terhadap persoalan yang berkembang. Dengan demikian, teknologi tidak hanya digunakan sebagai sarana penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga sebagai ruang komunikasi dua arah.

Pengalaman Taiwan juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, komunitas teknologi, dan akademisi. Kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan teknologi dapat membantu mengembangkan berbagai perangkat digital untuk mendukung transparansi dan partisipasi publik. Kolaborasi tersebut menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan sosial dan politik melalui teknologi, bukan hanya menjadi pengguna pasif platform digital.

Partisipasi digital di Taiwan juga berkaitan dengan upaya menghadapi disinformasi dan manipulasi informasi. Masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, dan komunitas teknologi bekerja untuk meningkatkan kemampuan verifikasi informasi serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap informasi yang menyesatkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa demokrasi digital tidak cukup hanya menyediakan platform partisipasi, tetapi juga membutuhkan kemampuan masyarakat untuk menilai informasi secara kritis.

Keberhasilan Taiwan juga dipengaruhi oleh budaya politik yang mendorong keterbukaan dan keterlibatan masyarakat. Teknologi digital menjadi sarana untuk memperpendek jarak antara warga dan pemerintah, sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pembahasan isu publik. Namun, partisipasi digital tetap menghadapi tantangan berupa kesenjangan akses teknologi, polarisasi informasi, keamanan data, dan kemungkinan manipulasi ruang digital.

Dengan demikian, pengalaman Taiwan memperlihatkan bahwa teknologi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat demokrasi partisipatif apabila didukung oleh keterbukaan institusi, kolaborasi lintas kelompok, literasi digital, dan mekanisme partisipasi yang bermakna.

Pelajaran penting dari Taiwan adalah bahwa demokrasi digital bukan sekadar memindahkan aktivitas politik ke internet, tetapi menciptakan ruang yang memungkinkan warga benar-benar didengar dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam kehidupan publik.

E. Pembelajaran bagi Indonesia

Keempat studi kasus yang telah diuraikan menawarkan pembelajaran yang saling melengkapi bagi Indonesia. Dari Amerika Serikat, Indonesia dapat mempelajari pentingnya regulasi yang seimbang antara mendorong inovasi teknologi dan mencegah konsentrasi kekuasaan informasi berlebihan pada segelintir aktor, menghindari baik pendekatan minim intervensi yang berisiko membiarkan penyalahgunaan platform, maupun regulasi berlebihan yang dapat menghambat inovasi digital yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari Uni Eropa, Indonesia dapat mempelajari pentingnya kerangka regulasi yang komprehensif dan berbasis risiko sebagaimana dicontohkan EU AI Act, meskipun penerapannya perlu disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan Indonesia yang berbeda signifikan dari Uni Eropa. Alih-alih mengadopsi kerangka regulasi Uni Eropa secara mentah tanpa penyesuaian, Indonesia perlu merumuskan kerangka regulasi AI yang mempertimbangkan kapasitas penegakan hukum domestik, tingkat literasi digital masyarakat, dan karakteristik unik ekosistem digital Indonesia.

Dari Estonia, Indonesia dapat mempelajari pentingnya membangun infrastruktur interoperabilitas data yang kuat sebagai fondasi transformasi layanan pemerintah digital, meskipun skala dan kompleksitas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi jauh lebih besar menuntut adaptasi signifikan terhadap model Estonia yang dikembangkan untuk konteks negara kecil dan homogen. Pembangunan infrastruktur digital terpadu semacam ini perlu menjadi prioritas jangka panjang kebijakan digital nasional Indonesia, meskipun realistisnya memerlukan investasi dan waktu pengembangan yang jauh lebih panjang dibandingkan yang dibutuhkan Estonia.

Dari Taiwan, Indonesia dapat mempelajari pembelajaran paling relevan dan aplikatif dalam jangka pendek hingga menengah, yaitu model deliberasi digital partisipatif berbantuan AI yang dapat diadaptasi mengatasi tantangan geografis kepulauan Indonesia. Model vTaiwan menawarkan preseden konkret bagaimana teknologi AI dapat digunakan

untuk memfasilitasi, bukan menggantikan, deliberasi demokratis warga dalam skala besar, sebuah pendekatan yang sejalan dengan prinsip AI berorientasi demokrasi. Adaptasi model semacam ini bagi konteks Indonesia perlu mempertimbangkan keragaman bahasa daerah dan tingkat literasi digital yang bervariasi antarwilayah, menuntut penyesuaian teknis dan pendekatan yang lebih inklusif dibandingkan model aslinya di Taiwan. Pembelajaran dari keempat studi kasus menegaskan bahwa tidak ada model demokrasi digital tunggal yang dapat diadopsi secara utuh oleh Indonesia, melainkan menuntut kombinasi elemen dari berbagai model yang disesuaikan konteks unik geografis, demografis, dan kelembagaan Indonesia.

BAB XII
MASA DEPAN DEMOKRASI DI ERA *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) membawa perubahan besar terhadap masa depan demokrasi. AI dapat membantu meningkatkan akses informasi, menganalisis aspirasi masyarakat, mendukung pelayanan publik, dan memperluas partisipasi warga dalam proses politik. Teknologi ini juga dapat membantu pemerintah dan lembaga demokrasi memahami kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan berbasis data.

Di sisi lain, penggunaan AI menghadirkan tantangan baru, seperti manipulasi informasi, deepfake, bias algoritma, pengawasan digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Karena itu, masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dan institusi dalam menggunakannya secara bertanggung jawab. Transparansi, etika, literasi digital, dan akuntabilitas menjadi unsur penting agar AI dapat memperkuat demokrasi tanpa mengurangi kebebasan, keadilan, dan kepercayaan publik.

A. Evolusi Demokrasi Menuju *Society* 5.0

Perkembangan demokrasi tidak dapat dilepaskan dari perubahan teknologi dan struktur masyarakat. Setiap revolusi teknologi membawa perubahan terhadap cara warga memperoleh informasi, berkomunikasi, berpartisipasi, dan berhubungan dengan negara. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari demokrasi yang pada awalnya bertumpu pada institusi fisik dan komunikasi langsung, kemudian bergerak menuju demokrasi elektronik, demokrasi digital, hingga bentuk demokrasi yang semakin terintegrasi dengan kecerdasan buatan, Internet of Things, *big data*, dan teknologi siber-fisik dalam kerangka *Society 5.0*. Konsep *Society 5.0* sendiri diperkenalkan Jepang sebagai visi masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered society*) dengan memanfaatkan integrasi ruang

siber dan ruang fisik untuk menyelesaikan persoalan sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan.

1. Dari Demokrasi Konvensional Menuju Demokrasi Digital

Pada tahap awal, praktik demokrasi sangat bergantung pada ruang fisik dan institusi formal. Warga berpartisipasi melalui pemilu, organisasi masyarakat, partai politik, pertemuan publik, media massa, dan berbagai mekanisme representasi. Informasi politik sebagian besar bergerak melalui saluran komunikasi yang bersifat satu arah, seperti surat kabar, radio, dan televisi. Dalam sistem tersebut, partai politik, media, dan lembaga negara memiliki posisi yang relatif dominan sebagai perantara antara masyarakat dan kekuasaan.

Perkembangan internet mengubah pola tersebut secara signifikan. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi dapat memproduksi, menyebarkan, dan mendiskusikan informasi secara langsung. Media sosial kemudian memperluas perubahan tersebut dengan menciptakan komunikasi yang lebih horizontal dan interaktif. Warga dapat mengorganisasi gerakan sosial, menyampaikan kritik kepada pemerintah, membangun komunitas politik, dan berkomunikasi langsung dengan kandidat maupun pejabat publik.

Perubahan tersebut menjadi dasar munculnya demokrasi digital. Demokrasi tidak lagi hanya berlangsung melalui institusi formal, tetapi juga melalui ruang digital yang memungkinkan partisipasi berlangsung secara lebih cepat dan fleksibel. Namun, demokrasi digital juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, polarisasi, manipulasi algoritmik, kesenjangan digital, dan persoalan privasi. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak otomatis menghasilkan demokrasi yang lebih baik, tetapi mengubah arena tempat proses demokrasi berlangsung.

2. Demokrasi Berbasis Data dan Algoritma

Tahap berikutnya ditandai oleh meningkatnya penggunaan *big data*, algoritma, dan kecerdasan buatan dalam kehidupan politik. Jika pada tahap awal digitalisasi teknologi terutama digunakan sebagai sarana komunikasi, pada tahap ini teknologi mulai digunakan untuk menganalisis perilaku dan memprediksi kecenderungan masyarakat. Pemerintah, partai politik, kandidat, media, dan organisasi masyarakat sipil dapat menggunakan data digital untuk memahami pola opini publik dan menentukan strategi komunikasi.

Dalam kampanye politik, perkembangan tersebut terlihat melalui penggunaan *data-driven politics*, *microtargeting*, dan personalisasi pesan. Data mengenai perilaku digital dapat dianalisis untuk mengidentifikasi kelompok pemilih tertentu dan menyusun pesan yang dianggap relevan bagi mereka. Algoritma kemudian membantu menentukan konten yang ditampilkan kepada pengguna berdasarkan karakteristik dan perilaku digitalnya. Politik dengan demikian semakin bergeser dari komunikasi massa menuju komunikasi yang lebih tersegmentasi dan personal.

Namun, demokrasi berbasis data menghadirkan persoalan baru mengenai siapa yang memiliki data dan siapa yang mengendalikan algoritma. Ketika perusahaan platform dan aktor politik memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar, terjadi perubahan distribusi kekuasaan dalam ruang publik. Persoalan transparansi, privasi, bias algoritmik, dan manipulasi menjadi semakin penting. Perkembangan ini menunjukkan bahwa evolusi demokrasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknologi, tetapi juga dengan pertanyaan mengenai bagaimana kekuasaan teknologi dikendalikan secara demokratis.

3. Integrasi Ruang Fisik dan Ruang Digital dalam *Society* 5.0

Konsep *Society 5.0* membawa perkembangan tersebut ke tahap yang lebih terintegrasi. Dalam *Society 5.0*, ruang siber dan ruang fisik tidak dipandang sebagai dua lingkungan yang terpisah. Data dari dunia fisik dikumpulkan melalui berbagai sensor dan perangkat digital, kemudian dianalisis dalam ruang siber menggunakan AI dan teknologi komputasi. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menghasilkan keputusan atau tindakan yang memberikan dampak kembali terhadap kehidupan fisik.

Dalam konteks demokrasi, konsep ini membuka kemungkinan munculnya bentuk partisipasi politik yang lebih terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Data mengenai kebutuhan masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai saluran digital, dianalisis secara real-time, dan digunakan untuk membantu pemerintah memahami kondisi sosial. Misalnya, data pengaduan masyarakat, transportasi, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan kondisi ekonomi dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih dinamis mengenai kebutuhan publik.

Perubahan tersebut berpotensi menggeser model pemerintahan dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju pemerintahan yang lebih prediktif

dan responsif. Pemerintah tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi dapat menggunakan data untuk mengidentifikasi persoalan yang mulai berkembang. Namun, model ini juga mengandung risiko apabila pengumpulan data dilakukan tanpa batas yang jelas. *Society 5.0* harus tetap berorientasi pada manusia agar teknologi tidak berubah menjadi sistem pengawasan yang mengurangi privasi dan otonomi warga.

4. Demokrasi yang Berpusat pada Manusia

Salah satu karakter penting *Society 5.0* adalah prinsip *human-centered*. Teknologi tidak ditempatkan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Prinsip ini memiliki relevansi kuat bagi perkembangan demokrasi karena teknologi seharusnya digunakan untuk memperkuat kapasitas warga, bukan menggantikan posisi manusia dalam menentukan arah kehidupan politik.

Dalam demokrasi berbasis *Society 5.0*, AI dapat membantu warga memahami informasi politik yang kompleks, memberikan akses terhadap berbagai perspektif, dan membantu pemerintah mengolah aspirasi masyarakat. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan akses kelompok rentan terhadap pelayanan publik dan informasi politik. Dengan demikian, transformasi teknologi dapat diarahkan untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif.

Akan tetapi, pendekatan yang berpusat pada manusia membutuhkan batas yang jelas terhadap penggunaan algoritma. Keputusan yang memiliki konsekuensi besar bagi kehidupan warga tidak seharusnya sepenuhnya diserahkan kepada sistem otomatis. Manusia harus tetap memiliki kemampuan untuk memahami, mempertanyakan, dan mengoreksi keputusan yang dihasilkan teknologi. Prinsip *human oversight* menjadi penting agar efisiensi teknologi tidak menghilangkan akuntabilitas demokratis.

5. Menuju Demokrasi 5.0 yang Inklusif dan Berkelanjutan

Evolusi menuju *Society 5.0* pada akhirnya membuka kemungkinan munculnya bentuk demokrasi yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis pengetahuan. Teknologi dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih langsung antara warga dan pemerintah, mempercepat penyampaian aspirasi, memperluas akses informasi, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Demokrasi tidak lagi hanya berlangsung pada

saat pemilu, tetapi dapat berkembang menjadi proses partisipasi yang berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, demokrasi 5.0 tidak boleh dipahami sebagai demokrasi yang sepenuhnya dikendalikan oleh AI dan algoritma. Justru semakin besar peran teknologi, semakin penting prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, pluralisme, dan perlindungan hak asasi manusia. Teknologi harus dirancang untuk memperkuat prinsip-prinsip tersebut, bukan menguranginya. Kesenjangan akses teknologi juga harus diperhatikan agar transformasi menuju *Society 5.0* tidak menghasilkan kesenjangan politik baru antara masyarakat yang memiliki kemampuan digital tinggi dan kelompok yang tertinggal.

Dengan demikian, evolusi demokrasi menuju *Society 5.0* dapat dipahami sebagai pergeseran dari demokrasi konvensional, demokrasi elektronik, demokrasi digital, demokrasi berbasis data, menuju demokrasi yang terintegrasi dengan AI dan ekosistem siber-fisik. Perubahan tersebut memberikan peluang besar untuk memperkuat partisipasi, transparansi, dan responsivitas pemerintahan, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru mengenai privasi, keamanan, kesenjangan digital, bias algoritmik, dan konsentrasi kekuasaan teknologi. Masa depan demokrasi dalam *Society 5.0* karena itu sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dan institusi untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berpusat pada manusia, inklusif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. AI sebagai Mitra Pengambilan Kebijakan Publik

Konsep AI sebagai mitra pengambilan kebijakan publik menandai pergeseran fundamental dari pandangan AI sekadar sebagai instrumen analitik pendukung keputusan manusia, menuju pandangan AI sebagai partisipan aktif dalam proses deliberasi kebijakan itu sendiri, meskipun tetap dalam kerangka pengawasan dan otoritas keputusan akhir yang berada di tangan manusia. Landemore (2024) mengidentifikasi dua model utama pemanfaatan AI untuk memperluas deliberasi demokratis: deliberasi daring massal yang menghimpun publik virtual berskala besar, dan mini-publik berputar ganda yang melibatkan banyak majelis warga secara simultan dengan partisipan yang berganti secara berkala, dengan AI berperan membantu skalabilitas melalui fasilitasi, penerjemahan, pemeriksaan fakta, pengelompokan, dan sintesis hasil deliberasi.

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) semakin berpotensi menjadi mitra dalam proses pengambilan kebijakan publik. AI mampu mengolah data dalam jumlah besar, mengenali pola, membuat prediksi, dan memberikan analisis yang dapat membantu pemerintah memahami berbagai persoalan masyarakat. Dengan kemampuan tersebut, AI dapat digunakan untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih cepat, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial. Dalam proses identifikasi masalah publik, AI dapat membantu pemerintah menganalisis berbagai sumber data, seperti data kependudukan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aspirasi masyarakat di ruang digital. Analisis tersebut dapat membantu menemukan pola atau permasalahan yang sulit dikenali melalui pengolahan data secara manual. Misalnya, AI dapat membantu mengidentifikasi wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan layanan publik atau memprediksi perubahan kebutuhan masyarakat berdasarkan data historis.

AI juga dapat berperan dalam menganalisis berbagai alternatif kebijakan. Sistem AI dapat digunakan untuk melakukan simulasi dan memperkirakan kemungkinan dampak dari suatu kebijakan sebelum diterapkan. Pemerintah dapat membandingkan beberapa skenario berdasarkan indikator tertentu, seperti biaya, efektivitas, cakupan masyarakat, dan potensi risiko. Dengan demikian, AI dapat menjadi alat pendukung yang membantu pembuat kebijakan melihat konsekuensi dari berbagai pilihan secara lebih sistematis.

Dalam pelaksanaannya, AI juga dapat membantu pemantauan dan evaluasi kebijakan publik. Data yang masuk secara berkala dapat dianalisis untuk melihat apakah suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. AI dapat membantu mendeteksi perubahan, ketidaksesuaian, atau pola tertentu yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Informasi tersebut memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi secara lebih cepat dan melakukan penyesuaian apabila kebijakan tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Namun, penggunaan AI dalam kebijakan publik harus tetap menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan utama. AI bekerja berdasarkan data dan algoritma yang dapat mengandung keterbatasan atau bias. Jika data yang digunakan tidak lengkap atau tidak mewakili seluruh kelompok masyarakat, rekomendasi AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil. Karena itu, hasil analisis AI perlu diperiksa oleh manusia,

disertai mekanisme transparansi, audit, perlindungan data, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Dengan demikian, AI sebaiknya diposisikan sebagai mitra, bukan pengganti pembuat kebijakan. Teknologi dapat memperkuat kapasitas pemerintah dalam memahami masalah, menganalisis pilihan, memprediksi dampak, dan mengevaluasi program, tetapi keputusan akhir tetap harus mempertimbangkan nilai sosial, kepentingan masyarakat, konteks politik, dan prinsip keadilan. Pemanfaatan AI secara bertanggung jawab dapat membantu menciptakan kebijakan publik yang lebih berbasis bukti, adaptif, dan responsif, sekaligus tetap menjaga prinsip demokrasi dan kepentingan warga.

C. Model Demokrasi Digital yang Inklusif

Model demokrasi digital yang inklusif merupakan pendekatan yang menempatkan teknologi sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan warga dalam memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengawasi kekuasaan. Inklusivitas dalam konteks ini tidak hanya berarti menyediakan akses internet bagi sebanyak mungkin masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa setiap kelompok memiliki kemampuan, kesempatan, dan perlindungan yang relatif setara untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan politik. Dengan demikian, demokrasi digital yang inklusif harus memperhatikan dimensi akses, keterampilan, representasi, keamanan, dan pengaruh warga terhadap keputusan publik.

Model tersebut menjadi semakin penting karena digitalisasi politik dapat menghasilkan dua kemungkinan yang berlawanan. Di satu sisi, teknologi dapat mengurangi hambatan geografis, biaya partisipasi, dan jarak antara pemerintah dengan masyarakat. Di sisi lain, teknologi dapat memperbesar ketimpangan apabila hanya kelompok dengan akses, perangkat, literasi, dan sumber daya digital yang memadai yang mampu memanfaatkannya. Oleh karena itu, demokrasi digital yang inklusif tidak dapat dibangun hanya dengan menyediakan platform digital, tetapi membutuhkan desain kelembagaan yang memastikan teknologi benar-benar memperluas kapasitas politik masyarakat.

1. Kesetaraan Akses dan Infrastruktur Digital

Fondasi pertama demokrasi digital yang inklusif adalah kesetaraan akses terhadap infrastruktur digital. Warga harus memiliki kesempatan yang memadai untuk mengakses internet, perangkat digital, dan berbagai layanan publik berbasis teknologi. Ketimpangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan perdesaan, pusat dan daerah terpencil, serta kelompok ekonomi berbeda dapat menyebabkan partisipasi politik digital berlangsung secara tidak merata.

Akses juga perlu dipahami sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi secara berkelanjutan. Kepemilikan perangkat tanpa koneksi yang stabil atau biaya internet yang terjangkau belum cukup untuk memastikan partisipasi yang bermakna. Masyarakat membutuhkan ekosistem yang memungkinkan mereka mengakses informasi publik, mengikuti konsultasi pemerintah, menyampaikan pengaduan, dan berinteraksi dengan institusi politik tanpa menghadapi hambatan teknologi yang berlebihan.

Dalam konteks Indonesia, prinsip ini memiliki arti penting karena karakter geografis dan sosial masyarakat sangat beragam. Model demokrasi digital tidak seharusnya hanya dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat perkotaan yang memiliki koneksi internet cepat dan literasi digital tinggi. Platform pemerintah dan mekanisme partisipasi digital perlu mempertimbangkan keterbatasan konektivitas, penggunaan perangkat dengan spesifikasi rendah, keberagaman bahasa, serta kebutuhan masyarakat di wilayah yang infrastrukturnya belum optimal.

2. Literasi Digital dan Kapasitas Kewargaan

Akses teknologi harus diikuti dengan kemampuan untuk menggunakannya secara kritis. Karena itu, komponen kedua adalah literasi digital. Warga perlu memiliki kemampuan untuk mencari informasi, menilai kredibilitas sumber, memahami konteks suatu konten, mengenali disinformasi, serta memahami bagaimana algoritma memengaruhi informasi yang mereka lihat.

Literasi digital dalam demokrasi juga mencakup kemampuan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara di ruang digital. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana menyampaikan kritik secara bertanggung jawab, melindungi data pribadi, mengenali praktik manipulasi digital, serta menggunakan mekanisme partisipasi yang tersedia. Dengan kapasitas tersebut, warga tidak hanya menjadi pengguna

teknologi, tetapi menjadi aktor politik yang mampu menggunakan teknologi untuk memperjuangkan kepentingan publik.

Kebutuhan terhadap literasi semakin besar dengan berkembangnya AI generatif. Masyarakat kini berhadapan dengan konten yang dapat dibuat secara otomatis dan terlihat sangat meyakinkan. Kemampuan membedakan informasi autentik dari konten sintetis menjadi bagian penting dari kecakapan demokratis. Oleh karena itu, pendidikan kewargaan digital perlu berkembang dari sekadar mengajarkan penggunaan perangkat menuju kemampuan berpikir kritis terhadap data, algoritma, AI, dan kekuasaan digital.

3. Partisipasi Publik yang Bermakna dan Representatif

Komponen ketiga adalah tersedianya mekanisme partisipasi yang memungkinkan warga tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mengetahui bagaimana pendapat tersebut diproses dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Platform e-partisipasi, konsultasi publik daring, e-petisi, forum digital, dan sistem pengaduan dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara warga dengan pemerintah. Namun, keberadaan platform digital saja tidak menjamin partisipasi yang bermakna. Jika pemerintah hanya mengumpulkan komentar masyarakat tanpa menjelaskan bagaimana masukan tersebut dipertimbangkan, partisipasi digital dapat berubah menjadi aktivitas simbolik. Karena itu, harus terdapat mekanisme *feedback* yang menjelaskan hasil konsultasi, alasan diterima atau ditolaknya suatu usulan, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga terkait.

Representasi juga menjadi persoalan penting. Sistem partisipasi digital harus dirancang agar tidak hanya mengakomodasi warga yang paling aktif dan vokal. Kelompok masyarakat dengan akses terbatas, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpendidikan rendah, dan kelompok yang kurang aktif secara digital juga harus memperoleh kesempatan untuk terlibat. Karena itu, model yang paling inklusif adalah model hibrida, yaitu menggabungkan mekanisme digital dengan saluran partisipasi luring sehingga teknologi memperluas representasi tanpa menggantikan seluruh bentuk partisipasi konvensional.

4. Transparansi, Privasi, dan Akuntabilitas Algoritmik

Demokrasi digital yang inklusif membutuhkan transparansi mengenai bagaimana teknologi digunakan dalam proses politik dan pemerintahan. Ketika pemerintah atau platform menggunakan algoritma untuk menentukan rekomendasi, memproses pengaduan, melakukan klasifikasi, atau mengambil keputusan tertentu, masyarakat perlu mengetahui prinsip dasar yang digunakan sistem tersebut. Transparansi menjadi penting agar warga dapat memahami bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan politik mereka.

Privasi juga merupakan bagian penting dari inklusivitas. Warga mungkin enggan berpartisipasi secara politik apabila mereka merasa aktivitas digitalnya terus dipantau atau data pribadinya dapat digunakan tanpa persetujuan. Pengumpulan data untuk meningkatkan layanan publik harus memiliki tujuan yang jelas, proporsional, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan data bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan syarat agar warga dapat berpartisipasi tanpa rasa takut.

Selain itu, diperlukan akuntabilitas algoritmik. Apabila suatu sistem AI menghasilkan keputusan yang merugikan warga, harus terdapat mekanisme untuk melakukan pemeriksaan, koreksi, dan pengajuan keberatan. Keputusan penting yang memiliki konsekuensi politik atau sosial tidak seharusnya sepenuhnya diserahkan kepada sistem otomatis. Prinsip *human oversight* perlu dipertahankan agar teknologi tetap berada di bawah kendali institusi dan masyarakat yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

5. Tata Kelola Kolaboratif dan Demokrasi yang Berpusat pada Warga

Komponen terakhir adalah tata kelola yang melibatkan berbagai aktor. Demokrasi digital tidak dapat dibangun hanya oleh pemerintah. Negara memang memiliki tanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur, regulasi, dan layanan publik, tetapi perusahaan teknologi, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas digital, dan warga juga memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem digital.

Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang melindungi hak warga tanpa menghambat inovasi. Platform digital perlu meningkatkan transparansi mengenai algoritma, iklan politik, moderasi konten, dan penggunaan data. Media dan organisasi pemeriksa fakta memiliki peran

dalam menjaga kualitas informasi, sedangkan masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai pengawas independen terhadap kekuasaan negara maupun perusahaan teknologi. Kolaborasi tersebut diperlukan karena tidak ada satu aktor yang memiliki seluruh kapasitas untuk mengatasi kompleksitas demokrasi digital.

Pada akhirnya, model demokrasi digital yang inklusif harus berorientasi pada penguatan kapasitas warga, bukan sekadar digitalisasi prosedur politik. Teknologi harus membuat warga lebih mudah memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam keputusan publik, dan mengawasi kekuasaan. Dengan demikian, model demokrasi digital yang ideal dapat dirumuskan melalui lima prinsip yang saling berkaitan: akses yang setara, literasi digital yang kuat, partisipasi yang bermakna, perlindungan hak dan akuntabilitas algoritmik, serta tata kelola kolaboratif. Jika kelima unsur tersebut dapat dikembangkan secara seimbang, transformasi digital berpotensi menjadi sarana untuk memperkuat kualitas demokrasi, bukan menciptakan bentuk baru ketimpangan politik.

D. Tata Kelola Ruang Digital dalam Demokrasi

Tata kelola ruang digital dalam demokrasi merujuk pada seperangkat prinsip, mekanisme, institusi, dan aturan yang mengatur bagaimana ruang digital dikelola agar tetap mendukung kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, partisipasi politik, perlindungan hak warga negara, serta akuntabilitas kekuasaan. Ruang digital saat ini tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik tempat masyarakat membentuk opini, melakukan mobilisasi politik, mengawasi pemerintah, dan memperdebatkan berbagai persoalan publik. Karena itu, tata kelola ruang digital menjadi bagian penting dari kualitas demokrasi kontemporer.

Persoalan tata kelola menjadi semakin kompleks karena ruang digital melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda. Pemerintah berupaya menjaga keamanan dan ketertiban, perusahaan teknologi mengelola platform berdasarkan model bisnis dan kebijakan internal, sementara masyarakat menginginkan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak digitalnya. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil dan media berperan dalam mengawasi kekuasaan serta menjaga kualitas informasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola

ruang digital tidak dapat hanya mengandalkan kontrol pemerintah, tetapi membutuhkan mekanisme yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

1. Perlindungan Kebebasan Berekspresi dan Hak Digital

Prinsip pertama dalam tata kelola ruang digital demokratis adalah perlindungan kebebasan berekspresi. Internet dan media sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara lebih luas dibandingkan era komunikasi konvensional. Warga dapat mengkritik pemerintah, mendiskusikan kebijakan publik, membentuk komunitas, dan menyuarakan kepentingan kelompok yang sebelumnya kurang mendapatkan ruang dalam media arus utama.

Namun, kebebasan berekspresi tidak berarti bahwa seluruh jenis konten harus dibiarkan tanpa batas. Ancaman seperti hasutan kekerasan, penipuan, eksploitasi, dan bentuk konten ilegal lainnya tetap membutuhkan mekanisme penanganan. Tantangan utamanya adalah menentukan batas yang proporsional antara perlindungan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan regulasi untuk membungkam kritik politik. Regulasi yang terlalu longgar dapat membiarkan ruang digital dipenuhi manipulasi, sementara regulasi yang terlalu represif dapat mengubah ruang digital menjadi instrumen kontrol politik. Karena itu, tata kelola ruang digital harus berorientasi pada hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas. Pembatasan terhadap suatu konten harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta mekanisme pemeriksaan dan keberatan. Pendekatan ini penting agar masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, termasuk kritik terhadap pemerintah dan institusi yang memiliki kekuasaan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Platform Digital

Platform digital memiliki posisi yang semakin penting dalam membentuk ruang publik. Algoritma menentukan konten yang direkomendasikan, sistem moderasi menentukan konten yang dapat ditampilkan, sementara desain platform memengaruhi bagaimana pengguna berinteraksi. Keputusan tersebut dapat memengaruhi opini publik dan dinamika politik tanpa melalui proses demokratis sebagaimana kebijakan negara.

Persoalan tersebut menimbulkan apa yang dapat disebut sebagai defisit akuntabilitas platform. Perusahaan teknologi dapat mengambil keputusan yang berdampak terhadap jutaan pengguna, tetapi proses

pengambilan keputusan internal mereka sering kali sulit dipahami masyarakat. Pengguna juga tidak selalu mengetahui mengapa konten tertentu memperoleh visibilitas tinggi sementara konten lain sulit ditemukan.

Oleh karena itu, perusahaan platform perlu meningkatkan transparansi mengenai sistem rekomendasi, moderasi konten, iklan politik, penggunaan data, dan perubahan kebijakan. Akuntabilitas juga membutuhkan mekanisme banding yang efektif ketika konten atau akun dibatasi. Dengan demikian, platform tidak hanya dipandang sebagai perusahaan teknologi, tetapi sebagai aktor penting dalam ekosistem ruang publik yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap kualitas demokrasi.

3. Tata Kelola Data dan Perlindungan Privasi

Data merupakan sumber daya utama dalam ekonomi dan politik digital. Aktivitas warga di internet menghasilkan berbagai data mengenai perilaku, preferensi, lokasi umum, interaksi sosial, serta minat politik. Data tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan profiling, pengawasan, dan personalisasi politik secara berlebihan. Dalam demokrasi, penggunaan data warga harus dibatasi oleh prinsip tujuan yang jelas, transparansi, keamanan, proporsionalitas, dan persetujuan yang memadai. Warga perlu mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, untuk apa data tersebut digunakan, dengan siapa data dapat dibagikan, dan berapa lama data disimpan. Perlindungan data menjadi semakin penting ketika AI digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan menghasilkan prediksi mengenai perilaku masyarakat.

Tata kelola data juga harus memperhatikan penggunaan data politik. *Political microtargeting* memungkinkan kandidat dan partai menyampaikan pesan yang berbeda kepada kelompok pemilih tertentu berdasarkan karakteristik dan perilaku digital mereka. Meskipun strategi tersebut dapat meningkatkan efisiensi komunikasi politik, penggunaannya secara berlebihan dapat mengurangi transparansi ruang publik karena warga yang berbeda dapat menerima pesan politik yang berbeda tanpa mengetahui pesan yang diterima kelompok lain. Karena itu, transparansi iklan politik dan penggunaan data menjadi bagian penting dari tata kelola demokrasi digital.

4. Penanggulangan Disinformasi Tanpa Mengorbankan Pluralisme

Disinformasi merupakan salah satu tantangan utama dalam tata kelola ruang digital. Kecepatan distribusi informasi memungkinkan informasi yang salah atau sengaja dimanipulasi menyebar jauh lebih cepat dibandingkan mekanisme verifikasi tradisional. Dalam konteks politik, disinformasi dapat digunakan untuk merusak reputasi kandidat, memengaruhi persepsi masyarakat, memperkuat konflik antarkelompok, dan mengganggu integritas pemilu.

Teknologi AI dapat membantu menghadapi masalah tersebut melalui deteksi pola penyebaran informasi, identifikasi akun otomatis, analisis jaringan, dan pendeteksian konten sintetis. Namun, mekanisme ini juga memiliki risiko. Sistem otomatis dapat salah mengidentifikasi konten yang sebenarnya sah sebagai disinformasi. Jika pemerintah atau platform memiliki kewenangan terlalu besar untuk menentukan informasi yang benar, mekanisme penanggulangan disinformasi dapat berubah menjadi alat sensor. Karena itu, tata kelola informasi harus mengutamakan kombinasi antara teknologi, pemeriksaan manusia, media profesional, organisasi pemeriksa fakta, dan literasi digital masyarakat. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip demokrasi karena tidak menyerahkan penentuan kebenaran informasi sepenuhnya kepada algoritma atau pemerintah. Masyarakat juga perlu diberikan kemampuan untuk mengevaluasi sumber informasi secara mandiri sehingga ketahanan demokrasi tidak sepenuhnya bergantung pada sistem moderasi platform.

5. Tata Kelola Multistakeholder dan Akuntabilitas Demokratis

Tata kelola ruang digital pada akhirnya membutuhkan model *multistakeholder governance*. Pemerintah memiliki peran dalam menciptakan kerangka hukum dan menjamin hak warga. Perusahaan teknologi bertanggung jawab terhadap desain dan pengelolaan platform. Masyarakat sipil berperan sebagai pengawas independen, sedangkan akademisi dapat memberikan kajian berbasis bukti untuk membantu mengevaluasi dampak teknologi terhadap demokrasi. Media juga memiliki posisi strategis karena berfungsi sebagai institusi verifikasi informasi dan pengawasan kekuasaan. Pada saat yang sama, warga tidak boleh ditempatkan hanya sebagai objek regulasi. Mereka harus memiliki kesempatan untuk terlibat dalam penyusunan aturan yang mengatur ruang digital, terutama ketika regulasi tersebut berkaitan dengan kebebasan berekspresi, privasi, dan hak politik.

Model tata kelola tersebut membutuhkan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Setiap aktor yang memiliki kekuasaan terhadap ruang digital harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuatnya. Pemerintah harus dapat diawasi melalui mekanisme demokratis dan hukum, perusahaan platform harus transparan terhadap kebijakan dan algoritmanya, sedangkan organisasi masyarakat sipil dan media harus menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Dengan demikian, tata kelola digital tidak berubah menjadi dominasi satu aktor atas ruang publik.

Tata kelola ruang digital dalam demokrasi pada dasarnya merupakan upaya mencari keseimbangan antara kebebasan dan keamanan, inovasi dan perlindungan hak, keterbukaan dan privasi, serta efisiensi teknologi dan akuntabilitas demokratis. Ruang digital tidak dapat dibiarkan sepenuhnya tanpa aturan, tetapi juga tidak dapat dikendalikan secara berlebihan oleh negara maupun perusahaan teknologi.

Model tata kelola yang demokratis perlu bertumpu pada lima prinsip utama: perlindungan kebebasan berekspresi, transparansi dan akuntabilitas platform, perlindungan data dan privasi, penanggulangan disinformasi secara proporsional, serta tata kelola multistakeholder. Kelima prinsip tersebut menjadi semakin penting dalam era AI karena kemampuan teknologi untuk memengaruhi informasi, perilaku, dan keputusan politik semakin besar.

Dalam konteks demokrasi digital Indonesia, tata kelola ruang digital perlu diarahkan bukan hanya untuk menciptakan ruang digital yang aman, tetapi juga ruang digital yang terbuka, inklusif, pluralistik, dan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan teknologi. Dengan pendekatan tersebut, teknologi dapat berfungsi sebagai infrastruktur yang memperkuat demokrasi, bukan sebagai instrumen baru untuk memperluas ketimpangan dan konsentrasi kekuasaan.

E. Visi Demokrasi Berkelanjutan di Era Kecerdasan Buatan

Visi demokrasi berkelanjutan di era kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) menempatkan teknologi sebagai sarana untuk memperkuat kualitas kehidupan demokratis, bukan sebagai pengganti manusia dalam menentukan arah masyarakat. Perkembangan AI memberikan peluang untuk meningkatkan akses informasi, memperluas partisipasi warga, memperbaiki pelayanan publik, serta membantu

pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih cepat. Namun, pemanfaatan teknologi harus tetap diarahkan pada prinsip kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak warga negara.

Demokrasi berkelanjutan membutuhkan partisipasi masyarakat yang inklusif dan bermakna. AI dan teknologi digital dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas melalui konsultasi publik daring, forum digital, sistem pengaduan masyarakat, dan berbagai platform kolaborasi. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang dapat memberikan masukan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, teknologi dapat membantu memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga.

Aspek penting lainnya adalah kualitas informasi dalam ruang publik digital. AI dapat digunakan untuk membantu mendeteksi disinformasi, menganalisis pola penyebaran informasi palsu, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang dapat dipercaya. Pada saat yang sama, AI juga dapat digunakan untuk menghasilkan konten manipulatif, *deepfake*, dan propaganda digital. Karena itu, demokrasi berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara pemanfaatan AI untuk menjaga kualitas informasi dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Visi tersebut juga menuntut adanya tata kelola AI yang etis, transparan, dan akuntabel. Pengembangan dan penggunaan AI perlu memperhatikan prinsip keadilan, perlindungan privasi, keamanan data, keterjelasan keputusan, serta pencegahan diskriminasi. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk mengetahui ketika AI digunakan dalam proses yang dapat memengaruhi hak atau kepentingan mereka. Selain itu, harus tersedia mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban apabila sistem AI menghasilkan keputusan atau dampak yang merugikan.

Demokrasi berkelanjutan juga tidak dapat dipisahkan dari literasi digital dan literasi AI. Warga perlu memiliki kemampuan untuk memahami cara kerja teknologi, menilai kredibilitas informasi, mengenali manipulasi digital, serta memahami bagaimana data pribadi digunakan. Pendidikan mengenai AI menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu berpartisipasi secara kritis dalam menentukan bagaimana teknologi digunakan dalam kehidupan sosial dan politik.

Pada akhirnya, visi demokrasi berkelanjutan di era AI adalah membangun ekosistem demokrasi yang memanfaatkan kecanggihan

teknologi tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. AI dapat membantu memperkuat partisipasi, meningkatkan kualitas kebijakan, memperluas akses informasi, dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Namun, arah penggunaannya harus ditentukan melalui prinsip demokrasi, pengawasan manusia, dan kepentingan publik. Dengan pendekatan tersebut, kemajuan AI dapat berjalan seiring dengan terciptanya demokrasi yang lebih inklusif, adil, transparan, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Aagaard, P., & Marthedal, S. (2023). Political microtargeting: Towards a pragmatic approach. *Internet Policy Review*, 12(1). https://doi.org/10.14763/2023.1.1690

AlgorithmWatch. (2024). *A Guide to the Digital Services Act, the EU's Law to Rein In Big Tech*. AlgorithmWatch.

Bradford, A. (2020). *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*. Oxford University Press.

Bradford, A. (2020). *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*. Oxford University Press.

Bradley Arant Boult Cummings LLP. (2025). Global AI governance: Five key frameworks explained. *Bradley Insights*.

Busuioc, M., Curtin, D., & Almada, M. (2023). Reclaiming transparency: Contesting the logics of secrecy within the AI Act. *European Law Open*, 2(1), 79–105.

Center for Democracy and Technology. (2025). *Promise and Peril: Generative AI's Experimental Debut in U.S. Political Campaigns*. CDT.

Center for Election Innovation & Research. (2024). *2024 Voter Registration Database Security Report*. CEIR.

Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118.

Cohen, J., & Fung, A. (2021). Democracy and the digital public sphere. In L. Bernholz, H. Landemore, & R. Reich (Eds.), *Digital Technology and Democratic Theory* (pp. 23–61). University of Chicago Press.

Congge, U., Guillamón, M.-D., Nurmandi, A., Salahudin, & Sihidi, I. T. (2023). Digital democracy: A systematic literature review. *Frontiers in Political Science*, 5, 972802. https://doi.org/10.3389/fpos.2023.972802

Costello, T. H., Pennycook, G., & Rand, D. G. (2024). Durably reducing conspiracy beliefs through dialogues with AI. *Science*, 385(6714), eadq1814. https://doi.org/10.1126/science.adq1814
Costello, T. H., Pennycook, G., & Rand, D. G. (2024). Durably reducing conspiracy beliefs through dialogues with AI. *Science*, 385(6714), eadq1814. https://doi.org/10.1126/science.adq1814
Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. Yale University Press.
Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. Yale University Press.
Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. Yale University Press.
Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. Yale University Press.
Das, D., Guha, S., Brubaker, J. R., & Semaan, B. (2024). The "colonial impulse" of natural language processing: An audit of Bengali sentiment analysis tools and their identity-based biases. In *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1–18). ACM.

Deibert, R. J. (2022). The autocrat in your iPhone: How mercenary spyware threatens democracy. *Journal of Democracy*, 33(2), 26–39.

Derave, T., Gailly, F., Sales, T. P., & Poels, G. (2024). A taxonomy and ontology for digital platforms. *Information Systems*, 120(102293).

Diakopoulos, N. (2016). Accountability in algorithmic decision making. *Communications of the ACM*, 59(2), 56–62.

Diakopoulos, N. (2025). Prospective algorithmic accountability and the role of the news media. In *Computer Ethics Across Disciplines: Deborah G. Johnson and Algorithmic Accountability* (pp. 125–143). Springer.

e-Residency Estonia. (2024). Estonian e-Residency attracts record interest and revenue in 2024. *Invest in Estonia*.

e-Residency Estonia. (2025). 11 firsts from Estonia – one of the most innovative countries. *e-Resident Blog*.

Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. St. Martin's Press.

European Commission. (2025). The impact of the Digital Services Act on digital platforms. *Shaping Europe's Digital Future*.

Fauzi, M., & Rahmawati, L. (2023). Hoaks politik di media sosial dan dampaknya terhadap demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(3), 89–101.

Fishkin, J., Bolotnyy, V., Lerner, J., Siu, A., & Bradburn, N. (2025). Scaling dialogue for democracy: Can automated deliberation create more deliberative voters? *Perspectives on Politics*, 1–18.

Gerbaudo, P. (2022). Are digital parties a new party type? *Democratic Theory*, 10(2).

Gray, J. E. (2023). Democracy in the digital era. *Policy & Internet*, 15(2), 195–207. https://doi.org/10.1002/poi3.349

Grimmelikhuijsen, S. (2023). Explaining why the computer says no: Algorithmic transparency affects the perceived trustworthiness of automated decision-making. *Public Administration Review*, 83(2), 241–262.

Guess, A. M., & Munger, K. (2023). Digital literacy and online political behavior. *Political Science Research and Methods*, 11(1), 110–128.

Hasna, N. M., & Huwaida, Z. N. (2024). Dampak buzzer politik dalam demokrasi digital. *ResearchGate Preprint*.

Hasna, N. M., & Huwaida, Z. N. (2024). Dampak buzzer politik dalam demokrasi digital. *ResearchGate Preprint*.

Hioe, B. (2020). Anti-pandemic policies in Estonia and Taiwan: Digital power, sovereignty and biopolitics. *Social Sciences*, 11(3), 112.

Home Security Heroes. (2023). *2023 State of Deepfakes Report*. Home Security Heroes.

Hovland, C. (2024). The opportunities and challenges of securing the 2024 election. *GovCIO Media & Research*.

Hsiao, Y. T., Lin, S. Y., Tang, A., Narayanan, D., & Sarahe, C. (2018). vTaiwan: An empirical study of open consultation process in Taiwan. *SocArXiv Preprint*.

Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press.

IBM. (2024). What is AI ethics? *IBM Think*.

International Panel on the Information Environment (IPIE). (2025). Generative AI in electoral campaigns: Mapping global patterns. *Summary for Policymakers*.

Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399.

Jost, J. T., Baldassarri, D. S., & Druckman, J. N. (2022). Cognitive–motivational mechanisms of political polarization in social-

communicative contexts. *Nature Reviews Psychology*, 1(10), 560–576.

Journal of Democracy. (2026). The AI democracy dilemma. *Journal of Democracy*.

Kefford, G., Dommett, K., Baldwin-Philippi, J., Bannerman, S., Dobber, T., Kruschinski, S., & Kruikemeier, S. (2022). Data-driven campaigning and democratic disruption: Evidence from six advanced democracies. *Party Politics*, 29(3).

Kefford, G., Dommett, K., Baldwin-Philippi, J., Bannerman, S., Dobber, T., Kruschinski, S., & Kruikemeier, S. (2022). Data-driven campaigning and democratic disruption: Evidence from six advanced democracies. *Party Politics*, 29(3).

Kefford, G., Dommett, K., Baldwin-Philippi, J., Bannerman, S., Dobber, T., Kruschinski, S., & Kruikemeier, S. (2022). Data-driven campaigning and democratic disruption: Evidence from six advanced democracies. *Party Politics*, 29(3).

Konrad-Adenauer-Stiftung. (2024). *The Influence of Deep Fakes on Elections*. KAS Monitor Security.

Krause, T. (2024). The use of AI by election campaigns. *LSE Public Policy Review*, 4(1).

Kreiss, D., Barnoy, A., & Kollanyi, B. (2025). Generative propaganda: Evidence from the 2024 elections in Taiwan and India. *arXiv Preprint*, arXiv:2509.19147.

Landemore, H. (2020). *Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century*. Princeton University Press.

Landemore, H. (2024). Scaling up deliberation with AI: Two models. Dikutip dalam kajian *Five Dimensions of Scaling Democratic Deliberation: With and Beyond AI* (2026).

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444. https://doi.org/10.1038/nature14539

Lestari, P. (2024). Polarisasi politik dalam penggunaan media sosial di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(1), 34–46.

McKinney, S. (2024). Integrating artificial intelligence into citizens' assemblies: Benefits, concerns and future pathways. *Journal of Deliberative Democracy*, 20(1).

Nasrullah, R. (2021). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Kencana.

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2023). *AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. U.S. Department of Commerce.

Nurfitriani, I., Maulana, I., & Muhaimin, R. (2025). Media sosial dan perkembangan demokrasi di Indonesia: Sebuah eksplorasi bibliometrik. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 26(1). https://doi.org/10.55981.2024.14021

People Powered. (2025). vTaiwan's hybrid approach to digital deliberation with AI. *People Powered Case Study*.

Postill, J. (2020). *Digital Politics and Political Engagement*. Berghahn Books.

Postill, J. (2020). *Digital Politics and Political Engagement*. Berghahn Books.

Postill, J. (2020). *Digital Politics and Political Engagement*. Berghahn Books.

Purbolaksono, A. (2023). Reformulasi pengaturan pencemaran nama baik dalam UU ITE. *Kajian Kebijakan Digital Indonesia*.

Rand Europe, Carnegie Endowment for International Peace, & UNESCO. (2024). Information pandemic: A critical review of disinformation spread on social media and its implications for state resilience. *Societies*, 14(8), 418.

Rauchfleisch, A., Jungherr, A., & rekan. (2025). Artificial intelligence in deliberation: The AI penalty and the emergence of a new deliberative divide. *ScienceDirect / Government Information Quarterly*.

Recorded Future, Insikt Group. (2024). 2024 deepfakes and election disinformation report: Key findings and mitigation strategies. *Recorded Future Research*.

Respati, A. A. (2024). Reformulasi Undang-Undang ITE terhadap artificial intelligence dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 4–12.

Roozenbeek, J., van der Linden, S., Goldberg, B., Rathje, S., & Lewandowsky, S. (2023). Psychological inoculation improves resilience against misinformation on social media. *Science Advances*, 8(34).

SAFEnet. (2025). Situasi hak-hak digital Indonesia 2024 menunjukkan estafet represi di internet. *SAFEnet Laporan Tahunan*.

Schaffer, F. C., & Gagnon, J.-P. (2023). Democracies across cultures. *Democratic Theory*, 10(1). https://doi.org/10.3167/dt.2023.100107

Špecián, P. (2022). *Behavioral Political Economy and Democratic Theory: Fortifying Democracy for the Digital Age*. Routledge.

TechInformed. (2024). AI vs democracy: Disinformation, deepfakes & 2024 US election. *TechInformed Report*.

Tentang AI. (2026). Regulasi AI di Indonesia: Kerangka hukum dan etika terkini. *TentangAI.com*.

Tessler, M. H., Bakker, M. A., Jarrett, D., Sheahan, H., Chadwick, M. J., Koster, R., ... & Summerfield, C. (2024). AI can help humans find common ground in democratic deliberation. *Science*, 386(6719).

UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. UNESCO General Conference.

Universitas Texas di Austin, Center for Media Engagement. (2024). Political machines: Understanding the role of AI in the U.S. 2024 elections and beyond. *Center for Media Engagement Report*.

Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news. *Social Media + Society*, 6(1).

Vaccari, C., & Valeriani, A. (2021). Political participation in the digital age. In *Outside the Bubble: Social Media and Political Participation in Western Democracies*. Oxford University Press.

Vinocur, N. (2024). Hacking voters' trust in democracy: Panel evidence on safeguarding confidence in election integrity. *Political Behavior*.

Wahyuni, S., & Adnan, M. F. (2024). Pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik kaum perempuan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2).

Woolley, S. C. (2022). Digital propaganda and nano-influencers in democratic societies. *Journal of Democracy*, 33(3).

Wörsdörfer, M. (2025). The E.U.'s artificial intelligence act: An ordoliberal assessment. *AI and Ethics*, 5, 263–278. https://doi.org/10.1007/s43681-023-00337-x

Zaki, M., Rafsanzani, D. R., Hutabarat, D. A., Hidayah, B., & Radianto, D. O. (2023). Pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik dan demokrasi di Indonesia. *VOX POPULI*, 6(2).

Zscaler CXO Revolutionaries. (2024). How cybersecurity and AI will influence global elections in 2024. *Zscaler Research*.

GLOSARIUM

Akuntabilitas Kewajiban individu, lembaga, atau pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, penggunaan sumber daya, serta hasil kebijakan kepada pihak yang berkepentingan.

Algoritma Serangkaian langkah atau aturan sistematis yang digunakan oleh komputer untuk mengolah data, menentukan pola, memberikan rekomendasi, dan menghasilkan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.

Data Sekumpulan fakta, angka, informasi, atau catatan digital yang dapat dikumpulkan, disimpan, dianalisis, dan digunakan sebagai dasar untuk memahami kondisi atau mengambil keputusan.

Demokrasi Sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui kebebasan berpendapat, partisipasi politik, pemilihan umum, serta pengawasan terhadap kekuasaan.

Digital Karakteristik teknologi yang menggunakan sistem elektronik berbasis data terkode untuk menyimpan, mengolah, mengirimkan, dan mengakses informasi secara cepat melalui perangkat dan jaringan.

Disinformasi Penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan secara sengaja dengan tujuan memengaruhi persepsi, membentuk opini, menciptakan kebingungan, atau mencapai kepentingan tertentu.

Informasi Data yang telah diproses, disusun, dan diberikan konteks sehingga memiliki makna serta dapat digunakan seseorang sebagai dasar pengetahuan, pertimbangan, atau pengambilan keputusan.

Kecerdasan Kemampuan suatu sistem, terutama kecerdasan buatan, untuk memproses informasi, mengenali pola,

	melakukan pembelajaran, memecahkan masalah, dan menghasilkan respons berdasarkan data.
Komunikasi	Proses penyampaian dan pertukaran pesan, gagasan, informasi, atau pandangan antara individu maupun kelompok melalui berbagai media dan saluran.
Literasi	Kemampuan seseorang dalam memahami, mengevaluasi, menggunakan, menciptakan, dan menyebarkan informasi secara kritis, bertanggung jawab, serta sesuai dengan konteks.
Media	Sarana yang digunakan untuk menyampaikan, menerima, memproduksi, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dalam bentuk konvensional maupun digital.
Partisipasi	Keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai proses sosial dan politik, baik melalui pemilihan umum, diskusi publik, advokasi, maupun aktivitas digital.
Platform	Sistem atau layanan digital yang menyediakan ruang bagi pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, menghasilkan konten, melakukan transaksi, atau menjalankan aktivitas tertentu.
Polarisasi	Kondisi ketika masyarakat atau kelompok politik semakin terbagi ke dalam pandangan yang berlawanan sehingga memperlebar jarak sosial, memperkuat konflik, dan mengurangi ruang dialog.
Politik	Proses yang berkaitan dengan memperoleh, menjalankan, mempertahankan, dan mengawasi kekuasaan serta menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
Privasi	Hak individu untuk mengendalikan informasi pribadi dan menentukan bagaimana data mengenai dirinya dikumpulkan, digunakan, disimpan, serta dibagikan oleh pihak lain.
Regulasi	Seperangkat aturan atau ketentuan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku, penggunaan teknologi, penyelenggaraan aktivitas, dan hubungan antaraktor dalam masyarakat.

Teknologi	Penerapan pengetahuan, metode, perangkat, dan sistem tertentu untuk membantu manusia menyelesaikan masalah, meningkatkan efisiensi, serta memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan.
Transparansi	Prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan sehingga informasi yang relevan dapat diketahui, diperiksa, dan dipahami oleh masyarakat.

INDEKS

A

agensi · 107, 158
akademik · 3, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 27, 42, 131, 145, 146, 149, 179
aksesibilitas · 11, 13, 24, 62, 75, 79, 80, 135
Algoritma · 1, 2, 3, 22, 37, 38, 44, 45, 47, 154, 187, 194
asimetri · 67, 104
audit · 44, 46, 48, 49, 50, 55, 102, 103, 104, 105, 108, 111, 116, 121, 126, 127, 136, 157, 175, 176, 177, 182
auditor · 119, 120

B

behavior · 183
big data · 9, 194
blockchain · 135, 136, 138

D

diferensiasi · 98
digitalisasi · 9, 16, 69, 126, 127, 128, 136, 137, 140, 162
disparitas · 148, 150
distribusi · 22, 29, 39, 64, 66, 83, 84, 85, 87, 136, 147
dividen · 65, 67, 88
domestik · 55, 66, 67, 84, 85, 95, 103, 116, 122, 135, 141, 147, 149, 163, 164, 165

E

e-commerce · 147
ekonomi · 5, 8, 10, 20, 32, 47, 49, 59, 80, 81, 84, 101, 124, 141, 147, 150, 156, 158, 172, 176
empiris · 27, 29, 42, 43, 51, 52, 73, 79, 87, 131, 174, 177
entitas · 38, 41, 55, 67, 149
etnis · 86, 116, 139, 143, 148

F

finansial · 16, 30, 84, 104, 105, 106, 110, 129, 146, 149, 157
fintech · 146, 147
fiskal · 124, 149, 176
fleksibilitas · 165
fundamental · 9, 21, 32, 34, 48, 49, 59, 66, 76, 82, 99, 109, 110, 113, 119, 122, 167, 168, 170, 171

G

geografis · 14, 56, 60, 101, 139, 148, 150, 151, 152, 163, 164, 172

H

hoaks · 25, 82, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 95

I

implikasi · 13, 24, 41, 63, 66, 120, 133, 162, 171, 178

infrastruktur · 8, 10, 11, 13, 15, 20, 29, 30, 31, 34, 40, 41, 51, 61, 67, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 96, 127, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 147, 148, 149, 155, 158, 159, 160, 163, 164, 168, 175, 176

inklusif · 15, 18, 26, 79, 80, 81, 144, 152, 164, 167, 172, 174, 179, 180, 194

integrasi · 9, 33, 59, 60, 77, 123, 126, 150, 154, 167, 169, 173

integritas · 87, 88, 95, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 138

interaktif · 9, 21

investasi · 31, 94, 101, 127, 130, 134, 136, 137, 148, 149, 157, 160, 162, 163, 164, 174, 175

investor · 176

K

kolaborasi · 50, 78, 92, 94, 108, 134, 149, 151, 172, 176

komparatif · 8, 18, 35, 55, 70, 130, 132, 141, 151, 152, 154, 164, 178

komprehensif · 3, 17, 18, 29, 33, 34, 48, 59, 66, 94, 102, 105, 107, 108, 110, 113, 121, 126, 128, 132, 134, 144, 145, 146, 151, 154, 156, 157, 163, 164, 165, 167, 175, 178, 179

komputasi · 9, 37, 38, 41

konkret · 14, 56, 72, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 98, 114, 116, 123, 126, 150, 161, 163, 167, 168, 170, 175, 176, 179

Konseptual · 8

konsistensi · 165

M

manipulasi · 7, 9, 15, 18, 25, 27, 34, 39, 42, 60, 64, 65, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 88, 89, 94, 95, 96, 107, 112, 129, 132, 145, 177, 194

metodologi · 71

N

negosiasi · 50

O

otoritas · 26, 32, 39, 73, 74, 157, 170, 171, 172, 179

P

pedagogis · 18

Persepsi · 45

politik · 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 137,139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 174, 175, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 194
proyeksi · 18

R

rasional · 6
real-time · 11, 12, 13, 31, 56, 58, 62, 129, 150, 173
regulasi · 16, 18, 19, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 47, 48, 49, 50, 55, 60, 61, 64, 66, 67, 74, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 116, 121, 122, 124, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 163, 164, 165, 172, 175, 176, 177, 178, 179
relevansi · 38, 39, 46, 143, 149
revolusi · 5, 9, 10, 20

S

siber · 16, 18, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 155, 160, 167
stabilitas · 96

T

teoretis · 14, 17, 135
transformasi · 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 32, 33, 34, 35, 51, 62, 69, 99, 137, 139, 142, 150, 151, 152, 160, 162, 163, 167, 175, 176, 178
transparansi · 9, 10, 11, 14, 15, 30, 31, 37, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 64, 66, 98, 102, 103, 108, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 123, 124, 125, 129, 130, 131, 135, 136, 156, 157, 170, 175, 194

U

universal · 7, 80, 81, 102, 169, 172, 178

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Hidayati, S.T., S.H., M.T., M.H.

hidayati@borobudur.ac.id | +62 81294783154

SD Negri Ngagel II no 395 Surabaya lulus tahun 1987, SMP Negri 12 Surabaya lulus tahun 1990, SMA Negri 4 Surabaya lulus tahun 1993, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya lulus tahun 1998 (S1), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gayus Lumbun lulus 2023 (S1), Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung lulus tahun lulus 2008 (S2). Magister ilmu Hukum Universitas Borobudur lulus 2022 (S2) Dan program Doktor ilmu Hukum Pada Pascasarjana Universitas Borobudur lulus tahun 2021 (S3).

Adapun Pekerjaan yang telah ditekuni selama ini sebagai Kepala Program Studi Teknik Sipil Universitas Pertahanan RI dan dosen tetap Universitas Borobudur. Aktif mengikuti pelatihan, seminar Nasional dalam dan Internasional antara lain:

a. Integration of Women and Gender Perspectives in Armed Forces, Canada tahun 2021.
b. Women Peace and Security Training, British Council tahun 2021,
c. Tenaga pengajar staff Militer PBB di Democratic Republic of Congo mulai tahun 2021-2022,
d. Defence cooperation programme di Singapura tahun 2023,
e. Tim Perencana Pembangunan Rumah Apung di Muara Angke Jakarta Utara tahun 2024
f. Comparative study di Kansai Gaidai University, Japan tahun 2024
g. The Future Military Technology International Cadets Science Week di Cina tahun 2025
h. Training Heavy Equipment Operational Week di Thailand tahun 2025



Dr. Anugerah Tatema Harefa, S.H., M.A.

Lahir di Gunungsitoli, 14 Februari 1976. Lulus S3 dari Program Doktor Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2018. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Nias pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).



Dr. Ansar, S.P., M.Si.

Lahir di Makassar, 16 Agustus 1969. Lulus S3 Program Studi Sosiologi di Universitas Negeri Makassar tahun 2010. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Pejuang Republik Indonesia pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



Sugiyanto, S.T., M.P.A

Lahir di Jakarta, 13 Agustus 1989. Lulus S2 di Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik FISIP Universitas Gadjah Mada tahun 2017. Saat ini sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN pada Program Studi Administrasi Publik. Karya buku sebelumnya berjudul Skema Inovatif Model Pengembangan Kampung Tematik dan Eksistensi Lembaga Bumdesa sebagai Lokomotif Pembangunan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan hasil penelitian Hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

SINOPSIS

Buku referensi "Demokrasi Digital: Politik, Algoritma, dan Partisipasi Warga di Era Kecerdasan Buatan" membahas perubahan wajah demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Kehadiran media sosial, platform digital, big data, algoritma, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, membentuk opini, berkomunikasi politik, serta berpartisipasi dalam proses demokrasi. Buku ini menguraikan berbagai peluang demokrasi digital dalam memperluas ruang publik, meningkatkan keterlibatan warga, dan mendorong transparansi pemerintahan, sekaligus mengkaji tantangan berupa disinformasi, manipulasi algoritmik, polarisasi, bias teknologi, privasi data, serta ancaman terhadap kualitas deliberasi publik. Pembahasan juga diarahkan pada pentingnya literasi digital, etika penggunaan kecerdasan buatan, tata kelola teknologi, dan perlindungan hak-hak digital warga negara.

DEMOKRASI DIGITAL

POLITIK, ALGORITMA, DAN PARTISIPASI WARGA DI ERA KECERDASAN BUATAN

Buku referensi "Demokrasi Digital: Politik, Algoritma, dan Partisipasi Warga di Era Kecerdasan Buatan" membahas perubahan wajah demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Kehadiran media sosial, platform digital, big data, algoritma, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, membentuk opini, berkomunikasi politik, serta berpartisipasi dalam proses demokrasi. Buku ini menguraikan berbagai peluang demokrasi digital dalam memperluas ruang publik, meningkatkan keterlibatan warga, dan mendorong transparansi pemerintahan, sekaligus mengkaji tantangan berupa disinformasi, manipulasi algoritmik, polarisasi, bias teknologi, privasi data, serta ancaman terhadap kualitas deliberasi publik. Pembahasan juga diarahkan pada pentingnya literasi digital, etika penggunaan kecerdasan buatan, tata kelola teknologi, dan perlindungan hak-hak digital warga negara.

IMPI
PT MEDIA PENERBIT INDONESIA

mediapenerbitindonesia.com
+62813622150605
Penerbit Idn
@pt.mediapenerbitidn

ISBN 978-634-316-088-5
9 786343 160885